LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA



DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TRIWULAN II

2026

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan pembangunan perkeretaapian sesuai amanah RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Capaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam rangka pertangungjawaban serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta disusun rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja serta upaya pencapaian kinerja periode Triwulan II Tahun 2026. Laporan monitoring kinerja ini selanjutnya dapat digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan monitoring kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. ***Rata-rata capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 diperoleh sebesar 102,056%*** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,458	99,565
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	94,750	96,015	101,335
		IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,77	97,401	99,623
		IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	27,747	29,178	105,157
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	98,702	98,702
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,610	23,329	107,955
Rata-rata Capaian Kinerja						**102,056**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp566.383.098.807,00 atau 11,47% dari pagu efektif sebesar Rp4.938.407.605.000,00. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2025 yaitu sebesar 9,69% namun tetap dibawah rata-rata realisasi anggaran tingkat Kementerian Perhubungan yaitu sebesar 39,00%. Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp616.621.864.829,00 atau 46,08% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Realisasi PNBP tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi PNBP periode yang sama Tahun 2025 yaitu sebesar 59,16% dan juga masih di bawah rata-rata perolehan PNBP tingkat Kementerian Perhubungan yakni sebesar 59,61%. Realisasi anggaran dan perolehan PNBP tersebut memerlukan upaya intensif untuk percepatan pencapaian target kinerja khususnya pada akhir Tahun 2026.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA 1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1-7
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN 1-11

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **2-1**
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2-4
2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-4
2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-16
2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-47
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2-59
2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029 2-59
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA 2-98
2.5 REALISASI ANGGARAN 2-106
2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA 2-106
2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA 2-1
2.6 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 2-2

2.6.1 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA 2-2
2.6.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN 2-4

BAB 3 PENUTUP 3-1

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 3-1

3.2 KESIMPULAN 3-17

3.3 REKOMENDASI 3-18

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi

Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja Program

Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Dokumen Pendukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka implementasi SAKIP tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan beberapa tahapan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah laporan monitoring kinerja setiap triwulan untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja. Laporan monitoring kinerja ini sangat diperlukan sebagai wadah untuk memastikan pencapaian target kinerja pada akhir periode serta selanjutnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan/tindakan yang diperlukan guna peningkatan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat informasi dan evaluasi pencapaian kinerja dengan dilengkapi identifikasi kendala/permasalahan serta upaya–upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran program dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud:

1. Menyediakan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja serta juga mencakup gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung;
2. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja;
3. Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

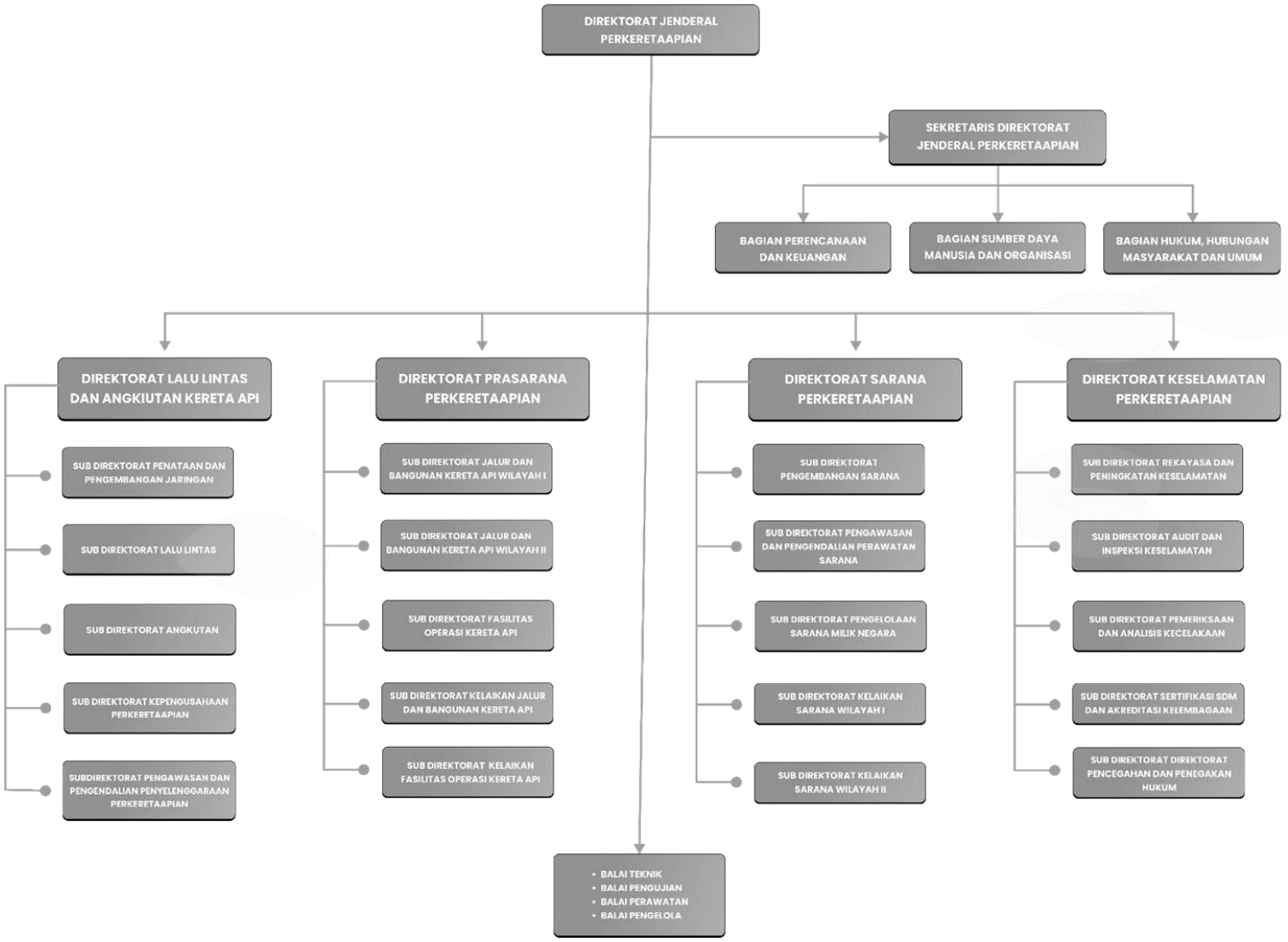
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
    a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
    e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);

i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

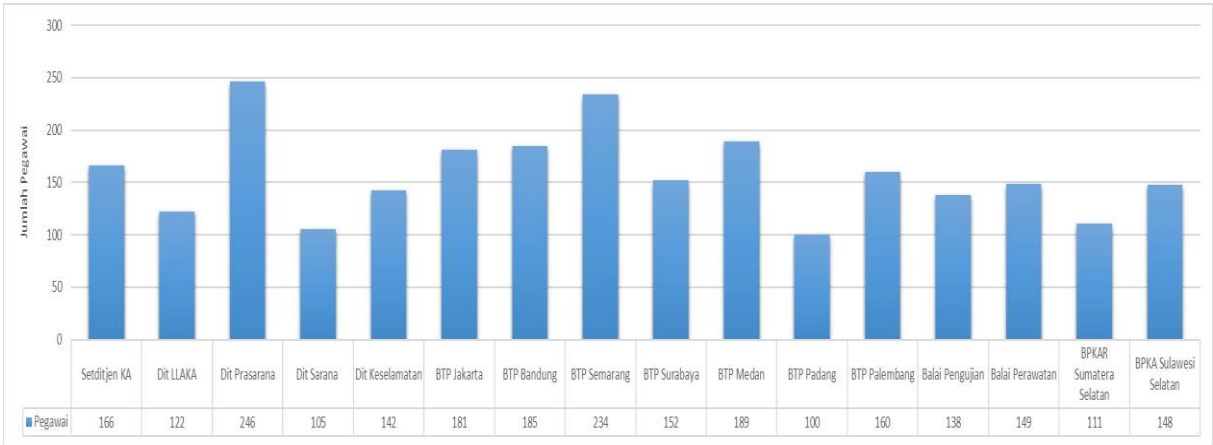
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026 berjumlah 2.528 dengan rincian 781 pegawai penugasan di Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.747 pegawai penugasan tersebar di 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui pelaksanaan Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 termasuk uraian dukungan alokasi anggaran Tahun 2026.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1-1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diukur melalui keterhubungan infrastruktur perkeretaapian terhadap lokasi strategis dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur berupa jumlah perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta yang berlaku	Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian. $\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ ***Keterangan:*** Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas dan Fungsi termasuk *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS *Case Survey Management System* yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan, selaras Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang</td><td>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang pada periode tersebut
$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan RIPNAS 2030, mengacu kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api</td><td>Jumlah angkutan KA penumpang dan barang merupakan ukuran kemanfaatan prasarana dan sarana dimana dengan peningkatan angkutan KA dapat memberikan manfaat ekonomi, finansial, sosial, dan lainnya termasuk mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan serta pengurangan emisi.</td><td>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.
$\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$
Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai RPJMN/Rencana Strategis.</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan perkeretaapian berkorelasi dengan jumlah angkutan KA, dimana selaras dengan RIPNAS dan Renstra 2025-2029</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
		$\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian. $\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$			
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian mengacu pada jumlah kejadian kecelakaan dengan perbandingan jumlah keberangkatan kereta api	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} X\ 1.000\right] X\ 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian. $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Komponen selaras dengan indikator kinerja Kementerian Perhubungan/ Sekretariat Jenderal guna mengukur keberhasilan program Dukungan Manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750
	IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%
	IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	%	40,000	22,827	27,747	32,667	40,000
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	21,020	21,610	36,870	100,000

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 sebesar Rp5.481.958.278.000,-, namun terdapat kebijakan efisiensi/blokir sehingga diperoleh alokasi anggaran efektif sebesar Rp4.163.784.421.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Blokir/Efisiensi (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif (Rp)
1	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**4.679.552.964.000**	**1.162.279.595.000**	**3.517.273.369.000**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	433.076.452.000	55.138.643.000	377.937.809.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1.343.052.057.000	763.661.974.000	579.390.083.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.869.738.007.000	343.236.586.000	2.526.501.421.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	33.686.448.000	242.392.000	33.444.056.000
2	**Program Dukungan Manajemen**	**802.405.314.000**	**155.894.262.000**	**646.511.052.000**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	34.277.460.000	7.982.843.000	26.294.617.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	723.911.575.000	141.027.619.000	582.883.956.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	26.204.287.000	2.296.200.000	23.908.087.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.197.555.000	-	12.197.555.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	5.814.437.000	4.587.600.000	1.226.837.000
Jumlah		**5.481.958.278.000**	**1.318.173.857.000**	**4.163.784.421.000**

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2026	Alokasi Anggaran (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	377.937.809.000
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	579.390.083.000
	IKP3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	2.526.501.421.000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	646.511.052.000
Jumlah				**4.163.784.421.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2026 dengan target kinerja Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk perbandingan/*benchmarking* kinerja;
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja;
4. Realisasi anggaran periode Triwulan II Tahun 2026 serta analisa efisiensi sumber daya;
5. Dukungan terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan capaian lainnya.

Tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Program</th><th>Pengukuran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian</td><td>Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.

$$\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$$

Keterangan:
Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian</td><td>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata nilai IKM Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKA Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengujian diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan dan nilai IKM BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan.

$$IKM_{DJKA} = (IKM_{Dit\ LLAKA} + IKM_{Dit\ Prasarana} + IKM_{Dit\ Sarana} + IKM_{Dit\ Keselamatan} + IKM_{Balai\ Pengujian} + IKM_{Balai\ Perawatan} + IKM_{BPKA\ Sulawesi\ Selatan} + IKM_{BPKAR\ Sumatera\ Selatan})/8$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25.
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</td></tr>
</table>

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
3	IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	Rata-rata jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. ***Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian*** = $\frac{\text{Rata-rata Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}}$ X 100%
4	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS. **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA** = **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang** + **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang** Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang*** = $\frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}}$ **X 50%** Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang*** = $\frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}}$ **X 50%**
5	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan ***Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian*** = $\left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \text{ X } 1.000\right]$ X 100%
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian. $TKTKP_{KA} = (AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBP_{DJKA} + NKASN_{DJKA})/4$ ***Keterangan:*** AKIPDJKA = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKADJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA PNBPDJKA = Tingkat pencapaian Realisasi PNBP DJKA NKASNDJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026.

2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)/simpul transportasi/kawasan strategis lainnya yang terhubung jaringan perkeretaapian s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi untuk terhubung dengan jaringan perkeretaapian berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030, dan dikalikan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.

Lokasi PKN/PKW/kawasan strategis lainnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selanjutnya untuk lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, sedangkan untuk lokasi simpul transportasi mencakup lokasi Bandara, Pelabuhan dan Terminal (Tipe A). Lokasi-lokasi tersebut disandingkan dengan jaringan perkeretaapian terhubung (*eksisting*) maupun yang akan terhubung sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029. Rincian target PKN/PKW/KSN/simpul transportasi/kawasan strategis lainnya yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian pada Tahun 2026 sebanyak 69 lokasi terdiri dari 52 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 6 lokasi simpul Bandara, 10 lokasi simpul Pelabuhan dan 1 lokasi simpul Terminal (Tipe A). Jumlah tersebut dibandingkan dengan target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 16 lokasi simpul Bandara, 29 lokasi simpul Pelabuhan dan 1 lokasi simpul Terminal (Tipe A).

Adapun realisasi untuk lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dikarenakan belum ada pengembangan jaringan perkeretaapian yang baru termasuk perbaikan prasarana kereta api yang terdampak bencana alam. Rincian realisasi lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/KSN/Kawasan Strategis Lainnya/Simpul Transportasi yang Terhubungan Jaringan Perkeretapaian Tahun 2026

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)/ Kawasan Strategis Lainnya			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2026	
		Target PK	Realisasi
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu/Lhokseumawe	√	- (terdampak bencana alam)
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		**69**	**68**

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa jumlah PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya/simpul transportasi sebanyak 68 lokasi (51 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN/kawasan strategis lainnya, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A).

Sedangkan untuk faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian yang merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api pada Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) diperoleh realisasi sebanyak 539.252 perjalanan kereta api dari program sebanyak 532.817 perjalanan kereta api pada Triwulan II Tahun 2026. Adapun rincian realisasi perjalanan kereta api baik penumpang dan barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada GAPEKA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2-3 Target dan Realisasi Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Tahun 2026

Bulan	Program	Kum. Program	Frekuensi				Capaian	
			Ka. Pnp	Ka. Brg	Total	Kum. Total	Bulanan	Kumulatif
Januari	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	1,008	1,008
Februari	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	0,998	1,004
Maret	**90.740**	**264.757**	**85.946**	**6.303**	**92.249**	**266.881**	**1,017**	**1,008**
April	88.872	353.629	83.773	5.377	89.150	356.031	1,003	1,007
Mei	90.366	443.995	85.520	6.827	92.347	448.378	1,022	1,010
Juni	**88.822**	**532.817**	**84.059**	**6.815**	90.874	**539.252**	**1,023**	**1,012**

Catatan: Data pada program GAPEKA menyesuaikan dengan penambahan frekuensi Perjalanan KA pada pelayanan LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A) / Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis Lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d. Tahun berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A) / Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis Lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$$

Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{68 \text{ Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{150 \text{ PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}} \times \frac{539.252 \; realisasi \; perjalanan \; KA}{532.817 \; program \; perjalanan \; KA}$$

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = 0{,}453 \times 1{,}012 = 0{,}458$$

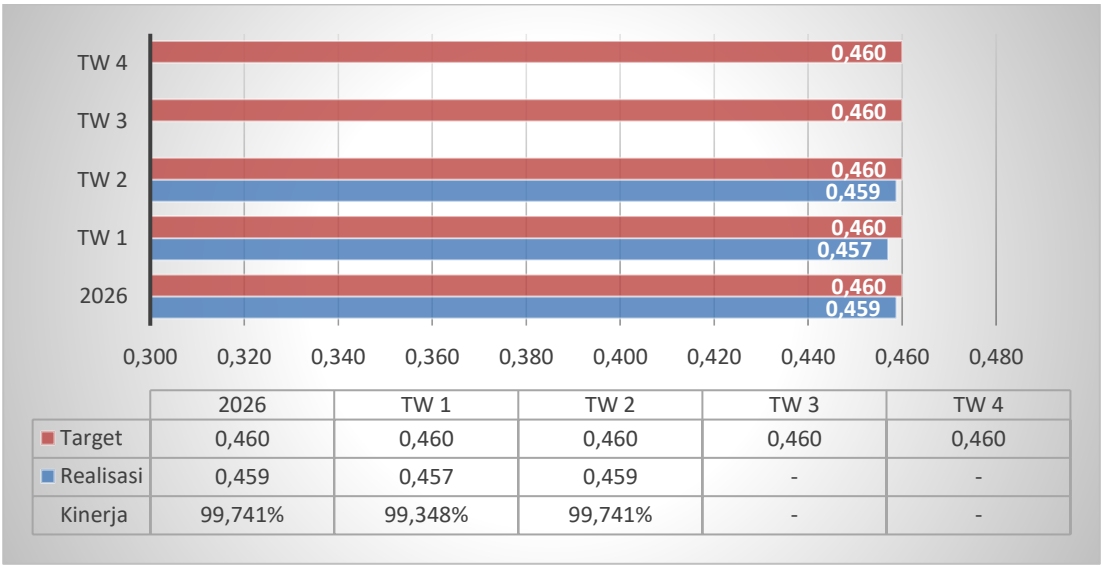
Data dukung capaian kinerja pada Lampiran VI

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian periode Triwulan II 2026 sebesar 0,458, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,565% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II 2026 dan Tahun 2026 sebesar 0,460. Pada Triwulan II 2026, realisasi kinerja tidak dapat memenuhi target dikarenakan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Aceh masih terputus/rusak/tidak beroperasi akibat dampak bencana alam Sumatera yang terjadi pada akhir Tahun 2025 (saat ini masih tahapan penyusunan kajian teknis penanganan bencana Sumatera). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-4 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Rasio)	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,457	0,458	-	-	99,348	99,565	-	-	99,565



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkeretaapian dengan rasio konektivitas tingkat Kementerian Perhubungan (nasional). Nilai rasio konektivitas nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 meliputi transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75% dan transportasi perkotaan bobot 5%. Perbandingan nilai rasio konektivitas transportasi Tahun 2026 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-5 Nilai Rasio Konektivitas Transportasi

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (seluruh moda)	0,720
2	Perkeretaapian	0,458

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bawah rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada tingkat nasional sehingga perlu ditingkatkan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 68 titik (5,83%) dari jumlah 1.166 titik yang terhubung secara nasional (220 titik Kawasan Strategis Nasional/Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan/Pusat Kegiatan Nasional, 647 Pelabuhan, serta 299 Bandar Udara).

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan II 2026, konektivitas infrastruktur perkeretaapian di lokasi PKN/PKW Lhokseumawe (Kuta Blang – Muara Satu) masih terputus/tidak beroperasi akibat bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Kondisi prasarana dalam kondisi rusak sedang/berat berupa gogosan, longsoran dan jembatan KA rubuh/rusak, sehingga layanan KA perintis Cut Meutia berhenti beroperasi. Untuk penanganan tersebut, terdapat 3 kegiatan kajian teknis penanganan bencana Sumatera yang dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan progres telah kontrak pada tanggal 3 Juli 2026 dan

ditargetkan penyelesaian pada Desember 2026. Posisi saat ini sedang berproses tinjauan lapangan survei sekunder untuk Kajian Kelayakan Teknis (KKT). Kajian teknis ini selanjutnya menjadi data dukung *readines criteria* untuk usulan kegiatan penanganan pada Tahun 2027. Adapun ketiga kajian teknis tersebut terdiri dari:

a. *Design Engineering Design* (DED) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Wilayah terdampak Bencana Provinsi Sumatera;
b. *Design Engineering Design* (DED) Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Wilayah terdampak Bencana Provinsi Sumatera Barat;
c. *Design Engineering Design* (DED) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Wilayah terdampak Bencana Provinsi Aceh.

Pada Tahun 2026 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan jaringan perkeretaapian baru menghubungkan PKN/PKW/ kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretaapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis.

Adapun beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres pada Tahun 2026 antara lain:

a. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur kereta api Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang berupa persiapan pengoperasian kereta api perintis segmen Rantauprapat – Aek Nabara yang ditargetkan pada Triwulan III 2026. Saat ini juga sedang dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian jalur, stasiun, jembatan dan fasilitas operasi pada segmen tersebut dengan target penyelesaian pada Juli 2026. Adapun untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progres 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah

dibebaskan, tersisa 52 bidang) dimana terkendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi untuk kelanjutan pengadaan tanah. Adapun untuk pengajuan penetapan lokasi baru belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2026 dikarenakan tidak tersedia anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP);

b. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *North-South* mencakup Fase 2A dengan progres 61,80% (segmen 1 BHI – Monas 82,03%, Segmen 2 Harmoni – Kota 53,59%) dan Fase 2B yang masih dalam tahap pemenuhan prasyarat untuk pelaksanaan *Basic Engineering Study.* Terdapat isu terkait Depo Ancol, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, layanan operasional MRT Jakarta *North-South* hanya melayani Lebak Bulus hingga kota dan apabila kondisi fiskal daerah sudah membaik kedepannya akan membuka penjajakan untuk Depo di area Ancol*;*

c. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *East-West Phase* I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, dengan progres pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta oleh Pemerintah DKI Jakarta masih berproses penetapan lokasi. Untuk pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN. Adapun posisi saat ini masih dalam proses verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan dalam proses *re-baseline* untuk mengakomodir perubahan durasi konstruksi hasil *market sounding* serta pembaruan pada proses pengadaan lahan dan tender;

d. Kegiatan pembangunan LRT Jakarta segmen Velodrome – Manggarai yang bersumber dari pembiayaan APBD/BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan progres fisik sebesar 93,74% dimana telah dilakukan beberapa item pekerjaan antara lain pekerjaan sipil *viaduct*, pekerjaan *trackworks*, pekerjaan sistem dan beberapa pekerjaan lain di stasiun. Kegiatan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan integrasi moda transportasi massal di simpul kawasan Manggarai dengan target penyelesaian pada Semester II 2026;

e. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro, yang bersumber dari pembiayaan SBSN (luncuran) dengan progres 96,40%, dimana masih terdapat 1 lingkup kegiatan yaitu pembangunan *Overpass* Tonasa yang belum dapat dilanjutkan karena berproses penetapan lokasi dari Pemerintah Daerah (Bupati Pangkep) untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi. Pada Tahun 2026 juga dilaksanakan pembangunan jalan akses stasiun kereta api lintas Makassar - Parepare Tahap I guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau stasiun kereta api, dimana saat ini telah berkontrak dan dalam tahap persiapan konstruksi;
f. Kegiatan pendukung pemenuhan *readiness criteria*/perencanaan teknis lainnya berupa kajian/studi yang berfokus pada penguatan tata kelola konektivitas perkeretaapian dimana saat ini masih dalam tahap pelaksanaan (penyusunan laporan pendahuluan dan persiapan survei/pengumpulan data) dengan rincian sebagai berikut:
    1) Reviu/pemutakhiran *Master Plan* Perkeretaapian Pulau Sumatera;
    2) Reviu/pemutakhiran *Master Plan* Perkeretaapian;
    3) Reviu/pemutakhiran *Master Plan* Perkeretaapian.

Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

a. Koordinasi dan konsolidasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan perkeretaapian sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, diantaranya hubungan kerja dengan pihak internal Kementerian Perhubungan (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat teknis, Balai, lainnya) dan pihak eksternal Kementerian Perhubungan yaitu badan usaha/operator, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengatur BUMN, lainnya), Pemerintah Daerah, serta pengelola simpul transportasi moda lain;

b. Koordinasi dan konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya;
c. Koordinasi dan konsolidasi terkait pembiayaan alternatif pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah dengan melibatkan Kementerian Koordinator Infraswil, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM dan badan usaha/pihak swasta.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target rasio konektivitas transportasi perkeretaapian juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 42 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Dari 42 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 8 kegiatan pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 12,50% dari 8 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun realisasi atas rencana penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 yakni usulan buka blokir untuk pemenuhan *readiness criteria* (kajian teknis) mendukung pembangunan perkeretaapian (***realisasi pada Triwulan I 2026***). Selain itu, juga dilaksanakan beberapa pengendalian eksisting sesuai proses bisnis diantaranya:

a. Rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan memberikan masukan terhadap jaringan jalur kereta api yang diperlukan;
b. Rapat koordinasi dengan Bappenas terhadap skema alternatif pembiayaan KPBU;
c. Monitoring dan evaluasi dengan membuat sandingan antara dokumen perencanaan dengan infrastruktur di lapangan;
d. Pengawasan terhadap proses perbaikan gambar *design*.

Tabel 2-6 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			%
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d.w TW II	
1	Rute Jaringan Perkeretaapian	30	4	8	1	0	1	12,50
2	Sistem Jaringan Logistik Perkeretaapian	6	0	-	-	-	-	-
3	Aksesibilitas Moda Kereta Api	6	0	-	-	-	-	-
Jumlah		**42**	**4**	**8**	**1**	**0**	**1**	**12,50**

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terkait rasio konektivitas transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

1) Dukungan rencana pengoperasian LRT Jakarta segmen Kelapa Gading – Manggarai (perizinan, *safety assessment*, pengujian, sertifikasi kelaikan, lainnya);
2) Penyusunan kajian teknis penanganan bencana Sumatera untuk selanjutnya digunakan sebagai *readiness criteria* pada usulan kegiatan penanganan/perbaikan prasarana perkeretaapian terdampak bencana pada Tahun 2027;

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

1) Pengusulan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas/mendesak mendukung konektivitas perkeretaapian pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027, khususnya terkait *readiness criteria* (kajian perencanaan teknis, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung/BOBP untuk pengadaan lahan, kegiatan pendukung lainnya);
2) Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas, termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (MRT Jakarta *North* – *South*, MRT Jakarta *East* – *West*, LRT Jakarta, Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, lainnya);

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Usulan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional inspektur perkeretaapian melalui pengalihan jabatan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Trasnspsortasi Perkeretaapian dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien;
b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi;
c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perkeretaapian dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM terhadap pelayanan perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, perawatan, dan lainnya) serta pelaksanaan layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-7 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	76.61 – 88.30	B	Baik
4	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target nilai IKM Tahun 2026 sebesar 94,750. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada periode Triwulan II 2026 diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 96,015 dan rincian per unit kerja dan per bulan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Hasil Survei Nilai IKM Periode Januari s.d. Juni 2026

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	86,880	95,810	90,630	97,630	98,240	97,930
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	100,000	91,940	100,000	94,380	100,000	99,300
Direktorat Sarana Perkeretaapian	100,000	100,000	98,130	94,380	-	97,500
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	97,690	94,590	100,000	96,920	94,710	96,810
Balai Pengujian Perkeretaapian	96,570	97,310	97,180	96,700	96,660	96,730
Balai Perawatan Perkeretaapian	92,500	95,630	92,970	92,500	91,880	96,250
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (survei mandiri)	91,320	92,080	92,900	93,190	93,090	92,490
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	98,020	98,520	98,210	98,100	98,320	97,650
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	96,430	96,290	96,670	96,730	95,580	96,810
Rata-rata	**95,490**	**95,797**	**96,299**	**95,614**	**96,060**	**96,830**
Realisasi	**95,490**	**95,644**	**95,862**	**95,800**	**95,852**	**96,015**

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh perhitungan matematis nilai IKM periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

Nilai IKM = Rata-rata Nilai IKM bulan Januari – Juni 2026 (Skala 1-100)

= (95,490+95,797+96,299+95,614+96,060+96,830) / 6 = 576,090 / 6

= 96,015

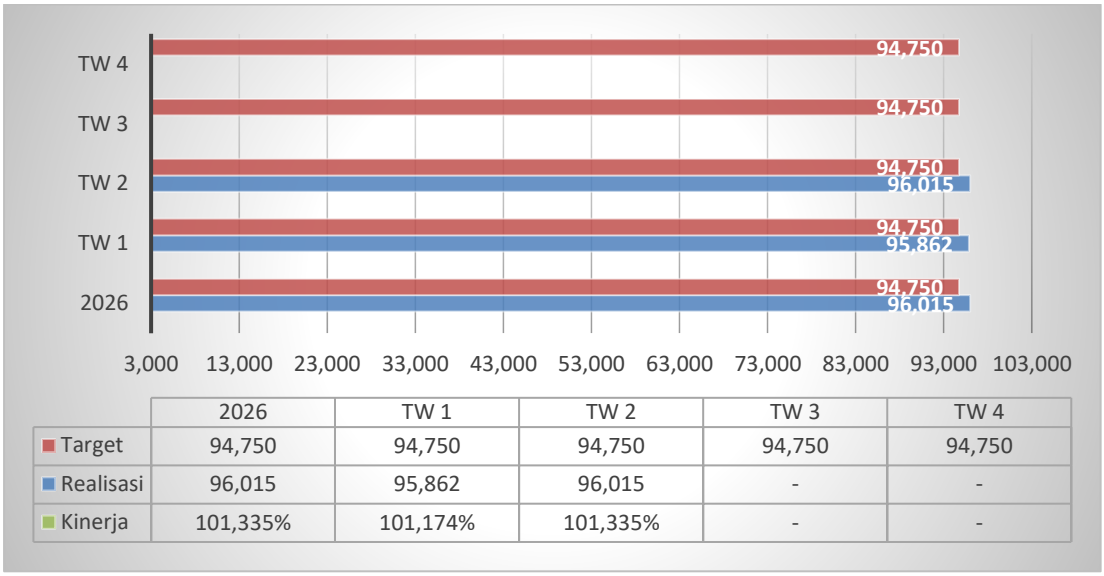
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian sampai dengan Triwulan II 2026, diperoleh nilai IKM sebesar 96,015. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 baik target tahunan maupun target triwulan sebesar 94,750, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,173%. Adapun nilai IKM pada periode Januari – Juni 2026 cenderung mengalami kenaikan setiap bulan dan perlu dipertahankan pada periode berikutnya. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-9 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian (Nilai)	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	95,862	96,015	-	-	101,173	101,335	-	-	101,335



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) dilakukan terhadap capaian kinerja IKM pada tingkat Kementerian Perhubungan (nasional) pada periode Triwulan II 2026 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-10 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	96,183
2	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	96,015

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan I-II 2026

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nilai IKM

Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di tingkat Kementerian Perhubungan.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja pada periode Triwulan I-II 2026 dengan perolehan nilai 96,015 yang dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan II 2026, pelaksanaan survei IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi menggunakan *google form* untuk unit kerja seperti BPKAR Sumatera Selatan untuk mempermudah akses pengguna layanan dalam pelaksanaan survei. Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

a. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang kereta api yang dikelola BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan, diantaranya:
    1) Penyesuaian harga khusus/diskon tiket pada momen tertentu;
    2) Tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan pada beberapa kanal/media (*chat center*, surat elektronik/e-mail, SP4N, media sosial, survei kepuasan);
    3) Pelaksanaan beberapa program sosialisasi, diantaranya pelaksanaan *edutrip*, forum konsultasi publik, dan lainnya;
    4) Pada pelayanan KA Makassar-Parepare, dilakukan perpanjangan lintas operasi yang sebelumnya Mandai – Garongkong menjadi Mandai – Palanro (penambahan layanan di 3 stasiun);
b. Pelaksanaan inspeksi/ pemeriksaan/ monitoring/ pengawasan guna memastikan pemenuhan standar pelayanan minimum, kenyamanan serta kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan kereta api. Inspeksi/*rampcheck* kelengkapan standar pelayanan

minimum (SPM) juga dilaksanakan untuk mendukung perpanjangan layanan KA Makassar – Parepare dengan penambahah layanan pada 3 stasiun yaitu di Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso dan Stasiun Pallanro.

c. Dukungan digitalisasi beberapa layanan regulator bidang perkeretaapian khususnya terkait perizinan dan sertifikasi;
d. Penerbitan 28 perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan pada Triwulan II 2026;
e. Pelayanan sertifikasi sampai dengan Triwulan II 2026 yang telah dilaksanakan oleh unit kerja meliputi:
    1) Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 90 sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari 73 penetapan sertifikat jalur dan bangunan serta 13 sertifikat fasilitas operasi;
    2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 4.160 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 10.949 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
f. Kehandalan SDM/pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memberikan layanan regulator sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan;
g. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada *stakeholder*.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diantaranya:

a. Gangguan/*error* sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana dan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian;
b. Pada bulan Mei 2026 sempat terjadi *error* pada *link* pengisian survei aplikasi yang menyebabkan beberapa responden tidak dapat melakukan pengisian kuesioner yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan sementara pada QR/link pengisian survei.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian,

Pemerintah Daerah dan sektor terkait lainnya (sektor industri perkeretaapian) dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian serta melibatkan masyarakat/pengguna kereta api terutama pada layanan LRT Sumatera Selatan dan KA Makassar - Parepare.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 66 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari 66 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 2 kegiatan pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 50,00% dari 2 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 adalah melakukan pembinaan pembahasan rancang bangun sarana perkeretaapian dengan teknologi terbaru (***realisasi pada Triwulan I 2026***). Selain itu, juga dilaksanakan beberapa pengendalian eksisting sesuai proses bisnis diantaranya:

a. Pelaksanaan *rampcheck*/inspeksi terkait pelayanan kereta api;
b. Penyediaan layanan pengaduan;
c. Koordinasi rutin kepada *stakeholder* terkait pelayanan kereta api;
d. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan SOP/regulasi penyelenggaraan perkeretaapian, termasuk penyampaian informasi prosedur persyaratan melalui website/buku investasi yang telah diterbitkan;
e. Koordinasi serta pemantauan beban kerja dan waktu proses pelayanan perizinan melalui *dashboard* monitoring;
f. Monitoring data perpanjangan perizinan (perpotongan/persinggungan jalur KA dengan bangunan lain, lainnya).

Tabel 2-11 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan II 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			%
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	
1	Pelayanan Transportasi Sarana Perkeretaapian	53	1	2	1	0	1	50,00
2	Pelayanan Transportasi Keselamatan Perkeretaapian	13	0	-	-	-	-	-
Jumlah		**66**	**1**	**2**	**1**	**-**	**1**	**50,00**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat 1 keterjadian risiko yang mempengaruhi kinerja yaitu Gangguan Operasional Perjalanan KA sebanyak 10 kejadian (keterjadian risiko pada Triwulan I 2026) disebabkan oleh gangguan teknis sarana dan prasarana yang berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang perkeretaapian khususnya terhadap kelancaran perjalanan kereta api. Keterjadian risiko tersebut selanjutnya memerlukan peningkatan pengawasan terhadap perawatan sarana dan prasarana sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, serta *update* pengelolaan sistem informasi dan *database* kondisi prasarana dan sarana pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai acuan Direktorat teknis melakukan pengawasan.

Tabel 2-12 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan II 2026

Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
Gangguan operasional perjalanan kereta api	Gangguan teknis sarana dan prasarana	Triwulan I: 10 kejadian, Triwulan II: 0 Kejadian	• Kerusakan *engine power* sarana • Gangguan sinyal, LAA putus, rel patah

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diperlukan beberapa upaya antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pelaksanaan reviu proses bisnis terkait pelayanan regutor perkeretaapian;

2) Penyesuaian perjalanan KA untuk mengakomodir kebutuhan layanan masyarakat serta mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (LRT Sumatera Selatan, KA Makassar – Parepare);
3) Lanjutan pengembangan sistem informasi dan *database* mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan.

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Pengoptimalan pemanfaatan anggaran PNBP/BLU guna mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian;

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

Koordinasi pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian (BUPP) termasuk penentuan status aset prasarana perkeretaapian milik negara guna mendukung peningkatan tata kelola penyelenggaraan perkeretaapian termasuk fokus pada layanan regulator perkeretaapian.

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan reputasi dan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP) TRANSPORTASI KERETA API

On Time Performance (OTP) merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api sebesar 97,770% baik periode Tahun 2026 maupun Triwulan II 2026.

Pada Triwulan II 2026, diperoleh realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang baik kedatangan dan keberangkatan yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 525.235 KA dan dibandingkan dengan jumlah perjalanan kereta api sebanyak 539.252 KA. Secara rinci realisasi perjalanan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2026

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	92.190	92.190	88.564	88.564	90.010	90.010	89.287	89.287	96,851	96,851
Feb	82.442	174.632	79.904	168.468	81.390	171.400	80.647	169.934	97,823	97,310
Mar	**92.249**	**266.881**	**89.520**	**257.988**	**91.186**	**262.586**	**90.353**	**260.287**	**97,945**	**97,529**
Apr	89.150	356.031	86.120	344.108	88.238	350.824	87.179	347.466	97,789	97,594
Mei	92.347	448.378	88.077	432.185	90.390	441.214	89.234	436.700	96,628	97,395
Jun	**90.874**	**539.252**	**87.729**	**519.914**	**89.342**	**530.556**	**88.536**	**525.235**	**97,427**	**97,401**

Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu secara kumulatif pada bulan Januari – Juni 2026 sebanyak 525.235 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada periode yang sama sebanyak 539.252 KA, maka diperoleh realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) sebesar 97,401%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{525.235 \text{ KA}}{539.252 \text{ KA}} \times 100\% = 97{,}401\%$$

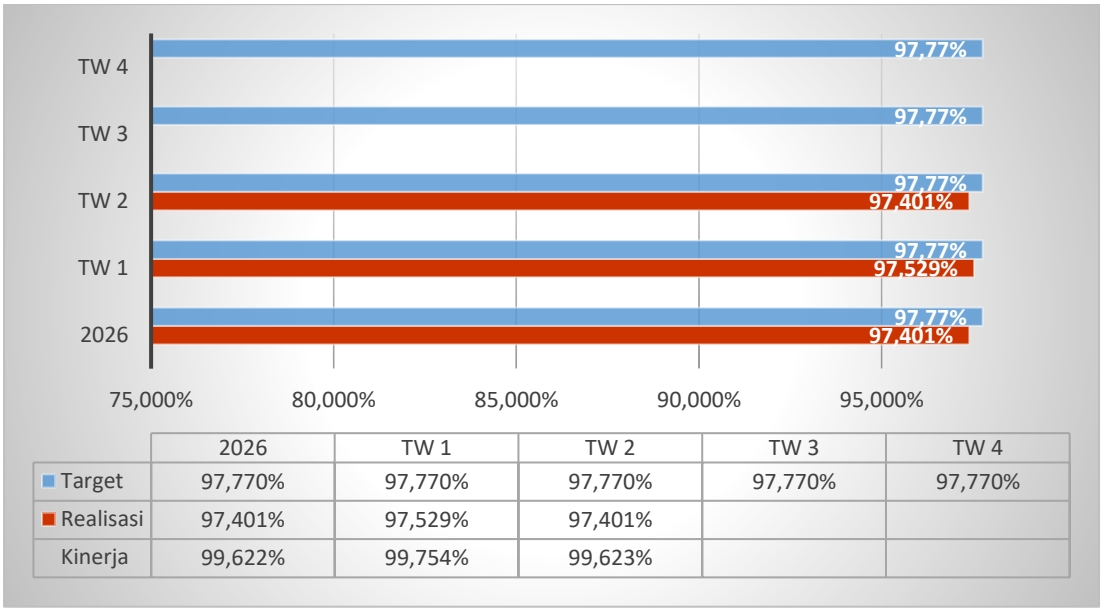
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Triwulan II 2026 sebesar 97,401%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,623% dibandingkan dengan target Triwulan II 2026 dan target Tahun 2026 sebesar 97,770%. Adapun nilai OTP setiap bulan pada Triwulan II 2026 cenderung fluktuatif dan belum memenuhi target, untuk itu perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase *On Time Performance* Transportasi Kereta Api (%)	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,529	97,401	-	-	99,754	99,623	-	-	99,623



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%	97,770%
Realisasi	97,401%	97,529%	97,401%		
Kinerja	99,622%	99,754%	99,623%		

Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP negara lain (Belgia, Britania Raya) berdasarkan beberapa sumber (*website Open Data Infrabel, website Office of Rail and Road Publication*). Data perbandingan *On Time Performance* tersebut diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-15 Perbandingan *On Time Performance* Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	*On Time Performance* (%)
1	Belgia	8.298	92,77%
2	Britania Raya	31.236	86,40%
3	Indonesia	6.915	97,40%

Sumber No.1 : Website Open Data Infrabel, periode Triwulan I-II 2026
Sumber No.2 : Website Office of Rail and Road Publication, periode Triwulan I 2026

Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia lebih baik apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di Belgia dan Britania Raya yang mencapai kinerja 86-93%. Dengan capaian OTP Indonesia yang cukup tinggi sebesar 97,40% pada Triwulan II 2026 menggambarkan bahwa Indonesia pada posisi yang kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas operasional, pengelolaan infrastruktur, dan manajemen layanan yang diterapkan oleh badan usaha/operator perkeretaapian dengan pembinaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dengan performa OTP yang tinggi.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tidak tercapainya target kinerja *on time performance* (OTP) pada periode Triwulan II 2026 diantaranya:

a. Tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%);
b. Tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%);
c. Terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

Pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Triwulan II 2026 menghadapi beberapa kendala operasional di beberapa wilayah, termasuk beberapa peristiwa menonjol yang mempengaruhi capaian OTP antara lain:

a. Gangguan keamanan terhadap operasional kereta api di lokasi perlintasan sebidang yang menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan perjalanan, terutama kejadian temperan/tabrakan dengan kendaraan berukuran besar (truk, alat berat) yang menimbulkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama;

b. Faktor cuaca ekstrem termasuk banjir di beberapa wilayah (Sumatera Selatan, Jawa Timur, lainnya) yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional layanan perkeretaapian yang dapat berupa gangguan perjalanan maupun kerusakan prasarana pada wilayah terdampak;
c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti permasalahan pada kereta pembangkit yang turut menyebabkan keterlambatan dan penurunan efisiensi jadwal operasi;
d. Beberapa kejadian kecelakaan kereta api pada Triwulan II 2026 yaitu terdapat 7 kecelakaan yakni tabrakan antar kereta api dan anjlokan pada yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas angkutan kereta api;
e. Penerapan pembatasan kecepatan pada lintas Mandalle – Tanete dan gangguan sarana KRDE.

Pada Triwulan II 2026 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja OTP, antara lain:

a. Telah disusun Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KA.407/1/6/DJKA/2026 tentang Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api tanggal 9 Juni 2026;
b. Telah dilaksanakan tahapan pengumpulan data rancangan Gapeka 2026 pada jaringan jalur nasional Jawa dan Sumatera antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI;
c. Kegiatan Penutupan Perlintasan Sebidang Liar Pada Km 12 + 6/7 Petak Pauh Lima - Indarung pada 9 April 2026;
d. Tinjauan Lapangan Pasca Kejadian Kecelakaan Kendaraan Dump Truck Menabrak Pagar Rel dan EWS 12 di KM 21+400 petak Stasiun Tabing - Stasiun Duku pada 11 April 2026;
e. Pembahasan Persiapan Pembuatan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa dan Sumatera Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 11-12 Juni 2026 dengan mengundang seluruh BTP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Badan Usaha perkeretaapian yaitu PT KAI, PT KCI dan PT Railink.
f. Pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian eksisting yang diprogramkan pada Tahun 2026 dalam upaya meningkatkan kapasitas,

kecepatan operasional dan kehandalan prasarana guna mendukung kinerja *on time performance*, mencakup:

1) Pengembangan Jalur KA Komuter Medan-Binjai (Jalur KA Layang), berupa kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2022 – 2026, pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan progres fisik saat ini 86,89% dan target 100% pada akhir Tahun 2026 sesuai lingkup kegiatan MYC;
2) Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, berupa kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2023 – 2027, pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan progres fisik saat ini 15,02% dan target 50% pada akhir Tahun 2026;
3) Pembangunan Gardu Traksi Delanggu, pembiayaan Rupiah Murni dengan progres saat ini dalam tahap pelelangan dan usulan skema kegiatan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun 2026 – 2027.
4) *Surabaya Regional Railway Line* (Phase I), merupakan proyek pengembangan layanan kereta komuter listrik di kawasan Gerbangkertosusila. Tahap pertama direncanakan sepanjang kurang lebih 30 km antara lain mencakup koridor Gubeng–Sidoarjo dan Gubeng–Pasar Turi dengan kebutuhan pengembangan Depo Sidotopo sekitar 3,6 hektare. Proyek ini didukung pendanaan KfW sebesar EUR 230 juta dan menggunakan kereta jenis *Electric Multiple Unit* (EMU). Posisi saat ini masih dalam tahapan perencanaan teknis (*Railway Design Consultant*, *Project Management Infrastructure Consultant*, LARAP, dan ESMC). Progres saat ini secara kumulatif untuk perencanaan teknissebesar 3,33% (2 dokumen dari target 60 dokumen) yang direncanakan selesai pada Tahun 2027 untuk tahapan selanjutnya konstruksi di Tahun 2028.
5) Terdapat beberapa kegiatan pengembangan/peningkatan jalur KA tidak dapat dilaksanakan/ditunda dikarenakan kebijakan blokir/penajaman belanja dengan peralihan anggaran ke BA BUN diantaranya:
    a) Peningkatan Jalur KA lintas Sukabumi - Cianjur segmen Lampegan – Cianjur;
    b) Pembangunan Jalur Ganda KA Wonokromo – Sepanjang;

c) Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Talun – Kertosono;
d) Peningkatan Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan – Martapura Tahap I.

g. Koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana/Sarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait identifikasi penyebab serta penanganan kejadian keterlambatan perjalanan kereta api, termasuk langkah antisipatif terhadap potensi rintang jalan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) melalui berbagai bentuk koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-pemangku kepentingan di bidang perkeretaapian. Koordinasi teknis dilaksanakan secara berkelanjutan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana/Prasarana antara lain PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta, PT KCIC, PT Railink, dan operator lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian kinerja operasional kereta api. Bentuk koordinasi tersebut mencakup pembahasan dan evaluasi kinerja operasional pada layanan kereta api yang dilaksanakan pada Triwulan II 2026 dan diperkuat melalui kegiatan evaluasi operasi di lapangan. Koordinasi juga difokuskan pada upaya antisipasi dan penanganan gangguan perjalanan khususnya yang disebabkan oleh kejadian anjlokan, kecelakaan di perlintasan sebidang, gangguan teknis sarana dan prasarana, serta dampak kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam di sejumlah wilayah operasi.

Selain itu, koordinasi lintas bidang turut dilaksanakan dalam pengelolaan dan evaluasi berkala Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) dengan melibatkan masukan dari Badan Usaha/Operator Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, guna memastikan kesesuaian pola operasi dengan kondisi lapangan dan kebutuhan layanan. Pelaksanaan berbagai bentuk koordinasi lintas bidang tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pencapaian target OTP.

Dalam mendukung pencapaian target *On Time Performance* (OTP), juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan

risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Berdasarkan profil risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 13 risiko yang diidentifikasi dari 1 proses bisnis terkait indikator kinerja *On Time Performance* (OTP). Dari 13 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 9 kegiatan pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau sebesar 33,33% dari 9 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 sebagai berikut:

a. Bersurat kepada Balai dalam melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan perpanjangan perizinan.
b. Rapat Koordinasi dengan Balai dan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan monitoring dan inventarisasi izin pembangunan perkeretaapian umum dan khusus.
c. Penyampaian surat pemberitahuan/himbauan kepada badan usaha untuk pengajuan izin pembangunan perkeretaapian umum dan khusus.

Tabel 2-16 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja *On Time Performance* (OTP) Periode Triwulan II 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan			Risiko (Form 9)
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelayanan Transportasi Prasarana Perkeretaapian	13	2	9		3	3	33,33
Jumlah		**13**	**2**	**9**		**3**	**3**	**33,33**

Selain itu, sampai dengan periode Triwulan II 2026 juga tercatat beberapa keterjadian risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP), meliputi:

Tabel 2-17 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja *On Time Performance* Periode Triwulan II 2026

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Waktu	Pemicu Peristiwa
1	Gangguan operasional perjalanan kereta api	• Gangguan alam/cuaca, kejadian pelemparan, pencurian/ vandalisme, pengrusakan terhadap aset sarana dan prasarana perkeretaapian	2 Kejadian	Triwulan I	• Terjadinya hujan deras yang menyebabkan adanya genangan air hingga di atas kop rel • Terjadinya cuaca ekstrem berupa angin kencang dan menyebabkan pohon tumbang dan menimpa di atas rel
2	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	• Ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu atau marka	73 Kejadian	Triwulan I	• Tidak adanya palang pintu perlintasan sebidang • Pengguna jalan menerobos palang pintu
3	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	• Ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu atau marka	36 Kejadian	Triwulan II	• Tidak adanya palang pintu perlintasan sebidang • Pengguna jalan menerobos palang pintu

Sebagaimana Tabel di atas, berbagai gangguan tersebut menunjukkan bahwa capaian *on time performance* dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, terutama aspek keamanan di perlintasan sebidang serta ketahanan jalur terhadap kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan sebagai berikut :

a. Peningkatan pengamanan perlintasan sebidang, penguatan mitigasi dan penanganan risiko bencana, serta penguatan sistem manajemen operasi dan kesiapsiagaan darurat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya.
b. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, Kepolisian, pengelola jalan, badan usaha, lainnya) dalam prioritas pengamanan lokasi perlintasan sebidang termasuk penindakan hukum, sosialisasi masyarakat/ pengguna jalan, dan penutupan perlintasan sebidang liar.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Lanjutan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) khususnya membahas layanan kereta api yang berkinerja OTP sangat rendah (KA barang di Jawa 83,81% dan KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung 89,9%, KA Makassar – Parepare 52,11%);
2) Penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2026 berupa penetapan perjalanan kereta api di luar GAPEKA sesuai hasil evaluasi serta pemenuhan kebutuhan perjalanan kereta api/ pemberhentian stasiun tertentu, diantaranya pada perjalanan KRL Jabodetabek, LRT Jabodetabek dan LRT Sumatera Selatan;
3) Melaksanakan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA (pengembangan jalur KA komuter Medan-Binjai, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, lainnya) serta mengusulkan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian prioritas yang ditunda/tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2026 (peningkatan jalur KA Sukabumi – Cianjur, pembangunan jalur ganda KA Wonokromo – Sepanjang, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, lainnya).

c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:

1) Penyegaran kompetensi SDM penjaga perlintasan dengan koordinasi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
2) Usulan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional inspektur perkeretaapian melalui pengalihan jabatan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2026 sebesar 40,00% dan untuk periode Triwulan II 2026 sebesar 27,474%.

Untuk jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Triwulan II 2026, diperoleh sebanyak 286.899.630 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial meliputi kereta api jarak jauh eksekutif, bisnis, *priority*, ekonomi *non* PSO dan KA lokal eksekutif (diantaranya KA Wisata Ambarawa, KA Bandara Soekarno Hatta) sebanyak 23.010.108 penumpang;
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (*non* KRL Jabodetabek) sebanyak 38.699.537 penumpang;
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 178.001.308 penumpang;
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 2.380.092 penumpang;

5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 24.425.393 penumpang;
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 756.025 penumpang;
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspress dan KA Srilelawangsa) sebanyak 669.422 penumpang;
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 16.018.911 penumpang;
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 2.938.834 penumpang.

Dengan jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api Tahun 2025 sebanyak 551.737.151 penumpang dan jumlah penumpang pada Triwulan II 2026 sebanyak 286.899.630 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 838.636.781 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api pada periode 2025 – 2029 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yaitu 2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan II 2026 sebesar 29,967% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan penumpang 2025 s. d TW II 2026}}{\text{Target angkutan penumpang 2025} - \text{2029}} \times 50\%$$

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{551.737.151 + \ 286.899.630}{2.798.554.050} \times 50\%$$

$$\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{838.636.781}{2.798.554.050} \times 50\% = 14{,}983\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Untuk jumlah barang terangkut dengan kereta api pada Triwulan II 2026, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **32.618.393 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **4.271.730** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 929.271 ton;
   2) Semen dan Klinker sebanyak 458.840 ton;
   3) Peti kemas sebanyak 290.640 ton;
   4) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 64.970 ton;
   5) B3 dan Limbah B3 sebanyak 42.477 ton;
   6) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 2.485.532 ton.

b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **28.346.663** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 413.493 ton;
   2) Semen dan Klinker sebanyak 705.249 ton;
   3) Batu bara sebanyak 26.616.418 ton;
   4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 303.727 ton;
   5) Peti kemas sebanyak 290.640 ton;
   6) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 2.053 ton;
   7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 15.083 ton;

Dengan jumlah realisasi angkutan barang kereta api Tahun 2025 sebanyak 69.908.773 ton dan jumlah angkutan barang pada Triwulan II 2026 sebanyak 32.618.393 ton, maka diperoleh jumlah realisasi angkutan barang kumulatif dari Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 102.527.166 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api pada periode 2025 – 2029 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yaitu 361.142.831 ton, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan II 2026 sebesar 28,390% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan barang 2025 s.d TW II 2026}}{\text{Target angkutan barang 2025} - 2029} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{69.908.773 + 32.618.393}{361.142.831} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{102.527.166}{361.142.831} \times 50\% = 14{,}195\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

Dengan pemenuhan target angkutan kereta api penumpang (14,983%) dan angkutan kereta api barang (14,195%), maka diperoleh ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api secara total sebesar 29,178%*** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA}$$

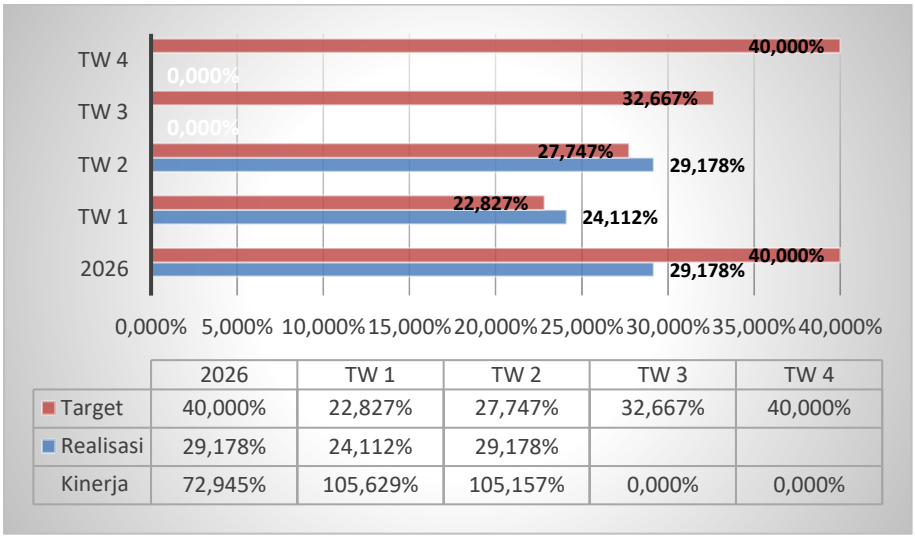
$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = 14{,}983\% + 14{,}195\% = 29{,}178\%$$

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api sebesar 29,178%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,157% terhadap target Triwulan II sebesar 27,747% dan capaian kinerja sebesar 72,945% terhadap target Tahun 2026 sebesar 40,000%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-18 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	40,000	22,827	27,747	32,667	40,000	24,112	29,178			105,629	105,157			72,945



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	40,000%	22,827%	27,747%	32,667%	40,000%
Realisasi	29,178%	24,112%	29,178%		
Kinerja	72,945%	105,629%	105,157%	0,000%	0,000%

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) angkutan penumpang kereta api di Indonesia dilakukan sandingan kinerja negara Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada Tahun 2025-2026. Perbandingan jumlah angkutan penumpang dan barang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-19 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.236	150.750.000	4.826
2	Malaysia	1.799	27.589.255	15.332
3	Singapura	271	110.970.000	409.031
4	Indonesia	6.915	47.816.605	6.915

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan April 2025-Maret 2026)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan Januari-Mei 2026)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan Tahun 2025)

**) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Januari-Juni Tahun 2026*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya dan Singapura namun lebih tinggi dari Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing

negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya namun lebih rendah dari Singapura dan Malaysia. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Analisa kinerja angkutan barang dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-20 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.236	5.825.000	186
2	Indonesia	6.915	5.436.399	786

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan April 2025-Maret 2026)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 186 Ton/Km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Angkutan Penumpang

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diantaranya:

a. Beberapa libur panjang selama Triwulan II Tahun 2026 sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan.
b. Meningkatnya animo masyarakat terhadap layanan angkutan penumpang kereta api dengan adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi dengan rincian:
    1) Pemberian stimulus dengan realisasi sebesar Rp90.956.933.000,00 atau 94,53% dari alokasi sebesar Rp90.956.933.000,00,00 yang diselenggarakan pada periode Libur Sekolah Tahun 2026 pada tanggal 20 Juni 2026 s.d. 5 Juli 2026 dengan realisasi penumpang sebanyak 1.303.191 penumpang atau capaian sebesar 110,95% dari kapasitas sebanyak 1.174.624 tempat duduk;
    2) Pada Tahun 2026 dialokasikan anggaran subsidi angkutan kereta api perintis sebesar Rp124.215.780.878,- dan alokasi subsidi PSO sebesar Rp5.864.206.808.000,-. Dimana pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada LRT Jabodebek.
    3) Guna meningkatkan pelayanan KA Makassar-Parepare dilakukan perpanjagan lintas operasi yang sebelumnya mencakup Mandai – Garongkong menjadi Mandai – Palanro;
    4) Telah beroperasinya Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) yang melayani aktivitas naik dan turun penumpang KRL Jabodetabek, sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan angkutan perkotaan. Selain itu juga terdapat pengoperasian Stasiun Comal di Kabupaten Pemalang serta Stasiun Plabuan di Kabupaten Batang.
    5) Pengoperasian layanan KA Sangkuriang pada lintas pelayanan Bandung–Ketapang turut memperluas jangkauan pelayanan angkutan penumpang.

6) Peresmian layanan KA Ekonomi Kerakyatan memberikan tambahan kapasitas dan alternatif moda transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
7) Pembaruan sarana kereta api yaitu KA Bangunkarta, KA Singasari, Penambahan kereta ekonomi kerakyatan pada KA Cikuray guna menarik minat pengguna angkutan kereta api.
8) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan pada penyelenggaraan subsidi PSO pada LRT Jabodebek.

c. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pola Pergerakan Penumpang dan SPM Pelayanan KA Antarkota di Stasiun Manggarai pada 21 Mei 2026.
d. Telah dilaksanakan kegiatan inspeksi, *rampcheck*, monitoring dalam rangka angkutan Hari Raya Idul Adha 2026 pada bulan Mei 2026 di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, BTP Surabaya dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

Selain itu, juga telah dilakukan koordinasi/pembahasan terkait peningkatan pelayanan kereta api diantaranya:

a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dengan Dishub Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembangunan Bandung Sky – Link Kereta Gantung (*Cable Car*) dengan Rute Punclut – Pagerwangi pada tanggal 28 April 2026.
b. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dengan Dishub Provinsi Jawa Barat terkait Koordinasi terkait DED Jalur, Penetapan Trase dan Rencana Penyusunan Kajian Larap Reaktivasi Jalur Kereta Api antara Cipatat – Padalarang (Rencana Jalur Baru/*Shortcut*) pada tanggal 10 Juni 2026;
c. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dengan Dishub Provinsi DKI Jakarta terkait Pengajuan Izin Operasi KA Bandara Ke Stasiun Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juni 2026;
d. Telah dilaksanakan Audiensi dengan PT Railink terkait Pengajuan Izin Operasi KA Bandara Ke Stasiun Lubuk Pakam pada tanggal 29 Juni 2026.

Namun demikian, dalam pencapaian kinerja angkutan kereta api pada Triwulan II Tahun 2026 masih terdapat beberapa kendala dan hambatan operasional di berbagai wilayah diantaranya faktor cuaca ekstrem dan bencana alam termasuk kejadian banjir di beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh, Sumatera

Utara, dan Sumatera Barat, serta lintas utara dan selatan Jawa yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional layanan perkeretaapian berupa gangguan perjalanan, kerusakan prasarana pada wilayah terdampak serta pembatalan pelayanan kereta api termasuk sampai saat ini KA perintis Cut Meutia di Provinsi Aceh belum dapat beroperasi kembali.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja/*crosscutting* terkait peningkatan angkutan penumpang kereta api dengan koordinasi BUPS/operator perkeretaapian melalui kegiatan pengawasan standar pelayanan minimum, pengelolaan tarif termasuk stimulus, penetapan lintas pelayanan, serta pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat. Upaya peningkatan akses stasiun dan integrasi antar moda juga terdapat keterhubungan kinerja dengan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/operator moda lain. Selain itu juga terdapat hubungan kerja dan data dalam penyediaan/penyelenggaraan subsidi perintis serta pengelolaan *Public Service Obigation* yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta BUPS/operator perkeretaapian.

Angkutan Barang

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja pemenuhan target angkutan barang kereta api diantaranya:

a. Telah dilaksanakan Pembahasan dan Koordinasi Data Kinerja Angkutan Barang dengan PT. Kereta Api Periode Triwulan I Tahun 2026 pada tanggal 12 Mei 2026;
b. Telah dilaksanakan Pembahasan Studi Kelayakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha pada Jalur Kereta Api Barang Pelabuhan Patimban pada tanggal 18 Mei 2026.

Namun demikian, dalam pencapaian kinerja angkutan barang kereta api terdapat beberapa kendala dan hambatan operasional yaitu

a. Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/202 5 yang diberlakukan pada 1 Januari 2026 tentang pembatasan angkutan batubara melewati jalur nasional yang

berpotensi menurunkan permintaan volume barang pada komoditas batubara.

b. Pada komoditas semen di Pulau Jawa terjadi penurunan volume angkutan kereta api akibat bertumbuhnya pabrik semen baru yang berlokasi lebih dekat dengan wilayah permintaan, sehingga sebagian distribusi semen beralih menggunakan moda truk. Selain itu, terdapat pemindahan lokasi pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) dari wilayah Daop 3 Cirebon (Arjawinangun) ke wilayah Daop 4 Semarang (Grobogan), sehingga distribusi semen tidak lagi menggunakan angkutan kereta api.
c. Sementara itu, di Pulau Sumatera, khususnya pada Divre II Sumatera Barat, terdapat permohonan pembatalan angkutan semen akibat kapasitas silo di Padang yang penuh serta penurunan permintaan dari pelanggan, sehingga frekuensi perjalanan kereta api menurun dari semula 16 perjalanan menjadi 6 perjalanan.
d. Penurunan kinerja angkutan komoditas pupuk di Pulau Jawa pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi angkutan pupuk pada wilayah Daop 5 Purwokerto (relasi Cilacap-Kebumen, Sleman, dan Klaten) dengan potensi angkutan sebesar 63.400 ton yang belum terealisasi secara penuh sejak rencana operasional pada 1 Januari 2026. Selain itu, permintaan angkutan pupuk pada Triwulan I cenderung lebih rendah dibandingkan Triwulan II, III, dan IV, sehingga volume angkutan kereta api mengalami penurunan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan kerja dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan sektor logistik/perdagangan/industri/pertanian/ perkebunan/pertambangan dimana angkutan kereta api barang membutuhkan sinergi dengan sektor-sektor tersebut sebagai pembentuk *demand*. Selain itu, koordinasi dengan badan usaha/operator perkeretaapian juga dilakukan termasuk melakukan sosialisasi terhadap perusahaan/pabrik/*outlet* potensial menggunakan angkutan kereta api barang dalam distribusi hasil produksinya. Keterhubungan data dan kinerja dengan sub sektor perhubungan laut dan darat juga terjalin dalam penyelenggaraan multimoda pada simpul transportasi (pelabuhan, terminal barang/*dryport*, bea cukai, lainnya).

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala setiap/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 102 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait indikator kinerja pemenuhan target angkutan kereta api. Dari 102 risiko tersebut, terdapat 9 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 29 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 11 kegiatan atau sebesar 37,93% dari 29 kegiatan rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi Perhubungan Darat terkait penataan dan pengamanan perlintasan sebidang Kereta Api.
b. Koordinasi dengan BMKG terkait mitigasi risiko cuaca ekstrim pada masa angleb tahun 2026.
c. Pengoptimalan kegiatan rampcheck kesiapan sarana dan prasarana perkeretaapian termasuk dengan dukungan SOP yang memadai.
d. Penguatan SOP terkait pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.
e. Usulan buka blokir anggaran IMO.
f. Reviu SOP Tata kelola penyelenggaraan IMO.
g. Dukungan kebijakan perubahan skema perintis menjadi PSO untuk menjamin penyelenggaraan layanan sesuai dengan kebutuhan.
h. Kerja sama dengan pihak Jasa Raharja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan operasional KA di Indonesia.
i. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pada perlintasan sebidang melalui Bimtek keselamatan sistem rekayasa

dan operasional, workshop rekayasa dibidang perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi penjaga pintu perlintasan.

j. Bersurat kepada pemegang izin yang masa berlaku perizinannya akan habis.

k. Rapat pembahasan percepatan penyelenggaraan IMO.

Tabel 2-21 Realisasi Penanganan Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api periode Triwulan II Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan			Risiko (Form 9)
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	67	6	21	5	2	7	33,33
2	Pengelolaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	18	2	6	2	2	4	66,67
3	Pengelolaan Sarana Transportasi Perkeretaapian	17	1	2	-	-	-	-
Jumlah		**102**	**9**	**29**	**7**	**4**	**11**	**37,93**

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan***:

1) Lanjutan pelaksanaan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional termasuk reviu *Masterplan* Perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing wilayah;

2) Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO dengan kontrak Tahun 2026 sesuai kebutuhan dan berkelanjutan yang mencakup layanan kereta api perkotaan dan antar kota;

3) Melakukan kajian mandiri terhadap rencana perpanjangan layanan KA Bandara YIA hingga Stasiun Maguwo.
4) Dukungan perizinan terhadap usulan pengembangan layanan transportasi perkeretaapian melalui integrasi antarmoda dan kawasan berbasis TOD
5) Sosialisasi pengenalan stasiun, pola operasi dan tarif Kereta Api Makassar-Parepare khususnya pada lintas yang baru beroperasi yaitu Mandai-Palanro.

b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran***:
1) Pengajuan revisi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kajian perencanaan teknis untuk penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam;
2) Pembangunan prasarana perkeretaapian pendukung serta jalan akses stasiun lintas Makassar - Parepare guna mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna KA Makassar – Parepare;
3) Koordinasi serta pemantauan dalam pembangunan dan rencana pengoperasian LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai.

Adapun pencapaian persentase pemenuhan target angkutan kereta api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya penggunaan kereta api yang mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
b. Peningkatan investasi infrastruktur, dimana dengan tingginya permintaan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan analisa mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan kereta api baik angkutan penumpang maupun angkutan barang pada periode tertentu. Kategori kecelakaan kereta api meliputi anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA, dan terbakar. Selain itu, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh keterjadian/pelanggaran/gangguan keamanan di lokasi perpotongan/ perlintasan sebidang yang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api sebagaimana ketentuan:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
    a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api;
    b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (*zero accident*) baik target tahunan maupun periode triwulan dengan nilai tingkat keselamatan 100%. Namun sampai dengan periode Triwulan II 2026 telah terjadi 7 kejadian kecelakaan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-22 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2026

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	1
2	Anjlokan	6
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		**7**

Tabel 2-23 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2026

Wilayah Balai	Bulan						Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
BTP Jakarta	-	-	-	1	1	-	**2**
BTP Bandung	-	-	-	1	-	-	**1**
BTP Semarang	-	-	-	1	-	-	**1**
BTP Surabaya	-	-	-	-	-	-	**0**
Pulau Jawa	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**4**
BTP Medan	-	-	-	-	-	-	**0**
BTP Padang	-	-	-	-	-	-	**0**
BTP Palembang	-	1	-	-	2	-	**3**
Pulau Sumatera	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**
Jumlah (Jawa + Sumatera)	**0**	**1**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**

Dengan jumlah kejadian kecelakaan kereta api sebanyak 7 kejadian serta jumlah keberangkatan kereta api sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 539.252 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode Triwulan II 2026 sebesar 98,702% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \left(\frac{7 \text{ Kejadian Kecelakaan Kereta Api}}{539.252 \text{ Perjalanan Kereta Api}} x\ 1.000\right)\right] x\ 100\% =$$

$$= [1 - 0{,}01298]\ x\ 100\% = 98{,}702\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

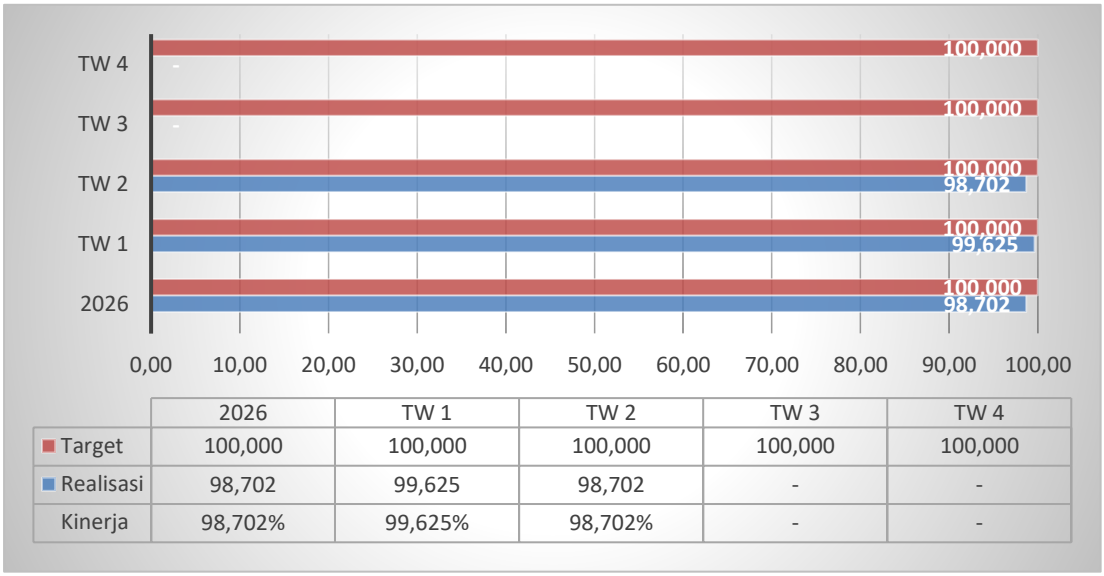
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian periode Triwulan II 2026 sebesar 98,702%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 98,702% dibandingkan target yang ditetapkan pada periode Triwulan II dan Tahun 2026 sebesar 100,000%. Kejadian kecelakaan kereta api mayoritas berupa anjlokan dan terdapat 1 kejadian tabrakan KA dengan KA yang

menyebabkan dampak/korban yang besar (terjadi di wilayah BTP Jakarta dengan lalu lintas yang padat). Adapun kejadian kecelakaan kereta api mayoritas terjadi di wilayah kerja BTP Kelas II Palembang yang dominan pada layanan kereta api barang. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-24 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian (%)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,625	98,702	-	-	99,625	98,702	-	-	98,702



	2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Realisasi	98,702	99,625	98,702	-	-
Kinerja	98,702%	99,625%	98,702%	-	-

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan kereta api dilakukan perbandingan dengan negara lain mengacu pada publikasi yang ada berupa jumlah kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokan) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data negara lain di Eropa (Uni Eropa) dengan data Indonesia periode Januari s.d. Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa jumlah kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan

Uni Eropa. Selain itu, apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api maka kinerja Indonesia masih lebih baik dari Uni Eropa dengan rasio yang lebih kecil. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-25 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Uni Eropa	202.131	405	0,0020
2	Indonesia	6.915	7*	0,0010

Sumber No.1 : Website European Union Agency of Railways, data periode Tahun 2025
**) Data Periode Triwulan I-II 2026*

Perbandingan kinerja di level nasional juga dilakukan dengan perbandingan kinerja sub sektor transportasi lain. Untuk perbandingan dengan transportasi jalan dan transportasi udara, pada Triwulan II 2026 diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian masih lebih tinggi dimana tingkat keselamatan transportasi jalan sebesar 95,048 dan tingkat keselamatan transportasi udara sebesar 97,420%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan transportasi laut sampai dengan periode Triwulan II 2026 diperoleh bahwa tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan transportasi laut yaitu sebesar 99,990%. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian yang lebih intensif sesuai faktor penyebab terjadinya kecelakaan khususnya kejadian anjlokan dan tabrakan KA dan KA yang menyebabkan dampak/korban yang besar.

Tabel 2-26 Perbandingan Tingkat Keselamatan Transportasi

No	Sub Sektor Transportasi	Tingkat Keselamatan (%)
1	Transportasi Jalan	95,048
2	Transportasi Laut	99,990
3	Transportasi Udara	97,420
4	Transportasi Perkeretaapian	98,702

**) Data Periode Triwulan I-II 2026*

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II 2026, terjadi 7 kejadian kecelakaan kereta api yaitu

a. Pada tanggal 7 Februari 2026 terjadi anjlokan KA barang (Barapati) pada petak jalan antara Stasiun Serdang – Stasiun Payakabung. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA yaitu patahnya rel di KM 370+570 (prasarana).

b. Pada tanggal 1 April 2026 terjadi anjlokan KA Ciremai pada petak jalan Maswati – Sasaksaat. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA yaitu KA Ciremai menabrak material longsoran yang menutupi jalur di KM 143+8/9 petak jalan Maswati – Sasaksaat. Longsoran dikarenakan sistem drainase lereng yang tidak optimal (prasarana).

c. Pada tanggal 6 April 2026 terjadi anjlokan KA Bangunkarta pada di Km 312+1 wessel 21A dan 21B Jalur Hulu Emplasemen Bumiayu. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA yaitu:
   1) Terjadi korosi parah pada penambat rel yang berakibat pada penurunan gaya jepit (*clamping force*);
   2) Adanya genangan lumpur (*mud pumping*) di lengkung sehingga mengurangi fungsi ballast dalam mendistribusi beban dinamis (prasarana);
   3) Adanya retak lelah (*fatigue crack*) hingga mematahkan pegas suspense sekunder sehingga menimbulkan ketidakseimbangan beban (*twist/roll instability*) (sarana).

d. Pada tanggal 27 April 2026 KA Argo Bromo Anggrek menabrak KA 5568A TS 6000 TM24 di Emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Terdapat korban yaitu 16 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, 100 orang luka ringan. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam proses analisis bersama dengan KNKT.

e. Pada tanggal 16 Mei 2026 terjadi anjlokan KA Baratarahan pada petak jalan Stasiun Tanjung Enim Baru – Stasiun Muara Enim. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA yaitu hilangnya sambungan rel/plat sambung menyebabkan tidak stabilnya jalur rel sehingga sebagian roda lokomotif keluar dari kepala rel saat rangkaian melintas.

f. Pada tanggal 17 Mei 2026 terjadi anjlokan KA Baratarahan pada petak Km 195+6 Jalur III (hilir) Emplasemen Martapura. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam proses analisis.

g. Pada tanggal 22 Mei 2026 terjadi anjlokan KA Jaka Tingkir pada petak Km 195+6 Jalur III (hilir) Emplasemen Martapura. Dampak kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam proses analisis.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan II 2026 diantaranya:

a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian dengan rincian:
   1) Pengujian prasarana perkeretaapian sebanyak 97 unit dan 192,77 km dengan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 90 sertifikat jalur dan bangunan termasuk sertifikasi fasilitas operasi;
   2) Pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 6.321 unit dengan sertifikasi sebanyak 4.160 sertifikat;
   3) Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 3.402 orang dengan sertifikasi sebanyak 10.949 sertifikasi.
b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan oleh Balai Teknik Perkeretaaapian dan Balai Pengelola Kereta Api meliputi:
   1) Kegiatan penjagaan aset prasarana perkeretaapian yaitu penialaian kondisi ex BH 1549 Km 388+850 antara Kasugihan - Maos lintas Bogor-Yogyakarta;
   2) Kegiatan pengawasan daerah rawan yaitu kegiatan penanganan gangguan sistem persinyalan di stasiun prupuk;
   3) Pengawasan keselamatan perkeretaapian dalam rangka antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat periode libur nasional dan cuti bersama kenaikan Isa Al Masih pada 14 -17 Mei 2026;
   4) Monitoring Jalur Lintas Muara Satu - Krueng Geukueh pada April 2026;
   5) Monitoring dan evaluasi daerah rawan banjir di Km 87+700 s.d 88+100 petak jalan Lampegan-Cibeber pada April 2026;
   6) Monitoring kejadian longsor Km 74+9/0 petak jalan Cibeber-Lampegan pada April 2026.
c. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretaapian termasuk

pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api, diantaranya:

1) Inventarisasi aset BMN antara st Kayu Tanam dan St Kandang Ampat pada 11 - 12 April 2026;
2) Pembuatan Laporan Polisi terkait kasus pencurian di lintas stasiun kayu tanam dan stasiun kandang ampat pada 13 April 2026;
3) Inventarisasi aset antara bekas halte Kubu Puding dan Stasiun Kubu Kerambil pada 7 - 8 Mei 2026.

d. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian;
e. Evaluasi manajemen tanggap darurat dan pemantauan tindak lanjutnya oleh Badan Usaha.

Selain itu, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

a. Bencana alam/cuaca ekstrim/*force major* di beberapa wilayah (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur), menyebabkan beberapa segmen prasarana perkeretaapian rusak/butuh penanganan;
b. Gangguan keamanan dari eksternal, diantaranya kondisi perlintasan sebidang yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kereta api;
c. Kebutuhan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan penanganan prasarana rusak/*urgent*;
d. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan, termasuk keterbatasan anggaran untuk pengawasan berkala terhadap kondisi dan pelaksanaan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian. Pada Tahun 2026, beberapa kegiatan mendukung keselamatan belum dapat dilaksanakan diantaranya:
    1) Penggantian Jembatan BH 46 dan BH 59 Brumbung – Gubug, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN (telah re-alokasi kembali dari revisi untuk kegiatan mendesak);

2) Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 dan BH 1164 Cirebon – Kroya, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN (telah re-alokasi kembali dari revisi untuk kegiatan mendesak);
3) Penanganan Rintang Jalan Jalur KA antara Mluwungcipari, Kawunganten-Lebeng dan Sikampuh-Kroya segmen Banjar–Kroya, kegiatan ditunda untuk pemenuhan kebutuhan anggaran prioritas, lingkup kegiatan mendesak diusulkan masuk lingkup kegiatan IMO;
4) Peningkatan Jembatan BH 397 dan BH 537 Blitar – Rejotangan, anggaran diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN;
5) Penanganan Rintang Jalan lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam, kegiatan ditunda untuk pemenuhan kebutuhan anggaran prioritas, lingkup kegiatan mendesak diusulkan masuk lingkup kegiatan IMO;
6) Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO), saat ini belum berkontrak dikarenakan masih menunggu kebijakan pemenuhan *backlog* IMO Tahun 2023-2024. Kendala lain juga terdapat kebutuhan pemenuhan IMO Tahun 2026 untuk wilayah BTP Palembang dan BPKAR Sumsel dimana anggaran Tahun 2026 diblokir dan terdampak penajaman realokasi anggaran ke BA BUN. Selain itu, juga terdapat kebutuhan anggaran IMO berupa *backlog* IMO Tahun 2023 sebesar Rp389,45 Milyar serta *backlog* IMO Tahun 2024 sebesar Rp1,2 T.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan audit/inspeksi keselamatan yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha penyelenggara prasarana/sarana/operator perkeretaapian serta Pemerintah Daerah. Koordinasi juga diperlukan dengan BMKG dalam hal berbagi informasi kondisi cuaca untuk mendukung kelancaran operasional kereta api, KNKT terkait investigasi kejadian kecelakaan, serta Badan SAR terkait penanganan kejadian kecelakaan kereta api. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait penyelesaian

kendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran khususnya untuk kegiatan pendukung keselamatan transportasi perkeretaapian.

Dalam mendukung pencapaian target Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 60 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait indikator kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian. Dari 60 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 14 kegiatan pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 14,286% dari 14 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi kegiatan penanganan risiko yang telah dilakukan pada Triwulan II 2026 yaitu:

1. Inventarisasi data prasarana sesuai dengan jenisnya terhadap penetapan sertifikasi uji pertama/berkala yang telah ditetapkan (***realisasi pada Triwulan I 2026***);
2. Bersurat ke Balai dan Badan Usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi uji berkala prasarana perkeretaapian (***realisasi pada Triwulan I 2026***).

Selain itu, juga dilaksanakan beberapa pengendalian eksisting sesuai proses bisnis diantaranya:

a. Pelaksanaan rapat koordinasi bidang keselamatan perkeretaapian;
b. Inventarisasi data terkait penetapan sertifikat pengujian berkala;
c. Sosialisasi pemenuhan kewajiban bagi badan hukum atau lembaga diklat yang terakreditasi;
d. Sosialisasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian kepada penyelenggara perkeretaapian;
e. Pelaksanaan rapat persiapan *rampcheck* dengan Balai Teknik Perkeretaapian dan Operator;
f. Operasi terpadu rutin (Kemenhub, Polri, Pemda, PT KAI) di daerah rawan bencana/kecelakaan.

Tabel 2-27 Realisasi Penanganan Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			%
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	
1	Keselamatan dan Keamanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	8	1	3	2	0	2	66,67
2	Keselamatan dan Keamanan Bidang Sarana Perkeretaapian	18	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Keselamatan Perkeretaapian	34	3	11	-	-	-	-
Jumlah		**60**	**4**	**14**	**2**	**0**	**2**	**14,29**

Selain itu, sampai dengan periode Triwulan II 2026 juga tercatat 4 keterjadian risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-28 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026

Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Waktu	Pemicu Peristiwa
Kondisi jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus	Kurangnya perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana	1 Kejadian	Triwulan I	• Terdapat rel patah akibat ketidaktepatan penanganan sementara/ kurangnya perawatan prasarana perkeretaapian sehingga menyebabkan KA 3100 (Barapati) mengalami anjlok dan terguling pada segmen Serdang –Payakabung (Sumatera Selatan)
Kondisi jalur kereta api tidaksesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus	Kurangnya perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana	3 Kejadian	Triwulan II	• Kurangnya perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana sehingga menyebabkan KA 161 (Bangunkarta) anjlok di KM 312+1 Jalur Hulu Emplasemen Bumiayu • Hilangnya sambungan rel/plat sambung sehingga menyebabkan KA 4016 (Baratarahan) anjlok di KM 4+9/0 petak jalan Stasiun Tanjung Enim Baru - Stasiun Muara Enim • Indikasi Kurangnya perawatan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana sehingga menyebabkan KA 4051 (Baratarahan) anjlok di KM 195+6 jalur III (hilir) Emplasemen Martapura
Terjadinya longsoran/ penurunan tanah di lokasi jalur kereta api	Pergeseran tanah/longsor akibat kondisi alam/cuaca ekstrim	1 Kejadian	Triwulan II	• Pergeseran tanah/longsor akibat kondisi alam/cuaca ekstrim sehingga menyebabkan KA 174B Ciremai menabrak longsoran dan anjlok di KM 142+8/9 Petak jalan maswati - Saaksaat

Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Waktu	Pemicu Peristiwa
Ketidakpatuhan terhadap standar dan ketentuan dalam pengoperasian sarana/ prasarana perkeretaapian oleh operator	Kelalaian sumber daya manusia/SDM dalammelaksanakan SOP	1 Kejadian	Triwulan II	• Pergerakan bakalan Kereta Api Serayu 284B dari jalur simpang 1 melewati sinyal langsir L112 menuju track 30T (spoor badug) tanpa adanya perintah dan tanpa dipandu oleh Petugas/Juru Langsir (PLR) sehingga menyebabkan Langsiran R 255 (Jaka Tingkir) Lok CC2039804 anjlok 5 as dan Rangkaian Bakalan KA 284 (Serayu) anjlok 2 as di Wessel 11A2 Emplasemen Pasarsenen

**) Terdapat 1 kejadian kecelakaan masih masih belum dapat diidentifikasi penyebabnya dikarenakan masih menunggu audit/pemeriksaan KNKT*

Sebagaimana Tabel di atas, kejadian kecelakaan kereta api dipengaruhi oleh kondisi prasarana perkeretaapian yang tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus, longsoran/penurunan tanah akibat cuaca ekstrim dan ketidakpatuhan operator dalam pengoperasian sehingga terjadi anjlokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Percepatan penyelenggaraan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) dengan koordinasi intensif Badan Usaha, serta peningkatan peran aktif Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk mengawasi aset prasarana dari vandalisme yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
b. Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api termasuk Satuan Pelayanan untuk melakukan pemetaan dan pemantauan kondisi rawan bencana alam sepanjang jalur kereta api serta pemanfaatan sistem deteksi bencana dengan koordinasi instansi terkait.
c. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SOP pengoperasian prasarana/sarana serta pelaksanaan *rampcheck* berkala terhadap kecakapan/keahlian/sertifikat SDM operator perkeretaapian.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan***:

1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kejadian kecelakaan kereta api (tabrakan KA dengan KA);
2) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rangka memperoleh informasi cuaca dan peringatan dini sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan keandalan operasional perkeretaapian.

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

1) Percepatan kontrak pelaksanaan kegiatan IMO Tahun 2026 untuk memastikan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
2) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan, diantaranya untuk memenuhi anggaran IMO.

c. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai***:

1) Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dan *Awareness* ISO 21001 : 2018 untuk meningkatkan mutu, efektivitas dan kualitas lembaga pendidikan serta pelatihan SDM Perkeretaapian;
2) Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan kompetensi dan sertifikasi SDM operator dan regulator, termasuk terhadap SDM yang belum memiliki sertifikat maupun yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir serta pengoptimalan jabatan fungsional tertentu perkeretaapian.

Kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat semaksimal mungkin menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.

b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.

c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga menganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

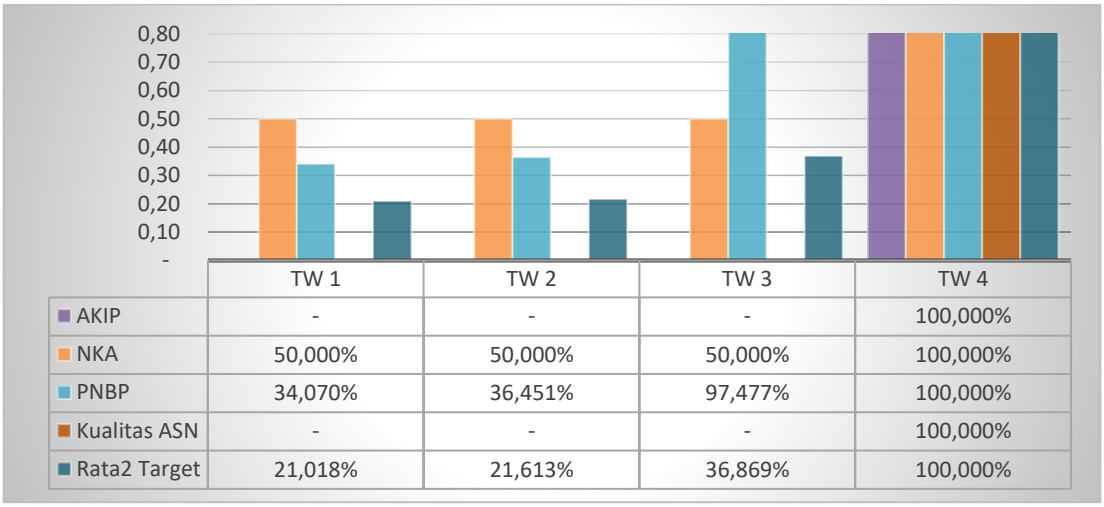
PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2026 dan sebesar 21,613% pada Triwulan II. Adapun uraian target sebagaimana Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-29 Uraian Target Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	83,750	100,000
2	Nilai Kinerja Anggaran	42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	85,000	100,000
3	Perolehan PNBP	455,950M	34,070	487,808M	36,451	1.304,510M	97,477	1.338,270M	100,000
4	Nilai Kualitas ASN	-	-	-	-	-	-	89,500	100,000
Rata-Rata Target		21,018%		21,613%		36,869%		100,000%	



Gambar 2-6 Uraian Target Triwulanan IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2026

Tingkat Pencapaian Nilai AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 83,750 dan pada Triwulan II 2026 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian mulai dilaksanakan secara berjenjang pada Triwulan II dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian kemudian dilaksanakan *assessment* oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada Triwulan II 2026 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai AKIP ***(Tingkat Pencapaian = 0,000%)***.

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 85,000 dan pada Triwulan II 2026 ditargetkan sebesar 42,500 (50,000% dari target Tahun 2026). Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 40,155 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 2,740;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 77,570.

Dengan realisasi sebesar 40,155, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026 sebesar 47,241% dari target Tahun 2026 sebesar 85,000 ***(Tingkat Pencapaian = 47,241%).***

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi perolehan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada dokumen DIPA Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 dan pada Triwulan II Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp487.808.032.342 atau sebesar 36,451%. Berdasarkan data pada aplikasi *MyIntress* dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp616.621.864.829,00. Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-30 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.097.243.054.000**	**416.677.064.118**	**37,975**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.302.744.000	270.099.768	11,729
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3.883.450.000	1.352.240.000	34,821
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.087.623.104.000	413.428.556.350	38,012
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3.433.756.000	1.626.168.000	47,358
2	**Pendapatan BLU**	**97.654.591.000**	**35.223.314.464**	**36,069**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	85.450.717.000	33.324.114.376	38,998
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.978.500.000	373.842.000	3,746
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.100.000.000	886.431.086	80,585
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000	138.050.000	12,267
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.000.000	-
	f. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	390.018.000	-

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	g. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	h. Pendapatan Lain-Lain BLU	-	108.859.002	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**143.372.000.000**	**164.721.486.247**	**114,891**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	28.749.000	-
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.411.642.000	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	114.448.000.000	4.101.996.785	3,584
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.924.000.000	104.318.000	0,361
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	3.303.974.383	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	13.075.356.638	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	14.260.962	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	131.830.365.450	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.901.282.850	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.949.540.179	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah		**1.338.269.645.000**	**616.621.864.829**	**46,076**

Dengan realisasi sebesar Rp616.621.864.829,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan II Tahun 2026 sebesar 46,076% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00 ***(Tingkat Pencapaian = 46,076%)***.

Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas ASN

Untuk mengetahui dan memetakan kualitas ASN, pengukuran Nilai Kualitas ASN dilakukan dengan mengadopsi metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas ASN berdasarkan kriteria standar yang mencakup kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN diharapkan dapat menjadi dasar pemetaan kualitas ASN serta rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam peningkatan kualitas manajemen SDM serta kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Penilaian kualitas ASN terdiri dari 4 aspek utama yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian:

1. ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK);
3. ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;
4. ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2026 ditargetkan Nilai Kualitas ASN sebesar 89,500 dan pada periode Triwulan II 2026 belum ditetapkan target karena menyesuaikan periode finalisasi penilaian dengan target ditetapkan pemenuhannya pada periode Triwulan IV Tahun 2026. Adapun pada periode Triwulan II Tahun 2026 saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan

kinerja melalui aplikasi SIK dan aplikasi e-Kinerja oleh masing-masing pegawai. Secara pararel juga dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/pelatihan/*workshop* baik yang dilaksanakan mandiri oleh Setditjen/Direktorat teknis maupun lembaga lain, serta peningkatan disiplin dan kinerja pegawai secara berkala oleh pimpinan.

Guna optimalisasi perolehan nilai, secara berkala (setiap triwulan) dilakukan monitoring/pemantauan terhadap capaian Nilai Kualitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Bagian SDM dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada periode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh nilai sementara nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 88,060 dari 100,000 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari perolehan periode sebelumnya (Triwulan I 2026) yakni sebesar 86,710. Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai pada Triwulan I s.d Triwulan II 2026 sebagai berikut:

Tabel 2-31 Monitoring Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026
1	Kualifikasi	25,00	23,37	23,43
2	Kompetensi	40,00	32,41	33,51
3	Kinerja	30,00	25,96	26,13
4	Disiplin	5,00	4,97	4,99
Nilai Kualitas ASN			**86,71**	**88,060**

Dengan demikian, pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat penetapan hasil pengukuran terhadap Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas ASN ***(Tingkat Pencapaian = 0,000%)***.

Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Nilai Kualitas ASN), maka diperoleh realisasi pencapaian tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 23,329% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	$(TP\ AKIPDJKA + TP\ NKA\ DJKA + TP\ PNBP\ DJKA + TP\ ASNDJKA) / 4$ *(0,000% + 47,241% + 46,076% + 0,000%) / 4*

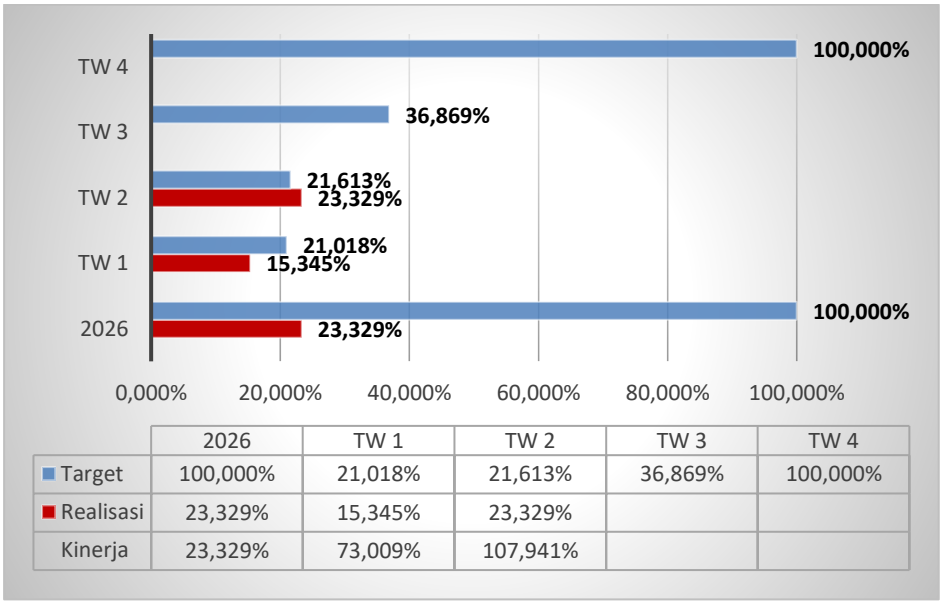
Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 23,329%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 107,941% terhadap target Triwulan II dan capaian kinerja sebesar 23,329% terhadap target Tahun 2026. Capaian kinerja pada Triwulan II masih sesuai kriteria *on the right track* (90-110%). Realisasi kumulatif per Triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-32 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan (%)	100,000	21,018	21,613	36,869	100,000	15,345	23,329	-	-	73,009	107,941	-	-	23,329



Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

2. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian dari seluruh komponen penilaian yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, perolehan PNBP dan Nilai Kualitas ASN. Khusus untuk komponen Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN, dilakukan perbandingan dengan perolehan kinerja Tahun 2025 karena pada Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi kinerja.

Untuk komponen Nilai AKIP, perbandingan kinerja dilakukan terhadap realisasi Tahun 2025 antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Inspektur Jendeal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Rincian perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 2-33 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
3	Ditjen Perhubungan Darat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
4	Ditjen Perhubungan Laut	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
5	Ditjen Perhubungan Udara	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**24,90**	**25,53**	**12,41**	**20,88**	**83,72**	**82,95**
7	Badan Kebijakan Transportasi	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
8	BPSDM Perhubungan	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan perolehan nilai sebesar 83,720. Oleh karena itu, pencapaian ini perlu untuk dipertahankan dan tetap melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja AKIP pada Tahun 2026.

Untuk perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBP, dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (terkait NKA) dan *MyIntress*/SIMPONI (terkait PNBP). Adapun rincian perbandinganya sebagai berikut:

Tabel 2-34 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2026

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	10,260	99,620	54,940
2	Inspektorat Jenderal	16,170	100,000	58,085
3	Ditjen Perhubungan Darat	8,530	96,180	52,355
4	Ditjen Perhubungan Laut	8,350	94,900	51,625
5	Ditjen Perhubungan Udara	7,850	97,210	52,530
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**2,740**	**77,570**	**40,155**
7	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	0,000	91,800	45,900
8	Badan Kebijakan Transportasi	8,330	99,960	54,145
9	BPSDM Perhubungan	19,220	96,420	57,820

Tabel 2-35 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2026

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.519.834.000	3.779.283.541	107,371%
2	Inspektorat Jenderal	-	393.662.970	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.309.642.722.000	619.470.863.118	47,301%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.630.393.145.000	3.503.681.182.222	62,228%
5	Ditjen Perhubungan Udara	2.090.049.630.000	1.463.627.924.334	70,028%
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**1.338.269.645.000**	**616.621.864.829**	**46,076%**
7	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	-	1.907.145	-
8	Badan Kebijakan Transportasi	-	1.267.056	-
9	BPSDM Perhubungan	1.545.065.320.000	895.674.305.097	57,970%

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 menduduki peringkat akhir dari 9 unit kerja eselon I dengan realisasi sebesar 40,155. Untuk

itu, diperlukan upaya perbaikan/peningkatan komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian *output* khususnya pada Rincian *Output* (RO) dengan kategori SBK baik SBKU maupun SBKK di periode berikutnya.

Sedangkan untuk capaian perolehan PNBP antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa secara persentase perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (46,076%) juga berada di posisi terendah dari 6 unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki target PNBP. Sedangkan berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp3,50 triliun. Capaian unit kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian masih di bawah rata-rata perolehan PNBP tingkat Kementerian Perhubungan yakni sebesar 59,606%, untuk itu diperlukan peningkatan perolehan PNBP diantaranya melalui penyelesaian pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI sebesar Rp1.009.000.000.000,00 yang direncanakan akan dibayarkan pada Agustus/Triwulan III 2026 serta optimalisasi pemanfaatan aset/BMN perkeretaapian (berupa sewa tanah/gedung/bangunan, sewa peralatan/mesin dan kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha).

Untuk perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kualitas ASN, diperoleh dari hasil monitoring penilaian yang dilakukan oleh Bagian SDM dan Organisasi Setditjen Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 yang dibandingkan dengan perolehan Nilai Kualitas ASN antar unit Eselon I di tingkat Kementerian Perhubungan Tahun 2025. Rincian perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 2-36 Perbandingan Nilai Kualitas ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No	Unit Kerja	Rerata Nilai Nilai Kualitas ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
Kementerian Perhubungan		**85,89**	**22,98**	**31,85**	**26,06**	**5,00**
1.	Sekretariat Jenderal	87,90	23,05	32,63	27,22	5,00
2.	Inspektorat Jenderal	85,01	22,56	31,90	25,56	5,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	84,51	23,42	30,53	25,56	5,00
4.	Ditjen Perhubungan Laut	82,85	22,99	29,79	25,07	5,00
5.	Ditjen Perhubungan Udara	84,97	22,12	31,18	26,68	5,00
6.	**Ditjen Perkeretaapian***	**88,06***	**23,43***	**33,51***	**26,13***	**4,99***

No	Unit Kerja	Rerata Nilai Nilai Kualitas ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
7.	BPSDM Perhubungan	83,57	22,45	30,42	25,71	5,00
8.	Badan Kebijakan Transportasi	88,14	23,01	33,56	26,57	5,00
9.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	89,32	23,87	34,26	26,21	4,99

**Menggunakan perolehan nilai Triwulan II Tahun 2026*

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-3 dari 9 unit Eselon I dengan perolehan Nilai Kualitas ASN pada Triwulan II 2026 sebesar 88,06. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun secara rata-rata sudah di atas nilai pada tingkat Kementerian Perhubungan.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang cukup optimal dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari tercapainya target Triwulan II pada dua dari empat komponen penilaian, yaitu komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan perolehan PNBP. Meskipun pengukuran terhadap Nilai AKIP dan Nilai Kualitas ASN belum dilakukan pada periode ini, pencapaian kinerja pada realisasi NKA dan PNBP berdampak signifikan pada kinerja indikator secara *aggregat* sehingga tingkat pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan pada Triwulan II 2026 dapat mencapai target Triwulan II namun tetap berada pada kriteria *on the right track* (90%-110%). Namun demikian, secara perbandingan kinerja dengan unit Eselon I lainnya pada 2 komponen penilaian (Nilai Kinerja Anggaran dan Perolehan PNBP) masih menduduki

posisi terakhir dari 9 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya percepatan dan optimalisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas kinerja anggaran serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, agar capaian kinerja pada Triwulan berikutnya tetap berada dalam rentang target yang ditetapkan. Selain itu, perbaikan penyelenggaraan SAKIP yang berkelanjutan termasuk penguatan kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

Selain itu, pada Triwulan II 2026 telah dilakukan beberapa upaya guna mendorong pencapaian target kinerja diantaranya:

a. Penyelenggaraan SAKIP:

1) Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Direktorat dan Balai serta Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 termasuk monitoring kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, SILAKI, e-Monev Bappenas);
3) Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi AKIP seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
4) Hasil penilaian mandiri evaluasi AKIP Tahun 2026 selanjutnya telah dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I pada 19 s.d. 20 Mei 2026 yang kemudian telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal untuk proses lanjut evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan. Dari hasil evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,79 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan".
5) Perolehan nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada unit kerja Eselon I dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,58
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,79
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,22
Nilai Hasil Evaluasi			**83,79**
Predikat			**A**

6) Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam Evaluasi Implementasi SAKIP, pada pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB;
7) Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan SAKIP, pada pembahasan monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan;
8) Penyesuaian pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 melalui pemanfaatan fitur monitoring rekomendasi hasil evaluasi pada modul Portal Layanan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan arahan/ketentuan dari narasumber Kementerian PANRB;
9) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis.

b. Pengelolaan/pelaksanaan anggaran:

1) Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan prioritas (diantaranya kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan IMO);
2) Pengusulan pergeseran (penajaman) anggaran Rupiah Murni dari bagian anggaran Kementerian Perhubungan (BA022) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor K4.002/2/4.SKJ/2026 tanggal 13 April 2026;

3) Penusulan kembali kebutuhan belanja pagawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dan pemenuhannya, melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/2/25/DJKA/2026 tanggal 19 Mei 2026;
4) Pelaksanaan kegiatan konsolidasi penyerapan anggaran yang akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.207/9/9/STJ/2026 tanggal 01 Juni 2026;
5) Pelaksanaan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana melalui surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-340/AG/AG.3/2026 tanggal 01 Juni 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7);
6) Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan/dapat ditunda di Tahun 2026 guna dilakukan realokasi untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan prioritas lainnya;
7) Melakukan pembahasan dan proses revisi anggaran serta pengajuan usulan kontrak tahun jamak sesuai kebutuhan;
8) Meningkatkan kinerja perencanaan anggaran melalui koordinasi dengan Satker dalam pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI serta penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU), guna memastikan akuntabilitas kinerja serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
9) Melakukan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA secara berkala, guna meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi penyerapan anggaran serta mendukung pencapaian nilai kinerja anggaran yang optimal.

c. Optimalisasi PNBP:

1) Telah dilakukan pembayaran TAC Tahun 2025 oleh PT. KAI senilai Rp325.108.662.510,00 yang terdiri dari nilai pokok dan sanksi administratif pada tanggal 14 April 2026 sebagaimana surat Menteri

Perhubungan Nomor KU.102/1/1/MHB/2026 tanggal 30 Maret 2026 sebagai tindak lanjut atas permohonan keringanan PNBP TAC dari PT.KAI. Adapun sisanya sebesar Rp1.009.000.000.000,00 diwajibkan untuk dibayar maksimal pada tanggal 14 Agustus 2026;

2) Pelaksanaan rekonsiliasi pencapaian target PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 yang diselenggarakan pada April 2026;
3) Monitoring dan evaluasi pencapaian target PNBP kepada seluruh Balai/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilakukan pada Mei 2026;
4) Melakukan inventarisasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api yang telah diterbitkan dan membutuhkan proses lanjut untuk pemanfaatan lahan BMN;
5) Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan;
6) Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dana PNBP dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target PNBP, termasuk mendorong peningkatan kualitas dan layanan. Pada Triwulan II 2026, telah terbit persetujuan revisi anggaran penambahan pagu sesuai Surat Dirjen Anggaran No. S-384/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Juni 2026 (pengesahan Revisi ke-8 DIPA DJKA TA 2026), sehingga realisasi belanja PNBP s.d. Juni 2026 masih nihil.

d. Pembinaan SDM/manajerial:

1) Pelaksanaan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian di unit kerja guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan kemutakhiran data ASN secara berkelanjutan yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan tugas kedinasan dan penerapan peraturan di bidang SDM Organisasi pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian selama periode April–Juni 2026,

meliputi BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas I Semarang, BTP Kelas I Medan, dan Balai Pengujian Perkeretaapian;

2) Penyampaian surat kepada seluruh unit kerja mengenai evaluasi kinerja pegawai Tahun 2026 serta peningkatan nilai *Document Management System* (DMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola data dan dokumen kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi SIK;
3) Penguatan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan skema *Work From Home* (WFH) melalui pengaturan mekanisme kerja yang disertai monitoring dan evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Tugas mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) untuk periode April, Mei, Juni, dan Juli 2026. Selain itu, telah disampaikan laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 kepada Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, dilakukan penyampaian penegasan pelaksanaan kebijakan WFH kepada seluruh unit kerja, serta pengusulan Admin Absensi *Digital Office* kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai upaya mendukung optimalisasi pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai berbasis digital;
4) Percepatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta menyiapkan dokumen pendukung pengembangan karier jabatan fungsional diantaranya penyusunan SKJ Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah dibahas bersama Direktorat Teknis dalam rapat pada tanggal 19 Juni 2026. Selain itu, telah disusun *Draft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dimaksud beserta lampirannya, serta dilaksanakan rapat pembahasan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan;

5) Melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja baik secara langsung maupun tidak langsung;
6) Mendorong peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial.

e. Perbaikan tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi informasi:
Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-*Performance*, e-Kinerja, Portal Layanan DJKA dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara Direktorat, Bagian dan Balai dalam proses perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk unit di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan lainnya. Pada lingkup eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian ATR/BPN, badan usaha dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja diantaranya program lanjutan pensertifikatan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, serta pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja, keuangan dan organisasi. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator

kinerja yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 104 risiko dari 14 proses bisnis yang dapat mengancam pencapaian target IKP tersebut dimana sebanyak 5 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 17 rencana penanganan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, telah terealisasi sebanyak 11 kegiatan penanganan risiko atau sebesar 61,11% dari 17 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi kegiatan penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 diantaranya:

a. Percepatan usulan buka blokir sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
b. Melakukan rotasi berkala bagi personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. Integrasi sistem/data antara Badan Usaha dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui API; dan
d. Penyempurnaan KAK/RAB serta penyusunan rekomendasi teknis untuk usulan buka blokir.
e. Implementasi penuh *E-Purchasing* dan Katalog Sektoral untuk barang/jasa yang sudah standar.
f. Sosialisasi dan penguatan pemanfaatan *Whistleblowing System (WBS)* yang menjamin anonimitas pelapor.
g. Reviu Kepdirjen No. KP-DJKA 271 Tahun 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
h. Pemantauan terkait dengan progres penetapan kontrak tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi).

Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2-37 Realisasi Penanganan Risiko IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d Triwulan II 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan			Risiko (Form 9)
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelaksanaan anggaran	6	1	7	1	1	2	28,57
2	Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Barang dan Jasa	9	1	3	1	2	3	100,00
5	Pengelolaan BMN	6	-	-	-	-	-	-
6	Pengelolaan Karier SDM	6	-	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	6	-	-	-	-	-	-
8	Pengelolaan Kinerja Organisasi	9	-	1	1	-	1	100,00
9	Pengelolaan Kinerja Pegawai	6	-	-	-	-	-	-
10	Pengelolaan PNBP dan BLU	8	-	-	-	-	-	-
11	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran	6	3	7	1	4	5	71,43
12	Pengembangan SDM	12	-	-	-	-	-	-
13	Perencanaan dan Pengadaan SDM	12	-	-	-	-	-	-
14	Perencanaan Strategis Organisasi	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**104**	**5**	**18**	**4**	**7**	**11**	**61,11**

Selain itu, sampai dengan periode Triwulan II 2026 juga tercatat beberapa keterjadian risiko yang mempengaruhi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, meliputi:

Tabel 2-38 Keterjadian Risiko pada Proses Bisnis terkait Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Waktu	Pemicu Peristiwa
1	Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Penyerapan anggaran dan capaian output rendah	1 Kejadian	Triwulan II	• Penyerapan anggaran dan capaian output rendah

Sebagaimana Tabel di atas, kejadian tidak tercapainya nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipengaruhi oleh penyerapan anggaran dan capaian output rendah, maka direkomendasikan pelaksanaan inventaris kegiatan belanja modal/barang yang belum terlaksana guna revisi/realokasi anggaran untuk prioritas kegiatan lainya dan/atau pengembalian ke rincian output khusus, percepatan penyelesaian readiness criteria yang dibutuhkan, serta percepatan pencapaian output kegiatan khususnya penyelesaian kegiatan kontraktual bidang prasarana perkeretaapian sesuai target waktu.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi/upaya yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang telah dilakukan hingga Triwulan II 2026 diantaranya:

a. Melakukan penambahan fitur dalam Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu fitur Monitoring Rekomendasi Hasil Evaluasi untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyelenggaraan SAKIP serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan optimal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
b. Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis *GAP* kompetensi guna mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN melalui pembinaan manajerial dan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian;
c. Melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral dengan judul Kompilasi Data Perkeretaapian di Indonesia yang dinyatakan Layak oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, telah mendapatkan Tanda Daftar SIstem Elektronik (TD-PSE) Lingkup Publik Nomor: 94 untuk Portal Layanan dan

Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan logo TD-PSE PERON HUB termasuk melakukan koordinasi dengan BKPM terkait penyesuaian sistem OSS pada perizinan berusaha bidang perkeretaapian. Dengan dilaksanakan inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola data, integrasi sistem layanan, serta transparansi dan kemudahan akses layanan publik;

d. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada UPT Pelaksana. setiap 2 bulan guna memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik;
e. Pelaksanaan kegiatan *Refreshment* Manajemen Risiko yang diikuti oleh 92 ASN hingga Triwulan II 2026 guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam penerapan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir potensi risiko dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif;
f. Melakukan pengklasifikasian arsip melalui pola pengaturan dokumen secara berjenjang berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai alat pemberkasan, penyimpanan, serta penemuan kembali arsip secara efektif guna meningkatkan tertib administrasi, serta memperkuat tata kelola kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
g. Monitoring pemenuhan persyaratan Zona Integritas melalui *Google Spreadsheet* dan *Google Drive* yang terintegrasi untuk memantau progres dan tindak lanjut secara berkala sehingga menjadi lebih efektif, progres mudah dipantau, dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat serta terdokumentasi dengan baik;
h. Pengembangan *Master Data* Kepegawaian secara *offline* sebagai basis data terpusat yang mengintegrasikan seluruh informasi kepegawaian dan mendukung penghitungan Nilai Kualitas ASN;
i. Pengembangan modul layanan pada Portal Layanan dan Data menjadi berbasis *microservices* yang disertai penyederhanaan proses bisnis sehingga layanan menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan dan diintegrasikan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan digital;

j. Penyusunan Kebijakan Privasi yang mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat pelindungan data pribadi, dan mendukung peningkatan tingkat kematangan layanan digital;

k. Pengembangan fitur Survei Kepuasan Masyarakat (Suara Pemdi) ke dalam Portal Layanan dan Data untuk mempermudah pengumpulan umpan balik pengguna, meningkatkan kualitas evaluasi layanan, dan mendorong perbaikan layanan digital secara berkelanjutan;

l. Inventarisasi dan monitoring tindak lanjut izin perpotongan/ persinggungan dan pemanfaatan lahan BMN melalui *Google Spreadsheet* yang dipantau bersama oleh Bagian Hukum dan Bagian Keuangan dengan tujuan untuk pelaksanaan monitoring yang lebih terintegrasi, tindak lanjut pemanfaatan BMN lebih optimal, dan mendukung peningkatan realisasi PNBP.

m. Pengembangan fitur *Helpdesk* pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung pelayanan informasi publik guna mempercepat respons pelayanan informasi publik, meningkatkan kemudahan akses layanan, serta mendukung pengelolaan permohonan yang lebih efektif dan terdokumentasi.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Koordinasi usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 termasuk penyesuaian rencana aksi pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* pada periode berikutnya.

2) Lanjutan pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada unit sampel untuk kemudian menjadi acuan dalam penyamaan persepsi/finalisasi penilaian pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

3) Pelaksanaan konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun Anggaran 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung optimalisasi pencapaian target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026;
4) Pelaksanaan konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2026 di guna mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2026;
5) Konsolidasi *one on one meeting* bersama Satuan Kerja dengan pagu besar untuk percepatan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026;
6) Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu;
7) Lanjutan pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija).

b. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

1) Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan dampak dari perubahan pagu/komposisi anggaran Tahun 2026 guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*;
2) Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan dialihkan ke BA BUN guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
3) Optimalisasi sisa anggaran kontraktual/ swakelola untuk penyediaan anggaran kegiatan direktif/prioritas Presiden;
4) Revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024;

5) Lanjutan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema *Work From Home* (WFH) guna mendukung kebijakan nasional dalam rangka efisiensi energi.

c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

1) Lanjutan pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan baik terkait kebutuhan kompetensi teknis maupun manajerial/umum termasuk terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kinerja pegawai, dll) pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian;
2) Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi.

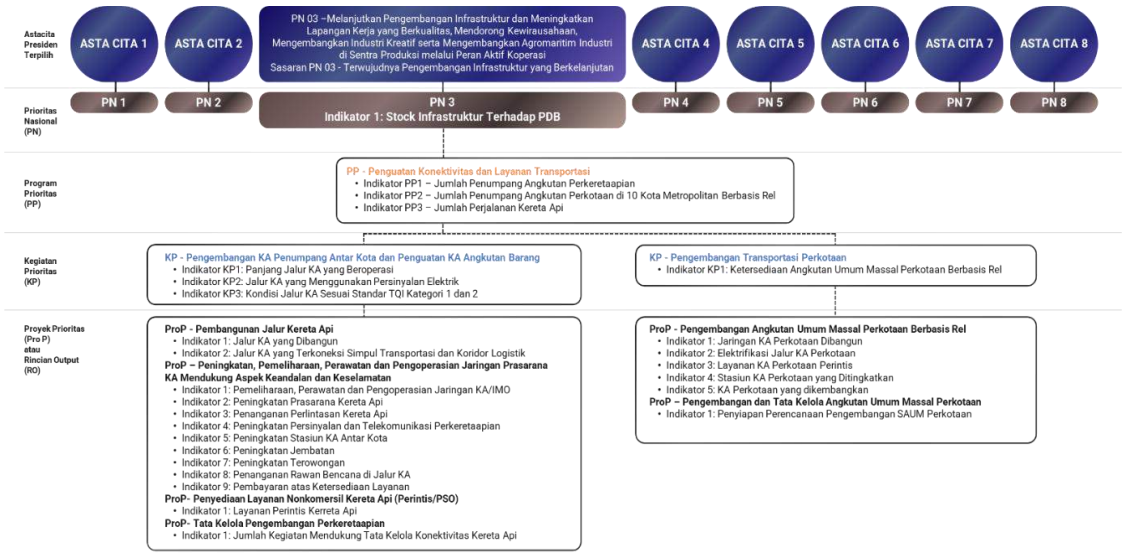
Adapun pencapaian target Tata Kelola Pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor perkeretaapian;
b. Penguatan sistem manajemen kinerja dan pelaksanaan prinsip *good governance* melalui penerapan SAKIP yang semakin terintegrasi dan berkualitas;
c. Optimalisasi pengelolaan anggaran, penerimaan PNBP, serta pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan keselamatan dan layanan perkeretaapian;
d. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi difokuskan pada Prioritas Nasional 3 (PN 3), termasuk memberikan dukungan prioritas nasional lainnya melalui beberapa Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam implementasi PN3, sektor transportasi perkeretaapian dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP) Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi dengan 2 Kegiatan Prioritas (KP) yaitu (1) Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang, serta (2) Pengembangan Transportasi Perkotaan. Selanjutnya masing-masing Kegiatan Prioritas (KP) dijabarkan menjadi beberapa Proyek Prioritas (ProP) atau Rincian *Output* (RO) sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2- 8 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Prioritas Nasional 3

Adapun target indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait transportasi perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

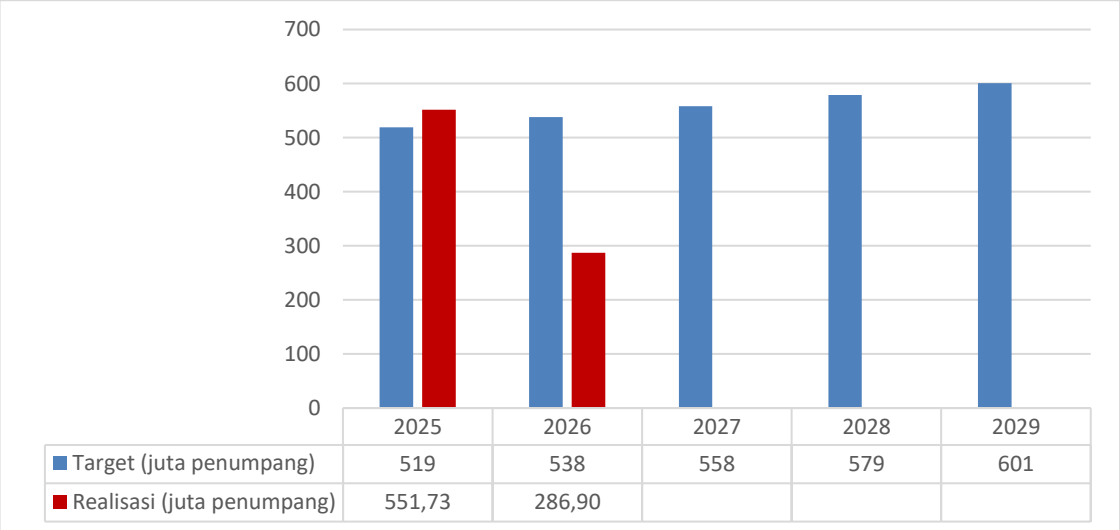
Tabel 2-39 Target Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait Transportasi Perkeretaapian

Indikator RPJMN	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	501 (2024)	519	538	558	579	601
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	685 (2023)	850* (460)**	870* (476)**	895* (493)**	925* (511)**	950* (529)**
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,86 (2024)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.880 (2023)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.937
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63 (2023)	65	66	67	68	70
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	93,85 (2023)	94	95	96	97	98
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,989 (2023)	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836

**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*
***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*

A. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api (PP1)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pengguna transportasi perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan diantaranya melalui peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan KA penumpang antar kota dan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Sampai dengan Triwulan II 2026, jumlah penumpang angkutan kereta api telah mencapai 286,90 juta penumpang atau sekitar 53,33% dari target Tahun 2026 berdasarkan RPJMN sebesar 538,00 juta penumpang. Capaian tersebut masih *on the right track* (>50%) untuk dapat mencapai target 100,00% pada Triwulan IV 2026, selain itu hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai kereta api sebagai moda transportasi utama yang aman dan nyaman.



Gambar 2- 9 Capaian RPJMN terkait Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Triwulan II 2026

Untuk mendukung capaian jumlah penumpang angkutan kereta api terdapat kegiatan pengendalian/pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang guna menjalankan fungsi regulator serta dukungan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik *(Public Service Obligation)* melalui BA BUN dan angkutan kereta api perintis. Kegiatan pendukung kinerja angkutan kereta api tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target diantaranya kebutuhan percepatan pelaksanaan kontrak penyelenggaraan Kereta Api Perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) dikarenakan saat ini masih menunggu penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Selain itu, diperlukan kepastian ketersediaan sarana perkeretaapian yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), termasuk penyediaan sarana cadangan guna menjamin keberlangsungan dan keandalan layanan perkeretaapian. Di sisi lain, terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran karena kebijakan efisiensi/pemblokiran anggaran sehingga beberapa kegiatan pendukung layanan angkutan penumpang tidak dapat dilaksanakan diantaranya kegiatan pembangunan Stasiun Cimindi, Stasiun Andir, dan Stasiun Ciroyom.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan koordinasi serta percepatan proses penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai dasar pelaksanaan kontrak penyelenggaraan Kereta Api Perintis dan *Public Service Obligation* (PSO). Selain itu, akan dilaksanakan koordinasi secara intensif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (BUPS) guna memastikan pemenuhan dan ketersediaan sarana perkeretaapian yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), termasuk penyediaan sarana cadangan untuk menjamin keberlangsungan dan keandalan pelayanan. Di sisi lain, koordinasi juga akan dilakukan dalam rangka penyusunan kebutuhan anggaran Tahun 2027, serta mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi alternatif pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha sebagai salah satu opsi pendanaan untuk mendukung peningkatan kinerja layanan perkeretaapian.



Gambar 2- 10 Layanan Kereta Api Perintis dan PSO

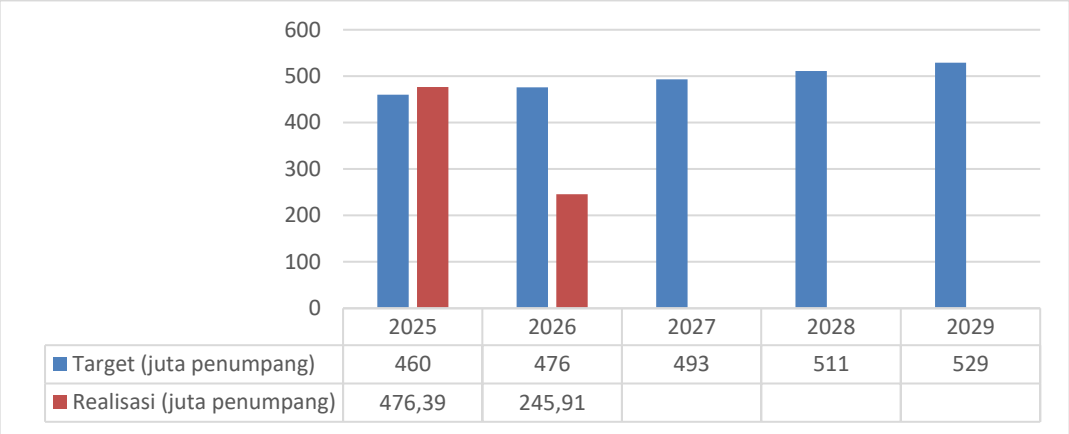
B. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di Kota Metropolitan Berbasis Rel (PP2)

Target dan capaian jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 Kota Metropolitan pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 merupakan gabungan dari angkutan perkotaan berbasis rel dan angkutan darat dengan target pada Tahun 2026 sebesar 870 juta penumpang. Dari target Tahun 2026 tersebut, jumlah untuk angkutan berbasis rel/kereta api pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 476 juta penumpang untuk 6 kota metropolitan. Adapun realisasi jumlah penumpang angkutan perkotaan berbasis rel di 6 kota metropolitan pada Triwulan II 2026 mencapai 245,91 juta penumpang atau 51,62% dari target angkutan berbasis rel/kereta api sebesar 476 juta penumpang di Tahun 2026. Rincian realisasi jumlah penumpang kereta perkotaan untuk 6 kota metropolitan pada Triwulan II 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Kereta perkotaan Jakarta (Jabodetabek) realisasi sebanyak 222.838.803 penumpang;
2. Kereta perkotaan Bandung sebanyak 10.106.910 penumpang;
3. Kereta perkotaan Medan sebanyak 2.139.243 penumpang;
4. Kereta perkotaan Surabaya sebanyak 8.528.571 penumpang;
5. Kereta perkotaan Palembang sebanyak 2.206.496 penumpang;

6. Kereta perkotaan Semarang sebanyak 88.311 penumpang.

Hal tersebut menggambarkan cukup tingginya preferensi masyarakat perkotaan terhadap transportasi massal berbasis rel yang terus perlu diperkuat dari sisi layanan, frekuensi, dan integrasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas angkutan perkotaan yang memadai dan nyaman termasuk integrasi antar moda serta dukungan subsidi keperintisan dan PSO.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (juta penumpang)	460	476	493	511	529
Realisasi (juta penumpang)	476,39	245,91			

Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di Kota Metropolitan Berbasis Rel Periode Triwulan II 2026

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja angkutan kereta api masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target diantaranya kebutuhan pelaksanaan kontrak penyelenggaraan kereta api perintis dan *Public Service Obligation* (PSO), ketersediaan sarana perkeretaapian yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) guna menjamin keberlangsungan dan keandalan layanan perkeretaapian. Di sisi lain terdapat pekerjaan pembangunan/peningkatan prasarana perkretaapian yang terkendala keterbatasan anggaran karena kebijakan efisiensi/pemblokiran anggaran, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan terus mendorong kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian di wilayah perkotaan termasuk dengan pembiayaan alternatif, diantaranya pengembangan KA perkotaan Jabodatebek (perpanjangan LRT Jakarta dan MRT Jakarta *North–South* dan *East - West*, pengembangan/peningkatan

stasiun, peningkatan fasilitas operasi, perpanjangan elektrifikasi, modernisasi sarana KRL), pengembangan KA perkotaan Bandung raya (pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Yogyakarta – Solo (perpanjangan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Surabaya (pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi), pengembangan KA perkotaan Medan (pembangunan jalur KA layang).

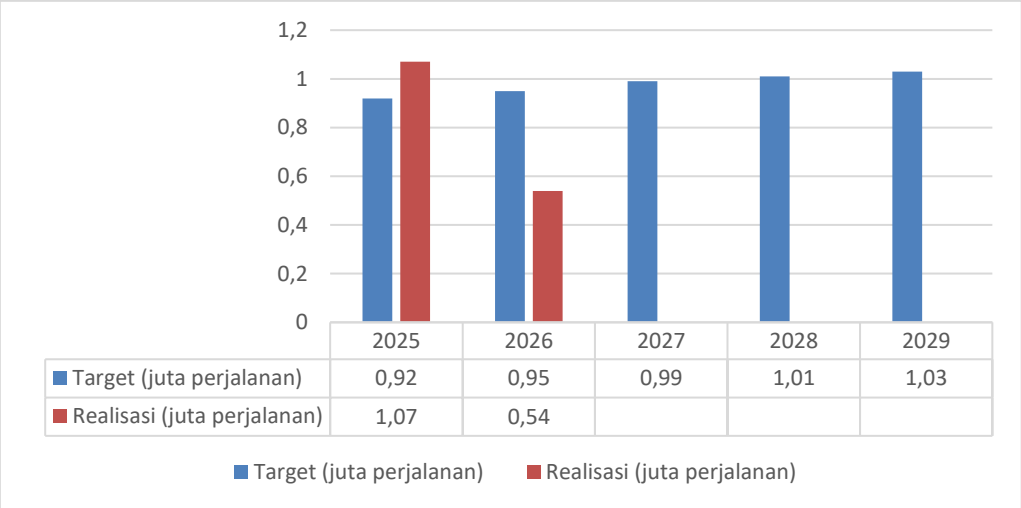
Secara rinci, dalam pelaksanaan proyek *MRT North–South* Fase 2A masih memerlukan dukungan kebijakan berupa pemberian fasilitas perpajakan, meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Masuk sesuai dengan ketentuan dalam *Loan Agreement*. Sementara itu, pelaksanaan *MRT North–South* Fase 2B masih menghadapi kendala berupa belum terpenuhinya berbagai prasyarat yang diperlukan sebelum penyusunan dan pelaksanaan *Basic Engineering Design (BED),* sehingga berpotensi memengaruhi jadwal pelaksanaan tahapan proyek berikutnya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek MRT *North–South 2B,* akan disusun kajian mengenai kapasitas fiskal dan *multiplier effect* sebagai bahan pendukung *(supporting explanation)* dalam proses pengambilan kebijakan.



Gambar 2- 12 Layanan Kereta Api Perkotaan

C. Jumlah Perjalanan Kereta Api (PP3)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat, telah diprogramkan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang disusun mempertimbangkan kondisi prasarana, sarana, dan sumber daya lainnya termasuk kebutuhan masyarakat. GAPEKA tersebut selanjutnya menjadi acuan realisasi perjalanan kereta api. Jumlah perjalanan kereta api ditargetkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026 sebesar 0,95 juta perjalanan, dan pada Triwulan II 2026 telah terealisasi perjalanan kereta api mencapai 0,54 juta perjalanan atau sebesar 56,76% dari target Tahun 2026 tersebut. Pemenuhan target jumlah perjalanan kereta api salah satunya dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat terutama di wilayah perkotaan dalam penggunaan transportasi massal kereta api serta didukung dengan pengaturan grafik perjalanan kereta api yang optimal dan dukungan kapasitas prasarana dan sarana perkeretaapian yang memadai.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (juta perjalanan)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Realisasi (juta perjalanan)	1,07	0,54			

Gambar 2- 13 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Triwulan II 2026

Upaya peningkatan jumlah perjalanan kereta api diantaranya melalui pengoperasian jalur ganda sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas lintas masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan. Salah satu lokasi yang saat ini berprogres pembangunan jalur ganda diantaranya Medan–Binjai (konstruksi jalur KA layang) dan Sepanjang – Wonokromo (perencanaan teknis). Kegiatan tersebut masih terkendala oleh pelaksanaan reviu dokumen teknis sebagai akibat perubahan dan penyesuaian desain di lapangan, serta belum tuntasnya proses pengadaan lahan. Di samping kendala pada aspek pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan perjalanan kereta api juga masih dipengaruhi oleh tingginya potensi gangguan operasional pada perlintasan sebidang serta risiko bencana alam dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan, keandalan, dan kelancaran perjalanan kereta api. Dalam rangka penanganan perlintasan sebidang diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan penyelesaian aspek teknis, administratif/aset, dan pendanaan untuk peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang.

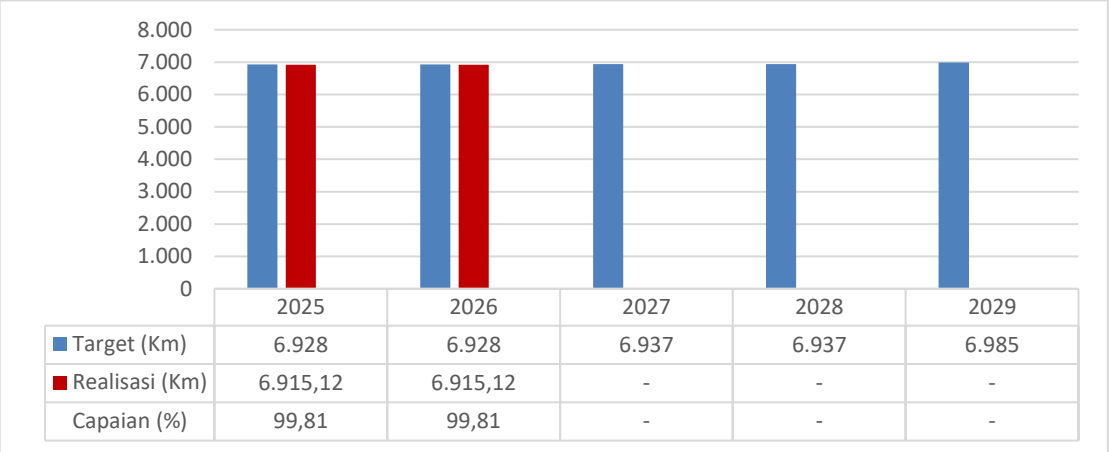


Gambar 2- 14 Pembangunan Jalur Ganda KA Layang Medan - Binjai

D. Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi (KP1)

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan konektivitas nasional sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai moda transportasi andalan baik wilayah perkotaan maupun antar kota. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029 telah ditetapkan target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada Tahun 2026

sepanjang 6.928,00 Km'sp dan realisasi sepanjang 6.915,12 Km'sp atau capaian sebesar 99,81%.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (Km)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
Realisasi (Km)	6.915,12	6.915,12	-	-	-
Capaian (%)	99,81	99,81	-	-	-

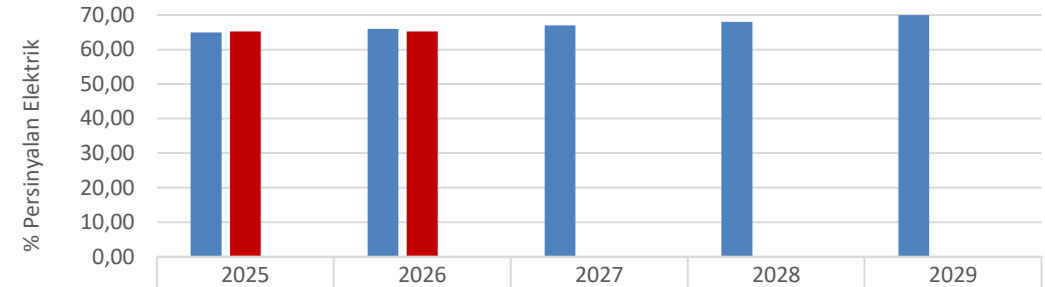
Gambar 2- 15 Capaian Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi Periode Triwulan II 2026

Pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan jalur kereta api baru/jalur ganda untuk penambahan jalur kereta api diantaranya perpanjangan LRT Jakarta dan MRT Jakarta North–South (2A dan 2B), serta pembangunan jalur KA layang Medan – Binjai. Kegiatan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan penyelesaian pekerjaan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan diantaranya keterbatasan anggaran, belum selesainya pengadaan lahan, serta kesiapan dokumen perencanaan teknis termasuk adanya perubahan dan penyesuaian desain di lapangan.

E. Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (KP2)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program peningkatan kehandalan perjalanan kereta api diantaranya dengan upaya peningkatan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan dan lebih menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta mendukung peningkatan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kinerja moda kereta api dan mendorong minat masyarakat untuk shitfing dari moda angkutan pribadi ke angkutan kereta api. Pada Tahun 2026, Indikator jalur kereta api yang menggunakan persinyalan elektrik ditargetkan sebesar

66,00% dengan baseline Tahun 2025 dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 65,21%.



	2025	2026	2027	2028	2029
Target (%)	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00
Realisasi (%)	65,21	65,21	0,00	0,00	0,00
Capaian (%)	100,32	98,80	0,00	0,00	0,00

Gambar 2-16 Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik Periode Triwulan I Tahun 2026

Untuk pemenuhan target di Tahun 2026, sedang berprogres perizinan/pemenuhan persyaratan dokumen perencanaan teknis terkait kegiatan peningkatan sistem persinyalan yang dilaksanakan oleh badan usaha/PT KAI pada 2 lokasi yaitu Lahat dan Marapi (Sumatera Selatan). Selain itu terdapat keterbatasan anggaran karena kebijakan efisiensi/pemblokiran anggaran yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan sejumlah proyek peningkatan fasilitas operasi tidak dapat dilaksanakan antara lain pembangunan jalur kereta api Tarahan–Martapura Tahap I serta Jalur Ganda Talun–Kertosono. Koordinasi akan terus dilakukan dalam rangka penyusunan kebutuhan anggaran Tahun 2027, termasuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi alternatif pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.



Gambar 2- 17 Peningkatan Persinyalan Pada Stasiun Merapi Sumatera Selatan

F. Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (KP3)

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kelancaran serta menjamin keselamatan perjalanan kereta api, diperlukan upaya peningkatan dan perawatan jalur kereta api secara berkala yang salah satu acuannya dapat menggunakan hasil penilaian *Track Quality Index (TQI).* TQI merupakan ukuran kondisi jalur kereta api (nyaman/aman/waspada/bahaya) serta kecepaatan pengoperasiannya, sehingga dapat digunakan dalam penentuan titik petak atau koridor jalan rel yang diprioritaskan untuk ditingkatkan/dirawat.

Perhitungan persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada hasil pengukuran Badan Usaha dengan supervisi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-40 Klasifikasi *Track Quality Index* (TQI)

Klasifikasi TQI	Kualifikasi			
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori I	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam
		Kondisi	:	Nyaman
	Kategori II	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam
		Kondisi	:	Aman
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori III	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam
		Kondisi	:	Waspada
	Kategori IV	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam
		Kondisi	:	Bahaya

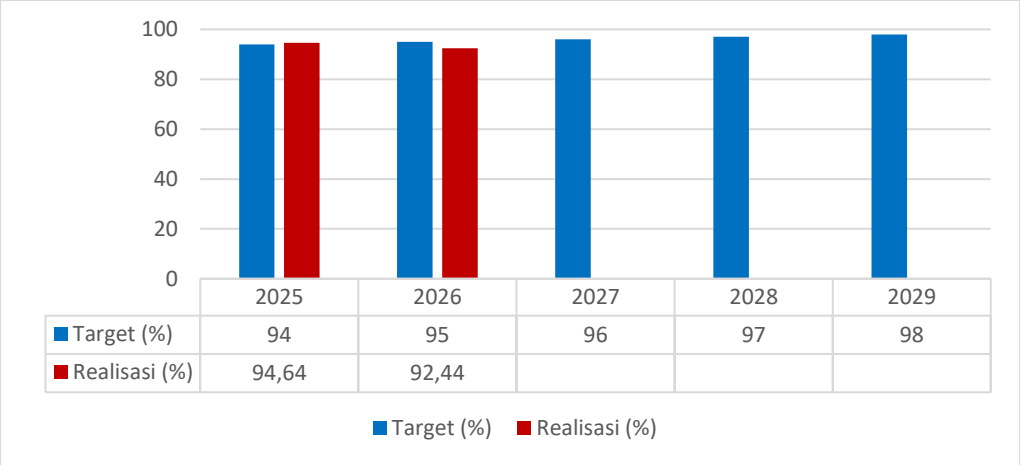
Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, kondisi jalur kereta api sesuai standar TQI Kategori 1 dan 2 ditargetkan pada Tahun 2026 sebesar 95,00%. Adapun capaian kondisi jalur kereta api sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 pada Triwulan II 2026 diperoleh sebesar 92,44% (panjang jalur 5.995,980 km dari panjang jalur terukur 5.933,836 km) atau capaian sebesar 97,30% dari target RPJMN tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan target nilai TQI, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada Wilayah BTP Kelas II Palembang pada Divre III Palembang terdapat penurunan jalur KA terukur sebesar 20,254 Km'sp dan Divre IV Tanjungkarang terdapat penurunan jalur KA terukur sebesar 15,026 Km'sp.

Terdapat perbedaan alat ukur dimana alat ukur yang digunakan adalah *accelemoter* yang di tempel pada kereta komersial bukan menggunakan kereta ukur;

2. Pada wilayah BTP Kelas I terdapat penurunan jalur KA terukur sebesar 8,965 Km'sp karena Manggarai at grade belum masuk dalam pengukuran TW I Tahun 2026;
3. Pada wilayah BTP Kelas I Medan pada Divre I Sumatera Utara terdapat penurunan jalur KA terukur sebesar 0,215 Km'sp karena terdampak genangan air.

Selain itu kegiatan IMO/pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian saat ini juga belum berkontrak dikarenakan menunggu kebijakan alokasi anggaran Tahun 2026 mengingat terdapat kebutuhan pembayaran Backlog IMO Tahun 2024 dan 2025.



Gambar 2- 18 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Periode Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan kegiatan peningkatan keandalan prasarana perkeretaapian masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran sebagai dampak dari kebijakan blokir dan efisiensi anggaran, sehingga memengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas, antara lain peningkatan dan rehabilitasi/perawatan jalur kereta api pada lintas Lampegan–Cianjur, penanganan rintang jalan dan penggantian jembatan.

Selain itu, terdapat kegiatan *Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)* pada Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api yang masih belum berkontrak. Kondisi tersebut disebabkan masih berlangsungnya pembahasan rancangan kontrak IMO Tahun Anggaran 2026 yang berjalan secara paralel dengan proses penetapan kepastian alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, masih terdapat penyelesaian kegiatan *backlog* IMO Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang perlu dituntaskan sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan program pada tahun berjalan.

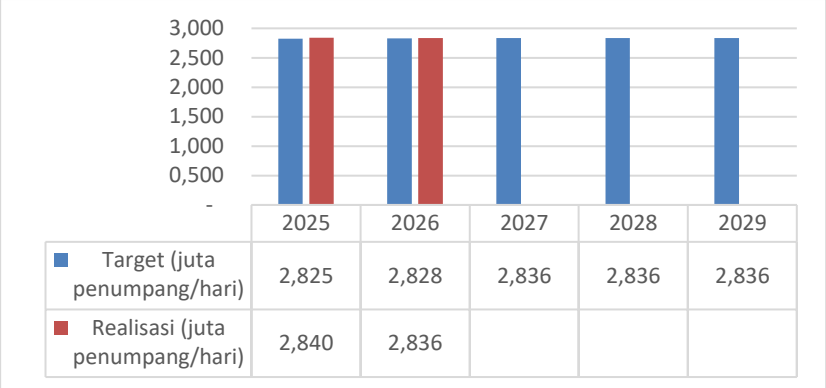
Sebagai upaya mengatasi tantangan yang dihadapi, akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan unit kerja dan pemangku kepentingan terkait untuk percepatan pelaksanaan IMO Tahun 2026 serta pengusulan kebutuhan anggaran Tahun 2027 guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai dengan prioritas program.



Gambar 2- 19 Pekerjaan perawatan prasarana perkeretaapian

G. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

Ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel diukur berupa kapasitas layanan kereta api perkotaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat (juta penumpang/hari). Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, ditargetkan ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada Tahun 2026 sebesar 2,828 juta penumpang/hari. Adapun realisasi sampai dengan Triwulan II 2026 dengan kapasitas layanan kereta api perkotaan sebanyak 2,836 juta penumpang/hari atau capaian sebesar 100,29% dari target RPJMN.



Gambar 2- 20 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Periode Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan layanan perkeretaapian perkotaan masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target pelayanan serta pengembangan jaringan perkeretaapian secara berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan ketersediaan sarana perkeretaapian, khususnya Kereta Rel Listrik (KRL), yang berdampak pada optimalisasi pelayanan dan pengembangan frekuensi perjalanan pada lintas perkotaan. Di samping itu, pengembangan sistem perkeretaapian perkotaan melalui skema investasi non-APBN, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan strategi pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan.

Selain aspek pendanaan dan penyediaan sarana, penyelenggaraan perjalanan kereta api juga masih dihadapkan pada potensi gangguan operasional yang berasal dari perlintasan sebidang serta tingginya risiko bencana alam dan cuaca ekstrem, yang dapat memengaruhi keselamatan, keandalan, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (BUPS) guna memastikan ketersediaan sarana perkeretaapian, khususnya Kereta Rel Listrik (KRL), serta evaluasi dan rekayasa pola operasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dipertahankan.

Di samping itu, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, operator perkeretaapian, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus

diperkuat dalam rangka mengurangi gangguan perjalanan kereta api khususnya di lokasi perlintasan sebidang serta upaya meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana perkeretaapian pada layanan kereta api perkotaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

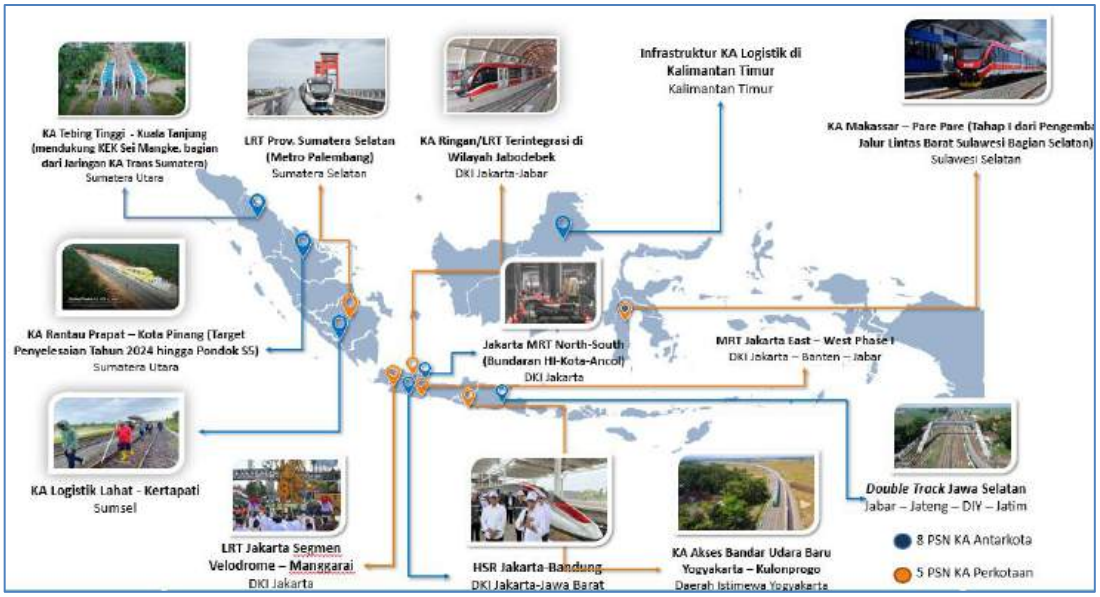
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada periode Triwulan II 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya diantaranya:

A. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, PSN bidang perkeretaapian sebanyak 13 proyek yang terdiri dari perkeretaapian antar kota sebanyak 8 proyek dan perkeretaapian perkotaan sebanyak 5 proyek sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2- 21 Proyek Strategis Nasional Bidang Perkeretaapian

Berikut uraian dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian posisi Triwulan II 2026:

1. **PSN status selesai konstruksi s.d Triwulan II 2026 dan isu/dukungan yang dibutuhkan (7 proyek)**:
   a. LRT Provinsi Sumatera Selatan (KA perkotaan, selesai pada 2018):
      - Isu sertifikasi Depo masih berprogres (7 sertifikat yang dimohonkan menunggu peta bidang yang dikeluarkan dari BPN Banyuasin guna mengajukan permohonan pelepasan hak), serta pemanfaatan aset guna pengoptimalan perolehan PNBP.

   b. KA Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (KA antar kota, selesai pada 2020):
      - Pembangunan *frontage road* belum sempurna dikarenakan terdapat lahan yang belum dibebaskan (progress 90%), sehingga terdapat beberapa pintu perlintasan belum bisa dimanfaatkan;
      - Pengadaan tanah terkendala anggaran BOPP yang tidak tersedia, dan apabila penyelesaian lahan tertunda berpotensi munculnya dampak sosial/protes Masyarakat.

   c. KA Akses Bandara Udara Baru Yogyakarta – Kulonprogo (KA antar kota, selesai pada 2021):
      - Kepemilikan Pakualaman *Ground* telah bersedia melepaskan tanahnya, namun anggaran BOBP untuk pengurusan penlok baru belum tersedia.

- Terdapat wacana penggunaan Rupiah Murni untuk pembiayaan Pakualaman *Ground,* di mana akan dikaji dahulu potensi kemampuan penganggaran di tahun 2026.

d. KA Makasar – Parepare Tahap I segmen Barru – Pangkep – Maros (KA antar kota, selesai pada 2023):
   - Pembangunan prasarana perkeretaapian antara Mandai – Palanro terkendala Penlok *Overpass* Tonasa (Kab. Pangkep)

e. LRT terintegrasi di wilayah Jabodebek (KA perkotaan, selesai pada 2023):
   - Terdapat kelanjutan proses pengadaan lahan di kelurahan Jatibening Baru, Pondok Gede dengan luas 773 m² dan kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dengan luas 7 m² (proses pembaruan Penlok). Pemprov Jawa Barat memberikan saran untuk menjadi satu luasan sebesar 780 m2, di mana menyisakan 3 bidang di bawah stasiun dan 1 bidang seluas 7 m²;
   - Dibutuhkan komitmen BPN Kota Bekasi dalam penerbitan surat rekomendasi, dan perpanjangan penlok.

f. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung (KA antar kota, selesai pada 2023):
   - Saat ini masih berlangsung proses penlok, penyusunan dokumen perencanaan (andalalin, desain, amdal dll), perizinan dan pengadaan tanah di Jawa Barat untuk mendukung peningkatan akses di Stasiun Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

g. KA Logistik Lahat-Kertapati (KA antar kota, *double track* selesai pada Tahun 2025):
   - Dukungan perizinan kepelabuhanan oleh PT KAI terkait pembangunan coal terminal unloading system di area stasiun Kramasan.

2. PSN status *on progres* s.d. Triwulan II 2026 (4 proyek):

Tabel 2-41 Proyek Strategis Nasional Status *On Progress*

No	Kegiatan	Status
1	KA Rantau Prapat – Kota Pinang	Konstruksi segmen Rantauprapat - Pondok S5 telah selesai 100%, saat ini dalam proses tindak lanjut hasil pengujian/persiapan pengoperasian. Untuk segmen Pondok S5 – Kota Pinang masih dalam proses pengadaan lahan (progres 93%)
2	*Double Track* Selatan Jawa	Pembangunan *Double Track Selatan Jawa* dibagi menjadi beberapa segmen pekerjaan dengan progres saat ini pembangunan segmen Cirebon-Sepanjang 100%, Bogor-Sukabumi 100%, Kiaracondong-Cicalengka 100%, segmen Sepanjang-Wonokromo masih tahap penyiapan *readiness criteria*/perencanaan teknis dan penyiapan lahan
3	LRT Velodrome-Manggarai	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome - Manggarai dengan progres fisik sebesar 93,741% dan ditargetkan beroperasi pada Tahun 2026
4	Jakarta MRT *North-South Phase 2*	• **Fase 2A**: 61,80% (segmen 1 BHI – Monas 82,03%, Segmen 2 Harmoni – Kota 53,59%). Target *commercial operation* pada Desember 2027 serta segmen II (*partial and full operation*) pada Tahun 2030. • **Fase 2B:** o MRT FASE 2B masih dalam tahapan pemenuhan prasyarat ke tahapan *Basic Engineering Study;* o Dengan adanya kebijakan fiskal Pemprov DKI, maka layanan operasional MRT North – South hanya melayani Lebak Bulus hingga kota dan apabila kondisi fiskal memungkinkan akan membuka penjajakan untuk Depo di area Ancol.

3. PSN status belum mulai/persiapan s.d. Triwulan II 2026 (2 proyek):

Tabel 2- 42 Proyek Strategis Nasional Status Persiapan

No	Kegiatan	Status
1	MRT Jakarta *East-West Phase* I	• Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan Lokasi; • Pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN; • Dibutuhkan kesepahaman bersama terkait penyusunan DPPT oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan BPN Kanwil Jawa Barat dalam rangka percepatan revisi pembaruan DPPT; • Diperlukan pembaruan data Gambaran Umum Status Tanah (GUST), dokumen Peraturan Teknis

No	Kegiatan	Status
		dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) terkait dengan adanya revisi pembaruan DPPT, di mana telah disampaikan surat permohonan ke Kementerian ATR/BPN.
2	Infrastruktur KA Logistik di Kalimantan Timur	• PT Bayan Laju Trans Kalimantan masih berprogres penyusunan studi kelayakan/perencanaan teknis, serta telah dilaksanakan audiensi dengan PT Bayan Laju Trans Kalimantan perihal persyaratan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

B. PROGRAM PRIORITAS PANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN

Untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional menuju Asta Cita Presiden, upaya pengendalian dan pengelolaan isu strategis terhadap program prioritas tersebut menjadi tugas dari Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai *delivery assurance agency*. Pada Tahun 2026, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemantauan sebanyak 30 rencana aksi dimana 3 rencana aksi yang menjadi pantauan Kantor Staf Presiden terkait sub sektor perkeretaapian. Berikut diuraikan program prioritas pantauan Kantor Staf Presiden terkait sub sektor perkeretaapian sampai dengan Triwulan II 2026:

1. Pembangunan jalur kereta api antara Medan-Binjai (jalur kereta api layang), dengan skema pembiayaan MYC 2022 – 2026 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 85,89% atau capaian sebesar 99,87% dari target Bulan Juni (B06) sebesar 86%. Kegiatan terkendala kesiapan lahan yang terlambat/masih berproses di lokasi Stasiun Sunggal dan Stasiun Helvetia serta juga membutuhkan dukungan anggaran BOPP untuk pengadaan dan penertiban lahan. Selain itu perlunya penyelesaian proses audit *cost overrun* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi persyaratan dalam pengajuan penambahan anggaran.
2. Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara Tahap III, dengan skema pembiayaan MYC 2023 – 2027 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 15,02% atau capaian sebesar 100,01% dari target Bulan Juni (B06) sebesar 15%. Saat ini masih terdapat 2 paket pekerjaan yang masih dalam proses persiapan/lelang (1 paket pekerjaan bangunan, *track*, dan fasop serta 1 paket konsultan MK

lanjutan). Pekerjaan Gedung Stasiun, Track, dan fasop belum tender/lelang dikarenakan masih berproses reviu desain oleh konsultan MK.

3. Pembangunan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian kereta api Makassar – Parepare antara Mandai – Palanro, dengan skema pembiayaan MYC 2022 – 2026 dan progres fisik kumulatif sampai dengan Triwulan II 2026 sebesar 96,40% atau capaian sebesar 100% dari target Bulan Juni (B06) sebesar 97%. Kegiatan masih terkendala proses penetapan lokasi pada pembangunan *overpass* Tonasa (Kabupaten Pangkep) sehingga mempengaruhi terhadap progres pembangunan.

C. PROGRAM PADAT KARYA

Program padat karya merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan melibatkan tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur transportasi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja guna mengurangi angka kemiskinan. Pada Tahun 2026, program padat karya tunai (*cash for work*) Kementerian Perhubungan merupakan salah satu program strategis sebagai pendukung paket kebijakan ekonomi dan program akselerasi penyerapan tenaga kerja. Kementerian Perhubungan diminta untuk melakukan akselerasi program padat karya tersebut yang dilakukan monitoring oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Kementerian Keuangan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Selain itu, Kementerian Perhubungan juga melakukan langkah pemadanan data pekerja padat karya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat guna penyerapan kegiatan padat karya lebih tepat kepada masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program tersebut dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan tidak memerlukan keahlian khusus/*unskill* pada kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian dan kegiatan pendukung lainnya. Adapun jenis kegiatan padat karya yang dilaksanakan meliputi:

1. Pekerjaan persiapan/pra konstruksi prasarana perkeretaapian;

2. Pekerjaan konstruksi prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan serta fasilitas operasi);
3. Pekerjaan pasca konstruksi prasarana perkeretaapian;
4. Pekerjaan pendukung lainnya (*security/safetyman*/penjaga malam/penjaga semboyan/keamanan lokasi kerja, juru masak/kebersihan kantor, kegiatan pendukung pengukuran/survei dan lainnya yang tidak perlu keahlian khusus).

Pada Tahun 2026, program padat karya dilaksanakan pada kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian serta kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api yang tersebar di 5 wilayah Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota. Pada Triwulan II terdapat penyesuaian target program padat karya dikarenakan adanya kebijakan penajaman/blokir anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian dan pendukung lainnya. Adapun target besaran upah untuk didistribusi pada Tahun 2026 adalah Rp4.088.273.100,00 dengan pelibatan tenaga kerja orang sebanyak 21 orang atau 31.557 orang hari.

Tabel 2- 43 Target Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target Padat Karya Awal			Target Padat Karya Pasca Penajaman Anggaran		
		Biaya Upah (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Tenaga Kerja (OH)	Biaya Upah (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Tenaga Kerja (OH)
1.	BTP Kelas I Jakarta	107.986.125	10	490	107.986.125	10	490
2.	BTP Kelas I Bandung	60.200.000	7	602	60.200.000	7	602
3.	BTP Kelas I Semarang	72.000.000	3	720	0	0	0
4.	BTP Kelas I Medan	2.975.399.400	143	23.535	2.975.399.400	143	23.535
5.	BTP Kelas II Padang	525.187.575	111	3.330	525.187.575	111	3.330
6.	BPKA Sulawesi Selatan	419.500.000	20	3.600	419.500.000	20	3.600
Jumlah		**4.160.273.100**	**294**	**32.277**	**4.088.273.100**	**291**	**31.557**

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat realisasi program padat karya dengan upah sebesar Rp4.616.201.475,00 (112,91%) dan tenaga kerja sebanyak 320 Orang (109,97%) atau 31.599 OH (100,13%). Capaian program padat karya pada Triwulan II mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan adanya pelibatan masyarakat/pekerja padat karya untuk mendukung program keselamatan perkeretaapian pada perlintasan sebidang pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapiaan Kelas II Padang. Program padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan kegiatan pendukung pembangunan/peningkatan prasarana dan kegiatan lainnya untuk

itu untuk meningkatkan progres maka perlu juga dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian.

D. PROGRAM STIMULUS DISKON TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API

Stimulus pertumbuhan ekonomi sektor transportasi melalui diskon tarif angkutan penumpang kereta api diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan daya beli dan minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api;
2. Mendorong peningkatan mobilitas orang yang berdampak pada penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata;
3. Mengoptimalkan tingkat okupansi dan pemanfaatan kapasitas angkutan kereta api; dan
4. Mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kinerja sektor transportasi.

Pada Triwulan II 2026 diselenggarakan satu kali program stimulus diskon tarif angkutan penumpang kereta api yaitu pada masa Libur Sekolah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada periode tanggal 6 Juni 2026 s.d. 5 Juli 2026 dengan rincian:

1. Alokasi anggaran sebesar Rp96.218.624.000,00;
2. Jumlah perjalanan kereta api sebanyak 176 KA yang terdiri dari 150 KA reguler dan 26 KA tambahan;
3. Besaran diskon 30% untuk seluruh kereta api ekonomi non penugasan (non PSO/non perintis);
4. Kapasitas sebanyak 1.174.624 seat dengan realisasi penumpang sebanyak 1.303.191 penumpang atau capaian sebesar 110,95%; dan
5. Realisasi diskon tarif angkutan penumpang kereta api sebesar Rp90.956.933.000,00.

E. PERESMIAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN

Pada tanggal 22 Juni 2026, telah dilaksanakan peresmian Stasiun *Jakarta International Stadium (JIS)* oleh Menteri Perhubungan bersama Gubernur Gubernur DKI Jakarta serta pihak terkait lainnya (Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, PT KAI dan stakeholder lainya). Peresmian ini dilaksanakan sebagai rangkaian acara HUT DKI Jakarta dan telah selesainya tahapan pembangunan stasiun penumpang tahap awal Kawasan *Jakarta International Stadium (JIS).* Stasiun *Jakarta International Stadium (JIS)* merupakan penghubung angkutan kereta api dengan kawasan *Jakarta International Stadium (JIS)* melalui jalur pedestrian sepanjang 300 meter dan lebar 6,6 meter, serta jembatan sepanjang 400 meter menuju kawasan Ancol.

Skema kerjasama dilakukan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian konsesi termasuk perjanjian penggunaan BMN berupa tanah untuk pembangunan Prasarana perkeretaapian Stasiun *Jakarta International Stadium (JIS)*. Pembangunan Stasiun *Jakarta International Stadium (JIS)* mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang nyaman, aman, dan berdaya saing serta melibatkan *stakeholder* lain dalam proses pengembangan prasarana perkeretaapian.



Gambar 2-22 Peresmian Stasiun *Jakarta International Stadium (JIS)*

2.5 REALISASI ANGGARAN

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebesar Rp5.481.958.278.000,00 sedangkan untuk posisi akhir Triwulan II Tahun 2026 terdapat perubahan jumlah anggaran menjadi sebesar Rp4.947.378.786.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dukungan alokasi Direktif Presiden sebesar Rp255.772.535.000,00 pada tanggal 25 Desember 2025 ***(tidak merubah pagu)**;*

2. Blokir anggaran IV.A DIPA sebesar Rp1.316.190.132.000,00 ***(tidak merubah pagu);***
3. Penambahan Saldo Awal BLU Rp5.709.744.000 pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada tanggal 3 Februari 2026 ***(menambah pagu);***
4. Pembukaan blokir kode 2 pada catatan halaman IV.A DIPA sebesar Rp1.399.000.000,00 pada tanggal 25 Februari 2026 ***(tidak merubah pagu);***
5. Lanjutan pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sumber dana SBSN TA 2025 (luncuran) sebesar Rp1.012.355.237.459,00 ***(menambah pagu);***
6. Realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,00 ***(mengurangi pagu);***
7. Pergeseran anggaran antar satker bersumber dana rupiah murni untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak sebesar Rp132.143.995.000,00 ***(menambah pagu);***
8. Pergeseran antar Program antar Unit Eselon I untuk pemenuhan Belanja Pegawai Setjen sebesar Rp31.248.161.000,00 ***(mengurangi pagu);***
9. Penambahan pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp29.727.104.000,00 ***(menambah pagu).***

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026 diperoleh sebesar Rp566.383.098.807 (11,45% dari pagu total atau 11,47% dari pagu efektif), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 44 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2026

No	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1	Belanja Pegawai	206.957.690.000	294.168.136.000	-	294.168.136.000	160.442.442.132	54,54	133.725.693.868	45,46
2	Belanja Barang	3.413.673.100.000	3.218.209.506.000	7.495.172.000	3.210.714.334.000	277.188.910.720	8,63	2.933.525.423.280	91,37
3	Belanja Modal	543.153.631.000	1.435.001.144.000	1.476.009.000	1.433.525.135.000	128.751.745.955	8,98	1.304.773.389.045	91,02
Total		**4.163.784.421.000**	**4.947.378.786.000**	**8.971.181.000**	**4.938.407.605.000**	**566.383.098.807**	**11,47**	**4.372.024.506.193**	**88,53**

Tabel 2- 45 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1.	**Program infrastruktur konektivitas**	**3.517.273.369.000**	**4.270.221.602.000**	**818.675.000**	**4.269.402.927.000**	**294.067.466.097**	**6,89**	**3.975.335.460.903**	**93,11**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	377.937.809.000	1.368.735.202.000	-	1.368.735.202.000	182.073.997.753	13,30	1.186.661.204.247	86,70
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	579.390.083.000	-	-	778.915.920.000	71.103.362.990	9,13	707.812.557.010	90,87
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.526.501.421.000	2.083.174.288.000	576.283.000	2.082.598.005.000	36.575.302.465	1,76	2.046.022.702.535	98,24

No	Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	33.444.056.000	39.396.192.000	242.392.000	39.153.800.000	4.314.802.889	11,02	34.838.997.111	88,98
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**646.511.052.000**	**677.157.184.000**	**8.152.506.000**	**669.004.678.000**	**272.315.632.710**	**40,70**	**396.689.045.290**	**59,30**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	26.294.617.000	21.387.706.000	-	21.387.706.000	6.827.576.815	31,92	14.560.129.185	68,08
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	582.883.956.000	628.811.927.000	7.919.706.000	620.892.221.000	259.949.524.553	41,87	360.942.696.447	58,13
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	23.908.087.000	15.856.196.000	232.800.000	15.623.396.000	1.996.102.958	12,78	13.627.293.042	87,22
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.197.555.000	10.393.157.000	-	10.393.157.000	3.344.790.460	32,18	7.048.366.540	67,82

No	Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Terhadap Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	1.226.837.000	708.198.000	-	708.198.000	197.637.924	27,91	510.560.076	72,09
TOTAL		**4.163.784.421.000**	**4.947.378.786.000**	**8.971.181.000**	**4.938.407.605.000**	**566.383.098.807**	**11,47**	**4.372.024.506.193**	**88,53**

Tabel 2- 46 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	433.076.452.000	1.368.735.202.000		1.368.735.202.000	182.073.997.753	13,31
Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	1.343.052.057.000	778.915.920.000		778.915.920.000	71.103.362.990	9,13
	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api						
	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api						
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	2.903.424.455.000	2.122.570.480.000	818.675.000	2.121.751.805.000	40.890.105.354	1,93

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2026	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	802.405.314.000	677.157.184.000	8.152.506.000	669.004.678.000	272.315.632.710	40,70
Jumlah		**5.481.958.278.000**	**4.947.378.786.000**	**8.971.181.000**	**4.938.407.605.000**	**566.383.098.807**	**11,47**

2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp616.621.864.829 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.338.269.645.000,00 maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 46,076%. Rincian realisasi PNBP periode Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 47 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**		**1.097.243.054.000**	**89.529.105.724**	**8,159**
	a.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.302.744.000	270.099.768	11,729
	b.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3.883.450.000	1.352.240.000	34,821
	c.	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.087.623.104.000	413.428.556.350	38,012
	d.	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	3.433.756.000	1.626.168.000	47,358
2	**Pendapatan BLU**		**97.654.591.000**	**35.223.314.464**	**36,069**
	a.	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	85.450.717.000	33.324.114.376	38,998
	b.	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.978.500.000	373.842.000	3,746
	c.	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.100.000.000	886.431.086	80,585
	d.	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000	138.050.000	12,267
	e.	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.000.000	-
	f.	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	390.018.000	-
	g.	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
	h.	Pendapatan Lain-Lain BLU	-	108.859.002	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**		**143.372.000.000**	**164.721.486.247**	**114,891**
	a.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	28.749.000	-
	b.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.411.642.000	-
	c.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	114.448.000.000	4.101.996.785	3,584
	d.	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.924.000.000	104.318.000	0,361
	e.	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	3.303.974.383	-
	f.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	13.075.356.638	-
	g.	Pendapatan Denda Lainnya	-	14.260.962	-

No	Jenis Pendapatan		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	h.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	131.830.365.450	-
	i.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.901.282.850	-
	j.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.949.540.179	-
	k.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah			**1.338.269.645.000**	**616.621.864.829**	**46,076**

2.6 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.6.1 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2.528 pegawai yang terdiri dari 1.701 PNS, 127 CPNS, 652 PPPK dan 48 PPPK Paruh Waktu yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan Direktorat Teknis) dan pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK), diperoleh kebutuhan penambahan pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 1.520 pegawai. Untuk itu, jumlah kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Tahun 2029 sesuai ABK adalah sebanyak 4.052 pegawai.

Selain itu, juga diperoleh perhitungan Output Aktual dibandingkan dengan Target Output untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 dari aplikasi MyIntress Kemenkeu sebesar 98,260%. Berdasarkan uraian data di atas, maka diperoleh nilai efisiensi SDM sebesar 61,339% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ Aktual}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Efisiensi SDM = $(\frac{2.528}{4.052}$ x 0,983) x 100%

Efisiensi SDM = (0,624 x 0,983) x 100% = **61,339%**

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM	Rasio Output*	Efieiensi SDM (Rasio SDM x Rasio *Output*)
2.528	4.052	0,624	0,983	61,339

*) *Rasio Output Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 diperoleh dari Aplikasi MyIntress*

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja, data kinerja pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026) telah dijadikan dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2026 antara lain:

1. Dalam pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II diperoleh jumlah mutasi sebanyak 32 pegawai (13 pegawai diantaranya mutasi ke Setditjen Perkeretaapian) dengan rincian 26 pegawai mutasi melalui program redistribusi pegawai (*talent pool*) dan 6 pegawai mutasi dengan beberapa pertimbangan yaitu pemenuhan organisasi, pembinaan pegawai, serta alasan pribadi;
2. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang kepegawaian (SDM Aparatur) sebanyak 2 pegawai yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) sebanyak 30 pegawai yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pada pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang hukum (Perancang Peraturan Perundangan) sebanyak 1 pegawai yang dilakukan dalam rangka

peningkatan kompetensi profesional dan memastikan pemenuhan standar kompetensi jabatan guna mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai ketentuan;

5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian (Auditor, Inspektur, Penguji) yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Telah disusun Rancangan Keputusan Menteri Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Nomor UM.207/6/18/STJ/2026 tanggal 28 April 2026;
7. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji bagi PNS yang belum pernah mengucapkan sumpah/janji dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 18 Juni 2026.

2.6.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, terdapat 2 pendekatan perhitungan analisis efisiensi anggaran yaitu pendekatan pertama berupa perbandingan capaian sasaran/indikator kinerja program dengan realisasi anggaran yang disandingkan dengan Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Triwulan II 2026, sedangkan pendekatan kedua mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 berupa perbandingan realisasi anggaran dengan capaian rincian output (CRO).

Pada pendekatan pertama, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran (0,00%) dikarenakan beberapa target indikator kinerja program periode Triwulan II 2026 tidak tercapai 100% (IKP1, IKP3, IKP5, IKP6) serta beberapa realisasi anggaran berdasarkan sasaran/indikator kinerja program telah melebihi Rencana Penyerapan Dana (RPD) yang ditargetkan pada Triwulan II 2026.

Pada pendekatan kedua yang menggunakan Capaian Rincian Output (CRO) periode Triwulan II 2026, diperoleh dari kompilasi capaian rincian output dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar 14,617% atau Rp738.652.735.976,00.

Perolehan efisiensi anggaran periode Triwulan II 2026 terhadap indikator kinerja program dan rincian output yang tercapai sebagaimana secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2-48 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Triwulan II			Keuangan Triwulan II					Keterangan
			Target Triwulan II 2026	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Total	RPD Triwulan II	Realisasi	% Penyerapan	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9) / (8)	(11) = (8) - (9)	(12)
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,458	99,565	1.368.735.202.000	195.592.260.366	182.073.997.753	93,09	-	Pada Sasaran Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
2	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	96,015	101,335	778.915.920.000	111.307.084.968	71.103.362.990	63,88	-	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan, terdapat 1 IKP yang tidak mencapai target (Persentase *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api) sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
3	IKP3 Persentase *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api	%	97,770	97,401	99,623						
4	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	27,747	29,178	105,157						
5	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	98,702	98,702	2.121.751.805.000	303.198.332.935	40.890.105.354	13,49	-	Pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Konektivitas, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,610	23,331	107,964	669.004.678.000	95.600.768.486	272.315.632.710	284,85	-	Pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pemerintahan target kinerja tercapai namun penyerapan anggaran melebihi RPD sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
Jumlah						**4.938.407.605.000**	**705.698.446.755**	**566.383.098.807**	**80,26**	**-**	**Tidak ada efisiensi di Triwulan II 2026**

Tabel 2- 49 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Capaian Rincian Output Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	ABF	Kebijakan Perencanaan	1	0	40,00%	9.420.517.000		9.420.517.000	1.724.152.289	3.768.206.800	2.044.054.511
2	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	CAN	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	40,00%	1.000.000		1.000.000	-	400.000	400.000
3	Setditjen Perkeretaapian	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	1	0	49,98%	1.055.285.000		1.055.285.000	342.500.752	527.431.443	184.930.691
4	Setditjen Perkeretaapian	WA	4604	EBA	Layanan Hukum	1	0	49,98%	708.198.000		708.198.000	197.637.924	353.957.360	156.319.436
5	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Hukum	1	0	71,65%	403.120.000		403.120.000	271.933.840	288.835.480	16.901.640
6	Setditjen Perkeretaapian	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	49,98%	8.062.433.000		8.062.433.000	2.633.124.911	4.029.604.013	1.396.479.102
7	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	8.453.260.000		8.453.260.000	2.667.736.099	4.224.939.348	1.557.203.249
8	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	EBA	Layanan Data dan Informasi	1	0	49,98%	268.964.000		268.964.000	80.017.044	134.428.207	54.411.163
9	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	86,66%	109.969.122.000		109.969.122.000	59.299.885.264	95.299.241.125	35.999.355.861
10	Setditjen Perkeretaapian	WA	4600	EBC	Layanan SDM	1045	0	40,00%	2.376.082.000		2.376.082.000	540.927.208	950.432.800	409.505.592
11	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	3.603.399.000		3.603.399.000	1.218.553.448	1.800.978.820	582.425.372
12	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	50,65%	10.138.303.000		10.138.303.000	3.251.042.672	5.135.050.470	1.884.007.798
13	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	40,00%	11.774.596.000		11.774.596.000	732.301.966	4.709.838.400	3.977.536.434
14	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	40,00%	11.774.596.000		11.774.596.000	732.301.966	4.709.838.400	3.977.536.434
15	Dit. LLAKA	GA	4641	ABF	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	15	0	11,99%	8.671.189.000		8.671.189.000	1.039.169.000	1.039.675.561	506.561
16	Dit. LLAKA	GA	4641	BAH	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	1	0	70,59%	18.636.000.000		18.636.000.000	13.117.760.663	13.155.152.400	37.391.737
17	Dit. LLAKA	GA	4641	BAH	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	2	0	57,55%	124.610.619.000		124.610.619.000	1.364.866.660	71.713.411.235	70.348.544.575
18	Dit. LLAKA	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	33,75%	4.529.592.000		4.529.592.000	1.523.794.000	1.528.737.300	4.943.300
19	Dit. LLAKA	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	33,75%	4.529.592.000		4.529.592.000	1.523.794.000	1.528.737.300	4.943.300
20	Dit. LLAKA	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	33,31%	4.200.000.000		4.200.000.000	1.398.751.000	1.399.020.000	269.000
21	Dit. LLAKA	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	33,31%	4.200.000.000		4.200.000.000	1.398.751.000	1.399.020.000	269.000
22	Dit. LLAKA	WA	4602	BMA	Pengelolaan Data dan Informasi	1	0	8,91%	1.089.623.000		1.089.623.000	94.816.200	97.085.409	2.269.209
23	Dit. LLAKA	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	84,37%	109.697.000		109.697.000	92.535.624	92.551.359	15.735
24	Dit. LLAKA	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	30,14%	1.130.760.000		1.130.760.000	340.754.508	340.811.064	56.556
25	Dit. LLAKA	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	55,70%	2.147.279.000		2.147.279.000	1.195.899.519	1.196.034.403	134.884
26	Dit. LLAKA	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	15,06%	24.392.404.000		24.392.404.000	3.672.092.134	3.673.496.042	1.403.908
27	Dit. LLAKA	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	35,27%	184.628.000		184.628.000	65.091.184	65.118.296	27.112
28	Dit. LLAKA	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	1,20%	60.657.000		60.657.000	-	727.884	727.884
29	Dit. LLAKA	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	1,20%	60.657.000		60.657.000	-	727.884	727.884
30	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4643	ABF	Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1	0	3,00%	9.648.976.000		9.648.976.000	-	289.469.280	289.469.280

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
200	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	1	83,50%	541.449.000		541.449.000	202.949.977	452.109.915	249.159.938
201	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	2	0	38,91%	395.425.000		395.425.000	153.830.747	153.859.868	29.120
202	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	BAH	Perintis Perkeretaapian	1	0	0,00%	412.670.000		412.670.000	-	-	-
203	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4643	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	40,00%	3.618.207.000		3.618.207.000	645.602.578	1.447.282.800	801.680.222
204	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	4	0	40,00%	7.772.877.000		7.772.877.000	1.699.143.720	3.109.150.800	1.410.007.080
205	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	40,00%	1.828.485.000		1.828.485.000	404.837.000	731.394.000	326.557.000
206	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	40,00%	1.828.485.000		1.828.485.000	404.837.000	731.394.000	326.557.000
207	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	5	0	40,00%	7.692.726.000		7.692.726.000	385.996.005	3.077.090.400	2.691.094.395
208	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	5	0	40,00%	7.692.726.000		7.692.726.000	385.996.005	3.077.090.400	2.691.094.395
209	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	QAH	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	1	0	49,80%	80.505.992.000		80.505.992.000	12.787.745.974	40.091.984.016	27.304.238.042
210	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4643	RBA	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)	60	15	25,00%	252.064.000.000		252.064.000.000	60.956.679.273	63.016.000.000	2.059.320.727
211	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro	1	0	33,00%	38.329.735.000		38.329.735.000	-	12.648.812.550	12.648.812.550
212	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Lintas Makassar - Parepare Tahap I	1	0	40,00%	70.779.756.000		70.779.756.000	2.575.267.323	28.311.902.400	25.736.635.077
213	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Peningkatan Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi Lintas Mandai - Garongkong termasuk Supervisi	1	0	81,33%	1.233.855.000		1.233.855.000	1.003.417.513	1.003.494.272	76.759
214	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45	0	59,35%	593.371.000		593.371.000	352.179.218	352.165.689	(13.530)
215	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Hukum	1	0	49,98%	12.000.000		12.000.000	-	5.997.600	5.997.600
216	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	55,99%	226.518.000		226.518.000	126.830.350	126.827.428	(2.922)
217	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	10.327.839.000		10.327.839.000	2.826.997.586	5.161.853.932	2.334.856.346
218	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	231.000.000		231.000.000	-	115.453.800	115.453.800
219	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	49,98%	23.532.732.000		23.532.732.000	11.237.099.763	11.761.659.454	524.559.691
220	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	986.217.000		986.217.000	350.260.758	492.911.257	142.650.499
221	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	49,98%	123.577.000		123.577.000	26.183.000	61.763.785	35.580.785
222	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	20.049.000		20.049.000	5.250.000	10.020.490	4.770.490
223	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	20.049.000		20.049.000	5.250.000	10.020.490	4.770.490
Jumlah								**36,365%**	**5.053.495.963.000**	**-**	**5.053.495.963.000**	**581.518.825.699**	**1.320.171.561.675**	**738.652.735.976**

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	▪ Lanjutan mempersiapkan kajian perencanaan teknis untuk persiapan penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam;	▪ Terdapat 3 kegiatan kajian teknis penanganan bencana Sumatera yang dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana progres saat ini telah dilakukan kontrak pada tanggal 3 Juli 2026. Selain itu, telah diusulkan penambahan anggaran dalam penanganan bencana alam sesuai Surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 hal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan TA 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
	▪ Melaksanakan kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dilengkapi reviu masterplan pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah yang saat ini masih dalam proses pelelangan;	▪ Telah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dilengkapi reviu masterplan pengembangan perkeretaapian pada bulan Juni 2026.
	▪ Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026.	▪ Revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 yang terdampak Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026 khususnya kegiatan kajian perencanaan teknis dan persiapan rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam, penetapan lokasi dan pengadaan lahan mendukung konektivitas perkeretaapian pada beberapa lokasi (Pondok S5 – Kota Pinang, MRT Jakarta East-West Phase I, Makassar – Parepare, lokasi lainnya);	▪ Saat ini telah dilakukan beberapa penyesuaian diantaranya melalui Pengesahan Revisi Anggaran sesuai SPRA Nomor: S-197/AG/AG.3/2026 tanggal 21 April 2026, Pengesahan Revisi Anggaran sesuai SPRA Nomor: S-314/AG/AG.3/2026 tanggal 20 Mei 2026 dan Pengesahan Revisi Anggaran sesuai SPRA Nomor: S-384/AG/AG.3/2026 tanggal 20 Juni 2026.
	▪ Pada Tahun 2026 direncanakan pembangunan jalan akses stasiun lintas Makassar - Parepare tahap I guna mempermudah penumpang KA menjangkau stasiun yang saat ini masih dalam tahap persiapan/pelelangan.	▪ Saat ini pekerjaan pembangunan jalan akses pada 3 stasiun pada lintas KA Makassar-Parepare yaitu Stasiun Labakkang, Stasiun Ma'rang dan Stasiun Tanete Rilau telah berkontrak.
IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	▪ Koordinasi melibatkan *stakeholder*/pengguna jasa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Tahun 2025 dan mempersiapkan upaya peningkatan layanan pada Tahun 2026;	▪ Telah dilaksanakan pembahasan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) antara PPTB dan Balai Pengujian Perkeretaapian pada 3-4 Juni 2026. ▪ Telah dilakukan rapat Penyampaian Laporan Pendahuluan dan Progres Pekerjaan Pengelolaan/*Managed Service* Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai platform pengajuan perizinan dan sertifikasi pada tanggal 9 Juli 2026 yang juga mengundang Badan Usaha Operator Perkeretaapian.
	▪ Tindak lanjut pengaduan terkait perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui OSS BPKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	▪ Sedang dikembangkan fitur pengaduan pada Portal Layanan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga memudahkan pemantauan terhadap pengaduan yang disampaikan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Upaya penambahan jumlah responden pengguna jasa dengan perluasan pelaksanaan survei serta memastikan survei dilakukan rutin setiap bulan dengan jumlah responden yang memadai;	▪ Selama periode Triwulan II Tahun 2026 terdapat 2.681 responden yang melakukan pengisian kuesioner meningkat jika dibandingkan dengan jumlah responden selama Triwulan I Tahun 2026 yaitu 2.284 responden.
	▪ Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026.	▪ Revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.
	▪ Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps.	▪ Telah dilakukan pembahasan Laporan Pendahuluan dan Progres Pekerjaan Pengembangan Modul *Data warehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 10 Juni 2026 dan Penyampaian Laporan Pendahuluan dan Progres Pekerjaan Pengelolaan/*Managed Service* Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 9 Juli 2026.
	▪ Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan program dan anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 yang terdampak Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026 khususnya yang mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;	▪ Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian yaitu 2 dari 12 pekerjaan pengembangan Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	▪ Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan terutama yang secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat/pengguna jasa (misalnya narahubung layanan perizinan, petugas yang berada di stasiun/kereta);	▪ Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan pembinaan kepada petugas pelayanan khususnya oleh BPKA Sulsel pada tanggal 22-25 Juni 2026 guna memastikan pelayanan dilakukan sesuai dengan standar proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan.
	▪ Mempersiapkan pengembangan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum (Balai Perawatan Perkeretaapian).	▪ Saat ini Balai Perawatan dalam proses menyusun dokumen pengajuan Badan Layanan Umum selain itu diperlukan perubahan tata kelola organisasi di lingkup Balai Perawatan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP3 Persentase *On Time Performance (OTP)* Transportasi Kereta Api	▪ Koordinasi dengan stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Operator, Kemendagri, Kepolisian, lainnya) untuk melakukan pembinaan pengelolaan perlintasan sebidang diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan fasilitas keamanan perlintasan sebidang termasuk memastikan pemeliharaan peralatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan (pintu perlintasan, *early warning system*, lainnya), peningkatan kompetensi penjaga perlintasan sebidang, serta pemberian rekomendasi untuk penataan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar teknis;	▪ Sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 5 rekomendasi teknis keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait.
	▪ Melakukan inspeksi/ pemantauan/ *rampcheck* terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/ lokasi taspat serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan khususnya untuk antisipasi beberapa libur panjang pdaa Triwulan II	▪ Hingga saat ini telah terlaksana Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (*Rampcheck*) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1.021 unit dari total 1.044 temuan. ▪ Selama triwulan II tahun 2026 telah dilakukan beberapa kegiatan pengawasan keselamatan diantaranya 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaaapian dan Balai Pengelola Kereta Api.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Lanjutan evaluasi terhadap pelaksanaan/realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang berlaku pada jaringan jalur Kereta Api Nasional yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.	▪ Telah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dilengkapi reviu masterplan pengembangan perkeretaapian pada bulan Juni 2026. ▪ Pada triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan pembahasan Persiapan Pembuatan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa dan Sumatera Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 11-12 Juni 2026 dengan mengundang seluruh BTP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Badan Usaha perkeretaapian yaitu PT KAI, PT KCI dan PT Railink. ▪ Telah dilaksanakan tahapan pengumpulan data rancangan Gapeka 2026 pada jaringan jalur nasional Jawa dan Sumatera antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI.
	▪ Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan/dapat ditunda di Tahun 2026 guna dilakukan realokasi untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan infrastruktur perkeretaapian prioritas yang dapat berdampak pada peningkatan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu;	▪ Telah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan mendesak bersumber dana Rupiah Murni di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah disetujui dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-340/AG/AG.3/2026 tanggal 1 Juni 2026 hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7).

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Melakukan inventarisasi serta menyusun dan mengajukan usulan Kontrak Tahun Jamak (KTJ), termasuk usulan pembukaan blokir Tahun Anggaran 2026, terhadap program dan kegiatan pembangunan infrastruktur konektivitas perkeretaapian dan kegiatan pendukung lainnya guna mendukung percepatan pelaksanaan proyek prioritas serta memastikan kesinambungan pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029.	▪ Telah disampaikan surat Usulan Revisi Anggaran tindaklanjut Penajaman Belanja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 Nomor KU.001/2/17/DJKA/2026 tanggal 10 April 2026 dan telah disetujui pergeseran anggaran blokir RM sebesar Rp1.561.592.486.000,00 ke Kemenkeu melalui surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-197/AG/AG.3/2026 21 April 2026. Dari 8 pekerjaan yang direncanakan skema KTJ, saat ini tersisa 1 pekerjaan KTJ yang masih dapat berjalan yaitu Pekerjaan Pembangunan Gardu Traksi Delanggu. Usulan KTJ yang telah disampaikan ke Menhub akan di tindaklanjuti setelah proses tender selesai (saat ini tahap evaluasi dokumen kualifikasi)
	▪ Peningkatan kompetensi Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama Tahun 2026 yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026.	▪ Telah dilaksanakan Diklat Inspektur Prasarana pada bulan 2 Maret s.d. 3 Juli 2026 yang diikuti sebanyak 48 orang peserta dan Inspektur Sarana Perkeretaapian pada bulan 6 April s.d. 29 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 20 orang peserta.
IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	▪ Lanjutan pelaksanaan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional termasuk reviu Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing wilayah	▪ Telah dilakukan pembahasan laporan pendahuluan kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dilengkapi reviu masterplan pengembangan perkeretaapian pada bulan Juni 2026.
	▪ Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO dengan kontrak Tahun 2026 sesuai kebutuhan dan berkelanjutan yang mencakup layanan kereta api perkotaan dan antar kota.	▪ Pada Tahun 2026 dialokasikan subsidi angkutan PSO sebesar 5.864,2M dan angkutan Perintis sebesar 279,7M.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Lanjutan perumusan usulan pengaturan tarif angkutan barang sebagai dasar penyusunan pedoman/regulasi tarif angkutan barang dalam rangka memberikan kepastian untuk mendukung efisiensi logistik sesuai rekomendasi BPKP.	▪ Pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan pembahasan Persiapan Pembuatan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa dan Sumatera Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 11-12 Juni 2026 dengan mengundang seluruh BTP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Badan Usaha perkeretaapian yaitu PT KAI, PT KCI dan PT Railink. ▪ Kegiatan perumusan usulan pengaturan tarif angkutan barang sebagai dasar penyusunan pedoman/regulasi tarif angkutan barang pada tahun 2026 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan fiskal, pada tahun 2027 kegiatan tersebut juga telah diusulkan namun dikarenakan keterbatasan fiskal kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
	▪ Pengajuan revisi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kajian perencanaan teknis untuk penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam.	▪ Telah diusulkan penambahan anggaran dalam penanganan bencana alam sesuai Surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 hal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan TA 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
	▪ Pembangunan prasarana perkeretaapian pendukung serta jalan akses stasiun lintas Makassar - Parepare guna mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna KA Makassar – Parepare.	▪ Saat ini pekerjaan pembangunan jalan akses pada 3 stasiun pada lintas KA Makassar-Parepare yaitu Stasiun Labakkang, Stasiun Ma'rang dan Stasiun Tanete Rilau telah berkontrak.
	▪ Koordinasi serta pemantauan dalam pembangunan dan rencana pengoperasian LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai.	▪ Capaian progress fisik pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai sebesar 93,741%. Telah dilakukan beberapa item pekerjaan antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan sipil *viaduct*, pekerjaan *trackworks*, pekerjaan sistem dan beberapa pekerjaan lain di stasiun.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Penambahan lintas pelayanan KA Penumpang pada beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa menyesuaikan dengan potensi bangkitan penumpang;	▪ Pada triwulan II 2026 terdapat pengoperasian KA Sangkuriang rute Bandung-Banyuwangi dan KA Pandalungan rute Jakarta-Jember. Selain itu, terdapat penambahan stasiun yang melayani naik turun penumpang yaitu pada Stasiun KRL Jabodetabek JIS, Stasiun Comal di Kabupaten Pemalang serta Stasiun Plabuan di Kabupaten Batang.
	▪ Pembaruan sarana kereta api penumpang khususnya layanan komersial guna meningkatkan kenyamanan penumpang.	▪ Selama triwulan II 2026 terdapat pembaruan sarana kereta api yaitu KA Bangunkarta, KA Singasari, Penambahan kereta ekonomi kerakyatan pada KA Cikuray.
IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	▪ Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/*rampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan kereta api.	▪ Selama triwulan II tahun 2026 telah dilakukan beberapa kegiatan pengawasan keselamatan diantaranya 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaaapian dan Balai Pengelola Kereta Api.
	▪ Peningkatan pengawasan daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak bencana.	▪ Pada triwulan II tahun 2026 terlaksana 2 pengawasan daerah rawan yang dilaksanakan oleh BTP Kelas I Semarang dan BTP Kelas I Bandung.
	▪ Pelaksanaan verifikasi tindak lanjut hasil audit SMKP Penyelenggara Perkeretaapian termasuk kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan untuk penilaian sistem keselamatan perkeretaapian.	▪ Selama triwulan II tahun 2026 untuk mendukung audit SMKP telah disampaikan Surat pemberitahuan audit kepada PT. KCIC No.KA.403/322/K5/DJKA/2026 tanggal 12 Juni 2026.
	▪ Mengusulkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menetapkan pemopokan rel sebagai penanganan sementara dan memasukkannya ke dalam Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR), karena tindakan tersebut tidak menghilangkan penyebab utama kerusakan rel.	▪ Masih dalam proses koordinasi Direktorat Teknis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengidentifikasi potensi penambahan kegiatan/mitigasi pemopokan rel sebagai penanganan sementara pada Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR)

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026.	▪ Revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.
	▪ Pengusulan revisi alokasi anggaran pada Tahun 2026 untuk mendukung kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam termasuk pelaksanaan pengawasan daerah rawan bencana.	▪ Telah diusulkan penambahan anggaran dalam penanganan bencana alam sesuai Surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/2/MHB/2026 hal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan TA 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
	▪ Lanjutan kegiatan Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III;	▪ Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara Tahap III merupakan kegiatan yang dilaksanakan Multi Years Contract (MYC 2023 - 2027). Progres pekerjaan kumulatif saat ini sebesar 15,02%. Saat ini masih terdapat 2 paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang (1 paket pekerjaan bangunan, track, dan fasop serta 1 paket konsultan MK lanjutan.
	▪ Pembangunan gardu traksi delanggu sebagai upaya keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa serta menjaga stabilitas tegangan Listrik untuk konsumsi KRL lintas Yogyakarta – Solo;	▪ Pekerjaan Pembangunan Gardu Traksi Delanggu saat ini masih dalam tahap lelang/tender. Selain itu diperlukan penambahan waktu pekerjaan dan telah diusulkan Kontrak Tahun Jamak (KTJ) 2026 s.d 2027 ke Menhub serta akan di tindaklanjuti setelah proses tender selesai (saat ini tahap evaluasi dokumen kualifikasi).
	▪ Melaksanakan bimbingan teknis audit SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian (operator perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian);	▪ Bimbingan teknis belum dapat dilaksankan pada Triwulan II Tahun 2026 dan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026.
	▪ Melaksanakan audit SMKP kepada PT. KCIC pada Triwulan I Tahun 2026.	▪ Audit SMKP kepada PT. KCIC akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 dan progres saat ini telah disampaikan Surat pemberitahuan audit kepada PT. KCIC No.KA.403/322/K5/DJKA/2026 tanggal 12 Juni 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Perkeretaapian pada Portal Layanan Data Perkeretaapian guna mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, diantaranya Modul Layanan Bidang Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian, Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	▪ Telah dilakukan pembahasan Laporan Pendahuluan dan Progres Pekerjaan Pengembangan Modul Data warehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 10 Juni 2026 dan Penyampaian Laporan Pendahuluan dan Progres Pekerjaan Pengelolaan/Managed Service Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 9 Juli 2026.
IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	▪ Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026;	▪ Revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.
	▪ Melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;	▪ Telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dan telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PR.205/1/4/DJKA/2026 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian tanggal 2 Juli 2026.
	▪ Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak untuk kegiatan kontraktual;	▪ Telah dilaksanakan rapat bersama Biro LPPBMN dan seluruh KPA Satker/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Percepatan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Aggaran 2026 pada tanggal 4 Juni 2026; ▪ Telah dilaksanakan konsultansi One on one dengan masing masing satuan kerja/balai guna mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak seperti BPKA Sulsel pada 23 April 2026, BTP Kelas I Bandung pada 7 Mei 2026, BTP Kelas I Surabaya 5 Juni 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan dampak dari perubahan pagu/komposisi anggaran Tahun 2026 guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi MyIntress;	▪ Telah disampaikan Surat kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dan Kepala Balai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KU.204/1/13/K1/DJKA/2026 tanggal 27 April 2026 hal Percepatan Pengisian Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output TA 2026 pada Aplikasi SAKTI dan MyIntress di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	▪ Pelaksanaan rekonsiliasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan I Tahun 2026;	▪ Telah dilaksanakan pembahasan Rekonsiliasi Realisasi PNBP/BLU Semester I dan Penyusunan Proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2026 yang turut mengundang seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	▪ Inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa lahan, gedung dan bangunan dengan Izin Perpotongan dan persinggungan jalur kereta api yang belum dipungut PNBP termasuk melakukan penertiban atas pembayaran sewa lahan bagi pihak penyewa yang belum menyetorkan PNBP sewa baik usulan baru maupun perpanjangan.	▪ Telah dilakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa lahan, gedung dan bangunan oleh Setditjen Perkeretaapian dan dari hasil inventarisasi tersebut telah disampaikan 3 surat peringatan terhadap *stakeholder* terkait.
	▪ Melakukan pergeseran anggaran blokir (kode 2) dan RO Direktif Presiden ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp1.561.592.486.000,00 termasuk menindaklanjuti rencana penajaman anggaran yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdampak sebesar Rp121.674.927.000,00;	▪ Telah ditindaklanjuti pergeseran anggaran blokir dan penajaman anggaran dengan diterbitkannya Pengesahan Revisi Anggaran sesuai SPRA Nomor: S-197/AG/AG.3/2026 tanggal 21 April 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan/dapat ditunda di Tahun 2026 guna dilakukan realokasi untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan prioritas lainnya.	▪ Telah dilakukan inventarisasi program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan telah disampaikan telah disampaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke masing masing unit kerja terkait penyesuain RUP No: PR.005/2/6/K1/DJKA/2026 tentang Permintaan Data Rencana Penarikan Dana (RPD), Kegiatan Kontraktual dan Rekapitulasi Pagu RUP Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 9 Juni 2026.
	▪ Pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN berkelanjutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan baik terkait kebutuhan kompetensi teknis maupun manajerial/umum termasuk terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kinerja pegawai, dll);	▪ Peningkatan kompetensi ASN dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilaksanakan melalui kegiatan Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 2 Maret s.d. 3 Juli 2026 dengan menggunakan metode daring/online dan luring/offline bertempat di PTDI – STTD Bekasi.
	▪ Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, khususnya terkait Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang meliputi pedoman formasi, petunjuk pelaksanaan dan pengembangan karier, standar kompetensi, standar kualitas hasil kerja, penilaian kinerja, kelas dan tunjangan jabatan, uji kompetensi, serta dokumen informasi faktor jabatan.	▪ Percepatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta menyiapkan dokumen pendukung pengembangan karier jabatan fungsional diantaranya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah dibahas bersama Direktorat Teknis dalam rapat pada tanggal 19 Juni 2026. Selain itu, telah disusun Draft Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dimaksud beserta lampirannya, serta dilaksanakan rapat pembahasan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

Tabel 3-1 Perubahan Budaya Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Orientasi Kerja	Berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tanpa melihat dampak/hasil	Berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat (*outcome–impact*)	Peningkatan kualitas layanan publik
2	Perencanaan dan pengukuran kinerja	• Belum terintegrasi antara perencanaan kinerja dan penganggaran penganggaran • Pengukuran dan evaluasi, kinerja organisasi tidak selaras dengan pengukuran kinerja individu • Indikator kinerja yang digunakan tidak terukur dan tidak mencerminkan hasil sesungguhnya (belum SMART)	• Penyelarasan **kinerja dengan anggaran** melalui Redesain System Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) agar perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*outcome*), untuk di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan Indikator Kinerja yakni mencakup aspek konektivitas, keselamatan dan keamanan serta pelayanan transportasi KA termasuk tata kelola pemerintahan • Terintegrasi secara terstruktur dan berbasis *cascading* dari level Unit Kerja tertinggi hingga individu (Target dan Indikator Kinerja selaras dengan Perjanjian Kinerja Individu/SKP) • Indikator kinerja dirumuskan dengan	• Efisiensi Penggunaan Anggaran dikarenakan Program atau kegiatan yang tidak memberikan dampak dapat dikurangi atau dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif • Pengukuran kinerja efektif dan menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola secara berkelanjutan

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
			prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).	
3	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	• Pelaksanaan monitoring dan pengukuran kinerja diselenggarakan melalui rapat dan koordinasi yang secara dominan melalui pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya dan waktu besar. • Kebersihan lingkungan kantor hanya mengandalkan tenaga kebersihan.	• Pemanfaatan rapat daring/online (Zoom, MS Teams, dsb.) sebagai bentuk adaptasi kebijakan efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas. • Melakukan bersih-bersih/kerja bakti tentang kebersihan di lingkungan kantor dalam mendukung Gerakan Indonesia Bersih: Aman Sehat Resik sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.	• Efisiensi anggaran perjalanan dinas, produktivitas serta komunikasi lintas bagian tetap terjaga. • Menciptakan suasana kerja yang lebih profesional dan nyaman dan sehiingga menjadi produktif dan kondusif.
4	Perbaikan berkelanjutan dalam Penyelenggaraan SAKIP	• Peran pimpinan masih terbatas cenderung hanya mengawasi administrasi pelaksanaan kegiatan dan terfokus pada penyampaian laporan • Pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi penyelenggaraan SAKIP masih dilakukan secara *manual.*	• Pimpinan memberikan arahan langsung dan konsisten untuk peningkatan akuntabilitas, disiplin, dan integritas pegawai. • Penambahan fitur modul Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Penyelenggaraan SAKIP sudah ditambahkan pada aplikasi SILAKI.	• Meningkatkan komitmen pegawai terhadap capaian kinerja organisasi termasuk memperkuat budaya integritas dan profesionalisme; • Fitur modul Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Penyelenggaraan SAKIP bermanfaat guna mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyelenggaraan SAKIP serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan optimal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
5	Evaluasi Kinerja	Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara	Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara online/digital dengan	Efektifitas pelaksanaan kegiatan evaluasi secara terpadu

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
		manual melalui excel atau *spreadsheet*	aplikasi Silaki dan dapat diakses melalui portal Ditjen Perkeretaapian	
6	*Reward and Punishment*	*Reward and Punishment* tidak berbasis capaian kinerja dan belum terukur serta tidak dilaksanakan secara rutin	*Reward and Punishment* dilaksanakan sesuai capaian kinerja dengan parameter yang terukur serta dilaksanakan secara rutin/triwulanan	Peningatan motivasi dan tanggung jawab unit kerja mencakup pimpinan maupun pegawai terhadap pencapaian target kinerja baik organisasi dan individu
7	Inovasi/Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah.	Pengembangan Portal Layanan dan Data DJKA sebagai *superapps* terintegrasi serta penggunaan SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan; • Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, diperlukan serangkaian upaya dan inovasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Inovasi tersebut diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat tata kelola organisasi, serta mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh unit kerja untuk secara aktif mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai inovasi yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada Triwulan II Tahun 2026, diidentifikasi terdapat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya:

Tabel 3- 2 Inovasi Peningkatan Kinerja Per Indikator Kinerja Pada Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Inovasi yang Dilakukan	Harapan/Tujuan
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	• -	• -
2	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	• Pemanfaatan Aplikasi survey SKM dari PPTB pada BPKA Sulawesi Selatan dan Balai Perawatan dimana sebelumnya survey masih dilakukan secara manual.	• Memastikan data yang masuk lebih valid dan meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat proses kompilasi hasil survei sehingga evaluasi terhadap

No	Indikator Kinerja	Inovasi yang Dilakukan	Harapan/Tujuan
		• Layanan bagi seluruh masyarakat yang berniat menjadikan stasiun LRT Sumsel sebagai lokasi pemotretan pranikah.	layanan dapat dilakukan lebih optimal. • Mempermudah masyarakat yang berniat menjadikan stasiun LRT Sumsel sebagai lokasi pemotretan pranikah dengan membuat kebijakan persyaratan yang jelas.
3	IKP3 Persentase *On Time Performance (*OTP*)* Transportasi Kereta Api	• -	• -
4	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	•	•
5	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	• -	• -
6	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Melakukan penambahan fitur dalam Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu fitur Monitoring Rekomendasi Hasil Evaluasi; • Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis GAP kompetensi; • Melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral dengan judul Kompilasi Data Perkeretaapian di Indonesia yang dinyatakan Layak oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, telah mendapatkan Tanda Daftar SIstem Elektronik (TD-PSE) Lingkup Publik Nomor: 94 untuk Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan logo TD-PSE PERON HUB termasuk melakukan koordinasi dengan BKPM terkait penyesuaian sistem	• Untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam penyelenggaraan SAKIP serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan optimal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; • mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN melalui pembinaan manajerial dan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian; • Meningkatkan kualitas tata kelola data, integrasi sistem layanan, serta transparansi dan kemudahan akses layanan publik; • Memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai

No	Indikator Kinerja	Inovasi yang Dilakukan	Harapan/Tujuan
		OSS pada perizinan berusaha bidang perkeretaapian. • Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada UPT Pelaksana setiap 2 bulan. • Pelaksanaan kegiatan *Refreshment* Manajemen Risiko yang diikuti oleh 60 ASN; • Melakukan pengklasifikasian arsip melalui pola pengaturan dokumen secara berjenjang berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai alat pemberkasan, penyimpanan, serta penemuan kembali arsip secara efektif.	bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik; • Meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam penerapan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir potensi risiko dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif; • Meningkatkan tertib administrasi, serta memperkuat tata kelola kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, pada periode selanjutnya akan terus dilakukan percepatan dalam proses identifikasi, perumusan, dan pelaksanaan upaya/inovasi lainnya guna mendorong pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rata-rata capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 102,056% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,458	99,565
2	SP2 Meningkatnya Kinerja	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,750	96,015	101,335

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	terhadap Pelayanan Perkeretaapian				
		IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,77	97,401	99,623
		IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	27,747	29,178	105,157
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100	98,702	98,702
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	21,610	23,329	107,955
Rata-rata Capaian Kinerja						**102,056**

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. **IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian:**
   a. Dukungan rencana pengoperasian LRT Jakarta segmen Kelapa Gading – Manggarai (perizinan, *safety assessment,* pengujian, sertifikasi kelaikan, lainnya);
   b. Penyusunan kajian teknis penanganan bencana Sumatera untuk selanjutnya digunakan sebagai *readiness criteria* pada usulan kegiatan penanganan/perbaikan prasarana perkeretaapian terdampak bencana pada Tahun 2027;
   c. Pengusulan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas/mendesak mendukung konektivitas perkeretaapian pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027, khususnya terkait readiness criteria (kajian perencanaan teknis, pemenuhan Biaya Operasional dan

Biaya Pendukung/BOBP untuk pengadaan lahan, kegiatan pendukung lainnya);

d. Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas, termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (MRT Jakarta *North – South*, MRT Jakarta *East – West*, LRT Jakarta, Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, lainnya);

e. Usulan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional inspektur perkeretaapian melalui pengalihan jabatan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

2. IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pubik Bidang Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan reviu proses bisnis terkait pelayanan regutor perkeretaapian;

b. Penyesuaian perjalanan KA untuk mengakomodir kebutuhan layanan masyarakat serta mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (LRT Sumatera Selatan, KA Makassar – Parepare);

c. Lanjutan pengembangan sistem informasi dan *database* mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan;

d. Pengoptimalan pemanfaatan anggaran PNBP/BLU guna mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian;

e. Koordinasi pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian (BUPP) termasuk penentuan status aset prasarana perkeretaapian milik negara guna mendukung peningkatan tata kelola penyelenggaraan perkeretaapian termasuk fokus pada layanan regulator perkeretaapian.

3. IKP3 Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

a. Lanjutan evaluasi terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) khususnya membahas layanan kereta api yang berkinerja OTP sangat rendah (KA barang di Jawa 83,81% dan KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung 89,9%, KA Makassar – Parepare 52,11%);

b. Penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2026 berupa penetapan perjalanan kereta api di luar GAPEKA sesuai hasil evaluasi serta pemenuhan kebutuhan perjalanan kereta api/ pemberhentian stasiun tertentu, diantaranya pada perjalanan KRL Jabodetabek, LRT Jabodetabek dan LRT Sumatera Selatan;

c. Melaksanakan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian;

d. Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA (pengembangan jalur KA komuter Medan-Binjai, pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai-Jatinegara Tahap III, lainnya) serta mengusulkan pemenuhan *readiness criteria* untuk kegiatan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian prioritas yang ditunda/tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2026 (peningkatan jalur KA Sukabumi – Cianjur, pembangunan jalur ganda KA Wonokromo – Sepanjang, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, lainnya);

e. Penyegaran kompetensi SDM penjaga perlintasan dengan koordinasi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;

f. Usulan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional inspektur perkeretaapian melalui pengalihan jabatan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.

4. IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

a. Lanjutan pelaksanaan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional termasuk reviu Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan

dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing wilayah.

b. Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO dengan kontrak Tahun 2026 sesuai kebutuhan dan berkelanjutan yang mencakup layanan kereta api perkotaan dan antar kota.
c. Melakukan kajian mandiri terhadap rencana perpanjangan layanan KA Bandara YIA hingga Stasiun Maguwo.
d. Pengajuan revisi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kajian perencanaan teknis untuk penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam.
e. Pembangunan prasarana perkeretaapian pendukung serta jalan akses stasiun lintas Makassar - Parepare guna mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna KA Makassar – Parepare.
f. Koordinasi serta pemantauan dalam pembangunan dan rencana pengoperasian LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai.

5. IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kejadian kecelakaan kereta api (tabrakan KA dengan KA);
b. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rangka memperoleh informasi cuaca dan peringatan dini sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan keandalan operasional perkeretaapian.
c. Percepatan kontrak pelaksanaan kegiatan IMO Tahun 2026 untuk memastikan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
d. Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan, diantaranya untuk memenuhi anggaran IMO.
e. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dan *Awareness* ISO 21001 : 2018 untuk meningkatkan mutu, efektivitas dan kualitas lembaga pendidikan serta pelatihan SDM Perkeretaapian;

f. Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan kompetensi dan sertifikasi SDM operator dan regulator, termasuk terhadap SDM yang belum memiliki sertifikat maupun yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir serta pengoptimalan jabatan fungsional tertentu perkeretaapian.

6. IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 termasuk penyesuaian rencana aksi pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* pada periode berikutnya;

b. Lanjutan pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada unit sampel untuk kemudian menjadi acuan dalam penyamaan persepsi/finalisasi penilaian pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Pelaksanaan konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun Anggaran 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung optimalisasi pencapaian target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026.

d. Pelaksanaan konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2026 di guna mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

e. Konsolidasi *one on one meeting* bersama Satuan Kerja dengan pagu besar untuk percepatan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026.

f. Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu.

g. Lanjutan pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija).
h. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan dampak dari perubahan pagu/komposisi anggaran Tahun 2026 guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress.*
i. Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan dialihkan ke BA BUN guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
j. Optimalisasi sisa anggaran kontraktual/ swakelola untuk penyediaan anggaran kegiatan direktif/prioritas Presiden.
k. Revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024.
l. Lanjutan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema *Work From Home* (WFH) guna mendukung kebijakan nasional dalam rangka efisiensi energi.
m. Lanjutan pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan baik terkait kebutuhan kompetensi teknis maupun manajerial/umum termasuk terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kinerja pegawai, dll) pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian.
n. Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DAN
RENCANA AKSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	ALLAN TANDIONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

	Kegiatan		Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	377.937.809.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	579.390.083.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.526.501.421.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	33.444.056.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	26.294.617.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	582.883.956.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	23.908.087.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	12.197.555.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	1.226.837.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2026
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,486		Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	46,000		
				Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000	**377.937.809.000**	Dit. LLAKA
				Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%)	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700		
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%)	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%)	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	61,806	70,139		Dit. Sarana Perkeretaapian
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai		Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	**579.390.083.000**	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit Keselamatan, BPKA dan BPKARS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai)	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500		Dit. LLAKA
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750	92,750		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250	97,250		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750		Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250		Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	IK3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770	96,770		Dit. LLAKA, Dit Prasarana, BTP
				Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	55,000		
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	35,590		Dit. LLAKA
				Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%)	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64		Dit. Prasarana Perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
				Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,530		Dit. Prasarana Perkeretaapian
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	19,547	21,187	22,827	24,467	26,107	27,747	29,387	31,027	32,667	34,307	35,947	40,000		Dit LLAKA
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	50,850											62,790	2.526.501.421.000	Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	79,550	81,820		
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)												80,940		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Persentase Hasil *Rampcheck* Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%)												94,560		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%)	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	59,250		
				Persentase Pemenuhan Sertilikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%)	22,770											39,160		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	40,000		
				Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%)	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	40,000		
				Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	33,330		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%)	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	96,290		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%)												34,448		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)												39,580		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)												39,067		
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapiani	%	100,000	**Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM**	**16,10%**	**20,83%**	**21,02%**	**21,25%**	**21,41%**	**21,61%**	**35,10%**	**35,39%**	**36,87%**	**62,06%**	**62,19%**	**100,00%**		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian : 83,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	**646.511.052.000**	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIAKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
				Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian : 85	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000		
				Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian : 100	14,410	33,335	34,070	35,015	35,621	36,451	90,403	91,551	97,477	98,223	98,766	100,000		
				Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian : 89,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000		

Jakarta, Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP. 198801182025211023

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun: 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian) [%]	23,00	23,00	26,90	26,90	26,90	30,70	30,70	30,70	34,60	34,60	34,60	46	377.937.809.000	Direktorat LLAKA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana) [%]	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Panjang jalur KA yang beroperasi) [km]	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12	6915,12		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian) [%]	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000		Direktorat LLAKA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA) [%]	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730		Direktorat LLAKA
				Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian) [%]	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	31.482.219.489	63.002.232.760	94.484.452.250	125.966.671.739	157.486.685.010	188.968.904.500	220.451.123.989	251.971.137.260	283.453.356.750	314.935.576.239	346.455.589.510	377.937.809.000	377.937.809.000	
				Uraian Target	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	100	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian) [%]	50,94	51,43	55,39	56,95	58,78	59,05	59,36	59,85	60,29	60,87	61,27	62,79	2.526.501.421.000	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian) [%]	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	79,55	81,82		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Serttfikat Kelalkan Sarana Perkeretaapian) [%]	0,000	0,380	0,385	6,150	10,000	16,150	33,890	39,380	44,880	50,370	55,870	88,85		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan NSPK Bldang Sarana Perkeretaapian) [%]	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	37,03	59,25		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan) [%]	21,01	21,01	24,46	24,46	24,46	24,46	52,05	60,67	62,39	62,39	67,57	71,01		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti) [%]	-	-	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti) [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti) [%]	16,66	16,66	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	27,78	27,78	27,78	33,33		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti) [%]	20,000	20,000	21,050	21,050	21,050	23,160	23,160	23,160	28,420	28,420	28,420	36,84		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian) [%]	5	5	5	5	5	10	10	10	20	20	20	30		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian) [%]	22,970	22,970	24	24	24	30	30	30	36	36	36	39,16		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian) [%]	90,740	90,740	90,740	90,740	90,740	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	94,44		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian) [%]	20,75	21,50	22,07	23,18	23,93	25,42	27,65	30,60	32,83	35,81	38,49	39,580		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian) [%]	21,98	22,50	22,96	24,38	26,04	28,32	30,53	32,21	33,79	34,79	35,36	36,01		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian) [%]	21,64	22,55	23,16	24,69	26,59	28,54	30,49	32,47	34,32	36,16	37,67	39,07		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	210.541.785.083	421.083.570.167	631.625.355.250	842.167.140.333	1.052.708.925.417	1.263.250.710.500	1.473.792.495.583	1.684.334.280.667	1.894.876.065.750	2.105.417.850.833	2.315.959.635.917	2.526.501.421.000	2.526.501.421.000	
				Uraian Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA) [Nilai]	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	579.390.083.000	Direktorat LLAKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian) [%]	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250		Direktorat Sarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lerhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian) [Nilai]	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian) [Nilai]	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian) [%]	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakal (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan) [%]	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750		BPKAR Sumatera Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan) [%]	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250		BPKA Sulawesi Selatan
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian) [%]	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25		Balai Perawatan Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	48.263.193.913	96.584.326.836	144.847.520.750	193.110.714.663	241.431.847.586	289.695.041.500	337.958.235.413	386.279.368.336	434.542.562.250	482.805.756.163	531.126.889.086	579.390.083.000	579.390.083.000	
				Uraian Target	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750		
	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	97,770	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya (Persentase pemenuhan NSPK LLAKA) [%]	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	55,000	-	Direktorat LLAKA
				Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian) [%]	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	35,590		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya (Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2) [%]	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya (Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik) [%]	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,530		Direktorat Prasarana Perkeretaapian
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti) [%]	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	40		Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Uraian Target	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770		
	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	40,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api) [%]	21,23	22,67	24,15	25,71	27,32	28,94	30,70	32,37	34	35,75	37,32	38,95	-	Direktorat LLAKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api) [%]	20,81	22,24	23,75	25,30	27,00	28,55	30,19	31,86	33,51	35,27	37	38,68		Direktorat LLAKA
				Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel) [Juta Penumpang/ Hari]	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840		Direktorat LLAKA
				Jumlah Anggaran (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Uraian Target	19,547	21,187	22,827	24,467	26,107	27,747	29,387	31,027	32,667	34,307	35,947	40,000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	646.511.052.000	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian) [%]	14,410	33,335	34,070	35,015	35,621	36,451	90,403	91,551	97,477	98,223	98,766	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	53.854.370.631	107.773.392.368	161.627.763.000	215.482.133.631	269.401.155.368	323.255.526.000	377.109.896.631	431.028.918.368	484.883.289.000	538.737.659.631	592.656.681.368	646.511.052.000	646.511.052.000	
				Uraian Target	16,10	20,83	21,02	21,25	21,41	21,61	35,10	35,39	36,87	62,06	62,19	100		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	646.511.052.000	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian) [%]	14,410	33,335	34,070	35,015	35,621	36,451	90,403	91,551	97,477	98,223	98,766	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM (Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian) [Nilai]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Jumlah Anggaran (Rp)	53.854.370.631	107.773.392.368	161.627.763.000	215.482.133.631	269.401.155.368	323.255.526.000	377.109.896.631	431.028.918.368	484.883.289.000	538.737.659.631	592.656.681.368	646.511.052.000	646.511.052.000	
				Uraian Target	16,10	20,83	21,02	21,25	21,41	21,61	35,10	35,39	36,87	62,06	62,19	100		

Jakarta, Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**SASARAN : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur** **INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian**		
1	Melaksanakan reviu master plan pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional)	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
2	Melaksanakan kegiatan kajian teknis penanganan bencana Sumatera untuk selanjutnya dapat digunakan menjadi data dukung *readines criteria* untuk usulan kegiatan Tahun 2027.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktoral Prasarana Perkeretaapian
3	Berkoordinasi dan konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya termasuk pengusulan/penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktoral Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
4	Melakukan koordinasi terkait kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan adanya kebijakan efisiensi/penajaman belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026.	Triwulan III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
5	Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas diantaranya untuk kajian perencanaan teknis, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	kegiatan pendukung lainnya termasuk mengakomodir kebijakan pengalihan anggaran kepada RO Khusus.		• Balai terkait
6	Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan *stakeholder* terkait (Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, MRT Jakarta North – South, MRT Jakarta East – West, LRT Jakarta, lainnya).	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktoral Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
7	Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
B.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**		
1	Peningkatan pengawasan terhadap layanan publik perkeretaapian sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan termasuk pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api sesuai standar pelayanan minimum dengan dukungan prasarana dan sarana yang andal;	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat/Balai terkait yang melakukan layanan publik bidang perkeretaapian
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan database mendukung layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) guna meningkatkan kehandalan dan mencegah terjadinya gangguan pada layanan.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian
3	Koordinasi lanjutan usulan pemanfaatan perolehan PNBP untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung peningkatan kualitas layanan regulator perkeretaapian.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat/Balai terkait yang melakukan layanan publik bidang perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penyesuaian perjalanan KA pada LRT Sumatera Selatan mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengakomodir kebutuhan layanan masyarakat.	Triwulan III Tahun 2026	• BPKAR Sumatera Selatan
5	Sosialisasi pengenalan stasiun, pola operasi dan tarif Kereta Api Makassar-Parepare khususnya pada lintas yang baru beroperasi yaitu Mandai-Palanro.	Triwulan IV Tahun 2026	• BPKA Sulawesi Selatan
6	Mempersiapkan usulan pengembangan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Balai Perawatan Perkeretaapian
C	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Presentase Capaian *On Time Performace* (OTP) Transportasi Kereta Api**		
1	Koordinasi dengan *stakeholde*r terkait (Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Operator, Kemendagri, Kepolisian, lainnya) untuk melakukan pembinaan pengelolaan perlintasan sebidang diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan fasilitas keamanan perlintasan sebidang termasuk memastikan pemeliharaan peralatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan (pintu perlintasan, *early warning system*, lainnya), peningkatan kompetensi penjaga perlintasan sebidang, serta pemberian rekomendasi untuk penataan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar teknis;	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
2	Melakukan inspeksi/pemantauan/r*ampcheck* terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/ lokasi taspat serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan,	Triwulan II s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian • Balai Perawatan Perkeretaapia
3	Lanjutan evaluasi terhadap pelaksanaan/realisasi perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang berlaku pada jaringan jalur Kereta Api Nasional yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Triwulan III Tahun 2026	• Direktorat LLAKA

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Tahun 2026 berupa penetapan perjalanan kereta api di luar GAPEKA sesuai hasil evaluasi serta pemenuhan kebutuhan perjalanan kereta api/ pemberhentian stasiun tertentu.	Triwulan III Tahun 2026	• Direktorat LLAKA
5	Melaksanakan Kajian Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi Peralatan Perawatan di Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian guna mendukung.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Sarana Perkeretaapian
6	Lanjutan pembangunan/pengembangan prasarana perkeretaapian mendukung peningkatan kapasitas dan kecepatan operasional KA.	Triwulan II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
7	Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rangka memperoleh informasi cuaca dan peringatan dini sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan keandalan operasional perkeretaapian.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
8	Peningkatan kompetensi Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dalam pengawasan perjalanan kereta api melalui pelaksanaan Diklat Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana Perkeretaapian.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
D.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Presentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api**		
1	Lanjutan pelaksanaan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional termasuk reviu *Masterplan* Perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing wilayah	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA
2	Penyelenggaraan layanan subsidi kereta api perintis dan PSO dengan kontrak Tahun 2026 sesuai kebutuhan dan berkelanjutan yang mencakup layanan kereta api perkotaan dan antar kota	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Melakukan kajian mandiri terhadap rencana perpanjangan layanan KA Bandara YIA hingga Stasiun Maguwo.	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Balai terkait
4	Pengajuan revisi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kajian perencanaan teknis untuk penanganan infrastruktur perkeretaapian yang terdampak bencana alam	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
5	Pembangunan prasarana perkeretaapian pendukung serta jalan akses stasiun lintas Makassar - Parepare guna mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna KA Makassar – Parepare	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perketetaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
6	Koordinasi serta pemantauan dalam pembangunan dan rencana pengoperasian LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktoral Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
E.	**SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian**		
1	Pengawasan dan pengendalian keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, diantaranya berupa pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/rampcheck/audit dan pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
2	Koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Badan Usaha, Pemerintah Daerah) untuk penanganan daerah rawan gangguan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, diantaranya daerah rawan perlintasan sebidang, daerah rawan bencana alam/cuaca ekstrim	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Mendorong Badan Usaha untuk melakukan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) secara berkala/setiap bulan melalui fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjadi bahan telaah/pengawasan dari Direktorat teknis/Balai terkait	Triwulan III Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
4	Koordinasi lanjutan dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait dengan proses pemeriksaan dan analisis atas kejadian tabrakan KA	Triwulan III Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
5	Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rangka memperoleh informasi cuaca dan peringatan dini sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan keandalan operasional perkeretaapian	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
6	Pengusulan revisi alokasi anggaran pada Tahun 2026 untuk mendukung kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur perkeretaapian pasca bencana alam termasuk pelaksanaan pengawasan daerah rawan bencana;	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Teknik Perkeretaapian
7	Percepatan pelaksanaan kegiatan IMO untuk memastikan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
8	Melaksanakan pengembangan fitur pengawasan keselamatan didukung database yang memadai pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian secara *realtime*	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
9	Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan kompetensi dan sertifikasi SDM operator, termasuk terhadap SDM yang belum memiliki sertifikat maupun yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir	Triwulan III Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
10	Menugaskan pegawai dengan kompetensi/fungsional tertentu (inspektur perkeretaapian) untuk melakukan inspeksi prasarana dan sarana perkeretaapian yang beroperasi guna menjamin kondisi kelaikan	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
F.	**SASARAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2026 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026 serta penyesuaian target pada rencana aksi sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90%-110%);	Triwulan III s.d IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Lanjutan pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada unit sampel untuk kemudian menjadi acuan dalam penyamaan persepsi/finalisasi penilaian pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan III s.d IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Pelaksanaan konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun Anggaran 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung optimalisasi pencapaian target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026	Triwulan III s.d. IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Pelaksanaan konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2026 di guna mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2026		
5	Konsolidasi *one on one meeting* bersama Satuan Kerja dengan pagu besar untuk percepatan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026	Triwulan III s.d IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
6	Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu	Triwulan III s.d IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian •
7	Lanjutan pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija)	Triwulan III s.d IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
8	Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan dampak dari perubahan pagu/komposisi anggaran Tahun 2026 guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
9	Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan dialihkan ke BA BUN guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Triwulan III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
10	Optimalisasi sisa anggaran kontraktual/ swakelola untuk penyediaan anggaran kegiatan direktif/prioritas Presiden	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
11	Revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024	Triwulan III Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
12	Lanjutan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema *Work From Home* (WFH) guna mendukung kebijakan nasional dalam rangka efisiensi energi	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
13	Lanjutan pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan baik terkait kebutuhan kompetensi teknis maupun manajerial/umum termasuk terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kinerja pegawai, dll) pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
14	Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi	Triwulan III s.d.IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

LAMPIRAN III

REALISASI DAN ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	16.923.422.000	4.464.284.000	0	0	0	0	0	0	21.387.706.000
		REALISASI	0	4.221.517.891	2.606.058.924	0	0	0	0	0	0	6.827.576.815
			0%	24.94%	58.38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31.92%
		SISA	0	12.701.904.109	1.858.225.076	0	0	0	0	0	0	14.560.129.185
2	4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	294.168.136.000	319.320.499.000	15.323.292.000	0	0	0	0	0	0	628.811.927.000
		REALISASI	160.442.442.132	95.076.900.194	4.430.182.227	0	0	0	0	0	0	259.949.524.553
			54.54%	29.77%	28.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41.34%
		SISA	133.725.693.868	224.243.598.806	10.893.109.773	0	0	0	0	0	0	368.862.402.447
3	4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	14.055.576.000	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	15.856.196.000
		REALISASI	0	925.689.590	1.070.413.368	0	0	0	0	0	0	1.996.102.958
			0%	6.59%	59.45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12.59%
		SISA	0	13.129.886.410	730.206.632	0	0	0	0	0	0	13.860.093.042
4	4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	10.393.157.000	0	0	0	0	0	0	0	10.393.157.000
		REALISASI	0	3.344.790.460	0	0	0	0	0	0	0	3.344.790.460
			0%	32.18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32.18%
		SISA	0	7.048.366.540	0	0	0	0	0	0	0	7.048.366.540
5	4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	708.198.000	0	0	0	0	0	0	0	708.198.000
		REALISASI	0	197.637.924	0	0	0	0	0	0	0	197.637.924
			0%	27.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27.91%
		SISA	0	510.560.076	0	0	0	0	0	0	0	510.560.076
6	4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	436.611.626.000	342.304.294.000	0	0	0	0	0	0	778.915.920.000
		REALISASI	0	66.725.924.311	4.377.438.679	0	0	0	0	0	0	71.103.362.990
			0%	15.28%	1.28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.13%
		SISA	0	369.885.701.689	337.926.855.321	0	0	0	0	0	0	707.812.557.010
7	4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	2.068.718.515.000	14.455.773.000	0	0	0	0	0	0	2.083.174.288.000
		REALISASI	0	31.578.115.765	4.997.186.700	0	0	0	0	0	0	36.575.302.465
			0%	1.53%	34.57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.76%
		SISA	0	2.037.140.399.235	9.458.586.300	0	0	0	0	0	0	2.046.598.985.535
8	4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	313.531.103.000	1.055.204.099.000	0	0	0	0	0	0	1.368.735.202.000
		REALISASI	0	71.350.178.613	110.723.819.140	0	0	0	0	0	0	182.073.997.753
			0%	22.76%	10.49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13.30%
		SISA	0	242.180.924.387	944.480.279.860	0	0	0	0	0	0	1.186.661.204.247
9	4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	37.947.410.000	1.448.782.000	0	0	0	0	0	0	39.396.192.000
		REALISASI	0	3.768.155.972	546.646.917	0	0	0	0	0	0	4.314.802.889
			0%	9.93%	37.73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10.95%
		SISA	0	34.179.254.028	902.135.083	0	0	0	0	0	0	35.081.389.111

tanggal cetak : 06-07-26 09:53:49

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
GRAND TOTAL		PAGU	294.168.136.000	3.218.209.506.000	1.435.001.144.000	0	0	0	0	0	0	4.947.378.786.000
		REALISASI	160.442.442.132	277.188.910.720	128.751.745.955	0	0	0	0	0	0	566.383.098.807
		%	54.54%	8.61%	8.97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11.45%
		SISA	133.725.693.868	2.941.020.595.280	1.306.249.398.045	0	0	0	0	0	0	4.380.995.687.193

tanggal cetak : 06-07-26 09:53:49

PERHITUNGAN EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Triwulan II Tahun 2026

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	ABF	Kebijakan Perencanaan	1	0	40,00%	9.420.517.000		9.420.517.000	1.724.152.289	3.768.206.800	2.044.054.511
2	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	CAN	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	40,00%	1.000.000		1.000.000	-	400.000	400.000
3	Setditjen Perkeretaapian	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	1	0	49,98%	1.055.285.000		1.055.285.000	342.500.752	527.431.443	184.930.691
4	Setditjen Perkeretaapian	WA	4604	EBA	Layanan Hukum	1	0	49,98%	708.198.000		708.198.000	197.637.924	353.957.360	156.319.436
5	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Hukum	1	0	71,65%	403.120.000		403.120.000	271.933.840	288.835.480	16.901.640
6	Setditjen Perkeretaapian	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	49,98%	8.062.433.000		8.062.433.000	2.633.124.911	4.029.604.013	1.396.479.102
7	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	8.453.260.000		8.453.260.000	2.667.736.099	4.224.939.348	1.557.203.249
8	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	EBA	Layanan Data dan Informasi	1	0	49,98%	268.964.000		268.964.000	80.017.044	134.428.207	54.411.163
9	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	86,66%	109.969.122.000		109.969.122.000	59.299.885.264	95.299.241.125	35.999.355.861
10	Setditjen Perkeretaapian	WA	4600	EBC	Layanan SDM	1045	0	40,00%	2.376.082.000		2.376.082.000	540.927.208	950.432.800	409.505.592
11	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	3.603.399.000		3.603.399.000	1.218.553.448	1.800.978.820	582.425.372
12	Setditjen Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	50,65%	10.138.303.000		10.138.303.000	3.251.042.672	5.135.050.470	1.884.007.798
13	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	40,00%	11.774.596.000		11.774.596.000	732.301.966	4.709.838.400	3.977.536.434
14	Setditjen Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	40,00%	11.774.596.000		11.774.596.000	732.301.966	4.709.838.400	3.977.536.434
15	Dit. LLAKA	GA	4641	ABF	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	15	0	11,99%	8.671.189.000		8.671.189.000	1.039.169.000	1.039.675.561	506.561
16	Dit. LLAKA	GA	4641	BAH	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	1	0	70,59%	18.636.000.000		18.636.000.000	13.117.760.663	13.155.152.400	37.391.737
17	Dit. LLAKA	GA	4641	BAH	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	2	0	57,55%	124.610.619.000		124.610.619.000	1.364.866.660	71.713.411.235	70.348.544.575
18	Dit. LLAKA	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	33,75%	4.529.592.000		4.529.592.000	1.523.794.000	1.528.737.300	4.943.300
19	Dit. LLAKA	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	33,75%	4.529.592.000		4.529.592.000	1.523.794.000	1.528.737.300	4.943.300
20	Dit. LLAKA	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	33,31%	4.200.000.000		4.200.000.000	1.398.751.000	1.399.020.000	269.000
21	Dit. LLAKA	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	33,31%	4.200.000.000		4.200.000.000	1.398.751.000	1.399.020.000	269.000
22	Dit. LLAKA	WA	4602	BMA	Pengelolaan Data dan Informasi	1	0	8,91%	1.089.623.000		1.089.623.000	94.816.200	97.085.409	2.269.209
23	Dit. LLAKA	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	84,37%	109.697.000		109.697.000	92.535.624	92.551.359	15.735
24	Dit. LLAKA	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	30,14%	1.130.760.000		1.130.760.000	340.754.508	340.811.064	56.556
25	Dit. LLAKA	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	55,70%	2.147.279.000		2.147.279.000	1.195.899.519	1.196.034.403	134.884
26	Dit. LLAKA	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	15,06%	24.392.404.000		24.392.404.000	3.672.092.134	3.673.496.042	1.403.908
27	Dit. LLAKA	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	35,27%	184.628.000		184.628.000	65.091.184	65.118.296	27.112
28	Dit. LLAKA	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	1,20%	60.657.000		60.657.000	-	727.884	727.884
29	Dit. LLAKA	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	1,20%	60.657.000		60.657.000	-	727.884	727.884
30	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4643	ABF	Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1	0	3,00%	9.648.976.000		9.648.976.000	-	289.469.280	289.469.280
31	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4643	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	33,91%	4.244.139.000		4.244.139.000	1.379.157.071	1.439.187.535	60.030.464
32	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3.9839	0	12,00%	2.673.453.000		2.673.453.000	-	320.814.360	320.814.360
33	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3.9839	0	12,00%	2.673.453.000		2.673.453.000	-	320.814.360	320.814.360
34	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4643	RBA	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	1	0	25,00%	50.000.000.000		50.000.000.000	-	12.500.000.000	12.500.000.000
35	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4641	RBA	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	1	0	8,00%	63.050.000.000		63.050.000.000	-	5.044.000.000	5.044.000.000
36	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA	4642	RDA	Penanganan Perlintasan Sebidang untuk Integrasi Telekomunikasi antar Pos Jaga DJKA dengan Dinas Perhubungan/Swasta di Pulau Jawa	1	0	3,00%	1.650.911.000		1.650.911.000	-	49.527.330	49.527.330
37	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	9.362.747.000		9.362.747.000	4.004.792.024	4.679.500.951	674.708.927
38	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	55,86%	3.572.068.000		3.572.068.000	1.580.967.792	1.995.357.185	414.389.393

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
39	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	1	1	100,00%	777.000.000		777.000.000	776.067.600	777.000.000	932.400
40	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	31,86%	3.343.766.000		3.343.766.000	881.236.191	1.065.323.848	184.087.657
41	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	24,52%	2.844.456.000		2.844.456.000	558.270.724	697.460.611	139.189.887
42	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA	4643	AFA	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	17	0	9,00%	20.113.564.000		20.113.564.000	1.480.648.807	1.810.220.760	329.571.953
43	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA	4643	CCK	Operasi Sarana Perkeretaapian	14	0	18,00%	4.046.783.000		4.046.783.000	404.678.250	728.420.940	323.742.690
44	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA	4643	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	30	0	23,00%	33.155.759.000		33.155.759.000	6.814.421.483	7.625.824.570	811.403.087
45	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	100,00%	94.154.000		94.154.000	94.120.000	94.154.000	34.000
46	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4602	CAN	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	0	29,00%	20.000.000		20.000.000	4.551.880	5.800.000	1.248.120
47	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	44,00%	359.392.000		359.392.000	157.877.750	158.132.480	254.730
48	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	58,31%	2.966.936.000		2.966.936.000	1.154.639.149	1.730.020.382	575.381.233
49	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	51,00%	6.454.680.000		6.454.680.000	3.225.662.133	3.291.886.800	66.224.667
50	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	49,00%	79.568.000		79.568.000	36.954.161	38.988.320	2.034.159
51	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	6,00%	800.000.000		800.000.000	-	48.000.000	48.000.000
52	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA	4602	FAB	Sistem Informasi	1	0	6,00%	800.000.000		800.000.000	-	48.000.000	48.000.000
53	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	GA	4642	AFA	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	6	0	20,00%	2.704.220.000		2.704.220.000	-	540.844.000	540.844.000
54	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	1.586.549.000		1.586.549.000	772.922.061	792.957.190	20.035.129
55	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	65,91%	1.022.562.000		1.022.562.000	673.975.365	673.970.614	(4.751)
56	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	22.319.495.000		22.319.495.000	6.942.234.296	11.155.283.601	4.213.049.305
57	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	49,98%	129.852.000		129.852.000	42.203.470	64.900.030	22.696.560
58	BTP Jakarta	GA	4641	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	6,43%	2.310.525.000		2.310.525.000	11.898.090	148.566.758	136.668.668
59	BTP Jakarta	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	6	0	37,38%	18.913.566.000		18.913.566.000	3.734.764.178	7.069.890.971	3.335.126.793
60	BTP Jakarta	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	6	0	37,38%	18.913.566.000		18.913.566.000	3.734.764.178	7.069.890.971	3.335.126.793
61	BTP Jakarta	GA	4643	RBA	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III)	1	0	41,00%	636.159.734.000		636.159.734.000	63.222.445.350	260.825.490.940	197.603.045.590
62	BTP Jakarta	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	0,60%	391.600.000.000		391.600.000.000	222.260.428	2.349.600.000	2.127.339.572
63	BTP Jakarta	GA	4642	RDA	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (4 Lintas Pelayanan)	1	0	0,11%	400.000.000		400.000.000	-	440.000	440.000
64	BTP Jakarta	WA	4602	BMA	Pengelolaan Data dan Informasi	1	0	49,98%	40.736.000		40.736.000	14.002.500	20.359.853	6.357.353
65	BTP Jakarta	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	0	49,98%	618.066.000		618.066.000	400.345.980	308.909.387	(91.436.593)
66	BTP Jakarta	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	16	0	49,98%	2.133.843.000		2.133.843.000	929.105.843	1.066.494.731	137.388.888
67	BTP Jakarta	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	1.710.171.000		1.710.171.000	628.097.704	854.743.466	226.645.762
68	BTP Jakarta	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	49,98%	33.228.492.000		33.228.492.000	17.472.164.942	16.607.600.302	(864.564.640)
69	BTP Jakarta	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	1	0	98,35%	566.650.000		566.650.000	545.634.830	557.300.275	11.665.445
70	BTP Jakarta	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	0	49,98%	3.631.523.000		3.631.523.000	1.635.270.477	1.815.035.195	179.764.718
71	BTP Jakarta	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	2	0	49,98%	520.904.000		520.904.000	206.525.077	260.347.819	53.822.742
72	BTP Bandung	GA	4641	CBA	Jembatan Kereta Api	1	0	1,00%	11.010.817.000		11.010.817.000	-	110.108.170	110.108.170
73	BTP Bandung	GA	4643	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	28,00%	2.030.625.000		2.030.625.000	474.263.296	568.575.000	94.311.704
74	BTP Bandung	GA	4641	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	1,00%	752.000.000		752.000.000	-	7.520.000	7.520.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
75	BTP Bandung	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3	0	15,00%	6.809.130.000		6.809.130.000	793.022.597	1.021.369.500	228.346.903
76	BTP Bandung	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3	0	15,00%	6.809.130.000		6.809.130.000	793.022.597	1.021.369.500	228.346.903
77	BTP Bandung	GA	4641	RBA	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA Segmen Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II	1	0	0,00%	29.405.852.000		29.405.852.000	-	-	-
78	BTP Bandung	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	1,00%	467.082.627.000		467.082.627.000	-	4.670.826.270	4.670.826.270
79	BTP Bandung	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	0	22,00%	93.907.000		93.907.000	15.284.900	20.659.540	5.374.640
80	BTP Bandung	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	0	45,00%	1.993.489.000		1.993.489.000	863.781.170	897.070.050	33.288.880
81	BTP Bandung	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	53,00%	7.252.283.000		7.252.283.000	3.634.023.139	3.843.709.990	209.686.851
82	BTP Bandung	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	50,00%	32.911.475.000		32.911.475.000	15.433.098.632	16.455.737.500	1.022.638.868
83	BTP Bandung	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	1	0	46,00%	1.837.498.000		1.837.498.000	761.154.996	845.249.080	84.094.084
84	BTP Bandung	WA	4601	EBB	Layanan Prasarana Internal	2	0	6,00%	9.149.527.000		9.149.527.000	98.083.453	548.971.620	450.888.167
85	BTP Bandung	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9	0	51,00%	2.716.766.000		2.716.766.000	1.027.670.711	1.385.550.660	357.879.949
86	BTP Bandung	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	6	0	11,00%	231.731.000		231.731.000	12.596.874	25.490.410	12.893.536
87	BTP Bandung	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	2	0	6,00%	1.640.073.000		1.640.073.000	47.432.801	98.404.380	50.971.579
88	BTP Bandung	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	2	0	6,00%	1.640.073.000		1.640.073.000	47.432.801	98.404.380	50.971.579
89	BTP Semarang	GA	4641	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	0.1	0	69,08%	1.665.000.000		1.665.000.000	701.972.843	1.150.182.000	448.209.157
90	BTP Semarang	GA	4641	QAH	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri	1	0	5,69%	246.686.000		246.686.000	14.048.600	14.036.433	(12.167)
91	BTP Semarang	GA	4643	RBA	Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas	0.22	0	0,01%	1.197.330.000		1.197.330.000	-	119.733	119.733
92	BTP Semarang	GA	4641	RBA	Pembangunan Gardu Listrik Delanggu	1	0	0,06%	38.000.000.000		38.000.000.000	-	22.800.000	22.800.000
93	BTP Semarang	GA	4641	RBA	Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon - Kroya	1	0	0,04%	30.715.809.000		30.715.809.000	-	12.286.324	12.286.324
94	BTP Semarang	GA	4641	RBA	Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung - Gubug	1	0	0,04%	31.375.945.000		31.375.945.000	-	12.550.378	12.550.378
95	BTP Semarang	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	0,06%	652.555.032.000		652.555.032.000	-	391.533.019	391.533.019
96	BTP Semarang	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	30	10	28,40%	331.100.000		331.100.000	93.994.800	94.032.400	37.600
97	BTP Semarang	WA	4601	EBA	Layanan Hukum	1	0	49,98%	292.046.000		292.046.000	16.814.000	145.964.591	129.150.591
98	BTP Semarang	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	2.428.521.000		2.428.521.000	351.137.715	1.213.774.796	862.637.081
99	BTP Semarang	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	2.205.623.000		2.205.623.000	419.999.688	1.102.370.375	682.370.687
100	BTP Semarang	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	2	0	50,01%	39.431.483.000		39.431.483.000	16.270.824.929	19.719.684.648	3.448.859.719
101	BTP Semarang	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	79	0	0,06%	50.000.000		50.000.000	-	30.000	30.000
102	BTP Semarang	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	2.860.846.000		2.860.846.000	476.647.045	1.429.850.831	953.203.786
103	BTP Semarang	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	49,98%	408.146.000		408.146.000	90.581.743	203.991.371	113.409.628
104	BTP Semarang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	380.854.000		380.854.000	29.873.150	190.350.829	160.477.679
105	BTP Semarang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	380.854.000		380.854.000	29.873.150	190.350.829	160.477.679
106	BTP Surabaya	GA	4643	ABF	Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	1	0	15,00%	2.428.200.000		2.428.200.000	-	364.230.000	364.230.000
107	BTP Surabaya	GA	4641	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	30,00%	24.459.144.000		24.459.144.000	96.781.000	7.337.743.200	7.240.962.200
108	BTP Surabaya	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1	0	15,00%	200.000.000		200.000.000	-	30.000.000	30.000.000
109	BTP Surabaya	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3	0	30,00%	5.724.775.000		5.724.775.000	81.632.500	1.717.432.500	1.635.800.000
110	BTP Surabaya	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	3	0	30,00%	5.724.775.000		5.724.775.000	81.632.500	1.717.432.500	1.635.800.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
111	BTP Surabaya	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	30,00%	255.863.004.000		255.863.004.000	879.798.745	76.758.901.200	75.879.102.455
112	BTP Surabaya	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10	10	100,00%	115.995.000		115.995.000	115.933.950	115.995.000	61.050
113	BTP Surabaya	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	66,64%	1.259.854.000		1.259.854.000	475.624.180	839.566.706	363.942.526
114	BTP Surabaya	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	5.352.117.000		5.352.117.000	1.765.980.494	2.674.988.077	909.007.583
115	BTP Surabaya	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	49,98%	23.341.649.000		23.341.649.000	11.572.201.311	11.666.156.170	93.954.859
116	BTP Surabaya	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	83,30%	1.315.809.000		1.315.809.000	902.081.120	1.096.068.897	193.987.777
117	BTP Surabaya	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	74,97%	152.987.000		152.987.000	90.111.300	114.694.354	24.583.054
118	BTP Surabaya	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	1	100,00%	488.940.000		488.940.000	482.607.800	488.940.000	6.332.200
119	BTP Surabaya	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	1	100,00%	488.940.000		488.940.000	482.607.800	488.940.000	6.332.200
120	BTP Medan	GA	4643	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	1	100,00%	350.000.000		350.000.000	193.664.800	350.000.000	156.335.200
121	BTP Medan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	14,93%	1.847.597.000		1.847.597.000	-	275.846.232	275.846.232
122	BTP Medan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	14,93%	1.847.597.000		1.847.597.000	-	275.846.232	275.846.232
123	BTP Medan	GA	4641	QAH	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5	1	0	1,00%	8.000.000.000		8.000.000.000	-	80.000.000	80.000.000
124	BTP Medan	GA	4643	RBA	Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai	6.8	0	45,34%	337.865.770.000		337.865.770.000	45.678.312.238	153.188.340.118	107.510.027.880
125	BTP Medan	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	15,00%	101.656.365.000		101.656.365.000	-	15.248.454.750	15.248.454.750
126	BTP Medan	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	60,73%	1.807.180.000		1.807.180.000	1.097.462.805	1.097.500.414	37.609
127	BTP Medan	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	32,70%	900.363.000		900.363.000	259.643.313	294.418.701	34.775.388
128	BTP Medan	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	78,89%	29.152.917.000		29.152.917.000	13.583.382.733	22.998.736.221	9.415.353.488
129	BTP Medan	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	63,42%	956.960.000		956.960.000	606.888.176	606.904.032	15.856
130	BTP Medan	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	36,35%	258.775.000		258.775.000	93.287.536	94.064.713	777.177
131	BTP Medan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	61,35%	207.776.000		207.776.000	127.474.203	127.470.576	(3.627)
132	BTP Medan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	61,35%	207.776.000		207.776.000	127.474.203	127.470.576	(3.627)
133	BTP Padang	GA	4643	CAK	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	1	0	31,50%	1.042.059.000		1.042.059.000	-	328.248.585	328.248.585
134	BTP Padang	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	8.5	0	31,50%	2.209.710.000		2.209.710.000	-	696.058.650	696.058.650
135	BTP Padang	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	8.5	0	31,50%	2.209.710.000		2.209.710.000	-	696.058.650	696.058.650
136	BTP Padang	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	127	60	49,45%	14.130.476.000		14.130.476.000	4.777.301.428	6.987.520.382	2.210.218.954
137	BTP Padang	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	127	60	49,45%	14.130.476.000		14.130.476.000	4.777.301.428	6.987.520.382	2.210.218.954
138	BTP Padang	GA	4642	CDA	Operasi Prasarana Perkeretaapian	1	0	18,40%	200.000.000		200.000.000	35.506.895	36.800.000	1.293.105
139	BTP Padang	GA	4642	CDA	Operasi Prasarana Perkeretaapian	1	0	18,40%	200.000.000		200.000.000	35.506.895	36.800.000	1.293.105
140	BTP Padang	GA	4642	RDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	38,58%	47.464.490.000		47.464.490.000	-	18.311.800.242	18.311.800.242
141	BTP Padang	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	38,01%	1.017.786.000		1.017.786.000	301.946.767	386.860.459	84.913.692
142	BTP Padang	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	11,76%	2.441.380.000		2.441.380.000	193.491.910	287.106.288	93.614.378
143	BTP Padang	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	51,67%	17.024.828.000		17.024.828.000	7.837.179.197	8.796.728.628	959.549.431
144	BTP Padang	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	38,49%	1.156.402.000		1.156.402.000	302.847.722	445.099.130	142.251.408
145	BTP Padang	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	28,42%	407.744.000		407.744.000	85.564.833	115.880.845	30.316.012
146	BTP Padang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	22,57%	306.174.000		306.174.000	58.276.524	69.103.472	10.826.948
147	BTP Padang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	22,57%	306.174.000		306.174.000	58.276.524	69.103.472	10.826.948
148	BTP Palembang	GA	4641	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	12,64%	850.000.000		850.000.000	3.755.800	107.440.000	103.684.200
149	BTP Palembang	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	4.21	0.3	9,10%	2.989.052.000		2.989.052.000	-	272.003.732	272.003.732
150	BTP Palembang	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	4.21	0.3	9,10%	2.989.052.000		2.989.052.000	-	272.003.732	272.003.732
151	BTP Palembang	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	30,33%	1.164.125.000		1.164.125.000	194.349.899	353.079.113	158.729.214

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
152	BTP Palembang	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	1	16,28%	5.057.792.000		5.057.792.000	723.843.417	823.408.538	99.565.121
153	BTP Palembang	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	2	1	69,33%	20.160.131.000		20.160.131.000	10.468.951.976	13.977.018.822	3.508.066.846
154	BTP Palembang	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	1	0	36,96%	378.038.000		378.038.000	139.727.201	139.722.845	(4.356)
155	BTP Palembang	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	19,82%	1.505.659.000		1.505.659.000	167.705.745	298.421.614	130.715.869
156	BTP Palembang	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	42,36%	90.925.000		90.925.000	38.519.819	38.515.830	(3.989)
157	BTP Palembang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	18,15%	125.335.000		125.335.000	22.749.216	22.748.303	(914)
158	BTP Palembang	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	18,15%	125.335.000		125.335.000	22.749.216	22.748.303	(914)
159	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4642	ADC	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	1	0	56,47%	11.137.076.000		11.137.076.000	6.393.636.942	6.289.106.817	(104.530.125)
160	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4642	ADC	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	3	1	12,35%	9.487.120.000		9.487.120.000	1.186.647.385	1.171.659.320	(14.988.065)
161	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4642	ADI	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	1	0	16,82%	16.695.806.000		16.695.806.000	2.807.542.898	2.808.234.569	691.671
162	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	3	0	24,57%	5.396.439.000		5.396.439.000	1.325.660.600	1.325.905.062	244.462
163	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4644	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	2	15,20%	21.357.983.000		21.357.983.000	1.339.840.394	3.246.413.416	1.906.573.022
164	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	4644	FAB	Sistem Informasi	1	0	6,00%	499.500.000		499.500.000	-	29.970.000	29.970.000
165	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	0	66,05%	666.000.000		666.000.000	414.185.400	439.893.000	25.707.600
166	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	10,80%	268.248.000		268.248.000	28.973.820	28.970.784	(3.036)
167	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	3	42,68%	1.358.563.000		1.358.563.000	579.867.549	579.834.688	(32.861)
168	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	54,36%	19.933.558.000		19.933.558.000	10.836.870.575	10.835.882.129	(988.446)
169	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	15	0	21,89%	11.424.241.000		11.424.241.000	2.500.672.000	2.500.766.355	94.355
170	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	32,35%	509.160.000		509.160.000	157.158.949	164.713.260	7.554.311
171	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	36,93%	774.462.000		774.462.000	286.002.929	286.008.817	5.888
172	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	26,75%	706.777.000		706.777.000	188.613.692	189.062.848	449.156
173	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	26,75%	706.777.000		706.777.000	188.613.692	189.062.848	449.156
174	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA	4641	ABF	Rencana Induk (Master Plan)	2	1	24,70%	2.680.000.000		2.680.000.000	-	661.960.000	661.960.000
175	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA	4641	ABF	Rencana Induk (Master Plan)	2	1	24,70%	2.680.000.000		2.680.000.000	-	661.960.000	661.960.000
176	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA	4643	CAK	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	1	0	6,00%	4.120.056.000		4.120.056.000	142.013.400	247.203.360	105.189.960
177	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA	4642	CCK	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	17	7	32,08%	35.307.018.000		35.307.018.000	10.131.730.474	11.326.491.374	1.194.760.900
178	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1	0	6,00%	177.600.000		177.600.000	-	10.656.000	10.656.000
179	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	50,00%	7.818.992.000		7.818.992.000	1.861.399.900	3.909.496.000	2.048.096.100
180	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	2	1	50,00%	45.612.591.000		45.612.591.000	17.629.112.081	22.806.295.500	5.177.183.419
181	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBB	Layanan Sarana Internal	1	0	68,40%	1.209.581.000		1.209.581.000	1.115.003.965	827.353.404	(287.650.561)
182	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	50,00%	1.324.460.000		1.324.460.000	434.159.427	662.230.000	228.070.573
183	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	50,00%	122.368.000		122.368.000	103.376.625	61.184.000	(42.192.625)

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
184	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	5	1	24,48%	1.012.534.000		1.012.534.000	34.200.000	247.868.323	213.668.323
185	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	5	1	24,48%	1.012.534.000		1.012.534.000	34.200.000	247.868.323	213.668.323
186	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	1	0	38,44%	999.000.000		999.000.000	192.026.670	384.015.600	191.988.930
187	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	12,52%	2.100.000.000		2.100.000.000	-	262.920.000	262.920.000
188	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	12,52%	2.100.000.000		2.100.000.000	-	262.920.000	262.920.000
189	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	3,72%	3.376.141.000		3.376.141.000	-	125.592.445	125.592.445
190	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	2	0	3,72%	3.376.141.000		3.376.141.000	-	125.592.445	125.592.445
191	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	18,94%	13.338.709.000		13.338.709.000	1.576.211.495	2.526.351.485	950.139.990
192	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4644	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	18,94%	13.338.709.000		13.338.709.000	1.576.211.495	2.526.351.485	950.139.990
193	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA	4641	QAH	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	1	0	29,03%	191.214.326.000		191.214.326.000	38.386.679.524	55.509.518.838	17.122.839.314
194	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	ABF	Kebijakan Perencanaan	2	0	65,18%	53.206.000		53.206.000	34.569.255	34.679.671	110.416
195	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	1	0	44,70%	436.204.000		436.204.000	194.121.557	194.983.188	861.631
196	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3	0	21,93%	1.014.288.000		1.014.288.000	47.694.875	222.433.358	174.738.483
197	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	42,24%	784.677.000		784.677.000	310.009.978	331.447.565	21.437.587
198	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	39,67%	29.108.713.000		29.108.713.000	7.132.183.517	11.547.426.447	4.415.242.930
199	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4600	EBC	Layanan SDM	239	50	30,32%	132.438.000		132.438.000	13.659.438	40.155.202	26.495.764
200	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	1	83,50%	541.449.000		541.449.000	202.949.977	452.109.915	249.159.938
201	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	2	0	38,91%	395.425.000		395.425.000	153.830.747	153.859.868	29.120
202	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	BAH	Perintis Perkeretaapian	1	0	0,00%	412.670.000		412.670.000	-	-	-
203	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4643	CBA	Infrastruktur Perkeretaapian	1	0	40,00%	3.618.207.000		3.618.207.000	645.602.578	1.447.282.800	801.680.222
204	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CCK	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	4	0	40,00%	7.772.877.000		7.772.877.000	1.699.143.720	3.109.150.800	1.410.007.080
205	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	40,00%	1.828.485.000		1.828.485.000	404.837.000	731.394.000	326.557.000
206	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	1	0	40,00%	1.828.485.000		1.828.485.000	404.837.000	731.394.000	326.557.000
207	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	5	0	40,00%	7.692.726.000		7.692.726.000	385.996.005	3.077.090.400	2.691.094.395
208	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4642	CDA	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	5	0	40,00%	7.692.726.000		7.692.726.000	385.996.005	3.077.090.400	2.691.094.395
209	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	QAH	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	1	0	49,80%	80.505.992.000		80.505.992.000	12.787.745.974	40.091.984.016	27.304.238.042
210	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4643	RBA	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)	60	15	25,00%	252.064.000.000		252.064.000.000	60.956.679.273	63.016.000.000	2.059.320.727

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Blokir A	Alokasi Anggaran RO Efektif (AARO Efektif)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) x (9)	(15) = (14) - (13)
211	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro	1	0	33,00%	38.329.735.000		38.329.735.000	-	12.648.812.550	12.648.812.550
212	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Lintas Makassar - Parepare Tahap I	1	0	40,00%	70.779.756.000		70.779.756.000	2.575.267.323	28.311.902.400	25.736.635.077
213	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA	4641	RBA	Peningkatan Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi Lintas Mandai - Garongkong termasuk Supervisi	1	0	81,33%	1.233.855.000		1.233.855.000	1.003.417.513	1.003.494.272	76.759
214	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4602	CAN	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45	0	59,35%	593.371.000		593.371.000	352.179.218	352.165.689	(13.530)
215	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Hukum	1	0	49,98%	12.000.000		12.000.000	-	5.997.600	5.997.600
216	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4603	EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	0	55,99%	226.518.000		226.518.000	126.830.350	126.827.428	(2.922)
217	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	10.327.839.000		10.327.839.000	2.826.997.586	5.161.853.932	2.334.856.346
218	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4600	EBA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	0	49,98%	231.000.000		231.000.000	-	115.453.800	115.453.800
219	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBA	Layanan Perkantoran	1	0	49,98%	23.532.732.000		23.532.732.000	11.237.099.763	11.761.659.454	524.559.691
220	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	0	49,98%	986.217.000		986.217.000	350.260.758	492.911.257	142.650.499
221	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Manajemen Keuangan	1	0	49,98%	123.577.000		123.577.000	26.183.000	61.763.785	35.580.785
222	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	20.049.000		20.049.000	5.250.000	10.020.490	4.770.490
223	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA	4601	EBD	Layanan Reformasi Kinerja	1	0	49,98%	20.049.000		20.049.000	5.250.000	10.020.490	4.770.490
Jumlah								**36,365%**	**5.053.495.963.000**	**8.971.181.000**	**5.053.495.963.000**	**581.518.825.699**	**1.320.171.561.675**	**738.652.735.976**

EFISIENSI RO DJKA → **14,617%**

"Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 14,617% atau Rp738.652.735.976,00 dengan rata-rata pencapaian rincian output 36,365% "

LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI PERIODE
APRIL - JUNI 2026

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: April, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Satuan:** Rasio **Target Dalam PK:** 0,460	**0,460**	0,457	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	362	26.9	7.43	125.966.671.739	5.13	0.457	67.849.946.587	1.7%	53.86%	Realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian periode Triwulan I 2026 sebesar 0,457, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,348% dari target yang ditetapkan pada Triwulan I 2026 dan Tahun 2026 sebesar 0,460. Pada Triwulan I 2026, realisasi kinerja tidak dapat memenuhi target dikarenakan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Aceh masih terputus/rusak/tidak beroperasi yang terdampak bencana alam Sumatera yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Pada Triwulan I 2026, konektivitas infrastruktur perkeretaapian di lokasi PKN/PKW Lhokseumawe (Kuta Blang – Muara Satu) masih terputus/tidak beroperasi akibat bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Kondisi prasarana dalam kondisi rusak sedang/berat berupa gogosan, longsoran dan jembatan KA rubuh/rusak, sehingga layanan KA perintis Cut Meutia berhenti beroperasi. Untuk penanganan dampak bencana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian kondisi prasarana perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat, bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, termasuk joint inspection prasarana perkeretaapian lintas Kuta Blang – Muara Satu di Provinsi Aceh. Dari hasil inventarisasi dan penilaian serta joint inspection tersebut, direkomendasikan perbaikan geometrik lengkung serta perkuatan abutmen jembatan KA Krueng Mane antara Krueng Mane – Geurugok.	Upaya peningkatan kinerja terkait rasio konektivitas transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan 1) Merumuskan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang difokuskan di luar pulau Jawa dengan berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 2) Melaksanakan revisi master plan pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 3) Melakukan koordinasi terkait kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan adanya kebijakan efisiensi/penajaman belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026. b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran 1) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas dengan identifikasi kegiatan pembiayaan rupiah murni yang dapat ditunda di Tahun 2026, diantaranya untuk kajian perencanaan teknis mendukung rehabilitasi/rekonstruksi perkeretaapian pasca bencana alam, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan kegiatan pendukung lainnya; 2) Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan stakeholder terkait (Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, MRT Jakarta North – South, MRT Jakarta East – West, LRT Jakarta, lainnya) c. Penyesuaian organisasi/abatan/pegawai Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	288	24.14	8.38	-	-	24.14	-	100%	-	Pada Tahun 2026 belum direncanakan penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian sehingga target tahun 2026 masih sama dengan baseline yaitu 24,14. sampai dengan bulan Maret 2026 sedang dilaksanakan progres RDC SRRL dengan rincian : Telah dilakukan mobilisasi konsultan tenaga ahli lokal pada minggu kedua bulan Maret 2026, dan sedang dilakukan proses penerbitan visa tenaga ahli international untuk mobilisasi; Telah dilakukan penyusunan inception report oleh konsultan RDC SRRL (PT. Chodai Ltd. Co); Telah dikirimkan surat peringatan untuk penyampaian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.	Akan dilakukan pembahasan inception report pada minggu ke- tiga bulan April 2026; Akan dilakukan pembahasan monthly meeting pada tanggal 22 April 2026 bersama dengan tim KfW Jerman sebagai tindak lanjut progres RDC SRRL; Akan dilakukan proses penagihan uang muka pada bulan April 2026.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [km]	Panjang jalur KA yang beroperasi	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Target tahun 2026 untuk indikator Kinerja Kegiatan Panjang jalur KA yang terbangun sebesar 6.915,12km yang merupakan realisasi panjang jalur KA tahun 2025. Pada tahun 2026 terdapat potensi penyelesaian jalur KA yang terbangun pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai. Progres pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Solobalapan - Kadipiro (RPJMN) Panjang total = 3,950 km dengan progres masih bermasalah lahan di gudang gilingan pada km (107+500) at grade Kendala : MYC tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan Progres Pembangunan (JLKAMB) Paket 1-7 : Lingkup Pekerjaan : a. Elevated track sepanjang 3,3 Km'sp; b. At-grade double track sepanjang 3,5 Km'sp; c. Pembangunan 2 stasiun (Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal); d. Pengembangan Stasiun Medan; e. Sistem Persinyalan dan Telekomuniaksi. Dengan progress fisik MYC (2022-2026) : Rencana : 83,18%, Realisasi : 83,13%, Deviasi : -0,05%	Akan dilakukan monitoring progres pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	260	20	7.69	-	-	-	-	-	-	Belum terdapat realisasi dokumen kerja sama infrastruktur perkeretaapian sampai Triwulan I Tahun 2026. Adapun kegiatan yang masih dalam progress pengerjaan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum di Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang Dalam Rangka Mendukung Angkutan Batubara (saat ini sedang proses penyampaian surat permohonan reviu kepada BPKP) 2. Dokumen Reviu BPKP atas Amandemen Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Lintas Pelayanan Stasiun Cibatu Sampai Dengan Stasiun Garut (saat ini sedang berkoordinasi terhadap permohonan revu BPKP atas kewajaran nilai investasi, ketentuan kerjasama, masa konsesi, nilai konsesi fee dan kepemilikan aset	Melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP.	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA	1140	95.73	8.4	-	-	100.8	-	105.3%	-	Terpenuhinya target dikarenakan terlaksananya program perjalanan kereta api yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 yang dipengaruhi oleh beberapa perubahan kebijakan/strategi dari Badan Usaha Penyelenggara Prasarana yaitu: 1. Pengoperasian KA Tambahan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dan masa Angkutan Lebaran Tahun 2026; 2. Pengoperasian KA Fakultatif yang meteibh program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; 3. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut. Jumlah realisasi frekuensi perjalanan KA pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 266.881 KA dari jumlah target 264.757 KA, dengan rincian KA Penumpang sebanyak 249.521 perjalanan KA dan KA Barang sebanyak 17.360 perjalanan KA	a.Menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b.Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (KA LRT Jabodebek) dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; c.Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan target kinerja berdasarkan hasil pembahasan terkait evaluasi dan monitoring capaian kinerja untuk mengantisipasi capaian kinerja yang tidak memenuhi kriteria on the right track (90%-110%).	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	924	77.78	8.42	-	-	77.78	-	100%	-	Pada Tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : DED : 1 dokumen Spesifikasi Teknis : 82 dokumen Rancang Bangun : 18 dokumen Rekayasa : 11 dokumen	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**125.966.671.739**			**67.849.946.587**		**53.86**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4			Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran	Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**100**	99,625	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	690	56.95	8.25	842.167.140.333	5.13	99.62	12.230.514.016	174.93%	1.45%	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (zero accident) baik target tahunan maupun periode triwulan dengan nilai tingkat keselamatan 100%. Namun pada periode Triwulan I 2026 telah terjadi 1 kejadian kecelakaan kereta api. Dengan jumlah kejadian kecelakaan kereta api sebanyak 1 kejadian serta jumlah keberangkatan kereta api sampai dengan Triwulan I 2026 sebanyak 266.881 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode Triwulan I 2026 sebesar 99,625%. Pada bulan April terjadi 2 anjlokan KA dan 1 Tabrakan KA	Upaya peningkatan kinerja terhadap tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan 1) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, diantaranya berupa pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ramp check/audit dan pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP); 2) Koordinasi dengan stakeholder terkait (Badan Usaha, Pemerintah Daerah) untuk penanganan daerah rawan gangguan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, diantaranya daerah rawan perlintasan sebidang, daerah rawan bencana alam/cuaca ekstrim; 3) Mendorong Badan Usaha untuk melakukan identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) secara berkala/setiap bulan melalui fitur pelaporan badan usaha pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjadi bahan telaah/pengawasan dari Direktorat teknis/Balai terkait. b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran 1) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran keselamatan (reaktikasi anggaran RM Tahun 2026 dari kegiatan yang dapat ditunda/tidak dapat dilaksanakan), diantaranya untuk memenuhi anggaran IMO, kegiatan penggantian/peningkatan jembatan di beberapa lokasi, penanganan rintang jalan/amblesan, kegiatan mendesak lainnya; 2) Melaksanakan pengembangan fitur pengawasan keselamatan didukung database yang memadai pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian secara realtime. c. Penyesuaia organisasi/jabatan/pegawai Menugaskan pegawai dengan kompetensi/lungsional tertentu (inspektur perkeretaapian) untuk melakukan inspeksi prasarana dan sarana perkeretaapian yang beroperasi guna menjamin kondisi kelaikan.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	950	79.55	8.37	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan penetapan PK tahun 2026 untuk indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 memiliki target sebesar 81,82% dengan target penambahan 1 dokumen yaitu: 1. Pedoman TQI Sampai dengan Periode Triwulan I tahun 2026 telah terbit 2 Dokumen yaitu: 1. Pedoman TQI 2. SOP IMO Sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah tercapai sebesar 84,09% Renaksi pada periode triwulan I sebesar 79,55% dengan realisasi sebesar 84,09% sehingga capaian pada triwulan I sebesar 105,71%	Target indikator persentase pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sampai dengan akhir tahun telah tercapai, akan dilakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan NSPK yang belum terakomodir	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	341	6.15	1.8	-	-	-	-	-	-	Target Kinerja triwulan I 2026 adalah sebesar 3,85% dengan realisasi Kinerja TW I 8,65%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sampai bulan Maret adalah sebesar 224,67%. Dengan capaian hingga bulan Maret sebanyak 1247 sertifikat, dengan rincian 948 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 299 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Sarana Aktif sebanyak 14.412	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	466	37.03	7.95	-	-	-	-	-	-	Capaian merupakan baseline 2025. Pada Tahun 2026 ditargetkan penyusunan NSPK : a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT) d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkeretaapian e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad) f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	512	24.46	4.78	-	-	56.01	-	228.99%	-	Target Kinerja bulan April adalah 24,46%. Sampai bulan April telah dilakukan pengoperasian SMN sebanyak 14 unit sehingga realisasi kinerja sebesar 56,01% dan capaian bulan Mei 228,98%	Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan evaluasi terhadap target dan Rencana Aksi (Renaksi) bulanan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengoperasian Sarana Milik Negara (SMN) mengingat capaian hingga bulan Mei telah mencapai 392,51% atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyesuaian distribusi target bulanan agar lebih realistis dan selaras dengan rencana pengoperasian SMN sepanjang tahun. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pengoperasian SMN, pemutakhiran data pendukung, serta penguatan koordinasi dengan unit pelaksana untuk menjaga akurasi pelaporan dan memastikan target tahunan tercapai secara optimal.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	940	94.6	10.06	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021 unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan melakukan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengawasan Perawatan Sarana Telah dilaksanakan monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan. Persentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026.	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	278	22.22	7.99	-	-	-	-	-	-	Sampai dengan bulan April 2026 telah terdapat 4 hasil Audit SMKP yang telah ditindaklanjuti, sedangkan untuk target renstra yaitu sebanyak 18 hasil audit yang ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja saat ini sebesar 22,22 % (Realisasi : Target Renstra)	Melaksanakan kegiatan audit SMKP pada PT.KCIC	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti	292	21.05	7.21	-	-	-	-	-	-	Sampai dengan bulan April tahun 2026 telah terdapat 23 (duapuluh tiga) rekomendasi keselamatan yang telah ditindaklanjuti.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan memonitor terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	145	5	3.45	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan selanjutnya sesuai perencanaan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	353	24	6.8	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan pada bulan selanjutnya sesuai perencanaan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	1096	90.74	8.28	-	-	-	-	-	-	Dengan jumlah realisasi Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan sebanyak 49 NSPK dan target Renstra periode Tahun 2025 - 2029 sebanyak 54 NSPK, maka diperoleh realisasi Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90,74%	Melakukan koordinasi dengan sesditjen perkeretaapian terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi pengendali distribusi listrik	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	335	23.18	6.92	-	-	-	-	-	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian sampai dengan Februari dengan rincian sebagai berikut : Uji Pertama Lokomotif : 2 Unit Gerbong : 60 Unit Uji Berkala Lokomotif : 5 Unit Gerbong : 60 Unit	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktU	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	343	24.38	7.11	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan pengujian SDM perkeretaapian berdasarkan permohonan yang masuk pada bulan Mei 2026	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	352	24.69	7.01	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan pengujian Prasarana perkeretaapian berdasarkan permohonan yang masuk pada bulan Mei 2026	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**842.167.140.333**			**12.230.514.016**		**1.45**		
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 94,750	**94,750**	95,862	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	1128	94.5	8.38	193.110.714.663	5.13	91.1	-	96.4%	0%	Pada pelaksanaan survei posisi April 2026, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 91,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan DLLAKA	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	1140	95.25	8.36	-	-	99.5	-	104.46%	-	Pada pelaksanaan survei periode Triwulan I 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 99,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Sarana	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1164	97.5	8.38	-	-	99.23	-	101.77%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2026 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,9, dari hasil pelaksaan survey kepuasaan masyarakat dan pemantauan SKM sampai dengan periode Bulan Maret 2026 mendapat hasil sebagai mana berikut: Sampai dengan periode Bulan April tahun 2026 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,87 dari 29 responden dengan target sampai dengan Bulan April sebesar 3,9 sehingga capaian sebesar 99,23%	akan dilakukan survei kepuasan masyarakat periode bulan Mei	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	97.31	-	100.58%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 97,31. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan telah memperoleh kategori Baik.	Akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait permohonan sertifikasi SDM	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	98	-	101.29%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	1068	89.75	8.4	-	-	92.37	-	102.92%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, BPKARSS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 92,37. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKARSS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKARSS	BPKAR Sumatera Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	972	81.25	8.36	-	-	116.92	-	143.9%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, BPKASS secara agregat atau rata-rata memperoleh capaian sebesar 116,92%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKASS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKASS	BPKA Sulawesi Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	1164	97.25	8.35	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Perawatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**193.110.714.663**			**-**		**0**		

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 97,770	**97,770**	97,529	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase pemenuhan NSPK LLAKA	451	36	7.98	-	-	55	-	152.78%	-	Terpenuhinya 2 dokumen NSPK bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang telah ditetapkan: 1. KP-PHB 145 Tahun 2026 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian 2. KP-PHB 161 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda Angkutan Motor Gratis pada Masa Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru serta Hari Libur Nasional Lainnya Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Melakukan koordinasi yang intens dan diskusi yang mendalam kepada stakelholder terkait dalam penyusunan NSPK guna memperoleh data sekunder sesuai kebutuhan analisis.	Direktorat LLAKA
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Pada Tahun 2026 belum direncanakan penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretapian sehingga target tahun 2026 masih sama dengan baseline yaitu 24,14. sampai dengan bulan Maret 2026 sedang dilaksanakan progres RDC SRRL dengan rincian : Telah dilakukan mobilisasi konsultan tenaga ahli lokal pada minggu kedua bulan Maret 2026, dan sedang dilakukan proses penerbitan visa tenaga ahli international untuk mobilisasi; Telah dilakukan penyusunan inception report oleh konsultan RDC SRRL (PT. Chodai Ltd. Co); Telah dikirimkan surat peringatan untuk penyampaian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.	Akan dilakukan pembahasan inception report pada minggu ke- liga bulan April 2026; Akan dilakukan pembahasan monthly meeting pada tanggal 22 April 2026 bersama dengan tim KfW Jerman sebagai tindak lanjut progres RDC SRRL; Akan dilakukan proses penagihan uang muka pada bulan April 2026.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	1128	94.64	8.39	-	-	94.07	-	99.4%	-	Target tahun 2025 sesuai dengan target PK tahun 2026 sebesar 95%, Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode IV tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode IV pada tanggal 25 s.d 28 Januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI 1. Realisasi hasil TQI periode IV Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,07% dengan panjang jalur 5.636,718 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5.992,003 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.693,253 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.943,465 KM 2. Realisasi hasil TQI periode IV Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,93% dengan panjang jalur 355,285 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5.992,003 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 314,253 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 41,032 KM 3. Dari hasil pengukuran periode III dan periode IV terdapat perbedaan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64% dan pada periode IV menurun menjadi sepanjang 5.636,718 KM atau 94,07%. Kategori III dan IV periode III sepanjang 321,83 KM atau 5,36% dan pada periode IV meningkat menjadi sepanjang 355,285 KM atau 5,93%. Pada periode triwulan I 2026 telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel untuk wilayah jawa dan sumatera dan akan dilaksanakan evaluasi hasil pengukuran pada minggu ke-3 bulan April 2026 telah dilakukan evaluasi hasil pengukuran	Akan dilakukan penyusunan laporan evaluasi hasil pengukuran dengan kereta ukur periode 1 Tahun 2026	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Pada Tahun 2026, untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan baseline sebesar 65,21% dan ditargetkan terdapat realisasi peningkatan sinyal mekanik ke sinyal elektrik sebanyak 2 unit pada tahun 2026 yaitu Lahat dan Marapi Sesuai dengan target Renstra dan Target RPJMN. Sehingga berdasarkan penetapan PK tahun 2026, target Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik sebesar 65,53% Baseline tahun 2026 sebanyak 403 Sinyal Elektrik dan 206 Sinyal Mekanik dengan total 609 unit. Terdapat target peningkatan persinyalan pada 2 Stasiun yaitu stasiun Lahat dan Marapi. saat ini masih dalam proses pemenuhan data dukung berupa kajian teknis penggunaan E-House untuk ER	Akan dilakukan monitoring serta koordinasi untuk percepatan proses pemenuhan persyaratan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	295	20	6.78	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 40,000	**24,467**	24,112	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	353	25.71	7.28	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	349	25.3	7.25	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Juta Penumpang/ Hari]	Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	34080	2840	8.33	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**21,25**	15,345	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian	1200	100	8.33	215.482.133.631	5.13	-	-	-	0%	Pada Triwulan I 2026 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Posisi saat ini telah disusun Perjanjian Kinerja 2026, Laporan Kinerja Tahun 2025 Ditjen Perkeretaapian dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2026 Ditjen Perkeretaapian.	1. Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026; 2. Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian	650	50	7.69	-	-	-	-	-	-	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Triwulan I 2026 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 36,815	Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi one on one dengan masing-masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [%]	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian	761	35.015	4.6	-	-	18.066	-	51.6%	-	Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2026 sebesar Rp241.775.985.162,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan I 2026 sebesar 18,066% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00	Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Pada periode Triwulan I 2026 belum ditetapkan target karena menyesuaikan periode penilaian dan target ditetapkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2026. Pada periode Triwulan I 2026 masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK dan aplikasi e-Kinerja oleh masing-masing pegawai.	1. Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi; 2. Mendorong pembangunan zona integritas dengan pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan, termasuk menyelenggarakan simulasi penilaian internal (pre-assessment) unit kerja yang diusulkan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil penilaian.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**215.482.133.631**			**-**		**0**			

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Mei, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Satuan:** Rasio **Target Dalam PK:** 0,460	**0,460**	0,457	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	362	26.9	7.43	157.486.685.010	6.41	0.457	148.189.910.991	1.7%	94.1%	Realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian periode Triwulan I 2026 sebesar 0,457, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,348% dari target yang ditetapkan pada Triwulan I 2026 dan Tahun 2026 sebesar 0,460. Pada Triwulan I 2026, realisasi kinerja tidak dapat memenuhi target dikarenakan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Aceh masih terputus/rusak/tidak beroperasi yang terdampak bencana alam Sumatera yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Pada Triwulan I 2026, konektivitas infrastruktur perkeretaapian di lokasi PKN/PKW Lhokseumawe (Kuta Blang – Muara Satu) masih terputus/tidak beroperasi akibat bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2025. Kondisi prasarana dalam kondisi rusak sedang/berat berupa gogosan, longsoran dan jembatan KA rubuh/rusak, sehingga layanan KA perintis Cut Meutia berhenti beroperasi. Untuk penanganan dampak bencana tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian kondisi prasarana perkeretaapian berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat, bencana hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, termasuk joint inspection prasarana perkeretaapian lintas Kuta Blang – Muara Satu di Provinsi Aceh. Dari hasil inventarisasi dan penilaian serta joint inspection tersebut, direkomendasikan perbaikan geometrik lengkung serta perkuatan abutmen jembatan KA Krueng Mane antara Krueng Mane – Geurugok.	a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan 1) Merumuskan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang difokuskan di luar pulau Jawa dengan berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 2) Melaksanakan reviu master plan pengembangan perkeretaapian di beberapa wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan kajian evaluasi dan reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 3) Melakukan koordinasi terkait kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan adanya kebijakan efisiensi/penajaman belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026. b. Penyesuaian Aksivitas/Anggaran 1) Mengusulkan pemenuhan anggaran kegiatan prioritas pendukung sasaran konektivitas dengan identifikasi kegiatan pembiayaan rupiah murni yang dapat ditunda di Tahun 2026, diantaranya untuk kajian perencanaan teknis mendukung rehabilitasi/rekonstruksi perkeretaapian pasca bencana alam, pemenuhan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) untuk pengadaan lahan, dan kegiatan pendukung lainnya; 2) Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas termasuk dukungan pengawasan serta koordinasi teknis dengan stakeholder terkait (Makassar - Parepare termasuk pembangunan jalan akses stasiun KA, MRT Jakarta North – South, MRT Jakarta East – West, LRT Jakarta, lainnya) c. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai Mendorong peningkatan kompetensi inspektur perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas.	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	288	24.14	8.38	-	-	24.14	-	100%	-	Pada Tahun 2026 belum direncanakan penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian sehingga target tahun 2026 masih sama dengan baseline yaitu 24,14. sampai dengan bulan Maret 2026 sedang dilaksanakan progres RDC SRRL dengan rincian : Telah dilakukan mobilisasi konsultan tenaga ahli lokal pada minggu kedua bulan Maret 2026, dan sedang dilakukan proses penerbitan visa tenaga ahli international untuk mobilisasi; Telah dilakukan penyusunan inception report oleh konsultan RDC SRRL (PT. Chodai Ltd. Co); Telah diikirimkan surat peringatan untuk penyampaian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [km]	Panjang jalur KA yang beroperasi	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Target tahun 2026 untuk indikator Kinerja Kegiatan Panjang jalur KA yang terbangun sebesar 6.915,12km yang merupakan realisasi panjang jalur KA tahun 2025. Pada tahun 2026 terdapat potensi penyelesaian jalur KA yang terbangun pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai. Progres pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Solobalapan - Kadipiro (RPJMN) Panjang total = 3,950 km dengan progres masih bermasalah lahan di gudang gilingan pada km (107+500) at grade Kendala : MYC tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan Progres Pembangunan (JLKAMB) Paket 1-7 : Lingkup Pekerjaan : a. Elevated track sepanjang 3,3 Km'sp; b. At-grade double track sepanjang 3,5 Km'sp; c. Pembangunan 2 stasiun (Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal); d. Pengembangan Stasiun Medan; e. Sistem Persinyalan dan Telekomuniaksi. Dengan progress fisik MYC (2022-2026) : Rencana : 83,18%, Realisasi : 83,13%, Deviasi : -0,05%	Akan dilakukan monitoring progres pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	260	20	7.69	-	-	-	-	-	-	Belum terdapat realisasi dokumen kerja sama infrastruktur perkeretaapian sampai Triwulan I Tahun 2026. Adapun kegiatan yang masih dalam progress pengerjaan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum di Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang Dalam Rangka Mendukung Angkutan Batubara (saat ini sedang proses penyampaian surat permohonan reviu kepada BPKP) 2. Dokumen Reviu BPKP atas Amandemen Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Lintas Pelayanan Stasiun Cibatu Sampai Dengan Stasiun Garut (saat ini sedang berkoordinasi terhadap permohonan reviu BPKP atas kewajaran nilai investasi, ketentuan kerjasama, masa konsesi, nilai konsesi fee dan kepemilikan aset	Melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP.	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA	1140	95.73	8.4	-	-	100.8	-	105.3%	-	Terpenuhinya target dikarenakan terlaksananya program perjalanan kereta api yang telah diletapkan pada Tahun 2026 yang dipengaruhi oleh beberapa perubahan kebijakan/strategi dari Badan Usaha Penyelenggara Prasarana yaitu: 1. Pengoperasian KA Tambahan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dan masa Angkutan Lebaran Tahun 2026; 2. Pengoperasian KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; 3. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut. Jumlah realisasi frekuensi perjalanan KA pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 266.881 KA dari jumlah target 264.757 KA, dengan rincian KA Penumpang sebanyak 249.521 perjalanan KA dan KA Barang sebanyak 17.360 perjalanan KA	a.Menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b.Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (KA LRT Jabodebek) dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; c.Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan target kinerja berdasarkan hasil pembahasan terkait evaluasi dan monitoring capaian kinerja untuk mengantisipasi capaian kinerja yang tidak memenuhi kriteria on the right track (90%-110%).	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	924	77.78	8.42	-	-	77.78	-	100%	-	Pada Tahun 2026 tidak terdapat kegiatan DED pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke 1 tanggal 25 Desember 2025 Nomor : SP DIPA022.08.1.467478/2026 maka target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 77,78% berdasarkan pengesahan DED, spektek, rancang bangun dan rekayasa yang menjadi baseline tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : DED : 1 dokumen Spesifikasi Teknis : 82 dokumen Rancang Bangun : 18 dokumen Rekayasa : 11 dokumen	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**157.486.685.010**			**148.189.910.991**		**94.1**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**100**	99,625	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	690	58.78	8.52	1.052.708.925.417	6.41	-	-	-	0%	Pada Tahun 2026 sesuai dengan penetapan PK 2026 direncanakan terdapat target Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 62,79% yang akan ditetapkan pada tahun 2026 dengan realisasi sampai dengan bulan April sebesar 52,67% dengan target renaksi sampai dengan April sebesar 58,78% Sehingga Capaian sampai dengan bulan april 2026 sebesar 88,4%. Baseline Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 50,58% dengan target pada tahun 2026 terdapat penambahan sebanyak 274 sertifikat sehingga menjadi 62,79%. Realisasi Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 51,96% dengan realisasi sampai dengan bulan april tahun 2026 terdapat penambahan sebanyak 25 sertifikat dengan rincian sebanyak 15 sertifikat jalur dan bangunan kereta api serta 10 sertifikat fasilitas operasi kereta api.	- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Persetujuan Konsep SK Direktur Jenderal Perkeretapian yaitu: 1. Terdapat Sertifikat dalam proses Persetujuan Konsep SK Direktur Jenderal Perkeretaapian yaitu: - Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian berupa Jalur dan Stasiun Kereta Api pada Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Solo - Wonogiri Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang 2. Penyampaian Konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang pengesahan dan sertifikasi uji berkala prasarana perkeretaapian jalur kereta api di area depo Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta milik PT MRT Jakarta (Perseroda) 3. Krueng Geukeuh - Muara Satu Proses Penyusunan Konsep SK Direktur Prasarana tentang Pengesahan Hasil Pengujian 4. Penyampaian Konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang pengesahan dan sertifikasi uji pertana prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api di depo (depo tegalluar dan depo karawang) pada pembangunan prasarana kereta api kecepatan tinggi jakarta - bandung milik PT Kereta Api Cepat Indonesia China akan dikirimkan Surat PermintaanTindak Lanjut atas Temuan Hasil Uji kepada Pemohon (KCIC, LRT Sumsel, dll) akan dikirimkan Surat Konfirmasi Pelaksanaan Pengujian ke Balai Uji (Uji Berkala Daop 8 Surabaya, Uji Pertama EMU KCIC, dll) akan dikirimkan Surat Pemberlahuan Masa Berlaku Sertifikat (BTP Semarang, BTP Surabaya).	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	950	79.55	8.37	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan penetapan PK tahun 2026 untuk indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 memiliki target sebesar 81,82% dengan target penambahan 1 dokumen yaitu: 1. Pedoman TQI Sampai dengan Periode Triwulan I tahun 2026 telah terbit 2.Dokumen yaitu: 1. Pedoman TQI 2. SOP IMO Sehingga sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah tercapai sebesar 84,09% Renaksi pada periode triwulan I sebesar 79,55% dengan realisasi sebesar 84,09% sehingga capaian pada triwulan I sebesar 105,71%	Target indikator persentase pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sampai dengan akhir tahun telah tercapai, akan dilakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan NSPK yang belum terakomodir	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	341	10	2.93	-	-	-	-	-	-	Target Kinerja triwulan I 2026 adalah sebesar 3,85% dengan realisasi Kinerja TW I 8,65%. Sehingga Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sampai bulan Maret adalah sebesar 224,67%. Dengan capaian hingga bulan Maret sebanyak 1247 sertifikat, dengan rincian 948 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 299 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II. Dengan Sarana Aktif sebanyak 14.412	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan NSPK Bildang Sarana Perkeretaapian	466	37.03	7.95	-	-	-	-	-	-	Capaian merupakan baseline 2025. Pada Tahun 2026 ditargetkan penyusunan NSPK : a. Kajian Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara b. Kajian Standard Crash Energy Management pada Sarana Perkeretaapian c. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Autonomus Rail Rapid Transit (ART) dan Automated Guideway Transit (AGT) d. Studi Kajian Teknis Standar dan Tata Cara Inspeksi Sarana Perkerjetaapian e. Studi Penyusunan Standar Dan Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kendaraan Yang Berjalan Di Jalur KA (Railroad) f. Kajian Pedoman Pelaksanaan Uji Integrasi Sub Sistem Sarana Pada Sarana Otomatis	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	512	24.46	4.78	-	-	-	-	-	-	Target Kinerja bulan Mei adalah 24,46. Sampai bulan Mei telah dilakukan pengoperasian SMN sebanyak 30 unit sehingga realisasi kinerja sebesar 96,01% dan capaian bulan Mei 392,51%	Direktorat Sarana Perkeretaapian akan melakukan evaluasi terhadap target dan Rencana Aksi (Renaksi) bulanan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengoperasian Sarana Milik Negara (SMN) mengingat capaian hingga bulan Mei telah mencapai 392,51% atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar penyesuaian distribusi target bulanan agar lebih realistis dan selaras dengan rencana pengoperasian SMN sepanjang tahun. Selain itu, akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pengoperasian SMN, pemutakhiran data pendukung, serta penguatan koordinasi dengan unit pelaksana untuk menjaga akurasi pelaporan dan memastikan target tahunan tercapai secara optimal.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	940	94.6	10.06	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021 unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dan melakukan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengawasan Perawatan Sarana Telah dilaksanakan monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan. Persentase Pengawasan Tempat Perawatan Sarana Telah dilaksanakan monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain: Balai Yasa Manggarai, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Tegal, dan Balai Yasa Gubeng. Hasil monitoring tersebut terdapat 1 (satu) temuan pada BY Manggarai dengan tidak tersedianya alat Load Bogie Test. Tindak lanjut dari temuan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan pengadaan Load Bogie Test tahun 2026.	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	278	22.22	7.99	-	-	-	-	-	-	Sampai dengan bulan Mei 2026 telah terdapat 4 hasil Audit SMKP yang telah ditindaklanjuti, sedangkan untuk target renstra yaitu sebanyak 18 hasil audit yang ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja saat ini sebesar 22,22 % (Realisasi / Target Renstra)	Melaksanakan kegiatan audit SMKP pada PT.KCIC	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti	292	21.05	7.21	-	-	-	-	-	-	sampai dengan bulan Mei tahun 2026 telah terdapat 23 (duapuluh tiga) rekomendasi keselamatan yang telah ditindaklanjuti	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan memonitor terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	145	5	3.45	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan kegiatan belum berjalan	Melaksanakan kegiatan pada bulan selanjutnya sesuai perencanaan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	353	24	6.8	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses	Melaksanakan kegiatan pada bulan selanjutnya sesuai perencanaan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	1096	90.74	8.28	-	-	-	-	-	-	Dengan jumlah realisasi Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan sebanyak 49 NSPK dan target Renstra periode Tahun 2025 - 2029 sebanyak 54 NSPK, maka diperoleh realisasi Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90,74%.	Melakukan koordinasi dengan sesditjen perkeretaapian terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi pengendali distribusi listrik	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	335	23.93	7.14	-	-	-	-	-	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian sampai dengan Februari dengan rincian sebagai berikut : Uji Pertama Lokomotif : 2 Unit Gerbong : 60 Unit Uji Berkala Lokomotif : 5 Unit Gerbong : 60 Unit	Melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian berdasarkan permohonan yang masuk pada bulan Juni tahun 2026	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	343	26.04	7.59	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan pengujian SDM perkeretaapian berdasarkan permohonan yang masuk pada bulan Mei 2026	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	352	26.59	7.55	-	-	-	-	-	-	Melaksanakan pengujian Prasarana perkeretaapian berdasarkan permohonan yang masuk pada bulan Mei 2026	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**1.052.708.925.417**			-		**0**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 94,750	**94,750**	95,862	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	1128	94.5	8.38	241.431.847.586	6.41	91.1	-	96.4%	0%	Berdasarkan analisa hasil survei yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut atau kategori yang memiliki nilai terendah, yaitu sebagai berikut: 1. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian pengajuan pelayanan (izin usaha/izin operasi kereta api) terkadang tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi dikarenakan Badan Usaha yang mengajukan perizinan, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dalam pemenuhan data dukung menghambat proses pengajuan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari ketentuan. 2. Informasi Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian persyaratan dan data dukung yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan, maka telah dilakukan audiensi dengan Badan Usaha terkait penetapan perizinan dan lintas pelayanan kereta api yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Melakukan audiensi terhadap pelaku usaha eksternal baru yang belum mempunyai informasi terkait usaha di bidang perkeretaapian untuk menyampaikan proses/prosedur yang harus dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk memperoleh izin usaha b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dilaksanakan setiap bulan	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	1140	95.25	8.36	-	-	99.5	-	104.46%	-	Pada pelaksanaan survei periode Triwulan I 2026, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 99,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Dit Sarana	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1164	97.5	8.38	-	-	3.87	-	3.97%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2026 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,9, dari hasil pelaksaan survey kepuasaan masyarakat dan pemantauan SKM sampai dengan periode Bulan Maret 2026 mendapat hasil sebagai mana berikut: Sampai dengan periode Bulan April tahun 2026 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretapian sebesar 3,87 dari 29 responden dengan target sampai dengan Bulan April sebesar 3,9 sehingga capaian sebesar 99,23%	akan dilakukan survei kepuasan masyarakat periode bulan Mei	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	96.8	-	100.05%	-	Pada bulan Mei 2026 terdapat 17 responden yang telah mengisi survey kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi SDM dengan nilai 3,79 , jika menggunakan rumus perhitungan nilai IKM (hasil survey x 25) maka nilainya sebesar 94,75. sedangkan nilai rata-rata dari Januari - Mei sebesar 96,81	Terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait permohonan sertifikasi SDM	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	98	-	101.29%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	1068	89.75	8.4	-	-	92.37	-	102.92%	-	Pada pelaksanaan survei periode April 2026, BPKARSS secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 92,37. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BPKARSS telah memperoleh kategori Baik.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyrakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKARSS	BPKAR Sumatera Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	972	81.25	8.36	-	-	3.86	-	4.75%	-	Nilai IKM bulan April sebesar 3,87 dengan nilai Kumulatif sebesar 3,86 dan jumlah responden sebanyak 275 orang	Konsistensi pelaksanaan Survey IKM	BPKA Sulawesi Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	1164	97.25	8.35	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Balai Perawatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**241.431.847.586**			-		**0**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 97,770	**97,770**	97,529	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase pemenuhan NSPK LLAKA	451	36	7.98	-	-	159.82	-	443.94%	-	Terpenuhinya 2 dokumen NSPK bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang telah ditetapkan: 1. KP-PHB 145 Tahun 2026 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian 2. KP-PHB 161 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda Angkutan Motor Gratis pada Masa Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru serta Hari Libur Nasional Lainnya Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Melakukan koordinasi yang intens dan diskusi yang mendalam kepada stakelholder terkait dalam penyusunan NSPK guna memperoleh data sekunder sesuai kebutuhan analisis.	Direktorat LLAKA
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretapian	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Pada Tahun 2026 belum direncanakan penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretapian sehingga target tahun 2026 masih sama dengan baseline yaitu 24.14. sampai dengan bulan Maret 2026 sedang dilaksanakan progres RDC SRRL dengan rincian : Telah dilakukan mobilisasi konsultan tenaga ahli lokal pada minggu kedua bulan Maret 2026, dan sedang dilakukan proses penerbitan visa tenaga ahli international untuk mobilisasi; Telah dilakukan penyusunan inception report oleh konsultan RDC SRRL (PT. Chodai Ltd. Co); Telah dikirimkan surat peringatan untuk penyampaian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.	Akan dilakukan pembahasan inception report pada minggu ke- tiga bulan April 2026; Akan dilakukan pembahasan monthly meeting pada tanggal 22 April 2026 bersama dengan tim KfW Jerman sebagai tindak lanjut progres RDC SRRL; Akan dilakukan proses penagihan uang muka pada bulan April 2026.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	1128	94.64	8.39	-	-	94.07	-	99.4%	-	Target tahun 2025 sesuai dengan target PK tahun 2026 sebesar 95%, Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode IV tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode IV pada tanggal 25 s.d 28 Januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI 1. Realisasi hasil TQI periode IV Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,07% dengan panjang jalur 5.636,718 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5.992,003 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.693,253 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.943,465 KM 2. Realisasi hasil TQI periode IV Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,93% dengan panjang jalur 355,285 KM dari total panjang jalur keseluruhan 5.992,003 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 314,253 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 41,032 KM 3. Dari hasil pengukuran periode III dan periode IV terdapat perbedaan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64% dan pada periode IV menurun menjadi sepanjang 5.636,718 KM atau 94,07%. Kategori III dan IV periode III sepanjang 321,83 KM atau 5,36% dan pada periode IV meningkat menjadi sepanjang 355,285 KM atau 5,93%. Pada periode triwulan I 2026 telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel untuk wilayah jawa dan sumatera dan akan dilaksanakan evaluasi hasil pengukuran pada minggu ke-3 bulan April 2026 telah dilakukan evaluasi hasil pengukuran	akan dilakukan penyusunan laporan evaluasi hasil pengukuran dengan kereta ukur periode 1 tahun 2026	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Pada Tahun 2026, untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan baseline sebesar 65,21% dan ditargetkan terdapat realisasi peningkatan sinyal mekanik ke sinyal elektrik sebanyak 2 unit pada tahun 2026 yaitu Lahat dan Marapi Sesuai dengan target Renstra dan Target RPJMN. Sehingga berdasarkan penetapan PK tahun 2026, target Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik sebesar 65,53% Baseline tahun 2026 sebanyak 403 Sinyal Elektrik dan 206 Sinyal Mekanik dengan total 609 unit. Terdapat target peningkatan persinyalan pada 2 Stasiun yaitu stasiun Lahat dan Marapi. saat ini masih dalam proses pemenuhan data dukung berupa kajian teknis penggunaan E-House untuk ER	akan dilakukan monitoring serta koordinasi untuk percepatan proses pemenuhan persyaratan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	295	20	6.78	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 40,000	**26,107**	24,112	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	353	27.32	7.74	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	349	27	7.74	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Juta Penumpang/ Hari]	Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	34080	2840	8.33	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Direktorat LLAKA
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**21,41**	15,345	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian	1200	100	8.33	269.401.155.368	6.41	-	-	-	0%	Pada Triwulan I 2026 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Posisi saat ini telah disusun Perjanjian Kinerja 2026, Laporan Kinerja Tahun 2025 Ditjen Perkeretaapian dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2026 Ditjen Perkeretaapian.	1. Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026; 2. Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian	650	50	7.69	-	-	-	-	-	-	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Triwulan I 2026 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 36,815	Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi one on one dengan masing-masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [%]	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian	761	35.621	4.68	-	-	18.066	-	50.72%	-	Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2026 sebesar Rp241.775.985.162,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan I 2026 sebesar 18,066% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00	Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	100	-	-	-	-	86.72	-	-	-	Realisasi nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Mei 2026 mengacu pada hasil penilaian mandiri (self assessment) dengan diperoleh hasil 86,72 dari skala 0-100 atau kategori "Tinggi". Berdasarkan perolehan nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026, diperoleh bahwa 3 dari 4 aspek mengalami penurunan nilai dari periode sebelumnya (Tahun 2025), diantaranya aspek kualifikasi yang memperoleh nilai 23,38 (turun dari 23,56 pada Tahun 2025), aspek kinerja sebesar 25,96 (turun dari 26,41 pada Tahun 2025), serta aspek disiplin sebesar 4,97 (turun dari 5,00 pada Tahun 2025)	Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyesuaian strategi/kebijakan: 1) Penguatan kualitas dan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK di masing-masing unit kerja; 2) Peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema Work From Home (WFH). b. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja. c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**269.401.155.368**			-		**0**			

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juni, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Satuan:** Rasio **Target Dalam PK:** 0,460	**0,460**	0,457	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	362	30.7	8.48	188.968.904.500	7.69	30.7	3.522.231.687	100%	1.86%	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 30,70% dengan terpenuhinya 2 Dokumen Perencanaan Bidang Jaringan Jalur Kereta Api dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian, yaitu: 1. Dokumen Hasil Monitoring Reaktivasi Kereta Logistik di Stasiun Cigading 2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelas Stasiun di Wilayah Jabodetabek	Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait dokumen perencanaan bidang jaringan dan pelayanan perkeretaapian	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana	288	24.14	8.38	-	-	30.7	-	127.17%	-	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 30,70% dengan terpenuhinya 2 Dokumen Perencanaan Bidang Jaringan Jalur Kereta Api dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian, yaitu: 1. Dokumen Hasil Monitoring Reaktivasi Kereta Logistik di Stasiun Cigading 2. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelas Stasiun di Wilayah Jabodetabek	Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait dokumen perencanaan bidang jaringan dan pelayanan perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [km]	Panjang jalur KA yang beroperasi	82980	6915.12	8.33	-	-	6915.12	-	100%	-	Target tahun 2026 untuk indikator Kinerja Kegiatan Panjang jalur KA yang terbangun sebesar 6.915,12km yang merupakan realisasi panjang jalur KA tahun 2025. Pada tahun 2026 terdapat potensi penyelesaian jalur KA yang terbangun pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai. Progres pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Solobalapan - Kadipiro (RPJMN) Panjang total = 3,950 km dengan progres kendala pada lahan di gudang gilingan pada km (107+500) at grade telah keluar putusan Peninjauan Kembali dengan hasil PK ditolak dan eksekusi perubuhan bangunan menunggu anggaran Kendala : MYC tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan Progres Pembangunan (JLKAMB) Paket 1-7 : Lingkup Pekerjaan : a. Elevated track sepanjang 3,3 Km'sp; b. At-grade double track sepanjang 3,5 Km'sp; c. Pembangunan 2 stasiun (Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal); d. Pengembangan Stasiun Medan; e. Sistem Persinyalan dan Telekomuniaksi. Dengan progress fisik sampai dengan TW I 2026 (MYC 2022-2026) : Rencana : 83,18%, Realisasi : 83,13%, Deviasi : -0,05%	Akan dilakukan pengawasan pada kegiatan yang sedang dalam proses	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	260	20	7.69	-	-	20	-	100%	-	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 20,00%, terdapat kegiatan penyusunan dokumen kerja sama bidang perkeretaapian yang masih berproses, yaitu: Dokumen Reviu BPKP atas Pelaksanaan Perjanjian KPBU Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare dalam Pembayaran Availability Payment. (Telah melaksanakan Rapat Monitoring Kesiapan Pemenuhan Persyaratan dengan Skema KPBU pada tanggal 26 Mei 2026). Dokumen Reviu BPKP Pusat atas Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Segmen I Wilayah Lahat sampai Kertapati di Provinsi Sumatera Selatan. (Telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 Mei 2026 dengan hasil pada rapat tersebut PT KAI diminta untuk lebih proaktif dan menunjukkan komitmen dalam penyelesaian berbagai outstanding issues, termasuk penyelesaian terkait lahan mitra dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka menjawab hasil reviu BPKP Propinsi. Terhadap beberapa permasalahan tersebut, dihibau untuk menyusun langkah konkrit sesuai dengan timeline yang telah ada. Pada kesempatan tersebut, PT. KAI diharapkan dapat menyiapkan laporan penyelenggaraan konsesi secara berkala sesuai ketentuan perjanjian konsesi). Dokumen Rencana Pengembangan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum di Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang dalam Rangka Mendukung Angkutan Batubara. (PT KAI telah menyampaikan Surat perihal Penyampaian Data Dukung dan Permohonan Addendum PKS pada tanggal 25 Maret 2026, dan DJKA akan menyampaikan Surat Permohonan Reviu kepada BPKP, yang saat ini sedang menunggu perstujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian). Dokumen Reviu BPKP Pusat atas Amandemen Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Lintas Pelayanan Stasiun Cibatu sampai dengan Stasiun Garut. (Telah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 Mei 2026 dengan hasil pada rapat tersebut PT KAI diminta untuk lebih proaktif dan menunjukkan komitmen dalam penyelesaian berbagai outstanding issues, termasuk penyelesaian dokumen perizinan, pengujian kelaikan, permasalahan jembatan, serta penyampaian laporan pen	Melakukan percepatan penyelesaian dokumen kerjasama pengembangan perkeretaapian	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA	1140	95.73	8.4	-	-	100.99	-	105.49%	-	Capaian kinerja Tahun 2026 (Data bulan Mei 2026) sebesar 100,99%. Data realisasi frekuensi perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (KA penumpang dan KA barang), yaitu sebanyak 448.378 perjalanan KA, dengan rincian jumlah perjalanan KA Penumpang sebanyak 418.814 perjalanan KA, dan jumlah perjalanan KA Barang sebanyak 29.564 perjalanan KA. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi meningkatnya jumlah perjalanan KA terhadap target, yaitu: Perubahan Program perjalanan LRT Jabodebek semula flat 158 KA menjadi 430 KA saat Weekday dan 270 KA saat weekend. Perubahan Program perjalanan LRT Sumsel,semula flat 88 KA menjadi flat 94 KA. Klasifikasi weekend mengacu pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur berdasarkan SKB Hari Libur dan Cuti Bersama.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjalanan kereta api berdasarkan gapeka dengan Operator dan Balai Teknik Perkeretaapian	Direktorat LLAKA
			Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	924	77.78	8.42	-	-	84.02	-	108.02%	-	Realisasi kinerja hingga bulan Maret 2026 antara lain : Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang menjadi kereta penumpang wisata versi Heritage Eksekutif (K1) tipe 1 Milik PT KAI (Persero) dengan nomor dokumen: KA.603/1/1/K4/DJKA/2026 Spesifikasi Teknis Rekayasa Kereta Penumpang Menjadi Kereta Penumpang Wisata Versi Heritage Eksekutif (K1) Tipe 2 Milik PT KAI (Persero) Dengan Nomor Dokumen: KA.603/1/2/K4/Djka/2026 Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus Kereta Pemeliharaan Jalan Rel Vehicle Excavator Rail-road Milik Balai Perawatan Perkeretaapian Dengan Nomor Dokumen KA.603/115/K4/Djka/2026 Spesifikasi Teknis Peralatan Khususkereta Perawatan Jalan Rel Jenis Alat Pengangkut (Transport Gerat) Milik Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Nomor Dokumen KA.603/118/K4/Djka/2026 Perpanjangan Persetujuan Spesifikasi Teknis Gerbong Terbuka – Berat Muat (Bm) 50 T Pintu Bawah Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Nomor Dokumen KA.603/162/K4/Djka/2026	melakukan pemantauan kegiatan setiap bulan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**188.968.904.500**			**3.522.231.687**		**1.86**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**100**	99,625	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	690	59.05	8.56	1.263.250.710.500	7.69	54.86	40.890.105.354	92.9%	3.24%	Pada Tahun 2026 sesuai dengan penetapan PK 2026 direncanakan terdapat target Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 62,79% yang akan ditetapkan pada tahun 2026 dengan realisasi sampai dengan bulan Mei sebesar 54,68% dengan target renaksi sampai dengan Mesebesar 58,78% Sehingga Capaian pada periode Mei 2026 sebesar 93,02% dibanding dengan target renaksi bulan Mei dan sebesar 87,08% jika dibandingkan dengan target akhir tahun	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Persetujuan Konsep SK Direktur Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	950	79.55	8.37	-	-	84.09	-	105.71%	-	Sesuai dengan penetapan PK tahun 2026 untuk indikator Kinerja Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 memiliki target sebesar 81,82% dengan target penambahan 1 dokumen yaitu Pedoman TQI Sampai dengan Periode Bulan April tahun 2026 telah terbit 2 Dokumen yaitu: 1. Pedoman TQI 2. SOP IMO Sehingga sampai dengan April tahun 2026 telah tercapai sebesar 84,09% Renaksi pada periode April sebesar 79,55% dengan realisasi sebesar 84,09% sehingga capaian pada April sebesar 105,71%	akan dilakukan usulan anggaran untuk sosialisasi Pedoman TQI	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	341	16.15	4.74	-	-	22.15	-	137.15%	-	Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian dan Supervisi Pengujian Sarana Wilayah I dan Wilayah II masih berproses	akan dilakukan percepatan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Bldang Sarana Perkeretaapian	466	37.03	7.95	-	-	37.03	-	100%	-	Kajian Tentang Standar Dan Tata Cara Pengujian Uji Pembebanan Statis dan Dinamis Pada Sarana Perkeretaapian masih berproses	akan dilakukan percepatan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	512	24.46	4.78	-	-	21.01	-	85.9%	-	Pengoperasian Sarana Milik Negara masih berproses	akan dilakukan percepatan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	940	94.6	10.06	-	-	97.79	-	103.37%	-	Pelaksanaan Rampcheck Angkutan lebaran, Natal dan tahun baru di bidang sarana perkeretaapian masih berproses	akan dilakukan percepatan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase hasil Pengawasan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	100	-	-	-	Pengawasan Perawatan, Tempat dan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian di Bidang Sarana Perkeretaapian masih berproses	akan dilakukan percepatan monitoring kegiatan	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	278	22.22	7.99	-	-	22.22	-	100%	-	Sampai dengan bulan Mei 2026 telah terdapat 4 hasil Audit SMKP yang telah ditindaklanjuti, sedangkan untuk target renstra yaitu sebanyak 18 hasil audit yang ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja saat ini sebesar 22,22 % (Realisasi / Target Renstra)	Melaksanakan kegiatan audit SMKP pada PT.KCIC	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti	292	23.16	7.93	-	-	25	-	107.94%	-	Sampai dengan bulan Mei 2026 terdapat 5 rekomendasi teknis keamanan perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti, sedangkan target renstra yaitu sebanyak 20 rekomendasi sehingga dengan demikian capaiannya yaitu sebesar 20% (Realisasi / Target)	Rencana Selanjutnya: Subdit rekayasa dan peningkatan keselamatan berencana akan melaksanakan tinjauan lapangan bersama dengan dishub jember terkait dengan permohonan rekomendasi	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	145	10	6.9	-	-	20	-	200%	-	Sampai dengan Bulan Juni terdapat 4 capaian IKK Tindak lanjut penindakan dan Penegakan Hukum, sehingga capaian kinerjanya adalah (4/20)x100 = 20% (Capaian / Target Renstra)	Rencana Selanjutnya: Subdit Pencegahan dan Penegakan hukum telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kompetensi SDM Perkeretaapian sebagai upaya preventif untuk memastikan kesiapan, kedisiplinan serta keselamatan dalam mendukung transportasi Perkeretaapian yang Aman	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	353	30	8.5	-	-	30.41	-	101.37%	-	sampai denga bulan Juni terdapat 2.678 sertifikasi SDM Operator. akumulasi jumlah sertifikasi dari tahun sebelumnya ditambahkan dengan capaian pada tahun ini adalah sebesar (8.271 + 2.678) = 10.949 sertifikat. Jumlah total sertifikasi dibagi dengan target renstra (10.949/36.000) = 30,41	Rencana Selanjutnya: Direktorat Keselamatan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan permohonan sertifikasi SDM Operator dan Regulator	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	1096	92.59	8.45	-	-	90.74	-	98%	-	Sampai dengan bulan Mei 2026 masih belum terdapat tambahan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian sehingga capaiannya masih sama dengan capaian sebelumnya yaitu sebesar 90,74 atau 49 NSPK	Rencana Selanjutnya: melakukan koordinasi dengan sesditjen perkeretaapian terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi pengendali distribusi listrik	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	335	25.42	7.59	-	-	27.38	-	107.71%	-	Realisasi pengujian sarana perkeretaapian hingga bulan Mei tahun 2026 adalah sebanyak 18.383 Unit dari target tahun 2026 sebanyak 26.579 Unit	1. Akan dilakukan evaluasi target pengujian sarana perkeretaapian 2. Money trwulanan dengan stakeholder guna menyelaraskan data pengujian sarana	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	343	28.32	8.26	-	-	27.51	-	97.14%	-	Realisasi pengujian SDM perkeretaapian hingga bulan Mei tahun 2026 adalah sebanyak 12.005 Orang dari target tahun 2026 sebanyak 15.716 Orang	1. Akan dilakukan evaluasi target pengujian SDM perkeretaapian 2. Pemenuhan kompetensi asesor perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	352	28.54	8.11	-	-	24.72	-	86.62%	-	Realisasi pengujian prasarana perkeretaapian hingga bulan Mei tahun 2026 adalah 336 Unit dan 497,295 km'sp dari target tahun 2026 sebanyak 585 Unit dan 720 km'sp	1. Akan dilakukan evaluasi target pengujian prasarana perkeretaapian 2. Membuat rekapitulasi pengujian yang belum ditindaklanjuti oleh pemohon dan bersurat kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktorat Prasarana	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**1.263.250.710.500**			**40.890.105.354**		**3.24**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 94,750	**94,750**	95,862	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	1128	94.5	8.38	289.695.041.500	7.69	94.54	-	100.04%	0%	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 memperoleh nilai 94,54 yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat LLAKA telah memperoleh kategori Sangat Baik dengan jumlah responden sebanyak 51 orang.	Meningkatkan evaluasi terhadap pengisian kuesioner pada responden di lingkungan Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	1140	95.25	8.36	-	-	82.16	-	86.26%	-	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut : 1. Januari : 4 2. Februari : 4 3. Maret : 4 4. April : 3,82 5. Mei : 0 6. Juni : 3,90 Secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat 3,28 dalam skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 14 responden. Sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, maka hasil penilaian di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM = SKM unit pelayanan x 25 menjadi 3,28 x 25 = 82,16. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori baik	Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari s.d. Juni 2026 yang memperoleh nilai IKM sebesar 82,16 dengan kategori Baik, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala, peningkatan kompetensi pelayanan, serta penyempurnaan proses bisnis pelayanan. Selain itu, mengingat jumlah responden pada periode survei ini masih relatif terbatas, yaitu sebanyak 8 responden, Direktorat Sarana Perkeretaapian akan mengoptimalkan pelaksanaan survei dengan meningkatkan sosialisasi dan penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi responden sehingga hasil survei yang diperoleh pada periode berikutnya dapat lebih representatif dalam menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1164	97.5	8.38	-	-	97.25	-	99.74%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2026 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,9, dari hasil pelaksaan survey kepuasaan masyarakat dan pemantauan SKM sampai dengan periode Bulan Mei 2026 mendapat hasil sebagai mana berikut: Sampai dengan periode Bulan Mei tahun 2026 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,89 dari 30 responden dengan target sampai dengan Bulan Mei sebesar 3,9 sehingga capaian sebesar 99,74%	akan dilakukan pelaksanaan survei IKM untuk periode bulan juni	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Nilai]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	96.79	-	100.04%	-	Pada bulan Juni 2026 terdapat 10 responden yang telah mengisi survey kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi SDM dengan nilai 3,87 , jika menggunakan rumus perhitungan nilai IKM (hasil survey x 25) maka nilainya sebesar 96,75. sedangkan nilai rata-rata dari Januari - Juni sebesar 96,79	Rencana Selanjutnya: Terus berupaya meningkatkan pelayanan terkait pemrohonan sertifikasi SDM	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	1152	96.75	8.4	-	-	96.88	-	100.13%	-	Sebanyak 1.694 Pengguna Layanan Telah Mengisi Survei IKM Secara Elektronik sampai dengan Bulan Mei Tahun 2026	1. Akan dilakukan pelaporan secara berkala yang dilakukan oleh Tim SKM masing-masing seksi kepada tim humas secara online 2. Menyusun konsep laporan SKM Triwulan II Tahun 2026 yang dilaporkan kepada PPTB	Balai Pengujian Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	1068	89.75	8.4	-	-	93.09	-	103.72%	-	dilaksanakan rutin bulanan	dilaksanakan rutin bulanan	BPKAR Sumatera Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	972	81.25	8.36	-	-	97	-	119.38%	-	Hasil Pengukuran Bulan Mei sebesar 3,88 dari total responden sebanyak 257 orang	Revisi pada perjanjian kinerja	BPKA Sulawesi Selatan
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	1164	97.25	8.35	-	-	93.7	-	96.35%	-	dalam tahap pelaksanaan kegiatan	dalam tahap pelaksanaan kegiatan	Balai Perawatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**289.695.041.500**			**-**		**0**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 97,770	**97,770**	97,59	Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase pemenuhan NSPK LLAKA	451	36	7.98	-	-	47.62	-	132.28%	-	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 47,62%. Terpenuhinya 4 dokumen NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, antara lain:	Melakukan koordinasi dan pembahasan intens terhadap penyusunan NSPK bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Direktorat LLAKA
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	398	33.9	8.52	-	-	24.14	-	71.21%	-	Pada Tahun 2026 belum direncanakan penambahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian sehingga target tahun 2026 masih sama dengan baseline yaitu 24,14. sampai dengan bulan April 2026 realisasi persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian sebesar 24,14 atau 100% dari target dengan proses Telah dilakukan pembahasan inception report oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan konsultan RDC SRRL (Chodai Ltd. Co dan PT Dardela Yasa Guna) pada 22 April 2026	akan dilakukan pembayaran uang muka serta direncanakan dilakukan pemisahan anggaran untuk kegiatan PMC	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	1128	94.64	8.39	-	-	94.07	-	99.4%	-	Target tahun 2026 sesuai dengan target PK tahun 2026 sebesar 95%, Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode I tahun 2026 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode I 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI 1. Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2026 Kategori I dan II sebesar 92,44% dari total panjang jalur keseluruhan 5.933,836 KM 2. Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2026 Kategori III dan IV sebesar 7,56% dari total panjang jalur keseluruhan 5.933,836 KM 3. Dari hasil pengukuran periode IV 2025 dan periode I terdapat perbedaan kategori sebagai berikut: - Penurunan persentase tertinggi terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang terdiri dari Divre III Palembang sebesar 8,65% dan Divre IV Tanjungkarang sebesar 5,89% yang semula pada TW IV Tahun 2025 Divre III palembang sebesar 97,98% menjadi 89,32% dan Divre IV Tanjungkarang sebesar 91,36% menjadi 85,47%; - Peningkatan persentase tertinggi terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar 1,53% semula pada TW IV Tahun 2025 sebesar 88,33% menjadi 89,86%; - Terdapat penurunan lintas pengukuran pada Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian rata-rata TQI kategori 1 dan 2 tercatat sebesar 92,44% dari total panjang terukur 5.933,836 km'sp dengan penurunan lintas pengukuran	akan dilakukan pengukuran TQI periode 2 tahun 2026 serta akan dilakukan pengukuran menggunakan kereta ukur	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Fasilitas Prasarana Lainnya, Pengembangan Perkeretaapian Baik Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lainnya [%]	Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	780	65.21	8.36	-	-	65.21	-	100%	-	Pada Tahun 2026, untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan baseline sebesar 65,21% dan ditargetkan terdapat realisasi peningkatan sinyal mekanik ke sinyal elektrik sebanyak 2 unit pada tahun 2026 yaitu Lahat dan Marapi Sesuai dengan target Renstra dan Target RPJMN. Sehingga berdasarkan penetapan PK tahun 2026, target Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik sebesar 65,53% Baseline tahun 2026 sebanyak 403 Sinyal Elektrik dan 206 Sinyal Mekanik dengan total 609 unit. Terdapat target peningkatan persinyalan pada 2 Stasiun yaitu stasiun Lahat dan Marapi. 1. Sampai Bulan Mei 2026, Telah disampaikan kembali hasil revisi kajian Kelaikan Teknis E House dari PT KAI kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian	akan dilakukan percepatan persetujuan dokumen teknis	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	295	25	8.47	-	-	25	-	100%	-	Sampai dengan bulan Mei 2026 terdapat 5 rekomendasi teknis keamanan perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti, sedangkan target renstra yaitu sebanyak 20 rekomendasi sehingga dengan demikian capaiannya yaitu sebesar 20% (Realisasi / Target)	Rencana Selanjutnya: Subdit rekayasa dan peningkatan keselamatan berencana akan melaksanakan tinjauan lapangan bersama dengan dishub jember terkait dengan permohonan rekomendasi	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 40,000	**27,747**	24,112	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	353	28.94	8.2	-	-	28.18	-	97.37%	-	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 (Data Bulan Mei 2026) sebesar 28,18% dengan realisasi penumpang sebesar 236.931.192 orang yang terdiri dari KA PSO sebanyak 192.730.161 orang, KA Komersial sebanyak 42.239.493 orang dan KA Perintis sebanyak 1.961.538 orang.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kereta api baik di kereta maupun di stasiun melalui verifikasi lapangan PSO dan SPM	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [%]	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	349	28.55	8.18	-	-	26.73	-	93.63%	-	Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Data Bulan Mei 2026) sebesar 26,73% dengan capaian kinerja triwulan tahunan sebesar 99% dengan realisasi angkutan barang KA sebesar 26.624.325 ton yang didominasi oleh komoditi angkutan batu bara sebesar 21.630.014 ton dan peti kemas sebesar 2.525.803 ton	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja angkutan barang kereta api bersama Operator	Direktorat LLAKA
			Pelayanan Transportasi Perkeretaapian [Juta Penumpang/ Hari]	Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	34080	2840	8.33	-	-	2821	-	99.33%	-	Capaian kinerja Tahun 2026 (Data bulan Mei 2026) sebesar 2821 dengan capaian kinerja tahunan sebesar 99% dengan jumlah ketersediaan kapasitas angkutan umum sebanyak 2.821.535 orang/hari	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi perjalanan KA Perkotaan pada seluruh Operator	Direktorat LLAKA
			Jumlah Anggaran					-			-		-			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 100	**21,61**	15,345	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian	1200	100	8.33	323.255.526.000	7.69	-	-	-	0%	Pada Bulan Juni 2026 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Posisi saat ini telah disusun Perjanjian Kinerja 2026, Laporan Kinerja Tahun 2025 Ditjen Perkeretaapian dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2026 Ditjen Perkeretaapian.	1. Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026; 2. Koordinasi dan pembahasan kebutuhan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian	650	50	7.69	-	-	36.4	-	72.8%	-	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Juni 2026 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu adalah sebesar 36,40	Pelaksanaan konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi one on one dengan masing-masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [%]	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian	761	36.451	4.79	-	-	46.08	-	126.42%	-	Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Juni 2026 sebesar Rp616.621.864.829 maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Triwulan I 2026 sebesar 46,08% dari target Tahun 2026 sebesar Rp1.338.269.645.000,00	Koordinasi lanjutan untuk pembayaran PNBP TAC serta inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa aset/lahan/bangunan yang belum dipungut PNBP termasuk melakukan penertiban atas pihak yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM [Nilai]	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Realisasi nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Mei 2026 mengacu pada hasil penilaian mandiri (self assessment) dengan diperoleh hasil 86,72 dari skala 0-100 atau kategori "Tinggi". Berdasarkan perolehan nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026, diperoleh bahwa 3 dari 4 aspek mengalami penurunan nilai dari periode sebelumnya (Tahun 2025), diantaranya aspek kualifikasi yang memperoleh nilai 23,38 (turun dari 23,56 pada Tahun 2025), aspek kinerja sebesar 25,96 (turun dari 26,41 pada Tahun 2025), serta aspek disiplin sebesar 4,97 (turun dari 5,00 pada Tahun 2025)	Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya: a. Penyesuaian strategi/kebijakan: 1) Penguatan kualitas dan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK di masing-masing unit kerja; 2) Peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema Work From Home (WFH). b. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja. c. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi.	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
			Jumlah Anggaran					**323.255.526.000**			-		**0**			

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	**BTP Kelas I Medan**	1	3	4	4	2	2	1	1	0	0	8	10	0,44
	Provinsi Aceh		Banda Aceh		Lhokseumawe		Lhokseumawe (NAD)							
					Langsa									
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Rantau Prapat	KSN Danau Toba	Belawan (Sumatera Utara)		Kualanamu						
				Pematang Siantar		Kuala Tanjung (Sumatera Utara)								
				Tebingtinggi										
				Kisaran										
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)					
			Pekanbaru											
2	**BTP Kelas II Padang**	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau						
					Bukit Tinggi									
					Payakumbuh									
					Sawahlunto									
	Provinsi Bengkulu													
3	**BTP Kelas II Palembang**	2	1	6	0	1	3	1	0	0	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi											
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuklinggau			Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin						
				Muara enim										
				Baturaja										
				Prabumulih										
				Lahat										
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Kotabumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung)							
							Bakauheni (Lampung)							
4	**BTP Kelas I Jakarta**	3	0	2	1	2	3	1	1	1	0	9	5	0,64
	Provinsi Banten	Serang		Rangkasbitung	Pandeglang	Merak (Banten)	Tanjung Lesung (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	Panimban (Banten)	Kampung Rambutan (Jakarta)				
		Cilegon					Bojanegora (Banten)							
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek				Tanjung Priok (DKI Jakarta)	Kali Baru (DKI Jakarta)							
	Provinsi Jawa Barat			Cikampek										
5	**BTP Kelas I Bandung**	2	0	4	2	0	2	0	1	0	0	6	5	0,55
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon		Sukabumi	Kadipaten		Cirebon (Jawa Barat)		Kertajati (Jawa Barat)					
		Bandung Raya		Indramayu	Pangandaran		Patimban (Jawa Barat)							
				Tasikmalaya										
				Cikampek-Cikopo										
6	**BTP Kelas I Semarang**	4	4	7	11	2	3	2	3	0	0	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)					
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Mas (Jawa Tengah)								
		Surakarta		Cepu	Magelang									
				Purwokerto	KSN Borobudur									
				kebumen										
				klaten										
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman				Kulonprogo (Yogyakarta)						
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang		Tanjung Radeb		Banjarmasin (Kalimantan Selatan)		Syamsudin Noor (Kalsel)					
			Perkotaan Banjarmasin,Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)					
			Palangkaraya		Martapura		Balikpapan (Kalimantan Timur)							
			Pontianak		Mempawah									
					Singkawang									
					Sanggau									
					Muara Teweh									
7	**BTP Kelas I Surabaya**	2	5	9	8	1	4	0	3	0	0	12	20	0,38
	Provinsi Jawa Timur	Malang		Bojonegoro	Tuban	Tanjung Perak (Jawa Timur)			Juanda (Surabaya)					
		Gerbangkertosusila		Madiun	Pamekasan		Tuban (Jawa Timur)							
				Jember	Sumenep		Teluk Lamong (Jawa Timur)							
				Banyuwangi										
				Probolinggo										
				Blitar										
				Pasuruan										
				Tulungagung										
				Kediri										
	Provinsi Bali		Sarbagita		Singaraja				Ngurah Rai (Denpasar)					
					Negara									
	Papua Barat		Sorong		Manokwari		Sorong (Papua Barat)							
	Provinsi Papua		Jayapura		Sarmi		Jayapura (Papua)		Sentani (Papua)					
			Timika		Tanah Merah									
			Merauke											

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
8	**Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan**	1	5	2	5	1	2	0	1	0	0	**4**	**13**	**0,24**
	Sulawesi Selatan	Maminasata		Pangkajene	Parepare	Garongkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)					
				Barru	Watampone									
					Bulukumba									
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)							
	Gorontalo		Gorontalo											
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso									
	Sulawesi Barat		Mamuju											
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka									
	DITJEN PERKERETAAPIAN	**16**	**18**	**35**	**35**	**10**	**19**	**6**	**10**			**68**	**82**	**0,453**
		Jumlah PKW/PKN/PKSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030										**150**		

Jakarta, Juli 2026
Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

ROSITA
NIP 198001192001122001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TEL: 0813 6001 3838 | WEBSITE: http://djka.dephub.go.id/ EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0122/F2.2/VII/2026

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Dari : Kasubdit Lalu Lintas

Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tanggal : 20 Juli 2026

Menunjuk Surat Undangan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor KP.406/1/1/K2/DJKA/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hasil evaluasi kinerja lalu lintas sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 101,21%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKK Tahun 2026 sebesar 95,73%. Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya:
   a. KA Tambahan pada Masa Akhir pekan atau libur pada bulan Mei 2026;
   b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan
   c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 97,4%, nilai tersebut belum memenuhi Target IKP Tahun 2026 sebesar 97,77%. Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh:
   a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%);
   b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%);
   c. terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2026 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0122/K2.2/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

I. Capaian Kinerja Tahun 2026

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi Program	Realisasi							
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	100,82%	100,82%
	2	Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	99,83%	100,35%
	3	Maret	95,73%	90.740	264.757	85.946	6.303	92.249	266.881	101,66%	100,80%
TW 2	4	April	95,73%	88.872	353.629	83.773	6.377	89.150	356.031	100,31%	100,68%
	5	Mei	95,73%	90.366	443.995	85.520	6.827	92.347	448.378	102,19%	100,99%
	6	Juni	95,73%	88.822	532.817	84.059	6.815	90.874	539.252	102,31%	101,21%
TW 3	7	Juli	95,73%	92.122	624.939	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,73%	91.139	716.078	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,73%	89.271	805.349	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,73%	92.119	897.468	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,73%	88.912	986.380	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,73%	91.652	1.078.032	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	97,77%	92.190	92.190	5.445	84.565	90.010	90.010	5.014	83.550	88.564	88.564	89.287	89.287	96,85%	96,85%
	Februari	97,77%	82.442	174.632	4.848	76.542	81.390	171.400	4.221	75.683	79.904	168.468	80.647	169.934	97,82%	97,31%
	Maret	97,77%	92.249	266.881	5.990	85.196	91.186	262.586	5.421	84.099	89.520	257.988	90.353	260.287	97,94%	97,53%
TW 2	April	97,77%	89.150	356.031	5.926	82.312	88.238	350.824	5.334	80.786	86.120	344.108	87.179	347.468	97,79%	97,59%
	Mei	97,77%	92.347	448.378	6.340	84.050	90.390	441.214	5.773	82.304	88.077	432.185	89.234	436.700	96,63%	97,40%
	Juni	97,77%	90.874	539.252	6.354	82.938	89.292	530.506	5.352	81.877	87.729	519.914	88.526	525.235	97,43%	97,40%
TW 3	Juli	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	September	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2026

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	101,21%	Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya: a. KA Tambahan pada Masa Akhir pekan atau libur pada bulan Mei 2026; b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,40%	Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh: a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%); b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%); c. terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	a. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 27 April 2026 dengan Nomor: KA.407/1/3/DJKA/2026 dan tanggal 9 Juni 2026 dengan Nomor: KA.407/1/6/DJKA/2026 ; b. Telah dilaksanakan tahapan pengumpulan data rancangan Gapeka 2026 pada jaringan jalur nasional Jawa dan Sumatera antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI; c. Sedang dilakukan evaluasi rancangan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional Sulawesi Selatan dan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	101,21%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Jawa, Sumatera, Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,14%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

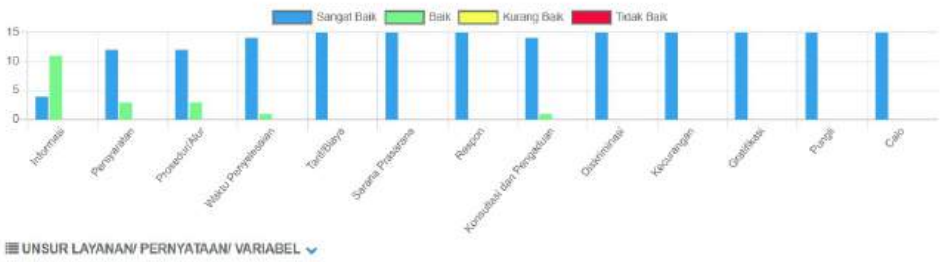
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.08/17.50
97.63/100 | 3.91/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 | 4/4

Responden
15

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

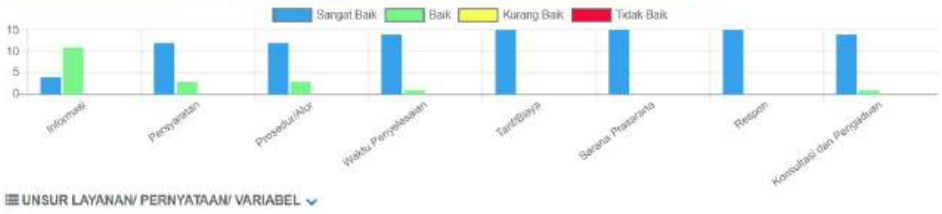
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.08/17.50 | 97.63/100 | 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

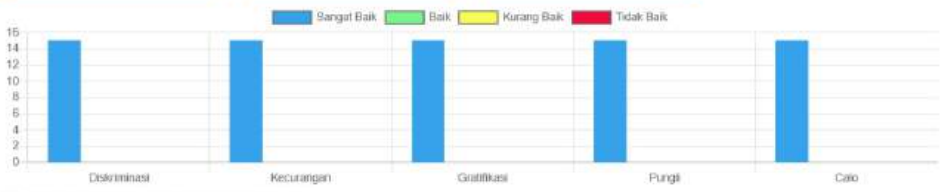


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	15.58	16.86	-1.28	16.51	-0.93	16.77	-1.19
Persyaratan	16.98	16.87	0.11	16.80	0.18	16.72	0.26
Prosedur/Alur	16.98	16.87	0.11	16.65	0.33	16.69	0.29
Waktu Penyelesaian	17.33	16.86	0.47	17.15	0.18	16.84	0.49
Tarif/Biaya	17.50	16.88	0.62	17.22	0.28	16.84	0.66
Sarana Prasarana	17.50	16.78	0.72	16.72	0.78	16.79	0.71
Respon	17.50	16.87	0.63	16.85	0.65	16.70	0.80
Konsultasi dan Pengaduan	17.33	16.84	0.49	16.89	0.44	16.65	0.68

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

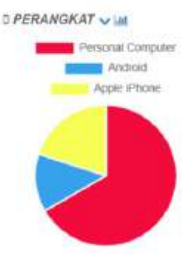


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.50	16.95	0.55	16.97	0.53	16.94	0.56
Kecurangan	17.50	16.94	0.56	17.01	0.49	16.88	0.62
Gratifikasi	17.50	16.96	0.54	16.99	0.51	16.90	0.60
Pungli	17.50	17	0.50	17.27	0.23	16.98	0.52
Calo	17.50	16.96	0.54	17.25	0.25	16.90	0.60

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

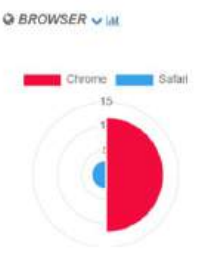
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

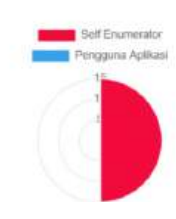


OPERATING SYSTEM

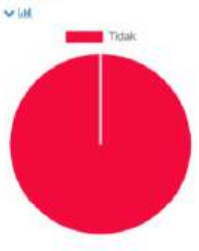


PROFIL RESPONDEN

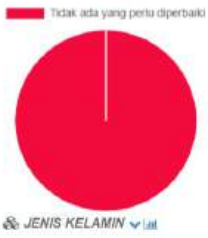
PENCACAHAN



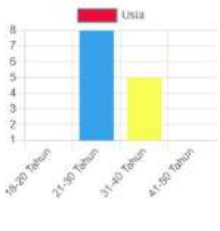
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



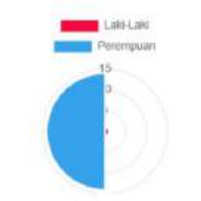
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

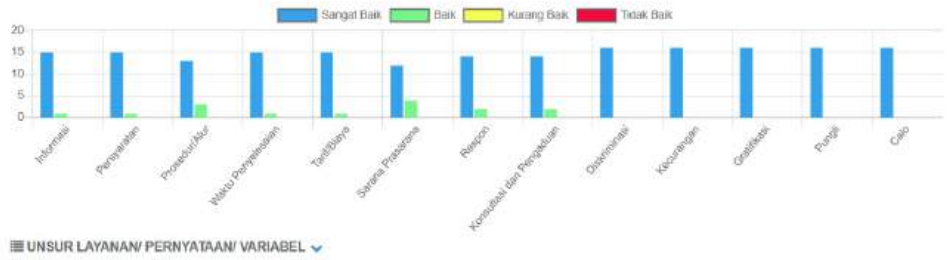
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.19/17.50
98.24/100 | 3.93/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 | 4/4

Responden
16

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

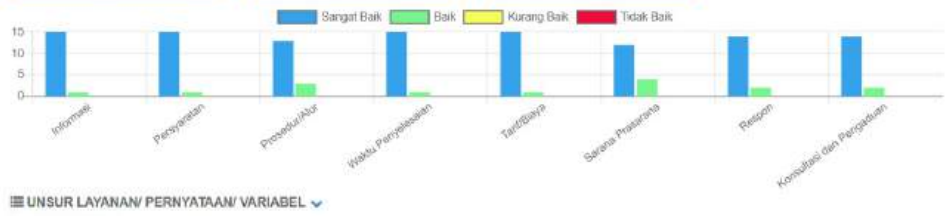
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.19/17.50 | 98.24/100 | 3.93/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.34	16.81	0.53	17.17	0.17	16.71	0.63
Persyaratan	17.34	16.82	0.52	17.11	0.23	16.64	0.70
Prosedur/Alur	17.01	16.87	0.14	17.08	-0.07	16.75	0.26
Waktu Penyelesaian	17.34	16.78	0.56	17.14	0.20	15.99	1.35
Tarif/Biaya	17.34	16.80	0.54	17.19	0.15	16.81	0.53
Sarana Prasarana	16.84	16.69	0.15	17.11	-0.27	16.46	0.38
Respon	17.17	16.80	0.37	17.09	0.09	16.42	0.75
Konsultasi dan Pengaduan	17.17	16.80	0.37	17.04	0.13	16.67	0.50

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.50	16.91	0.59	17.14	0.36	16.57	0.93
Kecurangan	17.50	16.88	0.62	17.12	0.38	16.57	0.93
Gratifikasi	17.50	16.88	0.62	17.16	0.34	16.54	0.96
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.28	0.22	16.60	0.90
Calo	17.50	16.91	0.59	17.21	0.29	16.58	0.92

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

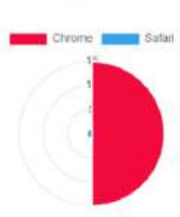
PERANGKAT



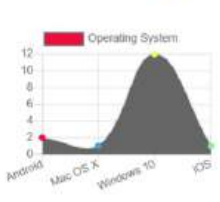
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

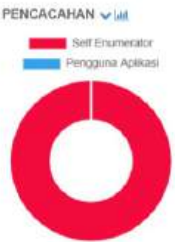


OPERATING SYSTEM

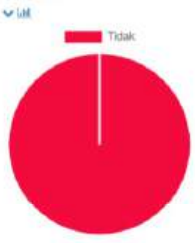


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



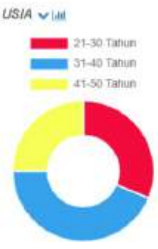
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

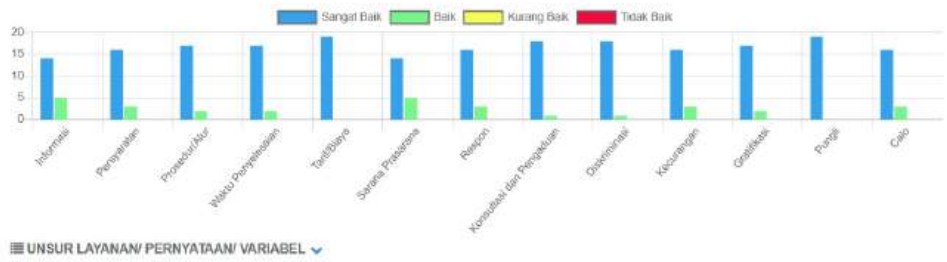
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.14/17.50
97.93/100 | 3.92/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.25/17.50
98.58/100 | 3.94/4

Responden
19

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

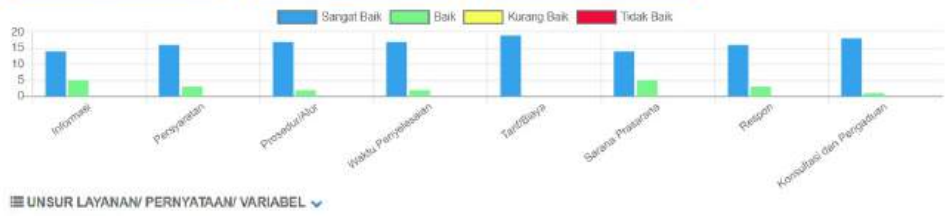
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.14/17.50 | 97.93/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.81	16.85	-0.04	17.03	-0.22	16.94	-0.13
Persyaratan	17.09	16.86	0.23	17.08	0.01	16.96	0.13
Prosedur/Alur	17.22	16.89	0.33	17.11	0.11	16.93	0.29
Waktu Penyelesaian	17.22	16.85	0.37	17.16	0.06	16.90	0.32
Tarif/Biaya	17.50	16.88	0.62	17.20	0.30	16.96	0.54
Sarana Prasarana	16.81	16.78	0.03	17.06	-0.25	16.92	-0.11
Respon	17.09	16.86	0.23	17.15	-0.06	16.95	0.14
Konsultasi dan Pengaduan	17.36	16.83	0.53	17.19	0.17	16.91	0.45

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.25/17.50 | 98.58/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

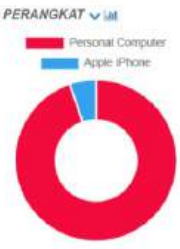


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.36	16.96	0.40	17.16	0.20	16.99	0.37
Kecurangan	17.09	16.93	0.16	17.16	-0.07	17	0.09
Gratifikasi	17.22	16.94	0.28	17.19	0.03	17.04	0.18
Pungli	17.50	16.94	0.56	17.21	0.29	17.05	0.45
Calo	17.09	16.92	0.17	17.15	-0.06	17.04	0.05

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

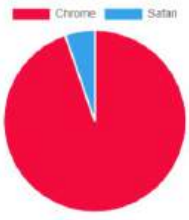
PERANGKAT



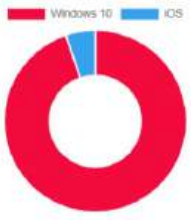
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

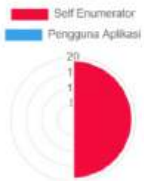


OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

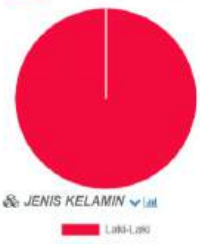
PENCACAHAN



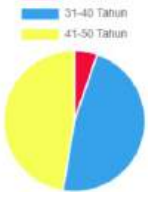
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



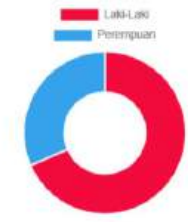
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

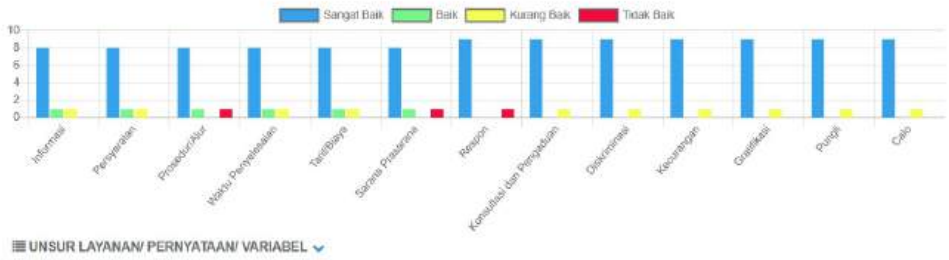
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.52/17.50
94.38/100 | 3.78/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.98/17.50
97/100 | 3.88/4

Responden
10

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

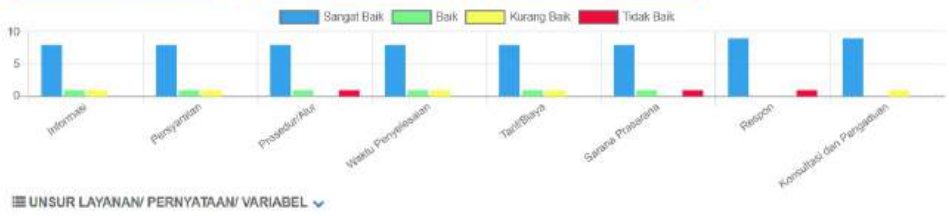
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.52/17.50 | 94.38/100 | 3.78/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.71	16.86	-0.15	16.51	0.20	16.77	-0.06
Persyaratan	16.71	16.87	-0.16	16.80	-0.09	16.72	-0.01
Prosedur/Alur	15.93	16.87	-0.94	16.65	-0.72	16.69	-0.76
Waktu Penyelesaian	16.71	16.86	-0.15	17.15	-0.44	16.84	-0.13
Tarif/Biaya	16.71	16.88	-0.17	17.22	-0.51	16.84	-0.13
Sarana Prasarana	15.93	16.78	-0.85	16.72	-0.79	16.79	-0.86
Respon	16.45	16.87	-0.42	16.85	-0.40	16.70	-0.25
Konsultasi dan Pengaduan	16.98	16.84	0.14	16.89	0.09	16.65	0.33

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.98/17.50 | 97/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

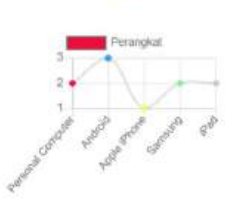


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.98	16.95	0.03	16.97	0.01	16.94	0.04
Kecurangan	16.98	16.94	0.04	17.01	-0.03	16.88	0.10
Gratifikasi	16.98	16.96	0.02	16.99	-0.01	16.90	0.08
Pungli	16.98	17	-0.02	17.27	-0.29	16.98	0
Calo	16.98	16.96	0.02	17.25	-0.27	16.90	0.08

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

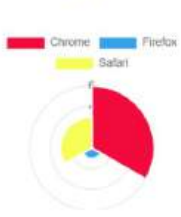
PERANGKAT



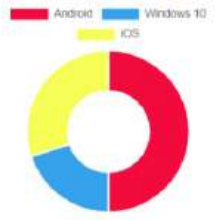
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

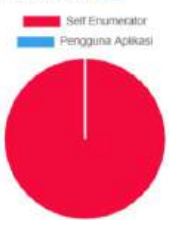


OPERATING SYSTEM

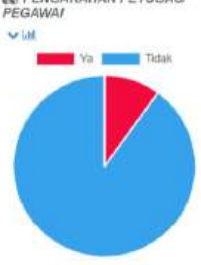


PROFIL RESPONDEN

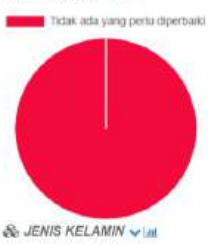
PENCACAHAN



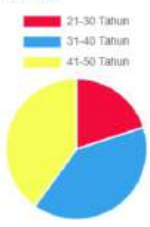
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

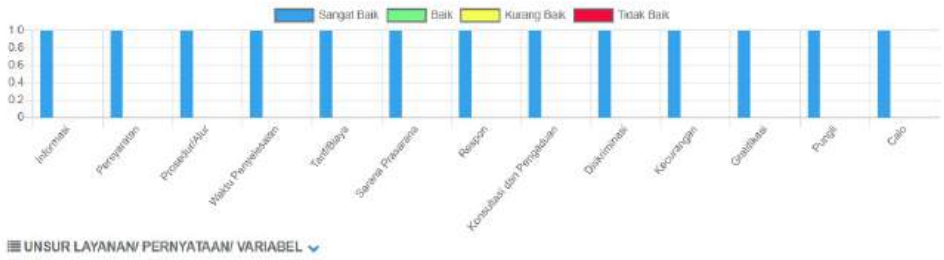
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.50	16.81	0.69	17.17	0.33	16.71	0.79
Persyaratan	17.50	16.82	0.68	17.11	0.39	16.64	0.86
Prosedur/Alur	17.50	16.87	0.63	17.08	0.42	16.75	0.75
Waktu Penyelesaian	17.50	16.78	0.72	17.14	0.36	15.99	1.51
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	17.19	0.31	16.81	0.69
Sarana Prasarana	17.50	16.69	0.81	17.11	0.39	16.46	1.04
Respon	17.50	16.80	0.70	17.09	0.41	16.42	1.08
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.80	0.70	17.04	0.46	16.67	0.83

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.50	16.91	0.59	17.14	0.36	16.57	0.93
Kecurangan	17.50	16.88	0.62	17.12	0.38	16.57	0.93
Gratifikasi	17.50	16.88	0.62	17.16	0.34	16.54	0.96
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.28	0.22	16.60	0.90
Calo	17.50	16.91	0.59	17.21	0.29	16.58	0.92

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER

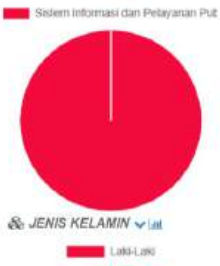
OPERATING SYSTEM

PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

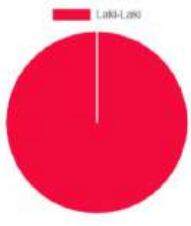
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juni 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Mei 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Maret 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

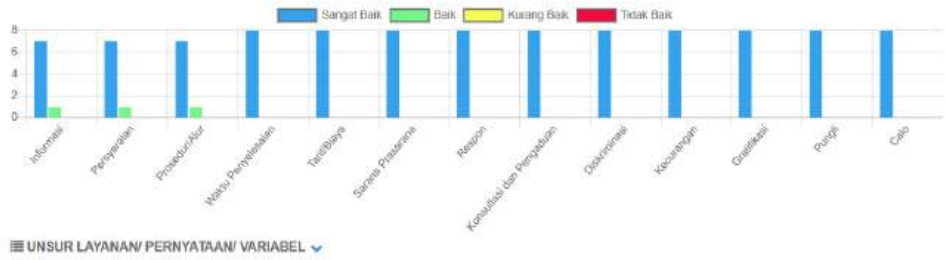
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.38/17.50
99.30/100 | 3.97/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 | 4/4

Responden
8

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

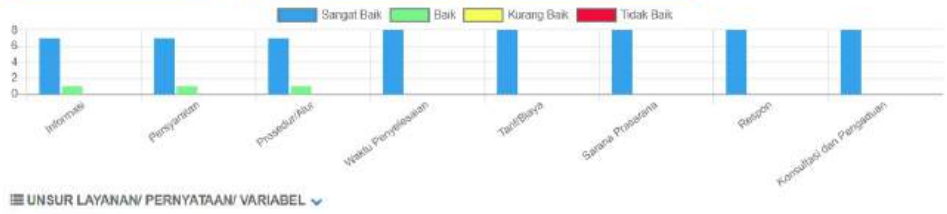
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.38/17.50 | 99.30/100 | 3.97/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.17	16.85	0.32	17.03	0.14	16.94	0.23
Persyaratan	17.17	16.86	0.31	17.08	0.09	16.96	0.21
Prosedur/Alur	17.17	16.89	0.28	17.11	0.06	16.93	0.24
Waktu Penyelesaian	17.50	16.85	0.65	17.16	0.34	16.90	0.60
Tarif/Biaya	17.50	16.88	0.62	17.20	0.30	16.96	0.54
Sarana Prasarana	17.50	16.78	0.72	17.06	0.44	16.92	0.58
Respon	17.50	16.86	0.64	17.15	0.35	16.95	0.55
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.83	0.67	17.19	0.31	16.91	0.59

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

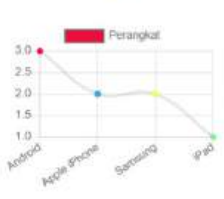


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.50	16.96	0.54	17.16	0.34	16.99	0.51
Kecurangan	17.50	16.93	0.57	17.16	0.34	17	0.50
Gratifikasi	17.50	16.94	0.56	17.19	0.31	17.04	0.46
Pungli	17.50	16.94	0.56	17.21	0.29	17.05	0.45
Calo	17.50	16.92	0.58	17.15	0.35	17.04	0.46

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

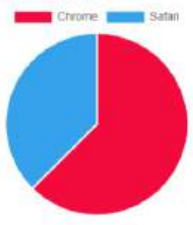
PERANGKAT



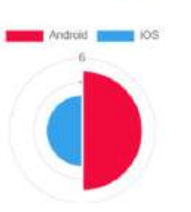
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

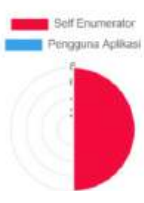


OPERATING SYSTEM

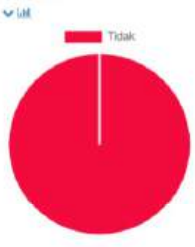


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



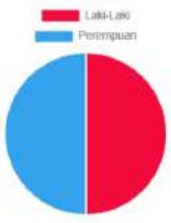
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

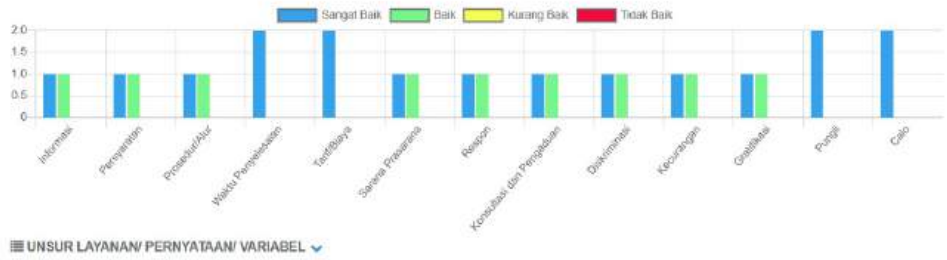
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.52/17.50
94.38/100 | 3.78/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.71/17.50
95.50/100 | 3.82/4

Responden
2

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

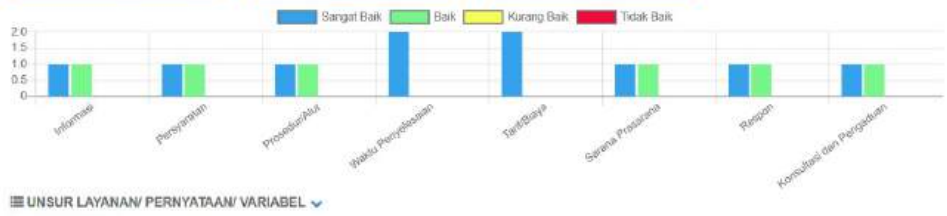
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.52/17.50 | 94.38/100 | 3.78/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.19	16.86	-0.67	16.51	-0.32	16.77	-0.58
Persyaratan	16.19	16.87	-0.68	16.80	-0.61	16.72	-0.53
Prosedur/Alur	16.19	16.87	-0.68	16.65	-0.46	16.69	-0.50
Waktu Penyelesaian	17.50	16.86	0.64	17.15	0.35	16.84	0.66
Tarif/Biaya	17.50	16.88	0.62	17.22	0.28	16.84	0.66
Sarana Prasarana	16.19	16.78	-0.59	16.72	-0.53	16.79	-0.60
Respon	16.19	16.87	-0.68	16.85	-0.66	16.70	-0.51
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.84	-0.65	16.89	-0.70	16.65	-0.46

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.71/17.50 | 95.50/100 | 3.82/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

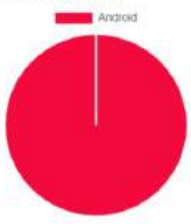


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.19	16.95	-0.76	16.97	-0.78	16.94	-0.75
Kecurangan	16.19	16.94	-0.75	17.01	-0.82	16.88	-0.69
Gratifikasi	16.19	16.96	-0.77	16.99	-0.80	16.90	-0.71
Pungli	17.50	17	0.50	17.27	0.23	16.98	0.52
Calo	17.50	16.96	0.54	17.25	0.25	16.90	0.60

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

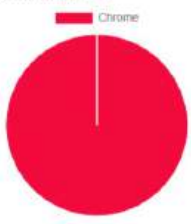
PERANGKAT



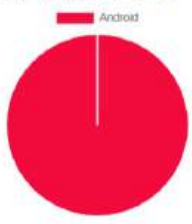
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

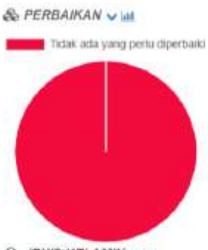


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

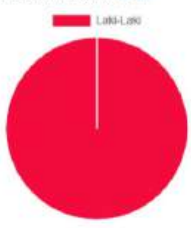
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

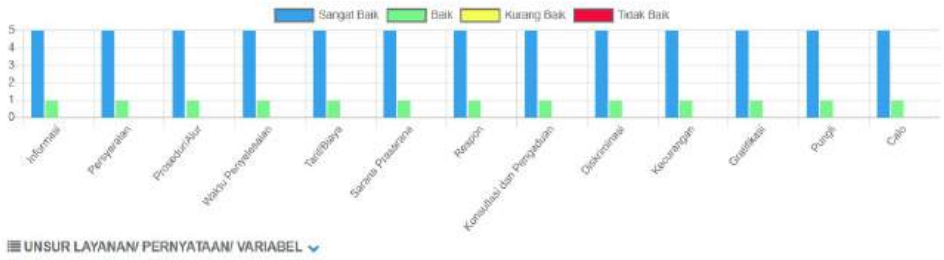
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.06/17.50
97.50/100 | 3.90/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.06/17.50
97.50/100 | 3.90/4

Responden
6

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

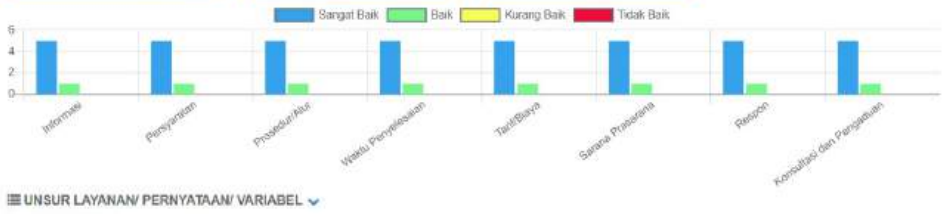
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.06/17.50 | 97.50/100 | 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

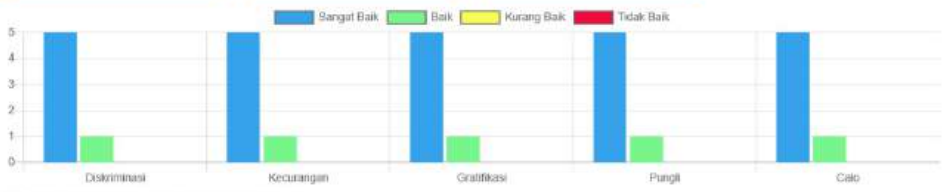


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.06	16.85	0.21	17.03	0.03	16.94	0.12
Persyaratan	17.06	16.86	0.20	17.08	-0.02	16.96	0.10
Prosedur/Alur	17.06	16.89	0.17	17.11	-0.05	16.93	0.13
Waktu Penyelesaian	17.06	16.85	0.21	17.16	-0.10	16.90	0.16
Tarif/Biaya	17.06	16.88	0.18	17.20	-0.14	16.96	0.10
Sarana Prasarana	17.06	16.78	0.28	17.06	0	16.92	0.14
Respon	17.06	16.86	0.20	17.15	-0.09	16.95	0.11
Konsultasi dan Pengaduan	17.06	16.83	0.23	17.19	-0.13	16.91	0.15

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.06/17.50 | 97.50/100 | 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

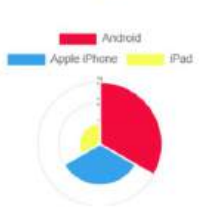


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.06	16.96	0.10	17.16	-0.10	16.99	0.07
Kecurangan	17.06	16.93	0.13	17.16	-0.10	17	0.06
Gratifikasi	17.06	16.94	0.12	17.19	-0.13	17.04	0.02
Pungli	17.06	16.94	0.12	17.21	-0.15	17.05	0.01
Calo	17.06	16.92	0.14	17.15	-0.09	17.04	0.02

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

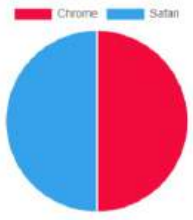
PERANGKAT



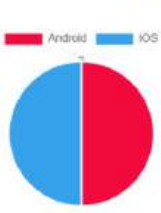
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

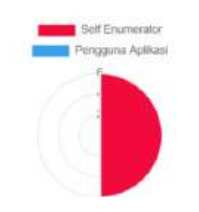


OPERATING SYSTEM

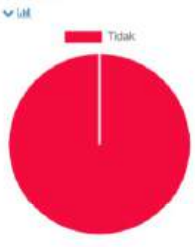


PROFIL RESPONDEN

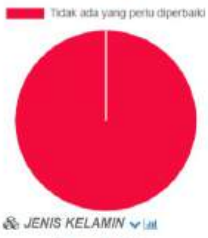
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



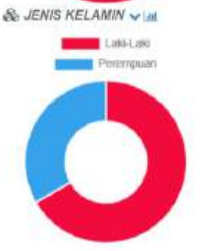
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

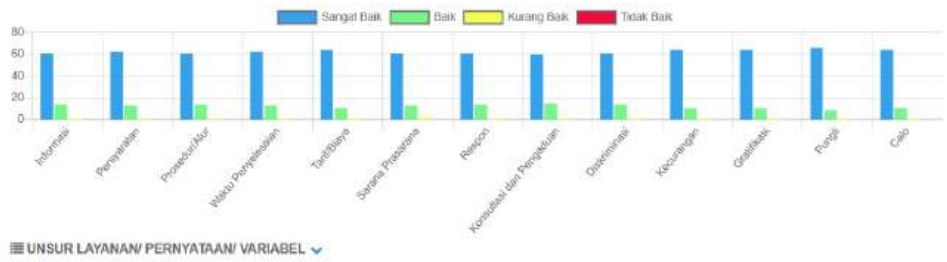
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.96/17.50
96.92/100 | 3.88/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.04/17.50
97.39/100 | 3.90/4

Responden
76

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



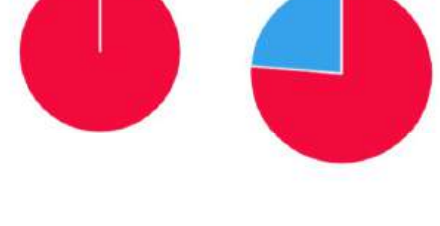
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.96/17.50 | 96.92/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.95	16.86	0.09	16.51	0.44	16.77	0.18
Persyaratan	16.98	16.87	0.11	16.80	0.18	16.72	0.26
Prosedur/Alur	16.95	16.87	0.08	16.65	0.30	16.69	0.26
Waktu Penyelesaian	16.98	16.86	0.12	17.15	-0.17	16.84	0.14
Tarif/Biaya	17.05	16.88	0.17	17.22	-0.17	16.84	0.21
Sarana Prasarana	16.91	16.78	0.13	16.72	0.19	16.79	0.12
Respon	16.95	16.87	0.08	16.85	0.10	16.70	0.25
Konsultasi dan Pengaduan	16.91	16.84	0.07	16.89	0.02	16.65	0.26

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.04/17.50 | 97.39/100 | 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

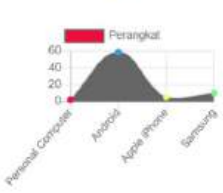


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.95	16.95	0	16.97	-0.02	16.94	0.01
Kecurangan	17.05	16.94	0.11	17.01	0.04	16.88	0.17
Gratifikasi	17.05	16.96	0.09	16.99	0.06	16.90	0.15
Pungli	17.12	17	0.12	17.27	-0.15	16.98	0.14
Calo	17.05	16.96	0.09	17.25	-0.20	16.90	0.15

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

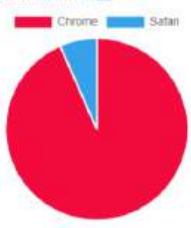
PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT

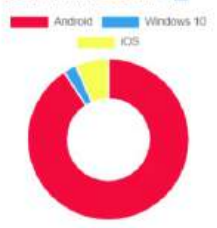


PENYEDIA INTERNET (ISP)

BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

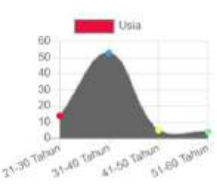
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

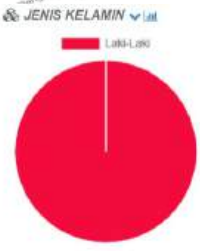
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

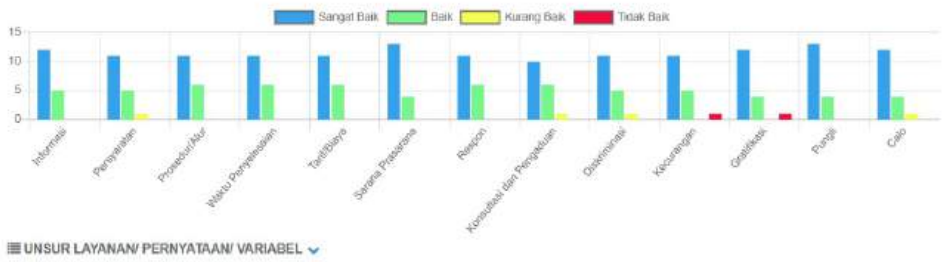
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.57/17.50
94.71/100 | 3.79/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.51/17.50
94.35/100 | 3.77/4

Responden
17

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

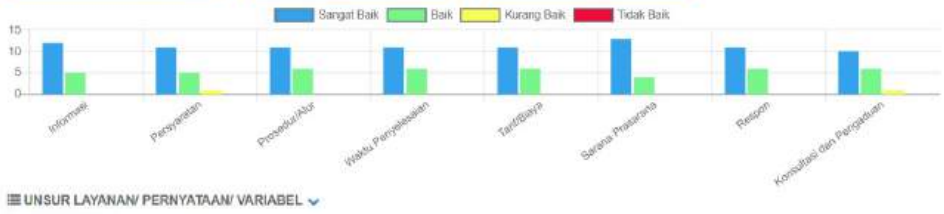
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.57/17.50 | 94.71/100 | 3.79/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

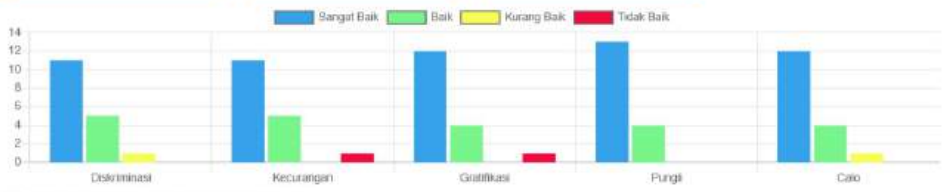


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.73	16.81	-0.08	17.17	-0.44	16.71	0.02
Persyaratan	16.42	16.82	-0.40	17.11	-0.69	16.64	-0.22
Prosedur/Alur	16.57	16.87	-0.30	17.08	-0.51	16.75	-0.18
Waktu Penyelesaian	16.57	16.78	-0.21	17.14	-0.57	15.99	0.58
Tarif/Biaya	16.57	16.80	-0.23	17.19	-0.62	16.81	-0.24
Sarana Prasarana	16.88	16.69	0.19	17.11	-0.23	16.46	0.42
Respon	16.57	16.80	-0.23	17.09	-0.52	16.42	0.15
Konsultasi dan Pengaduan	16.26	16.80	-0.54	17.04	-0.78	16.67	-0.41

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.51/17.50 | 94.35/100 | 3.77/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

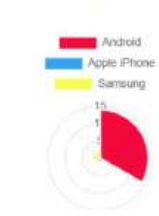


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.42	16.91	-0.49	17.14	-0.72	16.57	-0.15
Kecurangan	16.26	16.88	-0.62	17.12	-0.86	16.57	-0.31
Gratifikasi	16.42	16.88	-0.46	17.16	-0.74	16.54	-0.12
Pungli	16.88	16.90	-0.02	17.28	-0.40	16.60	0.28
Calo	16.57	16.91	-0.34	17.21	-0.64	16.58	-0.01

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

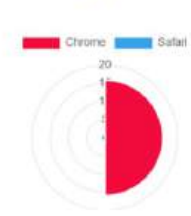
PERANGKAT



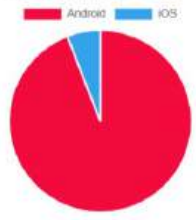
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

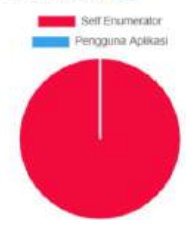


OPERATING SYSTEM

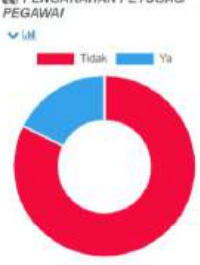


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



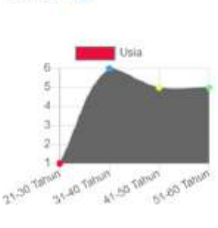
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



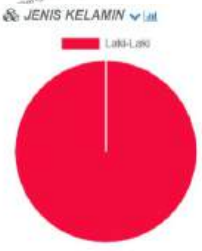
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

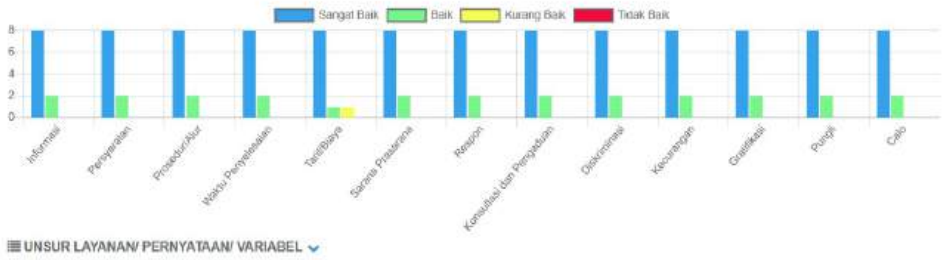
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.94/17.50
96.81/100 | 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.98/17.50
97/100 | 3.88/4

Responden
10

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

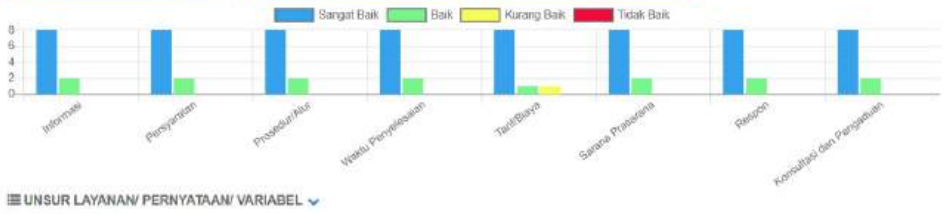
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.94/17.50 | 96.81/100 | 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

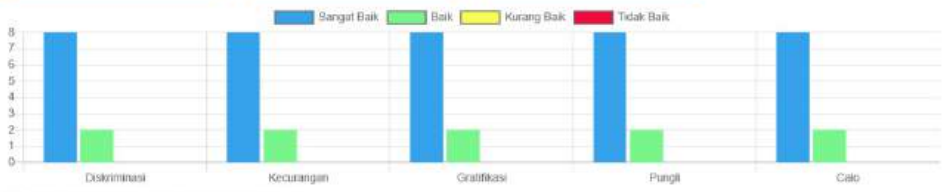


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.98	16.85	0.13	17.03	-0.05	16.94	0.04
Persyaratan	16.98	16.86	0.12	17.08	-0.10	16.96	0.02
Prosedur/Alur	16.98	16.89	0.09	17.11	-0.13	16.93	0.05
Waktu Penyelesaian	16.98	16.85	0.13	17.16	-0.18	16.90	0.08
Tarif/Biaya	16.71	16.88	-0.17	17.20	-0.49	16.96	-0.25
Sarana Prasarana	16.98	16.78	0.20	17.06	-0.08	16.92	0.06
Respon	16.98	16.86	0.12	17.15	-0.17	16.95	0.03
Konsultasi dan Pengaduan	16.98	16.83	0.15	17.19	-0.21	16.91	0.07

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.98/17.50 | 97/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.98	16.96	0.02	17.16	-0.18	16.99	-0.01
Kecurangan	16.98	16.93	0.05	17.16	-0.18	17	-0.02
Gratifikasi	16.98	16.94	0.04	17.19	-0.21	17.04	-0.06
Pungli	16.98	16.94	0.04	17.21	-0.23	17.05	-0.07
Calo	16.98	16.92	0.06	17.15	-0.17	17.04	-0.06

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

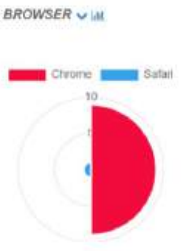
PERANGKAT



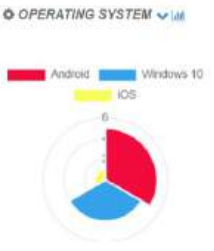
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

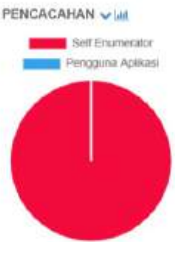


OPERATING SYSTEM

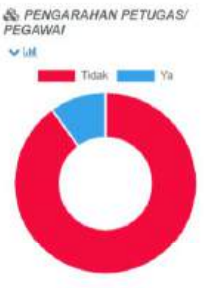


PROFIL RESPONDEN

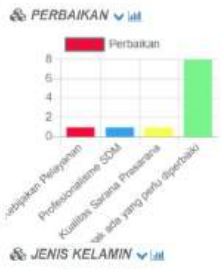
PENCACAHAN



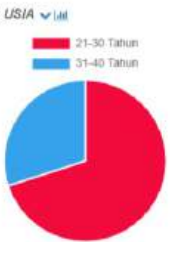
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



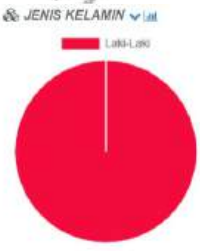
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

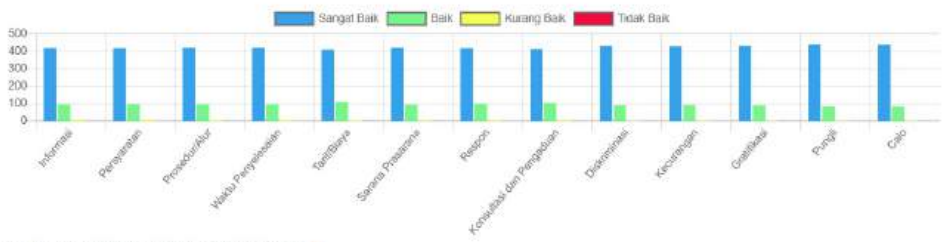
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.92/17.50
96.70/100 | 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.01/17.50
97.19/100 | 3.89/4

Responden
526

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

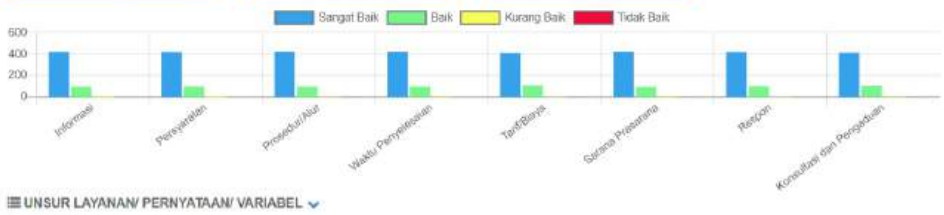
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.92/17.50 | 96.70/100 | 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

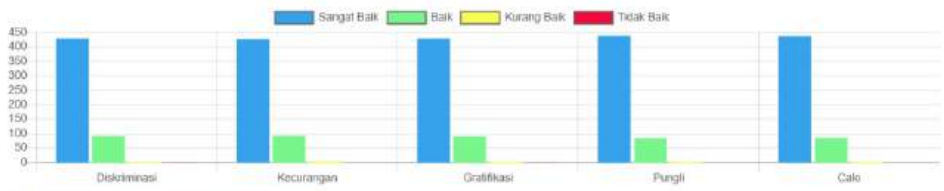


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.92	16.86	0.06	16.77	0.15
Persyaratan	16.93	16.87	0.06	16.72	0.21
Prosedur/Alur	16.94	16.87	0.07	16.69	0.25
Waktu Penyelesaian	16.95	16.86	0.09	16.84	0.11
Tarif/Biaya	16.88	16.88	0	16.84	0.04
Sarana Prasarana	16.94	16.78	0.16	16.79	0.15
Respon	16.94	16.87	0.07	16.70	0.24
Konsultasi dan Pengaduan	16.89	16.84	0.05	16.65	0.24

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.01/17.50 | 97.19/100 | 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

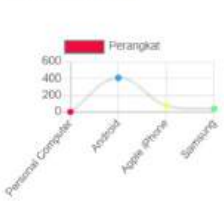


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17	16.95	0.05	16.94	0.06
Kecurangan	16.99	16.94	0.05	16.88	0.11
Gratifikasi	16.98	16.96	0.02	16.90	0.08
Pungli	17.04	17	0.04	16.98	0.06
Calo	17.04	16.96	0.08	16.90	0.14

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

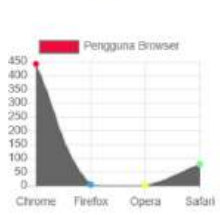
PERANGKAT



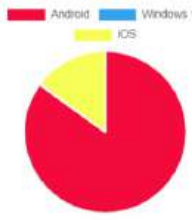
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

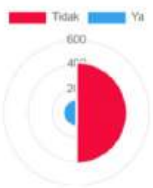


PROFIL RESPONDEN

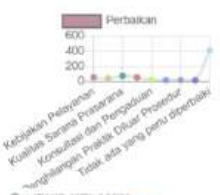
PENCACAHAN



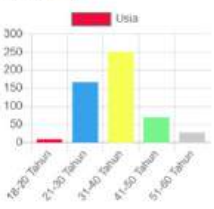
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



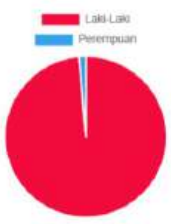
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

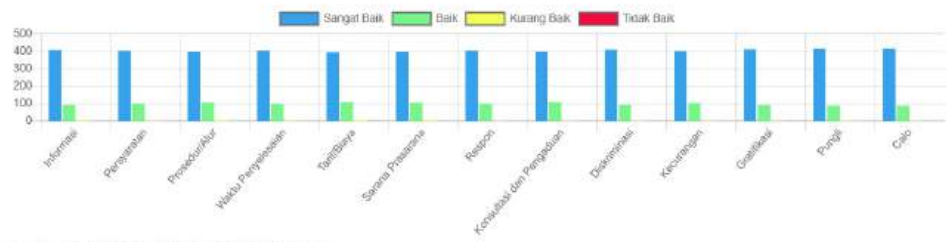
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.92/17.50
96.66/100 | 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.98/17.50
97.03/100 | 3.88/4

Responden
508

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

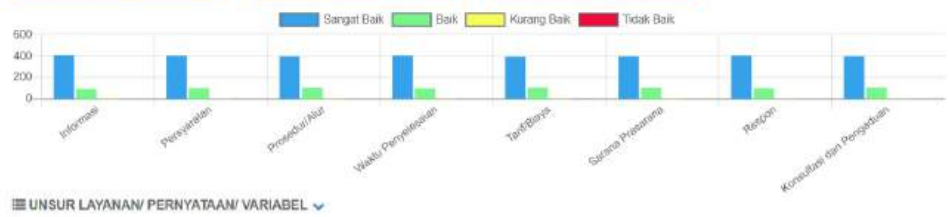
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.92/17.50 | 96.66/100 | 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



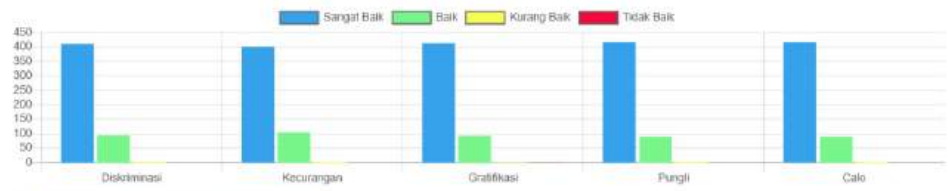
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.95	16.81	0.14	16.71	0.24
Persyaratan	16.94	16.82	0.12	16.64	0.30
Prosedur/Alur	16.89	16.87	0.02	16.75	0.14
Waktu Penyelesaian	16.94	16.78	0.16	15.99	0.95
Tarif/Biaya	16.85	16.80	0.05	16.81	0.04
Sarana Prasarana	16.89	16.69	0.20	16.46	0.43
Respon	16.95	16.80	0.15	16.42	0.53
Konsultasi dan Pengaduan	16.91	16.80	0.11	16.67	0.24

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.98/17.50 | 97.03/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



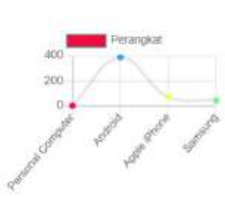
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.98	16.91	0.07	16.57	0.41
Kecurangan	16.93	16.88	0.05	16.57	0.36
Gratifikasi	16.97	16.88	0.09	16.54	0.43
Pungli	17.01	16.90	0.11	16.60	0.41
Calo	17.01	16.91	0.10	16.58	0.43

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

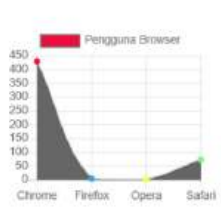
PERANGKAT



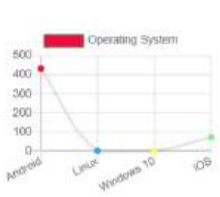
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

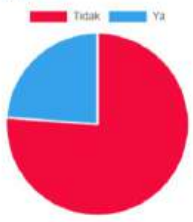


PROFIL RESPONDEN

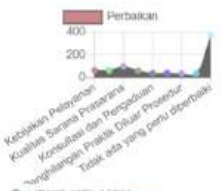
PENCACAHAN



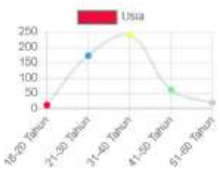
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



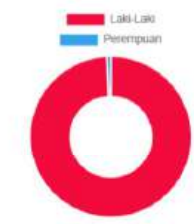
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

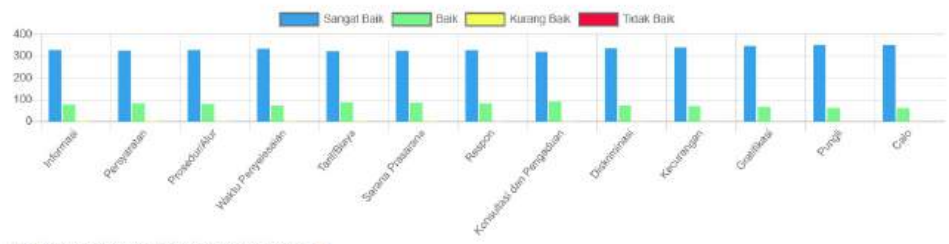
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.93/17.50
96.73/100 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.06/17.50
97.49/100 3.90/4

Responden
414

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

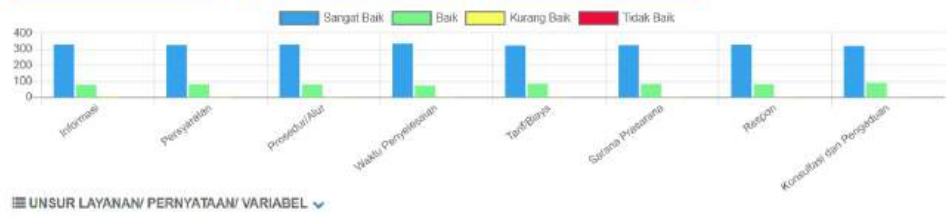
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.93/17.50 96.73/100 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



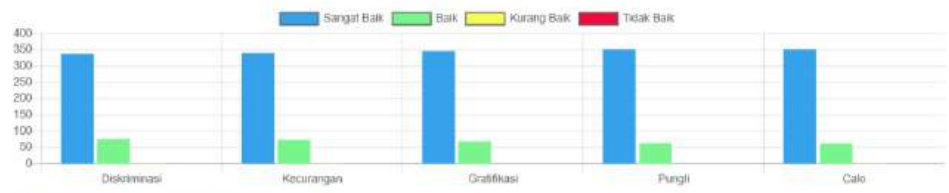
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.93	16.85	0.08	16.94	-0.01
Persyaratan	16.92	16.86	0.06	16.96	-0.04
Prosedur/Alur	16.94	16.89	0.05	16.93	0.01
Waktu Penyelesaian	16.99	16.85	0.14	16.90	0.09
Tarif/Biaya	16.90	16.88	0.02	16.96	-0.06
Sarana Prasarana	16.92	16.78	0.14	16.92	0
Respon	16.94	16.86	0.08	16.95	-0.01
Konsultasi dan Pengaduan	16.99	16.83	0.06	16.91	-0.02

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.06/17.50 97.49/100 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.01	16.96	0.05	16.99	0.02
Kecurangan	17.03	16.93	0.10	17	0.03
Gratifikasi	17.07	16.94	0.13	17.04	0.03
Pungli	17.10	16.94	0.16	17.05	0.05
Calo	17.09	16.92	0.17	17.04	0.05

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

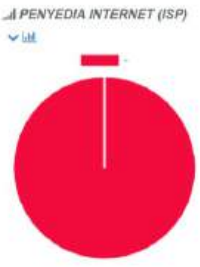
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



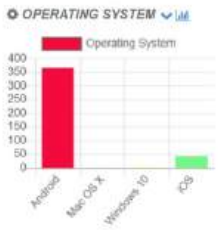
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

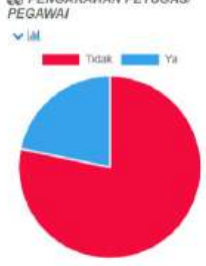
PENCACAHAN



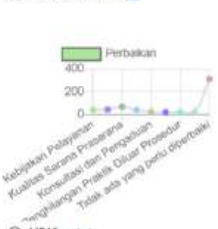
PRODUK LAYANAN



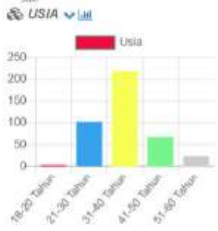
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

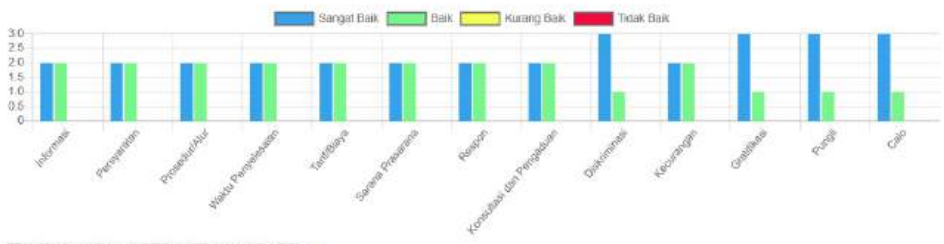
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.19/17.50
92.50/100 | 3.70/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.71/17.50
95.50/100 | 3.82/4

Responden
4

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

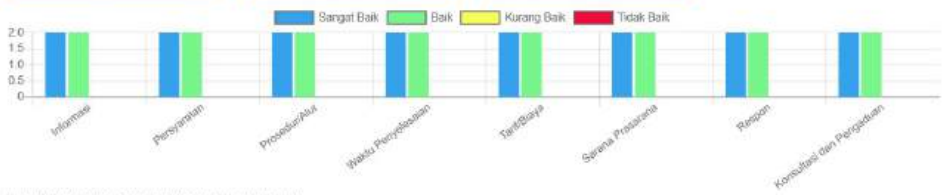
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.19/17.50 | 92.50/100 | 3.70/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

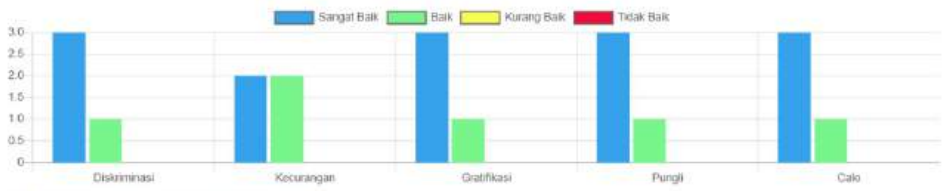


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.19	16.86	-0.67	16.90	-0.71
Persyaratan	16.19	16.87	-0.68	16.87	-0.68
Prosedur/Alur	16.19	16.87	-0.68	16.92	-0.73
Waktu Penyelesaian	16.19	16.86	-0.67	16.84	-0.65
Tarif/Biaya	16.19	16.88	-0.69	16.90	-0.71
Sarana Prasarana	16.19	16.78	-0.59	16.86	-0.67
Respon	16.19	16.87	-0.68	16.97	-0.78
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.84	-0.65	16.89	-0.70

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.71/17.50 | 95.50/100 | 3.82/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

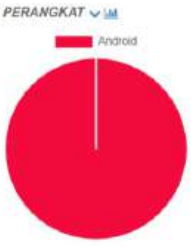


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.84	16.95	-0.11	16.99	-0.15
Kecurangan	16.19	16.94	-0.75	16.96	-0.77
Gratifikasi	16.84	16.96	-0.12	16.96	-0.12
Pungli	16.84	17	-0.16	17.01	-0.17
Calo	16.84	16.96	-0.12	16.95	-0.11

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

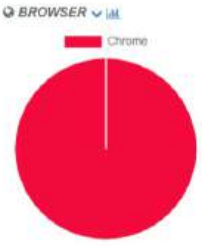
PERANGKAT



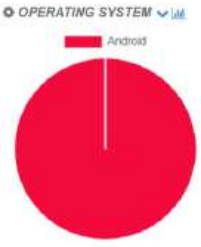
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

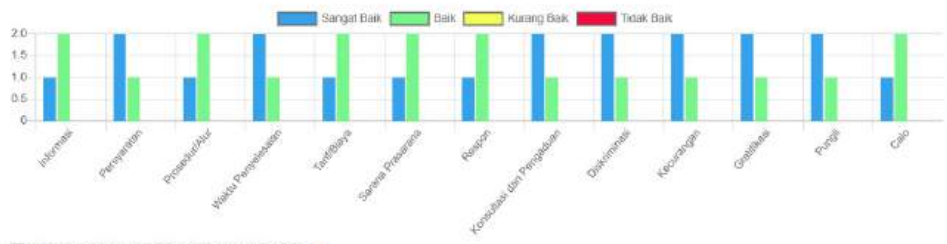
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.08/17.50
91.88/100 | 3.68/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.45/17.50
94/100 | 3.76/4

Responden
3

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

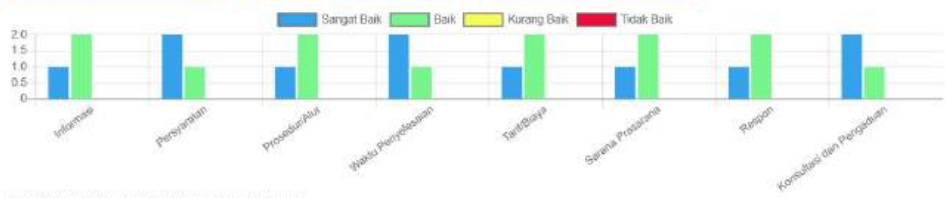
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.08/17.50 | 91.88/100 | 3.68/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	15.75	16.81	-1.06	16.91	-1.16
Persyaratan	16.63	16.82	-0.19	16.88	-0.25
Prosedur/Alur	15.75	16.87	-1.12	16.89	-1.14
Waktu Penyelesaian	16.63	16.78	-0.15	16.89	-0.26
Tarif/Biaya	15.75	16.80	-1.05	16.88	-1.13
Sarana Prasarana	15.75	16.69	-0.94	16.88	-1.13
Respon	15.75	16.80	-1.05	16.88	-1.13
Konsultasi dan Pengaduan	16.63	16.80	-0.17	16.90	-0.27

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.45/17.50 | 94/100 | 3.76/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

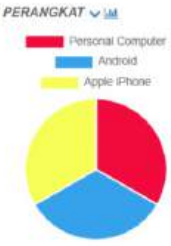


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.63	16.91	-0.28	16.98	-0.35
Kecurangan	16.63	16.68	-0.25	16.93	-0.30
Gratifikasi	16.63	16.88	-0.25	16.95	-0.32
Pungli	16.63	16.90	-0.27	16.96	-0.33
Calo	15.75	16.91	-1.16	16.92	-1.17

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

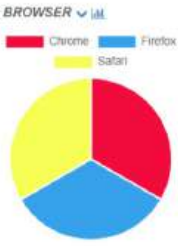
PERANGKAT



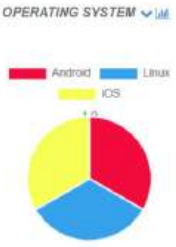
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

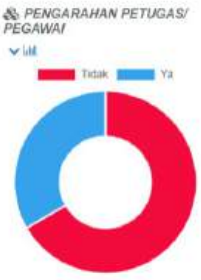


PROFIL RESPONDEN

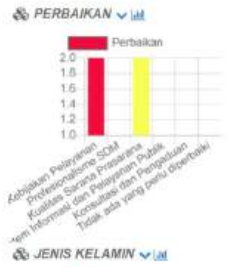
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



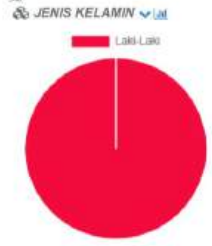
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

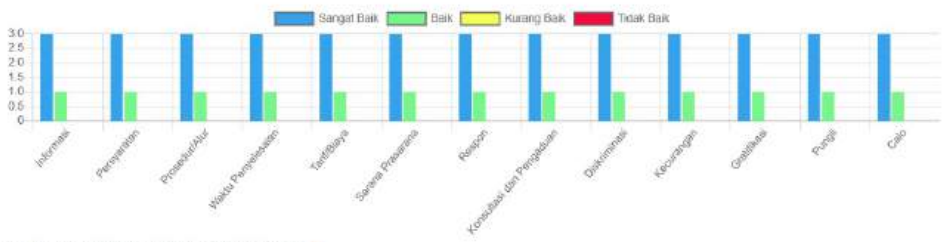
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.84/17.50
96.25/100 | 3.85/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.84/17.50
96.25/100 | 3.85/4

Responden
4

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

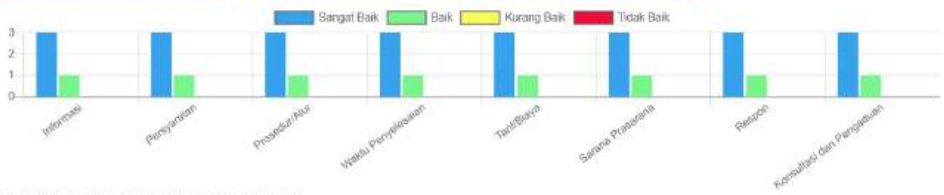
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.84/17.50 | 96.25/100 | 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

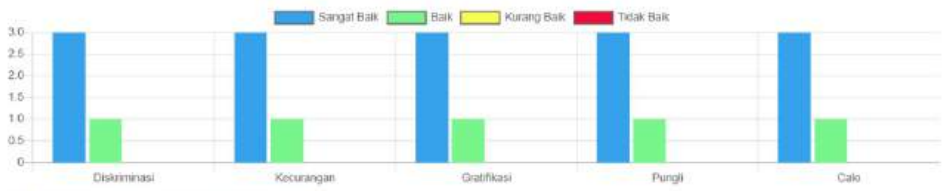


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.84	16.85	-0.01	16.96	-0.12
Persyaratan	16.84	16.86	-0.02	16.94	-0.10
Prosedur/Alur	16.84	16.89	-0.05	16.96	-0.12
Waktu Penyelesaian	16.84	16.85	-0.01	17.01	-0.17
Tarif/Biaya	16.84	16.88	-0.04	16.95	-0.11
Sarana Prasarana	16.84	16.78	0.06	17	-0.16
Respon	16.84	16.86	-0.02	17.02	-0.18
Konsultasi dan Pengaduan	16.84	16.83	0.01	17.02	-0.18

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.84/17.50 | 96.25/100 | 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

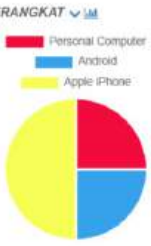


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.84	16.96	-0.12	16.99	-0.15
Kecurangan	16.84	16.93	-0.09	16.96	-0.12
Gratifikasi	16.84	16.94	-0.10	17	-0.16
Pungli	16.84	16.94	-0.10	17.01	-0.17
Calo	16.84	16.92	-0.08	16.95	-0.11

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

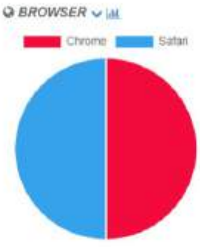
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

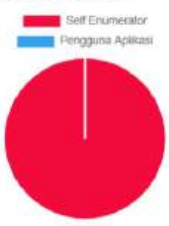


OPERATING SYSTEM

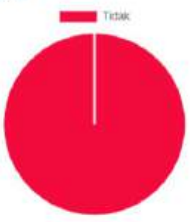


PROFIL RESPONDEN

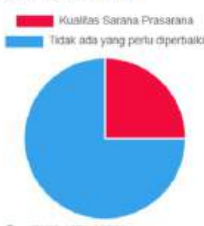
PENCACAHAN



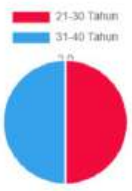
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



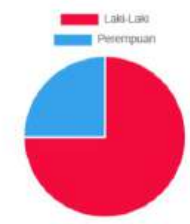
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

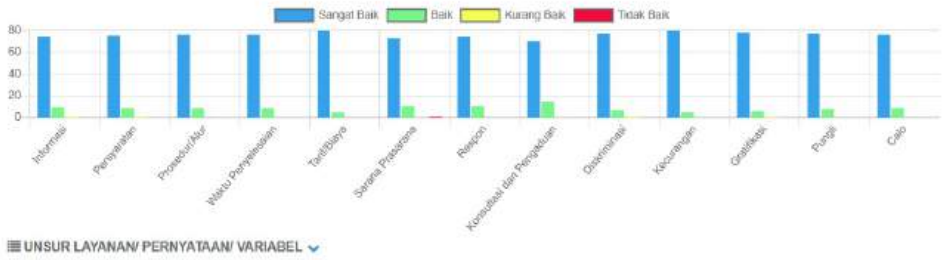
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.17/17.50
98.10/100 | 3.92/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.26/17.50
98.62/100 | 3.94/4

Responden
85

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

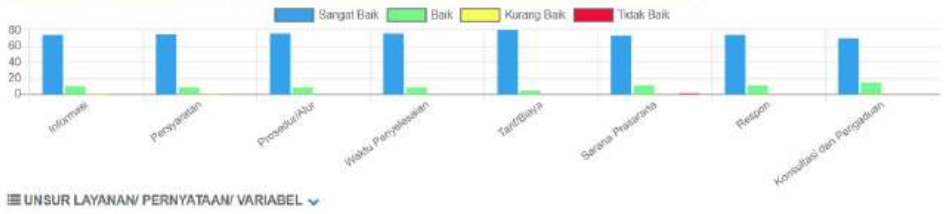
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.17/17.50 | 98.10/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



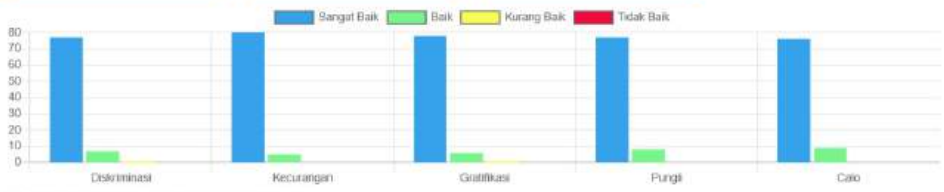
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.13	16.86	0.27	16.51	0.62	16.77	0.36
Persyaratan	17.16	16.87	0.29	16.80	0.36	16.72	0.44
Prosedur/Alur	17.22	16.87	0.35	16.65	0.57	16.69	0.53
Waktu Penyelesaian	17.22	16.86	0.36	17.15	0.07	16.84	0.38
Tarif/Biaya	17.35	16.88	0.47	17.22	0.13	16.84	0.51
Sarana Prasarana	17.07	16.78	0.29	16.72	0.35	16.79	0.28
Respon	17.16	16.87	0.29	16.85	0.31	16.70	0.46
Konsultasi dan Pengaduan	17.04	16.84	0.20	16.89	0.15	16.65	0.39

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.26/17.50 | 98.62/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



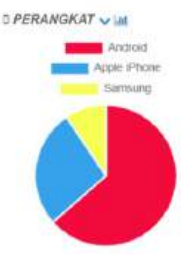
Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.22	16.95	0.27	16.97	0.25	16.94	0.28
Kecurangan	17.35	16.94	0.41	17.01	0.34	16.88	0.47
Gratifikasi	17.25	16.96	0.29	16.99	0.26	16.90	0.35
Pungli	17.25	17	0.25	17.27	-0.02	16.98	0.27
Calo	17.22	16.96	0.26	17.25	-0.03	16.90	0.32

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

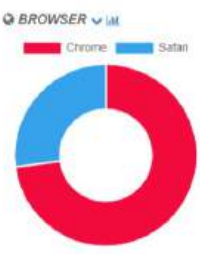
PERANGKAT



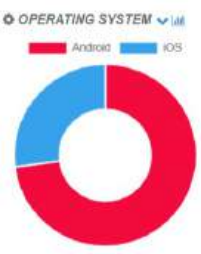
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

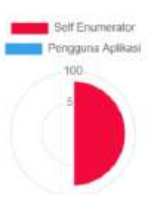


OPERATING SYSTEM

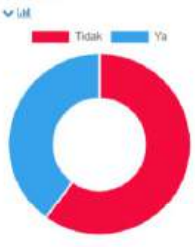


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



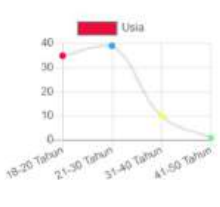
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



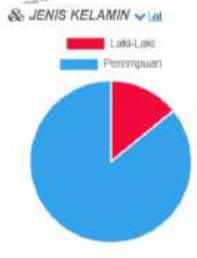
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK MEI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

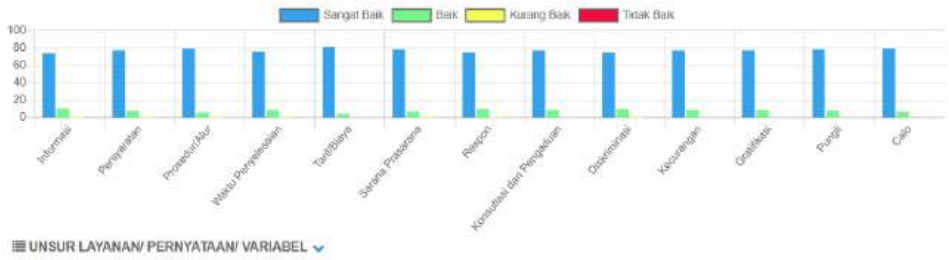
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.21/17.50
98.32/100 | 3.93/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.23/17.50
98.43/100 | 3.94/4

Responden
86

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

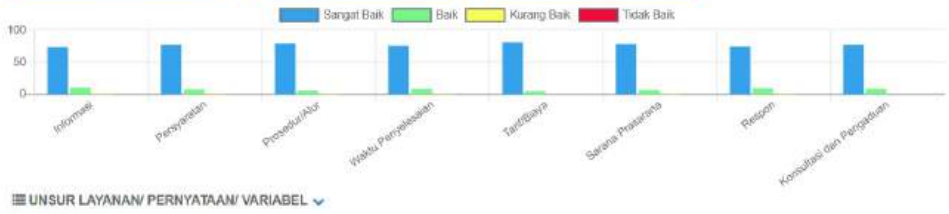
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.21/17.50 | 98.32/100 | 3.93/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.10	16.81	0.29	17.17	-0.07	16.71	0.39
Persyaratan	17.19	16.82	0.37	17.11	0.08	16.64	0.55
Prosedur/Alur	17.26	16.87	0.39	17.08	0.18	16.75	0.51
Waktu Penyelesaian	17.16	16.78	0.38	17.14	0.02	15.99	1.17
Tarif/Biaya	17.35	16.80	0.55	17.19	0.16	16.81	0.54
Sarana Prasarana	17.23	16.69	0.54	17.11	0.12	16.46	0.77
Respon	17.13	16.80	0.33	17.09	0.04	16.42	0.71
Konsultasi dan Pengaduan	17.23	16.80	0.43	17.04	0.19	16.67	0.56

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.23/17.50 | 98.43/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

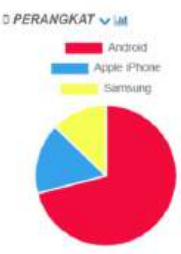


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.13	16.91	0.22	17.14	-0.01	16.57	0.56
Kecurangan	17.23	16.88	0.35	17.12	0.11	16.57	0.66
Gratifikasi	17.23	16.88	0.35	17.16	0.07	16.54	0.69
Pungli	17.26	16.90	0.36	17.28	-0.02	16.60	0.66
Calo	17.29	16.91	0.38	17.21	0.08	16.58	0.71

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

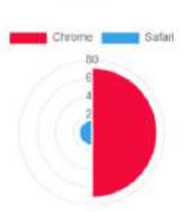
PERANGKAT



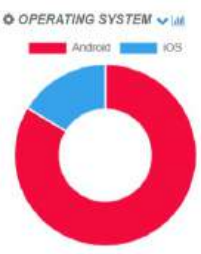
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

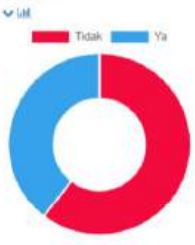


PROFIL RESPONDEN

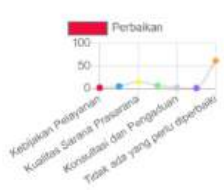
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

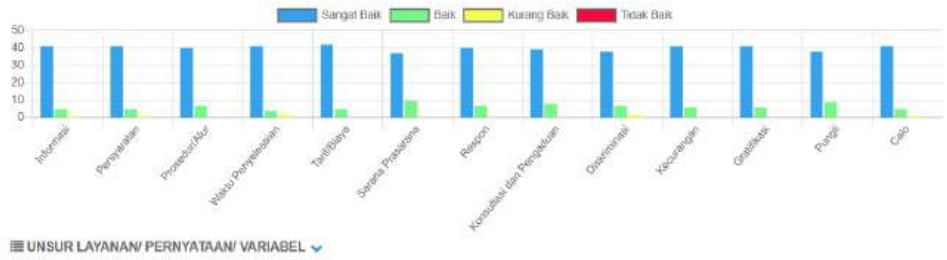
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.09/17.50
97.65/100 | 3.91/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.06/17.50
97.51/100 | 3.90/4

Responden
47

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

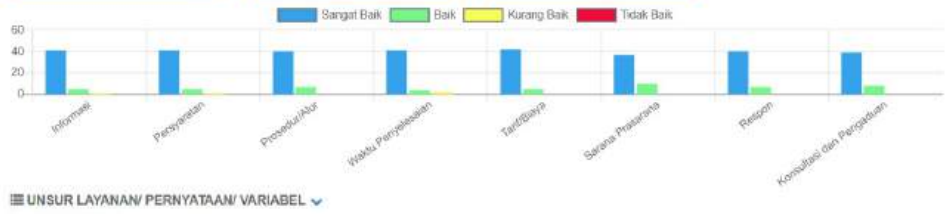
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.09/17.50 | 97.65/100 | 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.11	16.85	0.26	17.03	0.08	16.94	0.17
Persyaratan	17.11	16.86	0.25	17.08	0.03	16.96	0.15
Prosedur/Alur	17.11	16.89	0.22	17.11	0	16.93	0.18
Waktu Penyelesaian	17.05	16.85	0.20	17.16	-0.11	16.90	0.15
Tarif/Biaya	17.22	16.88	0.34	17.20	0.02	16.96	0.26
Sarana Prasarana	16.94	16.78	0.16	17.06	-0.12	16.92	0.02
Respon	17.11	16.86	0.25	17.15	-0.04	16.95	0.16
Konsultasi dan Pengaduan	17.05	16.83	0.22	17.19	-0.14	16.91	0.14

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.06/17.50 | 97.51/100 | 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

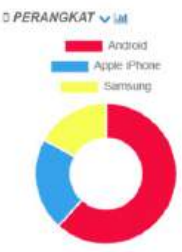


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.89	16.96	-0.07	17.16	-0.27	16.99	-0.10
Kecurangan	17.16	16.93	0.23	17.16	0	17	0.16
Gratifikasi	17.16	16.94	0.22	17.19	-0.03	17.04	0.12
Pungli	17	16.94	0.06	17.21	-0.21	17.05	-0.05
Calo	17.11	16.92	0.19	17.15	-0.04	17.04	0.07

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

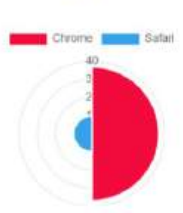
PERANGKAT



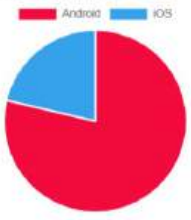
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

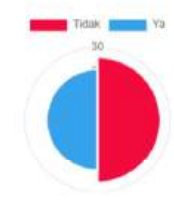


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



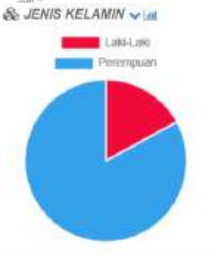
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK APRIL 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

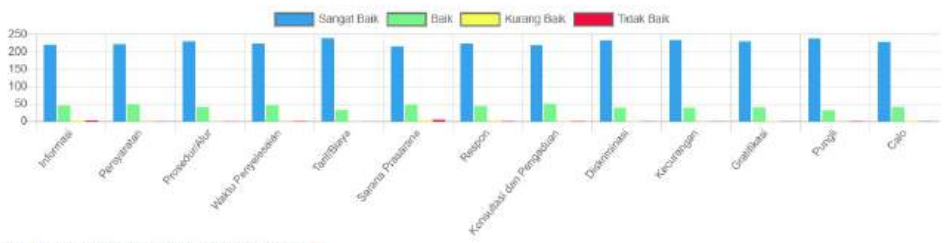
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.93/17.50
96.73/100 | 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.03/17.50
97.34/100 | 3.89/4

Responden
275

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

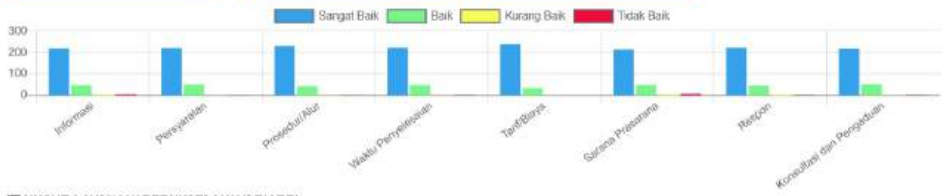
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.93/17.50 | 96.73/100 | 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

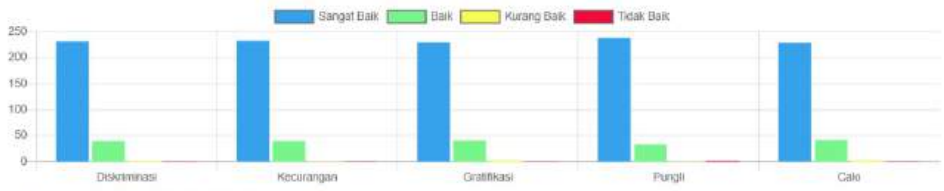


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.83	16.86	-0.03	17	-0.17	14	2.83
Persyaratan	16.96	16.87	0.09	17	-0.04	14	2.96
Prosedur/Alur	17.03	16.87	0.16	17.08	-0.05	14	3.03
Waktu Penyelesaian	16.96	16.86	0.10	16.97	-0.01	14	2.96
Tarif/Biaya	17.15	16.88	0.27	17.08	0.07	14	3.15
Sarana Prasarana	16.70	16.78	-0.08	16.69	0.01	14	2.70
Respon	16.92	16.87	0.05	17.06	-0.14	14	2.92
Konsultasi dan Pengaduan	16.89	16.84	0.05	17.01	-0.12	14	2.89

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.03/17.50 | 97.34/100 | 3.89/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.03	16.95	0.08	17.15	-0.12	15.75	1.28
Kecurangan	17.06	16.94	0.12	17.09	-0.03	15.75	1.31
Gratifikasi	17	16.96	0.04	17.12	-0.12	15.75	1.25
Pungli	17.07	17	0.07	17.16	-0.09	15.75	1.32
Calo	17	16.96	0.04	17.10	-0.10	15.75	1.25

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

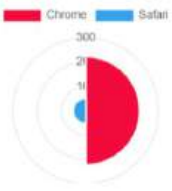
PERANGKAT



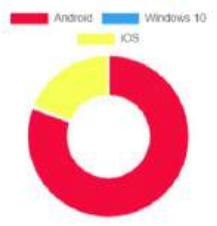
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

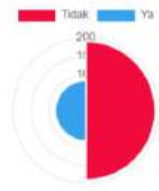
PENCACAHAN



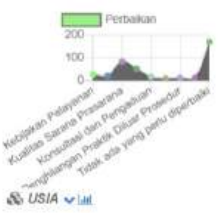
PRODUK LAYANAN



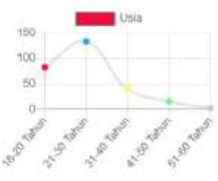
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



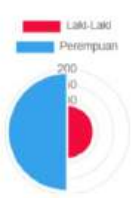
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JULI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

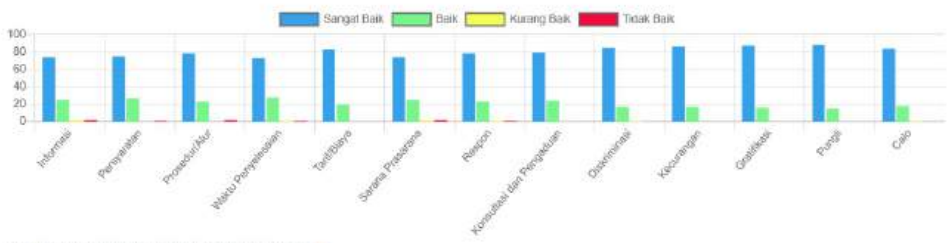
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.73/17.50
95.58/100 | 3.82/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.06/17.50
97.47/100 | 3.90/4

Responden
103

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.73/17.50 | 95.58/100 | 3.82/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

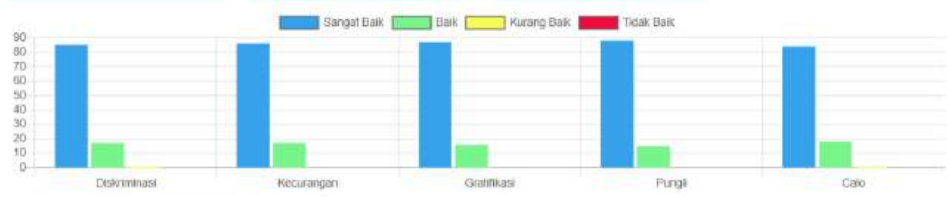


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.56	16.93	-0.37	16.96	-0.40	14	2.56
Persyaratan	16.68	16.94	-0.26	16.93	-0.25	14	2.68
Prosedur/Alur	16.71	16.99	-0.28	16.97	-0.26	14	2.71
Waktu Penyelesaian	16.63	16.90	-0.27	17.01	-0.38	14	2.63
Tarif/Biaya	16.99	16.93	0.06	16.95	0.04	14	2.99
Sarana Prasarana	16.61	16.85	-0.24	16.72	-0.11	14	2.61
Respon	16.74	16.94	-0.20	16.83	-0.09	14	2.74
Konsultasi dan Pengaduan	16.89	16.91	-0.02	16.93	-0.04	14	2.89

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.06/17.50 | 97.47/100 | 3.90/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.02	17	0.02	17.05	-0.03	15.75	1.27
Kecurangan	17.07	17.01	0.06	17.17	-0.10	15.75	1.32
Gratifikasi	17.09	16.99	0.10	17.07	0.02	15.75	1.34
Pungli	17.12	17.01	0.11	17.05	0.07	15.75	1.37
Calo	16.99	16.98	0.01	17.02	-0.03	15.75	1.24

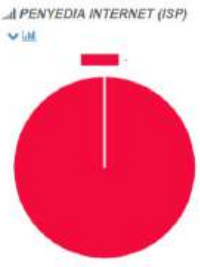
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

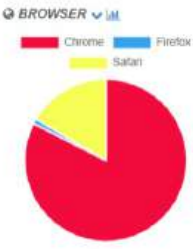
PERANGKAT



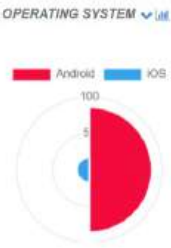
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

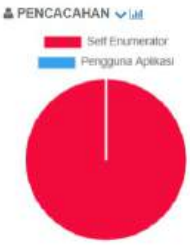


OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

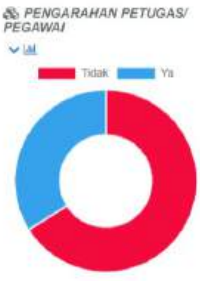
PENCACAHAN



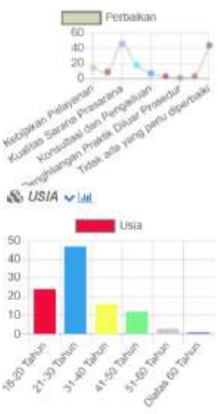
PRODUK LAYANAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA

JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Mei 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2026

< >
1 - 20 dari ?

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK JUNI 2026

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

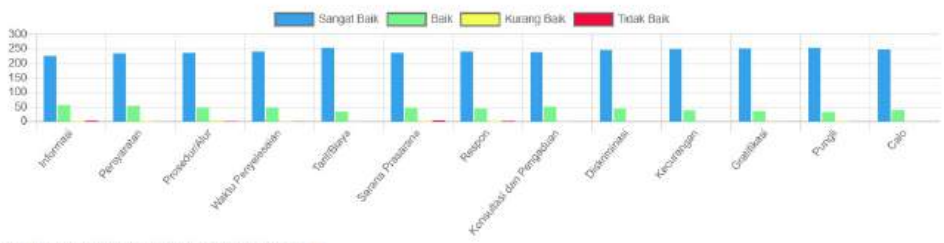
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.94/17.50
96.81/100 3.87/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.12/17.50
97.84/100 3.91/4

Responden
292

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

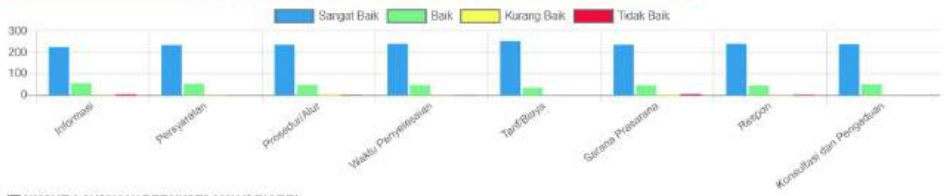
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.94/17.50 96.81/100 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.78	16.85	-0.07	16.89	-0.11	14	2.78
Persyaratan	16.95	16.86	0.09	16.88	0.07	14	2.95
Prosedur/Alur	16.90	16.89	0.01	16.91	-0.01	14	2.90
Waktu Penyelesaian	17	16.85	0.15	16.93	0.07	14	3
Tarif/Biaya	17.16	16.88	0.28	16.88	0.28	14	3.16
Sarana Prasarana	16.81	16.78	0.03	16.69	0.12	14	2.81
Respon	16.92	16.86	0.06	16.93	-0.01	14	2.92
Konsultasi dan Pengaduan	17.01	16.83	0.18	16.69	0.32	14	3.01

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.12/17.50 97.84/100 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

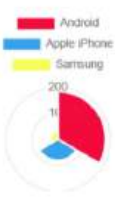


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah		Wilayah Bebas dari Korupsi	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.10	16.96	0.14	16.99	0.11	15.75	1.35
Kecurangan	17.13	16.93	0.20	17.02	0.11	15.75	1.38
Gratifikasi	17.14	16.94	0.20	16.97	0.17	15.75	1.39
Pungli	17.14	16.94	0.20	16.96	0.18	15.75	1.39
Calo	17.10	16.92	0.18	16.92	0.18	15.75	1.35

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

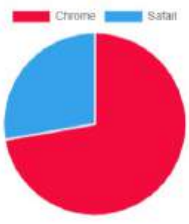
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

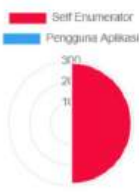


OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

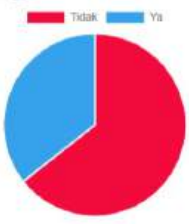
PENCACAHAN



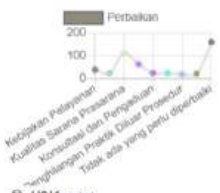
PRODUK LAYANAN



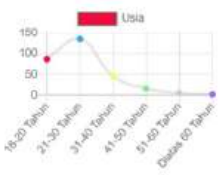
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



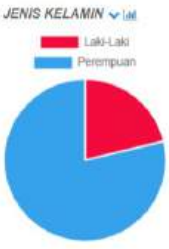
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



LAPORAN KINERJA PELAYANAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
LRT SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja pelayanan LRT Sumatera Selatan diukur berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan berdasarkan hasil survei pengguna jasa LRT. Adapun Nilai IKM LRT Sumatera Selatan telah dilakukan pengukuran oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Dan hasil survei tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penilaian kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh LRT Sumatera Selatan. Berikut Kinerja Pelayanan LRT Sumatera Selatan pada tahun 2026.

A. Profil Responden

NO	URAIAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Jumlah Responden Perempuan	286	292	249	291	297	302						
	Jumlah Responden Laki-Laki	86	78	124	80	75	71						
2	Pelajar/Mahasiswa	210	238	216	258	245	226						
	Wiraswasta	50	51	45	48	46	53						
	PNS/TNI/POLRI	23	11	18	12	16	19						
	Lainnya	89	70	94	53	65	75						
3	Usia 15 - 25 Tahun	289	297	307	312	293	301						
	Usia 26 - 45 Tahun	81	70	62	59	77	72						
	Usia > 46 Tahun	2	3	4	0	2	0						
4	Sekolah/Kampus	134	150	137	163	144	123						
	Bekerja	100	95	89	80	52	75						
	Jalan-Jalan	110	100	121	110	151	152						
	Transit ke Bandara	28	25	26	18	25	23						
5	> 3 Kali	279	281	293	272	255	261						
	2 -3 Kali	63	67	64	62	78	80						
	1 Kali	30	22	16	37	39	32						
CHECK		OK	OK	OK	OK	OK	OK						
JUMLAH RESPONDEN		372	370	373	371	372	373						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Data IKM Skala 1 – 100

NO	UNSUR LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U1	Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan LRT Sumatera Selatan?	90,52	91,89	93,43	93,26	92,54	91,62						
U2	Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan membeli tiket di LRT Sumatera Selatan?	93,55	93,92	94,37	95,48	94,95	94,37						
U3	Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan petugas dalam pelayanan?	91,20	91,89	92,69	92,65	93,07	92,09						
U4	Bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan di toilet dan tempat ibadah di Stasiun LRT Sumatera Selatan	87,23	88,99	89,54	90,09	89,31	88,4						
U5	Bagaimana pendapat Anda tentang waktu perjalanan dan waktu tunggu LRT Sumatera Selatan?	83,47	85,07	86,39	87,87	86,76	86,52						
U6	Bagaimana pendapat Anda tentang tidak adanya diskriminasi pelayanan di LRT Sumatera Selatan?	89,52	90,88	92,23	91,98	92,13	90,95						
U7	Bagaimana pendapat Anda tentang penetapan tarif pelayanan yang dibayarkan?	91,13	92,91	93,57	93,80	93,41	92,49						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U8	Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan integrasi antarmoda di LRT Sumatera Selatan?	88,44	90,54	91,42	91,5	91,33	89,74						
U9	Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan mendapatkan informasi pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik?	87,84	89,66	90,48	91,91	90,99	90,21						
U10	Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan di stasiun dan diatas kereta?	89,78	91,55	92,23	92,38	92,47	91,62						
U11	Bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas yang ada bagi penumpang bekebutuhan khusus?	88,44	90,34	91,49	91,57	90,99	91,01						
U12	Bagaimana pendapat Anda tentang pengendalian kecurangan pelayanan diluar prosedur yang sudah ada di LRT Sumatera Selatan?	94,76	96,35	95,44	97,1	97,04	96,58						
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN		89,66	91,17	91,94	92,46	92,08	91,3						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR PRODUK LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U1	Apakah Anda sudah mengetahui tentang tarif berlangganan LRT Sumatera Selatan?	91,26	91,76	91,29	92,04	91,53	90,21						
U2	Apakah pembelian kartu berlangganan (Kartu KRISS) dapat dijangkau dengan mudah?	94,35	93,38	94,37	94,74	95,43	94,23						
U3	Apakah Anda setuju bahwa tidak adanya penerimaan imbalan diluar ketentuan di LRT Sumatera Selatan?	98,12	99,05	98,93	99,59	98,92	98,39						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR PRODUK LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U4	Apakah Anda telah mengetahui bahwa saat ini telah ada pembaharuan rute integrasi Feeder menjadi 8 (delapan) rute?	81,72	82,30	85,39	84,09	85,21	86,59						
U5	Apakah Anda setuju jika diperlukan perbaikan fasilitas moda (seperti halte, sistem pembayaran, dan jadwal yang relevan dengan LRT Sumatera Selatan)?	99,46	98,51	99,33	99,05	99,32	98,92						
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN		92,99	93	93,86	93,9	94,08	93,67						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						
RATA-RATA AKHIR		91,32	92,08	92,90	93,19	93,09	92,49						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Data IKM Skala 1,00 - 4,00

NO	UNSUR LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U1	Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan LRT Sumatera Selatan?	3,59	3,68	3,74	3,73	3,7	3,66						
U2	Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan membeli tiket di LRT Sumatera Selatan?	3,71	3,76	3,77	3,82	3,8	3,77						
U3	Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan petugas dalam pelayanan?	3,62	3,68	3,71	3,71	3,72	3,68						
U4	Bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan di toilet dan tempat ibadah di Stasiun LRT Sumatera Selatan	3,46	3,56	3,58	3,60	3,57	3,54						
U5	Bagaimana pendapat Anda tentang waktu perjalanan dan waktu tunggu LRT Sumatera Selatan?	3,31	3,40	3,46	3,51	3,47	3,46						
U6	Bagaimana pendapat Anda tentang tidak adanya diskriminasi pelayanan di LRT Sumatera Selatan?	3,55	3,64	3,69	3,68	3,69	3,64						
U7	Bagaimana pendapat Anda tentang penetapan tarif pelayanan yang dibayarkan?	3,62	3,72	3,74	3,75	3,74	3,7						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U8	Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan integrasi antarmoda di LRT Sumatera Selatan?	3,51	3,62	3,66	3,66	3,65	3,59						
U9	Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan mendapatkan informasi pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik?	3,49	3,59	3,62	3,68	3,64	3,61						
U10	Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan di stasiun dan diatas kereta?	3,56	3,66	3,69	3,7	3,70	3,66						
U11	Bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas yang ada bagi penumpang bekebutuhan khusus?	3,51	3,61	3,66	3,66	3,64	3,64						
U12	Bagaimana pendapat Anda tentang pengendalian kecurangan pelayanan diluar prosedur yang sudah ada di LRT Sumatera Selatan?	3,76	3,85	3,82	3,88	3,88	3,86						
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN		3,56	3,65	3,68	3,69	3,68	3,65						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR PRODUK LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U1	Apakah Anda sudah mengetahui tentang tarif berlangganan LRT Sumatera Selatan?	3,62	3,67	3,65	3,68	3,66	3,61						
U2	Apakah pembelian kartu berlangganan (Kartu KRISS) dapat dijangkau dengan mudah?	3,74	3,74	3,77	3,79	3,82	3,77						
U3	Apakah Anda setuju bahwa tidak adanya penerimaan imbalan diluar ketentuan di LRT Sumatera Selatan?	3,89	3,96	3,96	3,98	3,96	3,94						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNSUR PRODUK LAYANAN	TAHUN 2026											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
U4	Apakah Anda telah mengetahui bahwa saat ini telah ada pembaharuan rute integrasi Feeder menjadi 8 (delapan) rute?	3,24	3,29	3,42	3,36	3,41	3,46						
U5	Apakah Anda setuju jika diperlukan perbaikan fasilitas moda (seperti halte, sistem pembayaran, dan jadwal yang relevan dengan LRT Sumatera Selatan)?	3,95	3,94	3,97	3,96	3,97	3,96						
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN		3,68	3,72	3,75	3,75	3,76	3,74						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						
RATA-RATA AKHIR		3,62	3,68	3,72	3,73	3,72	3,7						
KETERANGAN		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Nilai IKM Triwulan I (TW I) – Triwulan II (TW-II)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2026																
URAIAN	**JAN**	**FEB**	**MAR**	**TW I**	**APR**	**MEI**	**JUN**	**TW II**	**JUL**	**AGT**	**SEPT**	**TW III**	**OKT**	**NOV**	**DES**	**TW IV**
JUMLAH RESPONDEN	372	370	373	1115	371	372	373	1116								
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-100)	91,32	92,08	92,90	92,10	93,19	93,09	92,49	92,92								
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK								
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-4)	3,62	3,68	3,72	3,67	3,73	3,72	3,7	3,72								
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK								

Dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bulan Juni 2026 adalah 3,70 (Skala 1-4), melebihi target capaian IKM sebesar 3,57. Dan Nilai IKM Triwulan II adalah 3,72, artinya mengalami peningkatan dari Triwulan I sebelumnya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana

Aditya Yunianto
NIP.198506092007121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

PERSENTASE *ON TIME PERFORMANCE (OTP)* TRANSPORTASI KERETA API

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TEL: 0813 6001 3838 | WEBSITE: http://djka.dephub.go.id/ EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0122/F2.2/VII/2026

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Dari : Kasubdit Lalu Lintas

Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tanggal : 20 Juli 2026

Menunjuk Surat Undangan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor KP.406/1/1/K2/DJKA/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hasil evaluasi kinerja lalu lintas sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 101,21%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKK Tahun 2026 sebesar 95,73%. Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya:
   a. KA Tambahan pada Masa Akhir pekan atau libur pada bulan Mei 2026;
   b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan
   c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 97,4%, nilai tersebut belum memenuhi Target IKP Tahun 2026 sebesar 97,77%. Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh:
   a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%);
   b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%);
   c. terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2026 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0122/K2.2/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

I. Capaian Kinerja Tahun 2026

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi Program	Realisasi							
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	100,82%	100,82%
	2	Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	99,83%	100,35%
	3	Maret	95,73%	90.740	264.757	85.946	6.303	92.249	266.881	101,66%	100,80%
TW 2	4	April	95,73%	88.872	353.629	83.773	6.377	89.150	356.031	100,31%	100,68%
	5	Mei	95,73%	90.366	443.995	85.520	6.827	92.347	448.378	102,19%	100,99%
	6	Juni	95,73%	88.822	532.817	84.059	6.815	90.874	539.252	102,31%	101,21%
TW 3	7	Juli	95,73%	92.122	624.939	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,73%	91.139	716.078	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,73%	89.271	805.349	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,73%	92.119	897.468	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,73%	88.912	986.380	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,73%	91.652	1.078.032	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	97,77%	92.190	92.190	5.445	84.565	90.010	90.010	5.014	83.550	88.564	88.564	89.287	89.287	96,85%	96,85%
	Februari	97,77%	82.442	174.632	4.848	76.542	81.390	171.400	4.221	75.683	79.904	168.468	80.647	169.934	97,82%	97,31%
	Maret	97,77%	92.249	266.881	5.990	85.196	91.186	262.586	5.421	84.099	89.520	257.988	90.353	260.287	97,94%	97,53%
TW 2	April	97,77%	89.150	356.031	5.926	82.312	88.238	350.824	5.334	80.786	86.120	344.108	87.179	347.468	97,79%	97,59%
	Mei	97,77%	92.347	448.378	6.340	84.050	90.390	441.214	5.773	82.304	88.077	432.185	89.234	436.700	96,63%	97,40%
	Juni	97,77%	90.874	539.252	6.354	82.938	89.292	530.506	5.352	81.877	87.729	519.914	88.526	525.235	97,43%	97,40%
TW 3	Juli	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	September	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2026

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	101,21%	Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya: a. KA Tambahan pada Masa Akhir pekan atau libur pada bulan Mei 2026; b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,40%	Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh: a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%); b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%); c. terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. c. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.	a. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 27 April 2026 dengan Nomor: KA.407/1/3/DJKA/2026 dan tanggal 9 Juni 2026 dengan Nomor: KA.407/1/6/DJKA/2026 ; b. Telah dilaksanakan tahapan pengumpulan data rancangan Gapeka 2026 pada jaringan jalur nasional Jawa dan Sumatera antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI; c. Sedang dilakukan evaluasi rancangan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional Sulawesi Selatan dan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.	a. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,73%	101,21%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Jawa, Sumatera, Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	97,77%	97,14%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 231/ND/K2.3/DJKA/2026

Yth. : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Angkutan
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 24 Juli 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: 0255/K2/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Permohonan Data Dukung Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, bersama ini kami sampaikan data dukung kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Subdirektorat Angkutan sebagai berikut:

1. Data Capaian Kinerja Triwulan II 2026

Uraian	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Persentase
Angkutan Penumpang	258.730.378 Penumpang	286.899.630 Penumpang	**111%**
Angkutan Barang	17.352.810 Ton	17.718.452 Ton	**102%**

2. Matriks Analisa Keberhasilan/Kegagalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II	Realisasi Per Juni 2026	Analisa Keberhasilan / Kegagalan
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	258.730.378 Penumpang	286.899.630 Penumpang	1. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan II Tahun 2026 sebesar 103.685.068 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.054.413 penumpang. 2. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan II Tahun 2026 sebesar 1.530.019 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.816 penumpang; 3. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan II Tahun 2026 sebesar 8.263.965 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 118.225 penumpang;

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II	Realisasi Per Juni 2026	Analisa Keberhasilan / Kegagalan
				4. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 111%.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.352.810 Ton	17.718.452 Ton	1. Realisasi Angkutan Barang Triwulan II Tahun 2026 sebesar 17.718.452 Ton. 2. Persentase realisasi angkutan barang terhadap target pada triwulan II Tahun 2026 sebesar 102% 3. Meningkatnya permintaan volume barang pada komoditas BBM, Batubara, Petikemas, Semen dan Pupuk dari pihak mitra moda kereta api.

3. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda	1. Telah beroperasinya Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) yang melayani aktivitas naik dan turun penumpang KRL Jabodetabek, sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan angkutan perkotaan; 2. Pengoperasian layanan KA Sangkuriang pada lintas pelayanan Bandung–Ketapang turut memperluas jangkauan pelayanan angkutan penumpang; 3. Peresmian KA Cikuray menggunakan Rangkaian Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Petani dan Pedagang; 4. Telah melaksanakan Rapat Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Subsidi Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Periode Triwulan I, Bulan April dan Bulan Mei 2026; 5. Telah melakukan Pembahasan Rencana Layanan KA PSO di Stasiun Batang dan Stasiun Plabuan bersama internal DJKA.
2.	Pemenuhan Target Angkutan	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan	1. Telah dilakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait penyusunan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
	Barang Kereta Api	aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang.	narasi tunggal kebijakan Indonesia bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan pada tanggal 8 Mei 2026; 2. Telah dilaksanakan koordinasi dengan PT KAI (Persero) dalam peningkatan upaya percepatan proses mediasi dengan Gubernur Sumatera Selatan terkait pemberian dispensasi hauling, dimana PT Dizamatra Powerindo dan PT Mustika Indah Permai selaku mitra angkutan kereta api memperoleh toleransi sementara untuk *crossing* jalan nasional; 3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan PT KAI (Persero) dalam peningkatan upaya peningkatan operasional angkutan melalui penambahan layanan angkutan PT TJP, penambahan stasiun bongkar muat di Stasiun Ronggowarsito, serta pengoperasian angkutan peti kemas Divre I Sumatera Utara relasi Belawan–Sei Mangkei; 4. Telah dilaksakanan koordinasi dengan BTP Semarang dalam rangka pembahasan Draft PKS Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan PT. Pelindo (Persero) Regional 3 untuk Pengoperasian Jalur KA di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada tanggal 26 Mei 2026; 5. Saat ini sedang dilaksanakan penyusunan Kajian Pengembangan Fasilitas Infrastruktur Logistik Berbasis KA di Pulau Jawa.

4. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II	Realisasi Per Maret 2026	Kriteria Upaya	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	258.730.378 Penumpang	286.899.630 Penumpang	Aktivitas	Meningkatkan fasilitas pelayanan baik di stasiun maupun dalam perjalanan kereta.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.352.810 Ton	17.718.452 Ton	Aktivitas	1. Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang; 2. Melaksankan Studi Pengembangan Fasilitas Infrastruktur Logistik Berbasi KA di Pulau Jawa.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

Lampiran Surat
Nomor : 231/ND/K2.3/DJKA/2026
Tanggal : 24 Juli 2026

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT TRIWULAN II TAHUN 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2026												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	366.669	317.405	470.889	346.915	377.509	360.661							**2.240.048**
KA Ekonomi Jarak Sedang	632.652	538.412	630.097	606.090	591.875	633.995							**3.633.121**
KA Ekonomi Jarak Dekat	466.949	392.270	465.815	452.578	484.358	488.235							**2.750.205**
KRD Ekonomi	131.531	108.842	138.758	144.769	145.931	163.348							**833.179**
KA Ekonomi Lebaran	-	-	-	-	-	-							**-**
TOTAL	**1.597.801**	**1.356.929**	**1.705.559**	**1.550.352**	**1.599.673**	**1.646.239**							**9.456.553**
	Triwulan I		**4.660.289**	**Triwulan II**		**9.456.553**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

2. KA Komersial

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.138.730	986.184	1.517.090	1.161.558	1.325.286	1.446.836							**7.575.684**
Bisnis	50.469	43.160	58.563	49.942	51.798	55.788							**309.720**
Ekonomi	1.836.989	1.434.352	2.277.440	1.757.515	1.916.389	2.134.816							**11.357.501**
Lokal Eksekutif	33.973	27.032	38.537	33.325	39.988	41.837							**214.692**
Lokal Bisnis	-	-	-	-	-	-							**-**
Lokal Ekonomi	369.192	319.412	358.348	364.254	393.241	387.322							**2.191.769**
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-							**-**
Priority	24.880	20.183	32.514	24.752	28.961	32.475							**163.765**
TOTAL	**3.454.233**	**2.830.323**	**4.282.492**	**3.391.346**	**3.755.663**	**4.099.074**							**21.813.131**
	Triwulan I		**10.567.048**	**Triwulan II**		**21.813.131**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

3. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	378.863	294.519	410.860	356.827	373.948	391.479							**2.206.496**
Cut Meutia	-	-	-	-	-	-							**-**
Tanete Rilau - Palanro	28.314	22.923	24.935	34.830	35.519	27.075							**173.596**
Jumlah	**407.177**	**317.442**	**435.795**	**391.657**	**409.467**	**418.554**							**2.380.092**
	Triwulan I		**1.160.414**	**Triwulan II**		**2.380.092**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

Ket. KA Cut Meutia tidak dapat beroperasi dikarenakan kondisi prasarana yang rusak akibat banjir.

PT Kereta Commuter Indonesia

1. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2026												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	30.226.365	27.794.450	29.958.557	30.587.004	28.966.685	30.468.247							**178.001.308**
KRL Yogyakarta	758.375	662.025	802.316	805.314	874.735	863.267							**4.766.032**
KA Lokal Wilayah I	388.691	347.882	409.290	418.340	435.502	440.484							**2.440.189**
KA Lokal Wilayah II	1.756.179	1.454.571	1.839.247	1.643.720	1.731.513	1.681.680							**10.106.910**
KA Lokal Wilayah VI	94.567	79.235	106.604	99.992	102.308	105.092							**587.798**
KA Lokal Wilayah VII	1.418.231	1.245.219	1.403.936	1.451.422	1.505.742	1.504.021							**8.528.571**
TOTAL	**34.642.408**	**31.583.382**	**34.519.950**	**35.005.792**	**33.616.485**	**35.062.791**							**204.430.808**
	Triwulan I		**100.745.740**	**Triwulan II**		**204.430.808**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

2. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara Soetta (SHIA)	221.087	190.858	228.565	197.268	175.796	183.403							**1.196.977**
Jumlah	**221.087**	**190.858**	**228.565**	**197.268**	**175.796**	**183.403**							**1.196.977**
	Triwulan I		**640.510**	**Triwulan II**		**1.196.977**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

PT Railink

1. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	162.093	138.646	168.876	149.883	143.718	145.682							**908.898**
KA Srilelawangsa K3 Premium (MDN - BIJ - KBG)	197.329	179.927	205.015	201.682	209.972	211.126							**1.205.051**
KA Srilelawangsa Woojin (MDN-BIJ)	23.515	21.033	24.262	23.944	24.253	23.657							**140.664**
KA Srilelawangsa (MDN-ARB)	95.643	84.815	101.680	91.670	92.018	93.045							**558.871**
Jumlah	**478.580**	**424.421**	**499.833**	**467.179**	**469.961**	**473.510**							**2.813.484**
	Triwulan I		**1.402.834**	**Triwulan II**		**2.813.484**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

2. KA KOMERSIAL

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta Ekspres	77.236	62.771	87.646	73.747	65.011	68.354							**434.765**
Srilelawangsa (MDN - ARB - KNM)	42.331	36.791	45.685	38.718	35.491	35.641							**234.657**
Jumlah	**119.567**	**99.562**	**133.331**	**112.465**	**100.502**	**103.995**	**-**						**669.422**
	Triwulan I		**352.460**	**Triwulan II**		**669.422**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			**-**

PT MRT Jakarta

MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	4.195.303	3.733.714	3.638.751	4.347.308	4.001.270	4.509.047							**24.425.393**
Jumlah	**4.195.303**	**3.733.714**	**3.638.751**	**4.347.308**	**4.001.270**	**4.509.047**							**24.425.393**
	Triwulan I		**11.567.768**	**Triwulan II**		**24.425.393**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT LRT Jakarta

LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	127.470	108.845	122.208	130.176	125.658	141.668							**756.025**
Jumlah	**127.470**	**108.845**	**122.208**	**130.176**	**125.658**	**141.668**							**756.025**
	Triwulan I		**358.523**	**Triwulan II**		**756.025**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi LRT Jabodebek

LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT Jabodebek	2.714.594	2.530.000	2.510.352	2.912.092	2.544.818	2.807.055							**16.018.911**
Jumlah	**2.714.594**	**2.530.000**	**2.510.352**	**2.912.092**	**2.544.818**	**2.807.055**							**16.018.911**
	Triwulan I		**7.754.946**	**Triwulan II**		**16.018.911**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**			

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Kereta Whoosh

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Whoosh	508.652	443.810	456.353	491.826	515.091	523.102							**2.938.834**
Jumlah	**508.652**	**443.810**	**456.353**	**491.826**	**515.091**	**523.102**							**2.938.834**
	Triwulan I		**1.408.815**	**Triwulan II**		**2.938.834**	**Triwulan III**		**4.524.091**	**Triwulan IV**		**6.202.393**	

Jumlah Penumpang terangkut Tahun Anggaran 2026

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	48.466.872	43.619.286	48.533.189	48.997.461	47.314.384	49.968.438						
Jumlah	**Triwulan I**		**140.619.347**	**Triwulan II**		**286.899.630**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**		

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT TRIWULAN II TAHUN 2026

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	154.320	136.769	171.385	149.910	153.154	163.733						
2	PUPUK	-	360	1.170	3.720	2.400	2.400						
3	SEMEN & KLINKER	89.440	78.280	53.080	71.160	89.520	77.360						
4	BATUBARA	-	-	-	-	-	-						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	-	-	-	-	-	-						
6	PETIKEMAS	443.746	439.858	399.941	512.577	483.961	459.348						
7	KARET & KLINKER	-	-	-	-	-	-						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	15.858	15.188	13.753	15.532	14.191	15.672						
9	B3 & LIMBAH B3	2.982	3.465	1.911	4.057	2.717	2.121						
10	LAINNYA	3.271	4.306	5.519	3.964	3.177	6.454						
TOTAL		**709.617**	**678.226**	**646.759**	**760.920**	**749.120**	**727.088**						
		Triwulan I		**2.034.602**	**Triwulan II**		**2.237.128**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**		

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	73.387	61.618	72.523	65.431	67.172	73.362						
2	PUPUK	-	-	-	-	-	-						
3	SEMEN & KLINKER	115.836	89.827	141.773	111.476	136.385	109.952						
4	BATUBARA	3.998.049	3.413.788	4.605.902	4.661.290	4.950.985	4.986.404						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	47.869	46.362	53.285	50.843	54.483	50.885						
6	PETIKEMAS	36.280	42.700	57.220	58.180	51.340	44.920						
7	KARET	-	-	-	-	-	-						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	365	345	326	362	308	347						
9	B3 & LIMBAH B3	-	-	-	-	-	-						
10	LAINNYA	950	5.233	1.700	1.500	4.590	1.110						
TOTAL		**4.272.736**	**3.659.873**	**4.932.729**	**4.949.082**	**5.265.263**	**5.266.980**						
		Triwulan I		**12.865.338**	**Triwulan II**		**15.481.324**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**		

3. Jumlah Barang terangkut TA. 2026

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	BBM	227.707	198.386	243.908	215.341	220.326	237.095						
2	PUPUK	-	360	1.170	3.720	2.400	2.400						
3	SEMEN & KLINKER	205.276	168.107	194.853	182.636	225.905	187.312						
4	BATUBARA	3.998.049	3.413.788	4.605.902	4.661.290	4.950.985	4.986.404						
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	47.869	46.362	53.285	50.843	54.483	50.885						
6	PETIKEMAS	480.026	482.558	457.161	570.757	535.301	504.268						
7	KARET	-	-	-	-	-	-						
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	16.223	15.533	14.079	15.894	14.499	16.019						
9	B3 & LIMBAH B3	2.982	3.465	1.911	4.057	2.717	2.121						
10	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	4.221	9.539	7.219	5.464	7.767	7.564						
TOTAL		**4.982.353**	**4.338.099**	**5.579.488**	**5.710.002**	**6.014.383**	**5.994.068**						
		Triwulan I		**14.899.940**	**Triwulan II**		**17.718.452**	**Triwulan III**			**Triwulan IV**		

Aditya Karsa
NIP 198609022008121001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001-3838
WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 42/K53/VII/2026

Yth : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal : Penyampaian Data Jumlah Kecelakaan Kereta Api Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 7 Juli 2026

Bersama ini disampaikan data kecelakaan kereta api dan jumlah data korban kecelakaan kereta api triwulan ke II tahun 2026, dapat kami laporkan sebagai berikut:

A. Data Kecelakaan Kereta Api Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2026

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
1.	Sabtu, 7 Februari 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III palembang	Anjlokan	KA 3100 (Barapati) anjlok di Km 370+5/6 Jalur hulu petak jalan Stasiun Serdang – Stasiun Payakabung	Nihil	**Prasarana**, yaitu: 1. Kejadian anjlokan KA 3100 disebabkan oleh patahnya rel di Km 370+570; 2. Patahnya rel terjadi akibat kegagalan material bersifat brittle yang diawali oleh retak permukaan kepala rel (rail head) dan berkembang menjadi retak struktural ke arah vertikal hingga ke leher rel (rail web), dengan lokasi patahan berada di atau dekat area pemopokan; 3. Di petak yang sama ditemukan banyak bekas pemopokan yang mengindikasikan riwayat cacat rel berulang akibat Rolling Contact Fatigue (RCF) pada lintasan dengan frekuensi dan tonase tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
2.	Rabu, 1 April 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung	Anjlokan	KA 174B (Ciremai) menabrak longsoran dan anjlok di KM 142+8/9 petak jalan Maswati - Sasaksaat	Nihil	**Prasarana,** yaitu: 1. Material longsoran yang menutupi jalur di KM 143+8/9 petak jalan Maswati – Sasaksaat; 2. Sistem drainase lereng yang tidak optimal;
3.	Senin, 6 April 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto	Anjlokan	KA 161 (Bangunkarta) anjlok di Km 312+1 wessel 21A dan 21B Jalur Hulu Emplasemen Bumiayu	Nihil	**Prasarana**, yaitu: 1. Terjadi korosi parah pada penambat rel yang berakibat pada penurunan gaya jepit (clamping force); 2. Adanya genangan lumpur (mud pumping) di lengkung sehingga mengurangi fungsi ballast dalam mendistribusi beban dinamis; **Sarana**, yaitu: Adanya retak lelah (fatigue crack) hingga mematahkan pegas suspense sekunder sehingga menimbulkan ketidakseimbangan beban (twist/roll instability).
4.	Senin, 27 April 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Tabrakan KA	KA 4B (Argo Bromo Anggrek) menabrak KA 5568A TS 6000 TM24 di Emplasemen Stasiun Bekasi Timur	16 Orang Meninggal Dunia, 8 Orang Luka Berat, 100 Orang Luka Ringan	**Masih dalam proses anlisis**
5.	Sabtu, 16 Mei 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III palembang	Anjlokan	KA 4016 (Baratarahan) anjlok di Km 4+9/0 petak jalan Stasiun Tanjung Enim Baru - Stasiun Muara Enim	Nihil	**Prasarana,** yaitu: hilangnya sambungan rel/plat sambung menyebabkan tidak stabilnya jalur rel sehingga sebagian roda lokomotif keluar dari kepala rel saat rangkaian melintas.
6.	Minggu, 17 Mei 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang	Anjlokan	KA 4051 (Baratarahan) anjlok di Km 195+6 Jalur III (hilir) Emplasemen Martapura	Nihil	**Masih dalam proses anlisis**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
7.	Jumat, 22 Mei 2026	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	Langsiran R 255 (Jaka Tingkir) Lok CC2039804 anjlok 5 as dan Rangkaian Bakalan KA 284 (Serayu) anjlok 2 as di Wessel 11A2 Emplasemen Pasarsenen	Nihil	**SDM,** yaitu Pergerakan bakalan Kereta Api Serayu 284B dari jalur simpang 1 melewati sinyal langsir L112 menuju track 30T (spoor badug) tanpa adanya perintah dan tanpa dipandu oleh Petugas/Juru Langsir (PLR). **Operasi**, yaitu: 1. Pelaksanaan langsir tidak sesuai dengan prosedur langsiran yang berlaku di Stasiun Pasar Senen; 2. Masinis dan Asisten Masinis Langsiran yang bertugas melangsir Bakalan Kereta Api Serayu 284B telah melebihi waktu kerja normal (8 jam).

B. Data Jumlah Kejadian Kecelakaan dan Jumlah Korban kecelakaan Kereta Api Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2026

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KORBAN		
			LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL
1.	**TABRAKAN ANTAR KA**	1	100	8	16
2.	**KA TERGULING**	0	0	0	0
3.	**KA ANJLOK**	6	0	0	0
4.	**KA TERBAKAR**	0	0	0	0
TOTAL		**7**	**100**	**8**	**16**

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur, kami ucapkan terimakasih.

Riovano
NIP 198509062010121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TEL: 0813 6001 3838 | WEBSITE: http://djka.dephub.go.id/ EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0122/F2.2/VII/2026

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Dari : Kasubdit Lalu Lintas

Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Tanggal : 20 Juli 2026

Menunjuk Surat Undangan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor KP.406/1/1/K2/DJKA/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hasil evaluasi kinerja lalu lintas sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 101,21%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKK Tahun 2026 sebesar 95,73%. Terpenuhinya Target IKK tersebut dipengaruhi oleh beroperasinya:
   a. KA Tambahan pada Masa Akhir pekan atau libur pada bulan Mei 2026;
   b. KA Fakultatif yang melebih program yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; dan
   c. Penambahan perjalanan KA di luar Gapeka yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
   Capaian secara kumulatif hingga Juni 2026 sebesar 97,4%, nilai tersebut belum memenuhi Target IKP Tahun 2026 sebesar 97,77%. Tidak terpenuhinya Target IKP tersebut dipengaruhi oleh:
   a. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Barang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (83,81%), dan Sumatera Bagian Utara (91,67%);
   b. tidak tercapainya OTP KA Angkutan Orang pada Jaringan Jalur KA Nasional di Jawa (96,6%), Sumatera Bagian Selatan (97,14%), KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung (89,8%), dan Sulawesi Selatan (52,11%);
   c. terjadi gangguan operasional yang disebabkan oleh angkutan barang (56,66%), alam (14,25%), dan jalan rel dan jembatan (12,10%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan II Tahun 2026 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0122/K2.2/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

I. Capaian Kinerja Tahun 2026

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi Program	Realisasi							
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,73%	91.437	91.437	86.290	5.900	92.190	92.190	100,82%	100,82%
	2	Februari	95,73%	82.580	174.017	77.285	5.157	82.442	174.632	99,83%	100,35%
	3	Maret	95,73%	90.740	264.757	85.946	6.303	92.249	266.881	101,66%	100,80%
TW 2	4	April	95,73%	88.872	353.629	83.773	6.377	89.150	356.031	100,31%	100,68%
	5	Mei	95,73%	90.366	443.995	85.520	6.827	92.347	448.378	102,19%	100,99%
	6	Juni	95,73%	88.822	532.817	84.059	6.815	90.874	539.252	102,31%	101,21%
TW 3	7	Juli	95,73%	92.122	624.939	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,73%	91.139	716.078	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,73%	89.271	805.349	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,73%	92.119	897.468	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,73%	88.912	986.380	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,73%	91.652	1.078.032	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	97,77%	92.190	92.190	5.445	84.565	90.010	90.010	5.014	83.550	88.564	88.564	89.287	89.287	96,85%	96,85%
	Februari	97,77%	82.442	174.632	4.848	76.542	81.390	171.400	4.221	75.683	79.904	168.468	80.647	169.934	97,82%	97,31%
	Maret	97,77%	92.249	266.881	5.990	85.196	91.186	262.586	5.421	84.099	89.520	257.988	90.353	260.287	97,94%	97,53%
TW 2	April	97,77%	89.150	356.031	5.926	82.312	88.238	350.824	5.334	80.786	86.120	344.108	87.179	347.468	97,79%	97,59%
	Mei	97,77%	92.347	448.378	6.340	84.050	90.390	441.214	5.773	82.304	88.077	432.185	89.234	436.700	96,63%	97,40%
	Juni	97,77%	90.874	539.252	6.354	82.938	89.292	530.506	5.352	81.877	87.729	519.914	88.526	525.235	97,43%	97,40%
TW 3	Juli	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	September	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	November	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	97,77%	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2026

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/13/K1/DJKA/2026 Jakarta, 15 April 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan I Tahun 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaporan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 April 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan *upload* dokumen terbaru ***secara berkala*** sesuai fitur pada aplikasi diantaranya pohon kinerja dan *cascading*, tindak lanjut evaluasi AKIP internal, Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja), Laporan Monitoring Rencana Aksi (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Monitoring Rencana Aksi), Laporan Kinerja, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan;
   b. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi partisipasi satuan kerja dan monitoring capaian *output* serta *update* rencana penarikan dana ***pada kesempatan pertama***;
   c. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas mulai tanggal 13 April 2026 meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian *output*, status pelaksanaan, progress pelaksanaan, permasalahan dan isian lainnya untuk periode Triwulan I Tahun 2026 ***paling lambat tanggal 30 April 2026****;*

d. Pengisian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pengisian aplikasi e-*Performance* secara lengkap dan tepat waktu ***setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya*** meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja; dan

e. Pengisian fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi ***setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya*** termasuk *upload* dokumentasi laporan kinerja triwulan/tahunan.

2. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sesuai *outline*, substansi, dan dokumen pendukung, dengan mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

f. Tindak lanjut catatan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja unit kerja periode sebelumnya; dan

g. Tindak lanjut hasil rapat pembahasan, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pelaporan kinerja, diantaranya:

1) Mengecek kembali penggunaan *manual* indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2) Melakukan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index* (TQI), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan guna rekomendasi periode berikutnya), data gangguan keamanan operasional kereta api pada perlintasan sebidang, data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya;
3) Menyusun analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi kegiatan pendukung dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain), dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;
4) Menyusun rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya yang mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;
5) Menyampaikan dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, progres program prioritas nasional/proyek strategis nasional, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;
6) Melengkapi dan menyesuaikan format informasi perubahan budaya kinerja (semula-menjadi, keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja);
7) Melengkapi uraian perhitungan matematis masing-masing indikator kinerja untuk mengukur nilai realisasi kinerja;
8) Melengkapi dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja serta dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang; dan

9) Melengkapi...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Melengkapi data dukung capaian kinerja yang valid dengan persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta diupload pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 25 April 2026.***

3. Memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 berupa data dukung, analisa lengkap dan rekomendasi periode berikutnya sesuai bidang tugas;

4. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : PR.205/2/13/K1/DJKA/2026
Tanggal : 15 April 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat
Nomor : PR.205/2/13/K1/DJKA/2026
Tanggal : 15 April 2026

Outline Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2026

Jakarta, 22 Mei 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I Tahun 2026 terhadap penilaian mandiri unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan ***Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian Mandiri*** akuntabiilitas kinerja Tahun 2026 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melampirkan rincian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ***pada kesempatan pertama*** bagi unit kerja yang belum menyampaikan;
2. ***Menindaklanjuti hasil pembahasan/tanggapan tim evaluasi pada pelaksanaan pra evaluasi*** implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk perbaikan paparan sesuai ketentuan mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 (perbaikan paparan agar di*upload* pada tautan https://bit.ly/43riNdz);
3. Melakukan ***update*** **pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya** melalui fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 29 Mei 2026***, termasuk memperhatikan penyesuaian format sesuai arahan Kementerian PANRB;
4. Menyiapkan **form evaluasi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024**, termasuk isian *form* k untuk dua periode (2024–2025, 2025–2026);

5. Menindaklanjuti…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. ***Menindaklanjuti catatan Tim Evaluasi tingkat Eselon I*** pada pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2026, termasuk koordinasi aktif dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan melalui fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ***Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tingkat Eselon I agar diselesaikan paling lambat tanggal 4 Juni 2026*** guna proses lanjut finalisasi hasil penilaian dan kompilasi untuk penyampaian kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

6. ***Mempersiapkan dokumen pendukung evaluasi akuntabilitas kinerja berbasis AI*** dengan standar meliputi dokumen berupa *Portable Document Format* (PDF) *text* dengan pengecualian *scan* untuk lembar pengesahan serta ukuran dokumen maksimal 2,5 MB. Dokumen SAKIP yang perlu dipersiapkan sesuai standar tersebut diantaranya Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja termasuk Rencana Aksi Tahun 2026, Laporan Kinerja Tahun 2025, *cascading*/perjenjangan kinerja terbaru, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (LHEI). Dokumen tersebut selanjutnya agar dipenuhi melalui aplikasi e-SAKIP *reviu* dengan *update* berkala.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
16. Tim Evaluasi Akuntablitas Kinerja Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 41Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR 205/1/4/DJKA/2026

Jakarta, 2 Juli 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 41 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,79 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan".

4. Nilai...

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada unit kerja Eselon I dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,58
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,79
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,22
Nilai Hasil Evaluasi			**83,79**
Predikat			**A**

*) *Hasil evaluasi internal tingkat Eselon I terhadap unit kerja Eselon I dan 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,58 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Dokumen perencanaan kinerja terutama Rencana Strategis belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja;
2) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2026 belum seluruhnya masuk kriteria "menantang";
3) Pimpinan dan seluruh pegawai perlu meningkatkan komitmen pencapaian kinerja guna memenuhi kriteria *on the right track* serta diperlukan inovasi/upaya lebih dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 26,79 dari nilai maksimal 30,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 13,20 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Pelaksanaan...

1) Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun;
2) Dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja;
3) Dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu dipastikan telah memenuhi kriteria pada PM 85 Tahun 2020 dan KM 74 Tahun 2024, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,22 dari skor maksimal 25,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya rata-rata capaian kinerja beberapa unit kerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu secara konsisten dan berjenjang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 4 tahun terakhir).

6. Telah ditindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.306/1/2/DJKA/2025 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Hal Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta memperhatikan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan II 2026.

7. Terhadap hasil capaian kinerja tersebut direkomendasikan untuk:

a. Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja yang selaras secara berjenjang dan memenuhi kaidah dapat dicapai, menantang, dan realistis;
b. Target kinerja yang telah ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan diimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90% s.d. 110%) serta digunakan untuk acuan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai kriteria yang diamanahkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Memastikan...

d. Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan;

e. Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
   1) Reviu terhadap Laporan Kinerja;
   2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang termasuk konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

f. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

8. Disamping evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga dilakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi AKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Aan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
1. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Lampiran Surat
Nomor : PR 205/1/4/DJKA/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

No	Komponen/ Subkomponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2025	2026
1	Perencanaan Kinerja	**30,00**	24,90	24,58
2	Pengukuran Kinerja	**30,00**	25,53	26,79
3	Pelaporan Kinerja	**15,00**	12,41	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25,00**	20,88	19,22
Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal			**83,72**	**83,79**
			A	**A**

No	Catatan
1	Komponen perencanaan kinerja dengan catatan diantaranya dokumen perencanaan kinerja terutama Rencana Strategis belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2026 belum seluruhnya masuk kriteria "menantang", pimpinan dan seluruh pegawai perlu meningkatkan komitmen pencapaian kinerja guna memenuhi kriteria *on the right track* serta diperlukan inovasi/upaya lebih dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja;
2	Komponen pengukuran kinerja dengan catatan diantaranya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
3	Komponen pelaporan kinerja dengan catatan diantaranya pelaksanaan reviu terhadap Laporan Kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun, dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja, Laporan Kinerja perlu dipastikan telah memenuhi kriteria pada PM 85 Tahun 2020 dan KM 74 Tahun 2024, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja;
4	Komponen evaluasi aakuntabilitas kinerja internal dengan catatan diantaranya rata-rata capaian kinerja beberapa unit kerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu secara konsisten dan berjenjang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 4 tahun terakhir).

No	Rekomendasi
1	Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja yang selaras secara berjenjang dan memenuhi kaidah dapat dicapai, menantang, dan realistis;
2	Target kinerja yang telah ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan diimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90% s.d. 110%) serta digunakan untuk acuan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
3	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai kriteria yang diamanahkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

No	Rekomendasi
4	Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan;
5	Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait reviu terhadap Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang termasuk konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
6	Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

Menyetujui
a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tim Evaluator

1. Frederik Pongtuluran
   NIP 197502252006041001
2. Andi Guntur Asapa
   NIP 198407242007121001
3. Viki Okissa Saifudin
   NIP 199510022018011001
4. Merinda Pangestikasari
   NIP 199603252020122008

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2026

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Setditjen	Direktorat LLAKA	Direktorat Prasarana	Direktorat Sarana	Direktorat Keselamatan	BTP Jakarta	BTP Bandung	BTP Semarang	BTP Surabaya	BTP Medan	BTP Palembang	BTP Padang	Balai Pengujian	Balai Perawatan	BPKARSS	BPKASS	Rata-Rata Unit Kerja di Lingkungan DJKA	Unit Eselon I DJKA	Nilai Akuntabilitas Kinerja DJKA
1	**PERENCANAAN KINERJA**	30,00	23,70	25,20	25,20	23,70	23,70	23,70	25,20	25,20	22,80	22,80	23,70	22,80	23,70	23,70	23,70	24,60	23,96	25,20	24,58
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	5,96	6,00	5,98
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	6,30	6,30	7,20	6,30	7,20	7,20	7,20	7,20	7,03	7,20	7,12
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	12,00	12,00	10,50	10,50	10,50	12,00	12,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	12,00	10,97	12,00	11,48
2	**PENGUKURAN KINERJA**	30,00	27,60	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	25,50	27,60	25,20	25,50	26,10	26,10	24,60	25,50	25,50	25,99	27,60	26,79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	5,40	5,40	5,40	5,81	6,00	5,91
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	7,20	8,10	8,10	8,10	7,20	8,10	8,10	7,99	8,10	8,04
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,19	13,50	12,84
3	**PELAPORAN KINERJA**	15,00	13,80	12,75	13,80	12,45	13,05	12,75	13,05	12,75	13,05	12,30	12,30	12,15	12,75	10,50	11,40	12,75	12,60	13,80	13,20
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3,00	2,70	3,00	2,40	3,00	2,70	3,00	2,70	3,00	2,70	2,70	2,10	2,70	2,10	2,70	2,70	2,70	3,00	2,85
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	3,60	3,60	4,05	4,05	3,15	2,70	4,05	3,85	4,05	3,95
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	6,00	6,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,25	6,00	6,00	6,05	6,75	6,40
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	25,00	18,75	20,50	20,50	19,25	18,00	20,50	18,00	20,50	19,25	20,50	20,50	20,50	20,50	19,25	20,50	18,00	19,69	18,75	19,22
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,05	6,75	6,40
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,50	10,00	10,00	8,75	7,50	10,00	7,50	10,00	8,75	10,00	10,00	10,00	10,00	8,75	10,00	7,50	9,14	7,50	8,32
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100,00**	**83,85**	**84,55**	**85,60**	**81,50**	**80,85**	**83,05**	**82,35**	**83,95**	**82,70**	**80,80**	**82,00**	**81,55**	**83,05**	**78,05**	**81,10**	**80,85**	**82,24**	**85,35**	**83,79**

REKAPITULASI DATA TINDAK LANJUT ATAS
REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Tahun: 2025

No	Nama Unit Kerja	Hasil Evaluasi Internal Unit Kerja (April 2026)				Hasil Evaluasi AKIP Internal Eselon I (Juni 2026)			
		Jml. Rekomendasi	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti	Jml. Rekomendasi	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	6	5	1	0	6	6	0	0
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	8	7	1	0	8	8	0	0
3	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	4	4	0	0	4	4	0	0
4	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	10	8	2	0	10	9	1	0
5	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	4	3	1	0	4	3	1	0
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	11	10	1	0	11	11	0	0
7	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	10	9	1	0	10	10	0	0
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	4	2	2	0	4	4	0	0
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	4	4	0	0	4	4	0	0
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	10	6	4	0	10	10	0	0
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	11	8	3	0	11	11	0	0
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	10	8	2	0	10	9	1	0
13	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	4	3	1	0	4	4	0	0
14	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	10	6	4	0	10	7	3	0
15	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	11	10	1	0	11	11	0	0
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	10	6	4	0	10	8	2	0
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**
	Jumlah	**127**	**99**	**28**	**0**	**127**	**119**	**8**	**0**

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	031.00	Ditjen Perkeretaapian	2,74	77,57	40,16

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.06.446372	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAPIAN	0,00	91,35	45,68
2	022.06.467005	BALAI PENGELOLA KERETA API EKSPAN SUMATERA SELATAN	2,65	99,44	51,05
3	022.06.467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	2,66	77,94	40,30
4	022.06.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	82,48	41,24
5	022.06.467321	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I SEMARANG	1,56	73,84	37,70
6	022.06.467337	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I SURABAYA	12,50	78,04	45,27
7	022.06.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I MEDAN	6,82	81,94	44,38
8	022.06.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS II PADANG	3,22	84,02	43,62
9	022.06.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS II PALEMBANG	5,95	80,25	43,10
10	022.06.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAPIAN	15,42	93,82	54,62
11	022.06.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAPIAN	6,23	100,00	53,12
12	022.06.467402	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	96,18	48,09
13	022.06.467475	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAPIAN	7,50	86,74	47,12
14	022.06.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAPIAN	6,82	77,18	42,00
15	022.06.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	0,00	83,64	41,82
16	022.06.467513	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I BANDUNG	0,00	74,75	37,38

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	16.923.422.000	4.464.284.000	0	0	0	0	0	0	21.387.706.000
		REALISASI	0	4.221.517.891	2.606.058.924	0	0	0	0	0	0	6.827.576.815
			0%	24.94%	58.38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31.92%
		SISA	0	12.701.904.109	1.858.225.076	0	0	0	0	0	0	14.560.129.185
2	4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	294.168.136.000	319.320.499.000	15.323.292.000	0	0	0	0	0	0	628.811.927.000
		REALISASI	160.442.442.132	95.076.900.194	4.430.182.227	0	0	0	0	0	0	259.949.524.553
			54.54%	29.77%	28.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41.34%
		SISA	133.725.693.868	224.243.598.806	10.893.109.773	0	0	0	0	0	0	368.862.402.447
3	4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	14.055.576.000	1.800.620.000	0	0	0	0	0	0	15.856.196.000
		REALISASI	0	925.689.590	1.070.413.368	0	0	0	0	0	0	1.996.102.958
			0%	6.59%	59.45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12.59%
		SISA	0	13.129.886.410	730.206.632	0	0	0	0	0	0	13.860.093.042
4	4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	10.393.157.000	0	0	0	0	0	0	0	10.393.157.000
		REALISASI	0	3.344.790.460	0	0	0	0	0	0	0	3.344.790.460
			0%	32.18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	32.18%
		SISA	0	7.048.366.540	0	0	0	0	0	0	0	7.048.366.540
5	4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	708.198.000	0	0	0	0	0	0	0	708.198.000
		REALISASI	0	197.637.924	0	0	0	0	0	0	0	197.637.924
			0%	27.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27.91%
		SISA	0	510.560.076	0	0	0	0	0	0	0	510.560.076
6	4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	436.611.626.000	342.304.294.000	0	0	0	0	0	0	778.915.920.000
		REALISASI	0	66.725.924.311	4.377.438.679	0	0	0	0	0	0	71.103.362.990
			0%	15.28%	1.28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.13%
		SISA	0	369.885.701.689	337.926.855.321	0	0	0	0	0	0	707.812.557.010
7	4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	2.068.718.515.000	14.455.773.000	0	0	0	0	0	0	2.083.174.288.000
		REALISASI	0	31.578.115.765	4.997.186.700	0	0	0	0	0	0	36.575.302.465
			0%	1.53%	34.57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.76%
		SISA	0	2.037.140.399.235	9.458.586.300	0	0	0	0	0	0	2.046.598.985.535
8	4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	313.531.103.000	1.055.204.099.000	0	0	0	0	0	0	1.368.735.202.000
		REALISASI	0	71.350.178.613	110.723.819.140	0	0	0	0	0	0	182.073.997.753
			0%	22.76%	10.49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13.30%
		SISA	0	242.180.924.387	944.480.279.860	0	0	0	0	0	0	1.186.661.204.247
9	4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	37.947.410.000	1.448.782.000	0	0	0	0	0	0	39.396.192.000
		REALISASI	0	3.768.155.972	546.646.917	0	0	0	0	0	0	4.314.802.889
			0%	9.93%	37.73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10.95%
		SISA	0	34.179.254.028	902.135.083	0	0	0	0	0	0	35.081.389.111

tanggal cetak : 06-07-26 09:53:49

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
GRAND TOTAL		PAGU	294.168.136.000	3.218.209.506.000	1.435.001.144.000	0	0	0	0	0	0	4.947.378.786.000
		REALISASI	160.442.442.132	277.188.910.720	128.751.745.955	0	0	0	0	0	0	566.383.098.807
		%	54.54%	8.61%	8.97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11.45%
		SISA	133.725.693.868	2.941.020.595.280	1.306.249.398.045	0	0	0	0	0	0	4.380.995.687.193

tanggal cetak : 06-07-26 09:53:49

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. JUNI**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	2.400.000.000,00	491.500.000,00	497.400.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	24.298.927.000,00	8.905.635.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.623.750.000,00	60.000.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	500.000.000,00	395.044.386,00	0,00
	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	108.859.002,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000,00	138.050.000,00	0,00
	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.882,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.947.019.602,00	0,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	103.610.000,00	103.610.000,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.523.000.000,00	176.542.000,00	176.542.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	795.092.730,00	135.876.354,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.621.957,00	10.621.185,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.048.202.137,00	2.048.202.137,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.641.149,00	6.641.149,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	1.560.826.259,00	1.560.826.259,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.000.000.000,00	1.974.067.000,00	1.974.067.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	953.285.706,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	41.155.248.684,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.476.171.414,00	1.476.171.414,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	937.576.200,00	0,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.634.914,00	2.322.600,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.411.605.702,00	105.652.073,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.658.174.400,00	2.658.174.400,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	176.976.000,00	176.976.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	618.019.747,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.814.560.095,00	0,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	246.662.000,00	246.662.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	541,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.503.965.084,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.043.348.040,00	3.043.348.040,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	211.737.920,00	211.737.920,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	1.283.500.000,00	1.283.500.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.158.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.233.068.409,00	276.708.521,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	388,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	18.421.108.772,00	1.706.000,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	83.300.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.900.000.000,00	708.000,00	708.000,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	771.395.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.538.237,00	6.538.237,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	61.151.790.000,00	24.418.479.376,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.354.750.000,00	313.842.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	600.000.000,00	491.386.700,00	0,00
	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	390.018.000,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0,00	6.240.000,00	340.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	360,00	0,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	53.495.000,00	53.495.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104.000,00	413.428.556.350,00	413.428.556.350,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.230.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	13.004.346.501,00	13.004.346.501,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	25.432.000,00	0,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.349.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	836.650.000,00	836.650.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	61.450.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	2.203.256.000,00	1.521.168.000,00	1.521.168.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	123.537.140,00	60.129.500,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	1.881.267.785,00	1.881.267.785,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	71.010.137,00	71.010.137,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	28.749.000,00	28.749.000,00
	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	128.142.000,00	128.142.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	920,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	47.086.584.588,00	71.344.400,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	976.947.847,00	976.947.847,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

REALISASI PENDAPATAN PER SATKER

NO	Uraian			pendapatan					detail
	BA	BAES1	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	PENGEMBALIAN	NETTO	PERSENTASE	AKUN
1	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	2.400.000.000,00	533.650.000,00	0,00	533.650.000,00	22,24%	akun
2	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	33.548.051.000,00	13.654.402.643,00	0,00	13.654.402.643,00	40,70%	akun
3	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	1.523.000.000,00	4.950.269.232,00	0,00	4.950.269.232,00	325,03%	akun
4	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	8.000.000.000,00	45.763.383.801,00	0,00	45.763.383.801,00	572,04%	akun
5	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	0,00	7.195.341.506,00	0,00	7.195.341.506,00	0,00%	akun
6	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	0,00	13.433.955.842,00	0,00	13.433.955.842,00	0,00%	akun
7	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	6.017.838.585,00	0,00	6.017.838.585,00	0,00%	akun
8	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3.182.000.000,00	3.516.568.409,00	0,00	3.516.568.409,00	110,51%	akun
9	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0,00	26.802.573.034,00	0,00	26.802.573.034,00	0,00%	akun
10	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	112.971.395.000,00	813.526.237,00	0,00	813.526.237,00	0,72%	akun
11	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	64.106.540.000,00	30.402.131.691,00	0,00	30.402.131.691,00	47,42%	akun
12	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	1.088.853.604.000,00	426.569.334.851,00	0,00	426.569.334.851,00	39,18%	akun
13	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	1.430.349.000,00	904.320.000,00	0,00	904.320.000,00	63,22%	akun
14	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	2.264.706.000,00	1.715.755.140,00	0,00	1.715.755.140,00	75,76%	akun
15	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	19.940.000.000,00	1.993.881.690,00	0,00	1.993.881.690,00	10,00%	akun
16	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	50.000.000,00	48.703.597.355,00	0,00	48.703.597.355,00	97.407,19%	akun
GRAND TOTAL				1.338.269.645.000,00	632.970.530.016,00	0,00	632.970.530.016,00	47,30%	

tanggal cetak : 22-07-26 17:41:26

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RERATA NILAI KUALITAS ASN
88,06
dari 100

RERATA KUALIFIKASI	RERATA KOMPETENSI	RERATA KINERJA	RERATA DISIPLIN
23,43	**33,51**	**26,13**	**4,99**
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Jakarta, 20 Juli 2026

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. Nilai Kualifikasi

JENIS JABATAN	PENDIDIKAN	BOBOT NILAI			JUMLAH ORANG
		10	20	25	
Pimpinan Tinggi Madya	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**1**	**1**
	S-2			1	1
Pimpinan Tinggi Pratama	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**3**	**3**
	S-3			1	1
	S-2			2	2
Administrator	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**3**	**28**	**31**
	S-3			1	1
	S-2			27	27
	S-1		3		3
Pengawas	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**37**	**37**
	S-3			1	1
	S-2			32	32
	S-1			3	3
	D-IV			1	1
Fungsional Keahlian (S-2 dan S-3)	**Jumlah Orang -->>>**	**48**	**112**	**0**	**160**
	S-2		112		112
	S-1	44			44
	D-IV	4			4
Fungsional Keahlian (S-1 dan D-IV)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**356**	**21**	**377**
	S-2			21	21
	S-1		348		348
	D-IV		8		8
Fungsional Keterampilan (D-III)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**1**	**0**	**1**
	D-III		1		1
Fungsional Keterampilan (SLTA)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**63**	**63**
	S-1			5	5
	D-III			58	58
Pelaksana	**Jumlah Orang -->>>**	**4**	**174**	**1677**	**1855**
	S-2			86	86
	S-1			490	490
	D-IV			157	157
	D-III			944	944
	D-I		10		10
	SLTA		142		142
	SLTA Kejuruan		22		22
	SLTP	4			4
Grand Total		**59**	**644**	**1830**	**2528**
)bot Nilai x Grand Total)/total pegawai = Rata-rata --:		**590**	**12880**	**45750**	**23,43**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. Nilai Kompetensi	
Jumlah Seluruh ASN	2528
Rata-rata seluruh Skor Diklat pegawai	33,51
Rata-rata Skor Kompetensi	**33,51**

DIKLAT ASSESTMENT	
Belum Mengikuti	1366
Sudah Mengikuti	1162
Total Pegawai	2528

DIKLAT PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) untuk	
Belum Mengikuti	5
Sudah Mengikuti	66
Tidak Wajib	2457
Grand Total	2528

DIKLAT UMUM / TEKNIS	
Belum Mengikuti	502
Jumlah Diklat 0-9 kali	502
Sudah Mengikuti	2026
Jumlah Diklat 0-9 kali	892
Jumlah Diklat >10 kali	1134
Total Pegawai	2528

III. Nilai Kinerja

KATEGORI NILAI SKP	BOBOT NILAI	JUMLAH
Sangat Baik	30	584
Baik	25	1903
Cukup	15	7
Kurang	5	0
Buruk	1	1
Nilai Kinerja		**26,13**

IV. Nilai Disiplin

JENIS DISIPLIN	JUMLAH
ASN sedang menjalani Hukuman Disiplin	5
DISIPLIN RINGAN TEGURAN LISAN	0
DISIPLIN RINGAN TEGURAN TERTULIS	2
DISIPLIN SEDANG PENURUNAN KELAS JABATAN	0
DISIPLIN SEDANG PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA	2
DISIPLIN SEDANG PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA	1
ASN Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin	2523
Jumlah Seluruh ASN	2528
Nilai DIsiplin	**4,99**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN
KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026 DAN
DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

No. ST : ST-K1 DJKA 538 Tahun 2026
Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JULI 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

LAPORAN PEMBAHASAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pelaksanaan kegiaatan Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk memonitoring pengisian dan penggunaan aplikasi pelaporan dan persiapan penyusunan konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 masing-masing Unit Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2026 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan yang ingin dicapai dari rapat ini diantaranya:

a. Membahas progres pengisian, pemanfaatan serta evaluasi terhadap Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance, dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (monitoring rencana aksi dan tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP 2025);
b. Membahas capaian kinerja masing-masing unit kerja (Eselon I dan II);
c. Menyusun dan membahas konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 baik untuk tingkat unit kerja;

3. RUANG LINGKUP

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja;
b. Pembahasan Indikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026; dan
c. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026;

4. DASAR

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor PR.005/2/15/K1/DJKA/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Undangan serta Surat Tugas Nomor ST-K1 DJKA 538 Tahun 2026 Menghadiri Kegiatan Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2026 di Hotel Millenium, Jakarta.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium, Jakarta
2. Tanggal : Senin s.d. Selasa, 13-14 Juli 2026
3. Peserta Rapat :
    a. Perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (narasumber);
    b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    f. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    m. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
    n. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
    o. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
    p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
    q. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
    r. Perwakilan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Persiapan dan Registrasi Peserta;
2. Penyampaian materi "Upaya Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran" oleh narasumber dari Kemenkeu;
3. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance, dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (monitoring rencana aksi dan tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP 2025);
4. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Triwulan II Tahun 2026 masing-masing unit kerja; dan
5. Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyiapan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II tahun 2026 unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2026 Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja posisi per 6 April 2026 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Data Kinerja													
		Renstra 2025-2029	RKT 2026	PK 2026 Awal	LMCK Tw I 2026	DIPA 2026	Pohon Kinerja & Cascading	TL LHE	PM AKIP 2026	Monitoring Renaksi					
										Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Setditjen Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2	Direktorat LLAKA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3	Direktorat Prasarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	-	-
4	Direktorat Sarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Dokumen cascading yang diupload perlu didetailkan dan belum upload KP DIPA	✔	-	✔	✔	✔	-	-	-
5	Direktorat Keselamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔
6	BTP Jakarta	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
7	BTP Bandung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
8	BTP Semarang	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9	BTP Surabaya	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔
10	BTP Medan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔
11	BTP Padang	✔	- Dokumen 2025	✔	✔	✔	✔ Belum upload cascading unit kerja	✔	-	✔	✔	✔	-	-	-
12	BTP Palembang	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	-	-	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Dokumen Cascading yang diupload perlu didetailkan dan Belum upload KP DIPA	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔
15	BPKAR Sumatera Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔ Belum upload KP DIPA	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

**) Dokumen Renstra harus diupload setiap tahun*
***) Batas waktu publikasi sesuai PM 85 / 2020*

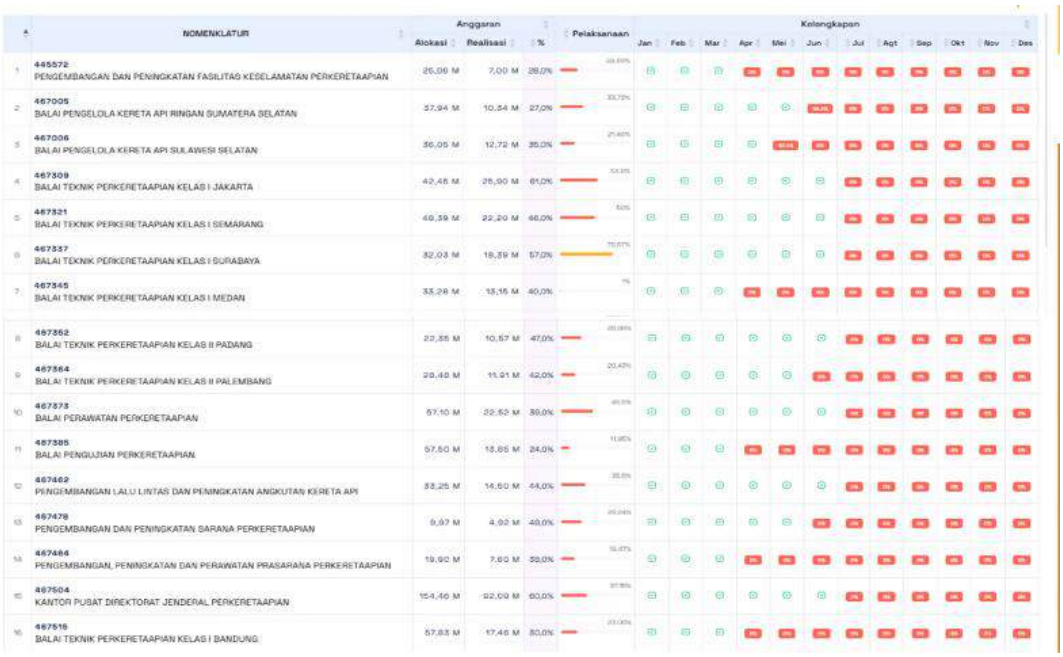
Keterangan:
V : Lengkap
- : Tidak Ada Pengisian

Update 9 Juli 2026

Mohon untuk melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan data dukung yang telah diunggah. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Selain itu, terkait penyampaian hasil Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2026, masih terdapat beberapa unit kerja yang belum menyampaikan dokumen dimaksud.

b. Dokumen yang disampaikan melalui ESR dalam bentuk pdf text untuk persiapan evaluasi SAKIP berbasis AI;

c. Pelaporan Komponen



A	NOMENKLATUR	Anggaran			Pelaksanaan	Kelengkapan											
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	445572 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	26,00 M	7,00 M	28,0%													
2	467005 BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	57,94 M	10,54 M	27,0%													
3	467006 BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	36,05 M	12,72 M	35,0%													
4	467309 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	42,46 M	25,90 M	61,0%													
5	467321 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	49,39 M	22,20 M	46,0%													
6	467337 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	32,03 M	18,39 M	57,0%													
7	467345 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	33,28 M	13,15 M	40,0%													
8	467352 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	22,55 M	10,57 M	47,0%													
9	467364 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	28,48 M	11,91 M	42,0%													
10	467373 BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	57,10 M	22,62 M	39,0%													
11	467385 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	57,50 M	13,85 M	24,0%													
12	467462 PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	32,25 M	14,50 M	44,0%													
13	467478 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	9,97 M	4,92 M	49,0%													
14	467484 PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	19,90 M	7,60 M	38,0%													
15	467504 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	154,46 M	92,09 M	60,0%													
16	467515 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	57,83 M	17,46 M	30,0%													

d. Pemantauan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan DJKA

No	Unit Kerja	Pengisian pada SILAKI	Keterangan
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	✔	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan

Terdapat penyesuaian format penyampaian evaluasi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Melakukan tagging pada setiap bukti dukung sesuai dengan komponen evaluasi, yaitu apakah termasuk dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, atau Evaluasi Internal;
2) Pada bagian Rencana Aksi, agar turut mengisi catatan evaluasi sebagai penjelasan atas hasil evaluasi yang dilakukan;
3) Sebelum mengisi format selanjutnya, mohon melakukan pengecekan terlebih

dahulu pada lembar kerja evaluasi untuk memastikan seluruh isian telah sesuai dan lengkap.

e. Evaluasi kinerja berdasarkan LMCK Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I (%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	103,34%
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,16%
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	102,80%
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	102,58%
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	101,85%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	101,11%
7	Balai Perawatan Perkeretaapian	100,91%
8	Direktorat Sarana Perkeretaapian	100,85%
9	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100,74%
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	100,45%
11	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,15%
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	99,82%
13	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	98,90%
14	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	98,82%
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	96,24%
16	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	92,09%

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I 2026		
		Pemenuhan Laporan Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,00	92,00	96,00
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,75	95,00	95,88
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	93,50	96,00	94,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	96,88	92,00	94,44
5	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,13	96,00	93,57
6	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	96,13	90,00	93,07
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,88	91,40	92,64
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	96,50	86,67	91,59
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	87,88	87,34	87,61
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	78,88	96,00	87,44
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	84,75	88,00	86,38
12	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	79,50	87,34	83,42
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	74,88	91,67	83,28
14	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	79,50	85,34	82,42
15	Balai Perawatan Perkeretaapian	62,75	86,67	74,71

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa indikator kinerja dengan capaian di bawah 90%. Untuk meningkatkan kinerja, perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PNBP, percepatan penyerapan anggaran, penguatan koordinasi dengan operator perkeretaapian, peningkatan ketepatan waktu perjalanan kereta api, serta optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana perkeretaapian.

Terdapat beberapa catatan dalam evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja tahun 2026:

1) Target pada komitmen untuk tidak disama ratakan pada satu Triwulan;
2) Data dukung agar dipilah dan disusun berdasarkan dokumen yang mencantumkan rincian capaian kinerja serta telah dilengkapi dengan tanda tangan dari masing-masing PIC yang bertanggung jawab;
3) Upaya peningkatan kedepannya tidak hanya bersifat normatif namun lebih di detailkan lagi;

f. Pemantauan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP/Balai Pengelola Kereta Api Periode Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Waktu Penyampaian	Ketepatan Waktu	Kelengkapan Substansi
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	15 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	15 April 2026	Tepat Waktu	Lengkap
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Belum Menyampaikan	Tidak Tepat Waktu	-
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	16 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	20 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	15 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	13 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
8	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Belum menyampaikan	Tidak Tepat Waktu	-
9	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	22 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen

Update 4 Juni 2026

Diharapkan kepada BTP/Balai Pengelola agar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala. Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan laporan triwulanan. Bagi BTP/Balai Pengelola yang belum menyampaikan atau masih terdapat kekurangan, agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan dimaksud.

g. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2026

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Hasil Evaluasi Tahun 2026		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,50	83,85	83,85	A
2	Dit LLAKA	82,60	86,65	84,55	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	83,20	85,60	85,60	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	80,75	83,00	81,50	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	80,50	84,15	80,85	A
6	BTP Jakarta	80,20	83,35	83,05	A
7	BTP Bandung	81,40	86,65	82,35	A
8	BTP Semarang	82,00	83,50	83,95	A
9	BTP Surabaya	83,50	84,90	82,70	A
10	BTP Medan	80,80	83,95	80,80	A
11	BTP Padang	80,20	83,20	82,00	A
12	BTP Palembang	80,70	85,90	81,55	A
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	82,15	83,95	83,05	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,40	83,50	78,05	BB
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,95	82,90	81,10	A
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,50	82,65	80,85	A

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada tingkat Eselon I telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akan dipilih lima unit kerja yang menjadi sampel dalam pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 13–31 Juli 2026.

h. Beberapa perubahan di SILAKI yang perlu ditindaklanjuti:
   1) Rencana Aksi (Renaksi) agar segera dilengkapi, mengingat telah terintegrasi dengan aplikasi e-Performance. Pengisian Rencana Aksi dilakukan untuk indikator yang belum tercakup dalam e-Performance, sedangkan capaian kinerja pada e-Performance cukup dilakukan pelaporan sesuai periode Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV;
   2) Pengisian target rencana aksi merupakan kegiatan pedukung, bukan indikator kinerja kegiatan;
   3) Pengisian target output bulanan detail kegiatan pendukung IKP/IKK serta target anggaran (kumulatif);
   4) Pengisian target bulanan Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);

5) Berikut evaluasi pengisian rencana aksi:

No	Unit Kerja	Pengisian pada SILAKI	Keterangan
1	Setditjen Perkeretaapian	✓	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
2	Dit. LLAKA	⊖	Pengisian indikator kinerja output lebih sesuai sebagai satuan Masih terdapat beberapa target anggaran yang belum terisi dan tidak bersifat kumulatif Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
3	Dit. Prasarana	✓	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
4	Dit.Sarana	⊖	Masih terdapat beberapa target anggaran yang belum terisi dan tidak bersifat kumulatif Masih terdapat pengisian penanggung jawab secara umum yaitu Direktorat Sarana Perkeretaapian
5	Dit. Keselamatan	⊖	Masih terdapat IKK yang belum ada kegiatan pendukungnya (IKM, PNBP) Terdapat pesentase target anggaran sebesar 1000% (Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian) Terdapat target bulanan anggaran yang kosong (Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards) Mayoritas taget output berada pada akhir tahun
6	BTP Kelas I Jakarta	⊖	Diperlukan pendetailan terhadap kegiatan pendukung, pengisian target output masih sama dengan target IKK
7	BTP Kelas I Bandung	⊖	Pengisian target output masih sama dengan target IKK, perlu dilakukan pendetailan terhadap kegiatan pendukung IKK
8	BTP Kelas I Semarang	⊖	Terdapat target output sebesar 0.1 (Infrastruktur Perkeretaapian (Pengadaan/Penertiban Lahan) Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
9	BTP Kelas I Surabaya	✓	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
10	BTP Kelas I Medan	⊖	Diperlukan update pengisian, masih terdapat IKK yang tidak ada kegiatan pendukungnya dan terdapat kegiatan yang tidak ada target output/ target anggaran
11	BTP Kelas II Padang	✓	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
12	BTP Kelas II Palembang	⊖	Target output kegiatan masih sama dengan target IKK, belum dilakukan pendetailan target realisasi anggaran
13	Balai Pengujian	✓	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
14	Balai Perawatan	⊖	Belum dilakukan pendetailan target realisasi anggaran, Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
15	BPKAR Sumatera Selatan	✓	Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
16	BPKA Sulawesi Selatan	⊖	Belum dilakukan pengisian indikator kinerja output Masih terdapat target anggarang yang tidak bersifat kumulatif

i. Diskusi

1) BTP Palembang

a) Input *tagging* yang dimaksud pada monitoring Tindal Lanjut rekomendasi SAKIP pada aplikasi SILAKI yakni ada di menu Tambah/Edit Rekomendasi dengan memilih "Komponen" yang sesuai dengan TL tersebut, seperti Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja atau lainnya;

b) Data *benchmarking* Es I DJKA akan di share jika capaian sudah final;

c) Terkait dengan inovasi pada penialian SAKIP, usulan inovasi diharapkan merupakan hal yang baru dan berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan, pengukuran, serta kinerja organisasi. Inovasi yang mendukung integrasi sistem, seperti integrasi Manajemen Risiko (MR), pengembangan website, maupun mekanisme reward and punishment, dapat diusulkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja. Kriteria penilaian inovasi pada evaluasi internal bersifat lebih fleksibel dibandingkan evaluasi Inspektorat Jenderal, dengan tetap mengutamakan aspek kebaruan dan manfaat yang dihasilkan;

d) Nilai NKA akan dibahas bersama tim Pelaksanaan Anggaran dengan maks tanggal 15 sudah di bagikan;

2) Balai Pengujian

a) *Benchmarking* dalam penyusunan dokumen RSB dapat dilakukan dengan menggunakan data pembanding dari instansi nasional maupun internasional sebagai referensi. Pemilihan indikator pembanding disesuaikan dengan kesetaraan karakteristik, sehingga apabila tidak dapat

dibandingkan secara langsung (apple to apple), dapat menggunakan persentase capaian sebagai acuan;

b) Untuk data yang belum final, seperti AKIP atau Manajemen Risiko, dapat digunakan data sementara yang didukung oleh surat atau dokumen resmi sebagai dasar referensi.

2. Penyampaian materi "Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2026 Ditjen Perkeretaapian" oleh narasumber Direktorat Sistem Penganggaran, DJA Kemenkeu

a. Pentingnya Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Anggaran

1) Peran: Menghubungkan indikator pembangunan dengan hasil pelaksanaan kebijakan;
2) Fungsi: Instrumen pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja anggaran;
3) Manfaat: Dasar *review baseline*, alokasi anggaran, peningkatan informasi kinerja, serta *reward dan punishment*.

b. Prinsip Belanja Berkualitas

1) Efisiensi: Pengalokasian anggaran harus menghasilkan keluaran sesuai rencana dan mengikuti ketentuan Standar Biaya;
2) Efektivitas: Keluaran anggaran harus tepat dan relevan dengan sasaran program serta sasaran strategis;
3) Prioritas: Belanja harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri PPN/Bappenas, selaras dengan arah pembangunan nasional;
4) Transparansi: Informasi anggaran harus tersedia bagi pihak terkait dan publik sesuai peraturan perundang-undangan;
5) Akuntabilitas: Alokasi anggaran dalam RKA harus memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan.

c. PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024 - Sinergi Monev DJA dan DJPB

1) Penggabungan regulasi;
2) Menghilamgkan irisan penilaian
   Penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB;
3) Penguatan Sinergi dan Peran
   a) DJA fokus pada aspek perencanaan anggaran;
   b) DJPB fokus pada aspek pelaksanaan anggaran
   c) Hasil monev DJA dan DJPB dipertukarkan dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja

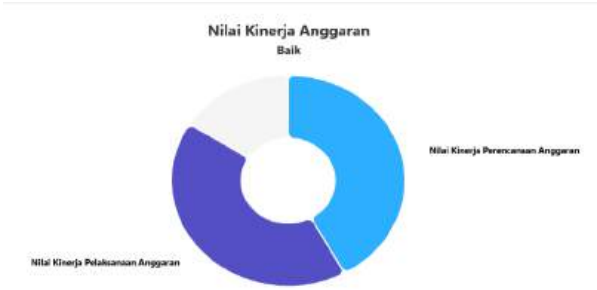
d. Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2025

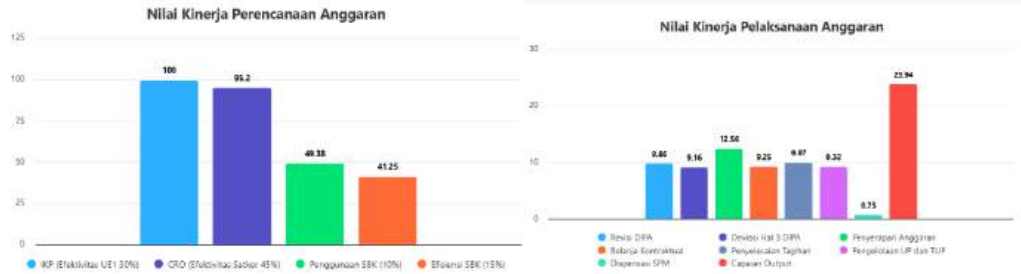
1) DJKA

a) NK Perencanaan Anggaran: 83,97;

b) NK Pelaksanaan Anggaran: 83,30;

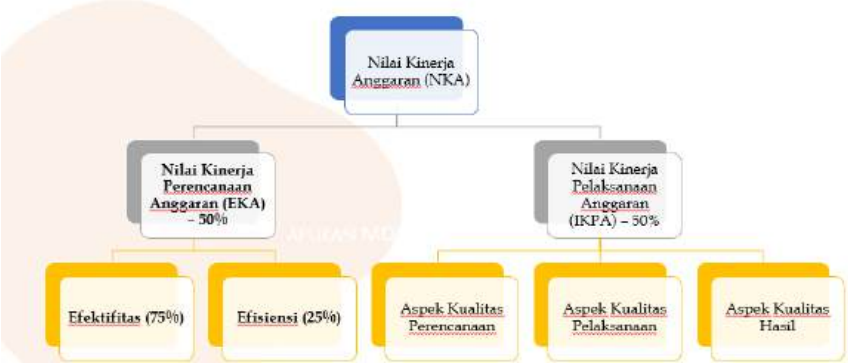
c) Nilai Kinerja Anggaran: 83,64.



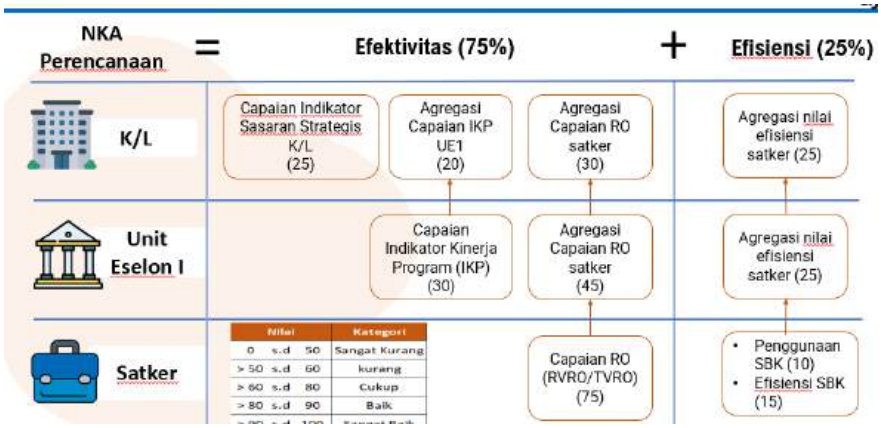


d) Terkait dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran penyumbang nilai terendah ada pada penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Apabila Indeks Realisasi SBK melebihi Indeks Pemanfaatan SBK, maka pada saat satuan kerja melakukan revisi anggaran, proses tersebut berpotensi mengalami kegagalan validasi. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab yang cukup sering ditemui dalam pelaksanaan revisi anggaran.

e. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA 2026



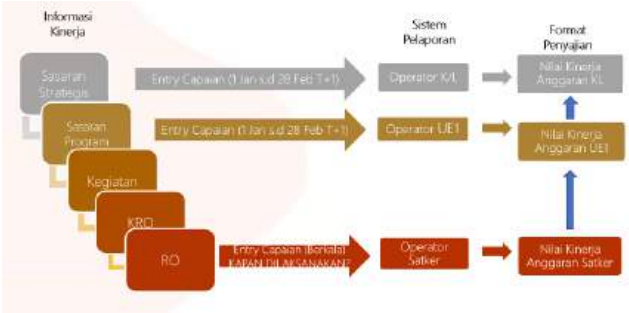
f. Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran



Dalam waktu dekat, apabila telah memperoleh persetujuan pimpinan, akan dilakukan perubahan pada mekanisme penilaian kinerja perencanaan anggaran. Perubahan tersebut mencakup penilaian efisiensi yang tidak hanya diterapkan pada RO SBK, tetapi juga pada seluruh RO, kecuali RO Belanja Pegawai. Saat ini, mekanisme penilaian tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

g. Variabel Penilaian Kinerja Anggaran
   1) Efektivitas: Mengukur rata-rata capaian output (RO) tiap satuan kerja. Target maksimal 100%, dilaporkan berkala sesuai ketentuan DJPb;
   2) Efisiensi: Berdasarkan penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK). Nilai 100 jika realisasi ≤ indeks PMK SBK, nilai 0 jika melebihi. Efisiensi dihitung hanya untuk RO yang mencapai target, dengan batas maksimal 20%.

h. Monev dan Pelaporan Kinerja
   1) Satuan Kerja: Isi capaian RO di SAKTI, pantau anomali, gunakan *dashboard* bersama, hasil assessment dimonitor Eselon I;
   2) Unit Eselon I: Tambah modul a*ssessment* RO, pantau anomali, gunakan *dashboard & Tableau* detail;
   3) Kementerian/Lembaga: Tambah approval *assessment* RO, pantau anomali, gunakan *dashboard & Tableau* detail.



Pada bulan Juli akan diterbitkan surat permintaan pengisian manual IKP. Apabila pengisian IKP belum dilakukan, maka satuan kerja tidak dapat melakukan

pengisian capaian Sasaran Program.

i. Capaian DJKA



Progress pengisian RO saat ini mencapai 37,45%, yang masih tergolong rendah. Melalui sistem dapat diidentifikasi satuan kerja yang belum melakukan pengisian RO:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	08	Ditjen Perkeretaapian	2.74	0.00	5.13	4.35	0.00

No.	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0	0	0	0
2	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0	0	0	0
3	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0	0	0	0
4	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0	0	0	0
5	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	0	0	0	0
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	1,56	2,08	0	0
7	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	2,65	3,53	0	0
8	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	2,66	1,32	16,67	0
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3,22	4,29	0	0
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	5,95	7,93	0	0
11	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	6,23	8,3	0	0
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	6,82	9,09	0	0
13	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	6,82	9,09	0	0
14	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	7,5	10	0	0
15	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	12,5	16,67	0	0
16	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	15,42	16,12	33,33	0

j. Faktor NKA masih rendah

1) 195 RO: 20 sudah melaporkan capaiannya, sisanya belum;
   46 RO SBK: 2 SBK yang sudah mendapat penialian penggunaaan belum ada SBK yang mendapat Nef;
2) Pada bulan Juni telah dilakukan pemetaan RO SBKU. Namun, masih terdapat RO yang seharusnya menggunakan RO SBKU tetapi belum dilakukan pemetaan atau pengaitan (linking). RO SBKU berfungsi sebagai dasar penilaian efisiensi serta sebagai instrumen pengendalian besaran pagu anggaran;
3) RO tidak sesuai kaidah
   a) Ditemukenali RO "Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal" tidak sesuai dengan ketentuan. RO tersebut hanya diperuntukkan bagi Biro Organisasi dan Tata Laksana atau unit yang setingkat. Penggunaannya dibatasi pada pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi, kelembagaan, serta tata laksana di tingkat kementerian/lembaga;

b) Ditemukenali RO “Layanan Hukum” hanya diperuntukan bagi Biro Hukum;

4) RO yang melebihi indeks SBKU
   a) Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat beberapa indeks yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK tentang SBK. Salah satunya terdapat pada SBKU Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang seharusnya menggunakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk satuan kerja vertikal;
   b) RO Reformasi Kinerja seharusnya pemetaan SBKU menggunakan SBK Layanan Reformasi Kinerja unutk Satker Vertikal.
5) Kiat Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Perencanaan:
   a) Melaporkan realisasi Rincian Output (RO) secara proporsional sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan di lapangan;
   b) Melakukan penyesuaian Indeks Pagu SBKU agar mencerminkan kebutuhan anggaran yang lebih akurat (tidak melebihi Indek PMK SBK);
   c) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Anggaran Bidang apabila terdapat Indeks Realisasi SBK yang melebihi Indeks PMK SBK, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan;
   d) Mengendalikan Indeks Realisasi SBK, khususnya SBKK, agar deviasi tidak melebihi 20% dari indeks yang ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya.

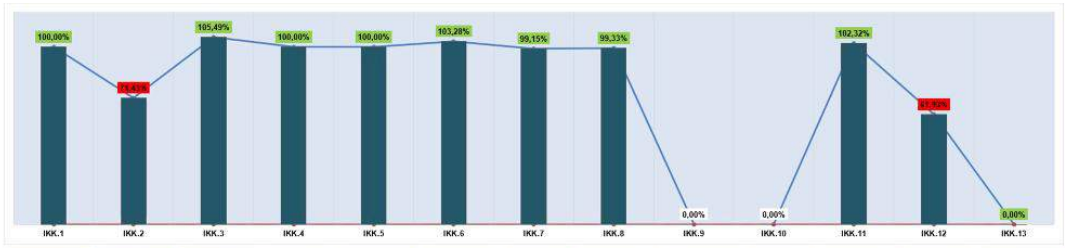
k. Diskusi
   1) Untuk IKPA, penilaian dilakukan setiap bulan oleh DJPB melalui pemantauan dan evaluasi terhadap masing-masing satuan kerja. Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Perencanaan dinilai secara tahunan. Meskipun tidak terdapat penyampaian hasil secara resmi selama tahun berjalan, Direktorat Anggaran Bidang akan melakukan *sounding* kepada Biro Perencanaan mengingat NKA Perencanaan merupakan salah satu IKU Direktorat Anggaran Bidang;
   2) Pemetaan SBKU telah dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hasil pemetaan telah disampaikan kepada kementerian/lembaga sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2026, RO SBKU yang telah dipetakan diwajibkan untuk dilakukan linking. Selain itu, Indeks SBK yang melebihi Indeks Pagu SBK akan menyebabkan proses validasi gagal. Oleh karena itu, hasil pemetaan pada Tahun Anggaran 2025 seharusnya telah menjadi rekomendasi dalam

penyusunan anggaran tahun berikutnya;

3) Terkait dengan dampak ketidaksesuaian kaidah RO, sebenarnya tidak ada punsihment, namum apabila ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan RO, hal tersebut berpotensi menjadi temuan dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan. Oleh karena itu, agar penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku. Saat ini, aspek tersebut menjadi salah satu perhatian utama dan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi;
4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meskipun capaian RO bersifat kumulatif, penurunan dapat terjadi akibat penilaian efisiensi, antara lain karena deviasi Indeks Realisasi SBK atau belum seluruh realisasi dilaporkan pada periode berjalan. Penilaian IKPA dilakukan secara bulanan, sedangkan NKA Perencanaan dinilai secara tahunan. Komponen yang sering memengaruhi penurunan nilai adalah aspek efisiensi, khususnya terkait standar biaya keluaran;
5) Penggunaan SBKU harus mengacu pada ketentuan PMK. Untuk layanan tunggal hanya diperkenankan menggunakan satu layanan. Apabila diperlukan pelampauan indeks atau anggaran, harus diajukan melalui Direktorat Anggaran Bidang dengan justifikasi yang memadai;
6) Perubahan target volume RO (TVRO) dimungkinkan sepanjang didukung penyesuaian anggaran dan tetap memperhatikan Indeks Realisasi SBK. Penambahan target RO tidak secara langsung memengaruhi nilai NKA;
7) Masih terdapat RO yang belum sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKA;
8) Untuk meningkatkan NKA, satuan kerja diimbau memastikan pelaporan capaian dan progres RO dilakukan secara optimal sesuai ketentuan. Bagi RO dengan satu layanan, pemantauan dapat difokuskan pada progres pelaksanaan.

3. Penyampaian Capaian Kinerja Triwulan II masing-masing Unit Kerja

a. Penyampaian Dit. LLAKA



IKK	IKK.1	IKK.2	IKK.3	IKK.4	IKK.5	IKK.6	IKK.7	IKK.8	IKK.9	IKK.10	IKK.11	IKK.12	IKK.13
Target Mei	26,90	20,00	95,73	42,86	94,50	27,34	27,08	2,840	-	-	47,00	63,28	-
Realisasi Mei	26,90	20,00	100,99	42,86	93,86	28,18	26,73	2,821	-	-	47,24	39,18	-
Persentase Capaian	**100,00%**	**100,00%**	**105,49%**	**100,00%**	**99,32%**	**103,07%**	**98,71%**	**99,33%**	**-**	**-**	**100,51%**	**61,93%**	**-**

Rata-rata capaian kinerja per Indikator Kinerja sampai bulan Juni 2026 mencapai nilai *on the right track* (capaian 90%-110%), namun terdapat salah satu Indikator dengan realisasi di bawah target yaitu pada Indikator Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA, yang disebabkan adanya permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha Wajib Bayar yang menyebabkan penerimaan PNBP TAC tidak tepat waktu, namun telah dilakukan koordinasi dan tindak lanjut sehingga memperoleh persetujuan bahwa pembayaran akan dilakukan maksimal pada tanggal 14 Agustus 2026.

1) IKK1, dokumen yang telah selesai disusun sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 2 dokumen (Dokumen Hasil Monitoring Reaktivasi Kereta Logistik di Stasiun Cigading dan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelas Statsiun di Wilayah Jabodetabek). Sesuai definisi dalam Kepdirjen, dokumen tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian apabila dimanfaatkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dit. LLAKA akan menginventarisasi kembali dokumen-dokumen yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, dokumen pada kategori 6, 8, 9, dan 10 agar dioptimalkan;
2) IKK2, terdapat 5 kegiatann penyusunan dokumen kerjasama bidang perkeretaapian yang masih berproses. Beberapa dokumen masih menunggu hasil reviu BPKP. Oleh karena itu, data dukung yang digunakan diharapkan tidak hanya berupa laporan rapat, tetapi juga dokumen yang telah disahkan, hasil reviu BPKP, atau bukti penyampaian kepada pihak yang menjadi mitra kerja sama;
3) IKK3, beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan jumlah perjalanan KA yakni penambahan perjalanan KA pada masa libur sekolah dan perjalanan KA diluar GAPEKA yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut. Data yang digunakan masih pada bulan Mei, diharapkan untuk dapat dimaksimalkan di 20 Juli penyampaian dari Badan Usaha;
4) IKK4, telah dilakukan koordinasi dan penyusunan permohonan penambahan lintas pelayanan pada Badan Usaha dengan terpenuhinya 4 dokumen NSPK di bidang LLAKA;

5) IKK5, capaian mendapat nilai 94,54 dengan jumlah responden 70. Pada aspek di beberapa nilai survey yang yang masih rendah, agar dilakukan analisis terhadap penyebabnya beserta tindak lanjut yang diperlukan. Nilai IKM berbeda dengan yang ada di Es I, perlu ada pemadanan hasil olahan survey;
6) IKK6, masih menggunakan data sementara;
7) IKK7, penurunan kinerja angkutan barang dipengaruhi penurunan komoditas semen di Pulau Jawa, terdapat permohonan pembatalan angkutan semen akibat kapasitas silo di Padang, serta penurunan komoditas pupuk di Pulau Jawa. Komoditi batubarata pada TW II sudah mengalami kenaikan kembali, berbeda dengan TW I yang mengalami penurunan;
8) IKK8, masih menggunakan data sementara dan menunggu data resmi dari Operator paling lambat tanggal 20 Juli 2026;
9) IKK9, TL rekomendasi telah di tindaklanjuti, evaluasi SAKIP tingkat Es I bernilai 84,55 (nilai sementara);
10) IKK10, telah dilakukan evaluasi penialian mandiri MR oleh UMR Es I dengan nilai 20;
11) IKK11, terdapat permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha Wajib Bayar yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan. Namun, telah dilakukan koordinasi dan disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan paling lambat pada 14 Agustus 2026;
12) IKK12, terdapat permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha dengan tindak lanjut memperoleh persetujuan pembayaran akan dilakukan maks pada tanggal 14 Agustus 2026;
13) IKK13, telah dilaksanakan penialian mandiri bernilai 76,47 (nilai sementara);
14) Capaian RPJMN Dit. LLAKA sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target					Realisasi Mei 2026	Persentase Capaian terhadap Target Tahunan
		2025	2026	2027	2028	2029		
PP1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	236,93	44,04%
PP2. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat	Juta penumpang	850 **KA : 460**	870 **KA : 476**	895 **KA : 493**	925 **KA : 511**	950 **KA : 529**	203,54	42,76%
PP.3 Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	0,45	47,36%
KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta pnp/hari	2.825	2.828	2.836	2.836	2.836	2.822	99,75%

PP1. Jumlah Penumpang, realisasi jumlah penumpang kereta api antarkota dan perkotaan sampai bulan Mei 2025 sebesar **236.931.192 orang**

PP2. Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan yang meliputi Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang dan Banjarmasin. Realisasi angkutan perkotaan berbasis rel yang terdiri dari 6 Kota yaitu **Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Palembang, Semarang** sampai bulan Mei 2026 sebesar **203.540.176 orang**

PP.3 Jumlah Perjalanan KA, realisasi jumlah perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang meliputi PT KAI, PT KCI, PT Railink, PT CRI, PT KCIC, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta sampai bulan Mei 2026 sebesar **356.031 Perjalanan KA**

KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, merupakan jumlah kapasitas layanan harian dari angkutan umum massal perkotaan yang dituliskan dalam satuan penumpang/hari. Dihitung dari variable kapasitas sarana yang beroperasi dikalikan dengan total perjalanan harian kereta api. Realisasi sampai bulan Mei 2026 sebesar **2.821.535 pnp/hari**

b. Penyampaian Dit. Prasarana Perkeretaapian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASELINE	TARGET Rev PK 2026	TARGET Rev RENAKSI TW II	REALISASI	%CAPAIAN THD TW	%CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	24,14	24,14	100,00	100,00
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	33,90	35,59	33,9	33,9	100,00	95,25
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94,64	95,00	94,64	91,77	96,97	96,60
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	65,21	65,21	100,00	99,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,90	3,90	3,89	3,90	100,26	100,00
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,85	62,79	54,86	54,86	100,00	87,37
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	81,82	79,55	84,09	105,71	102,77
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20,00	20,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,66	85,75	43	42	97,67	48,98
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100	71,95	73,41	102,03	73,41
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,02	85,02	-	-	-	-

Pada revisi pertama Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK), tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK), namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi. Perubahan tidak terjadi pada indikator kinerja 1, 2, 3, dan 4, sedangkan penyesuaian dilakukan pada indikator kinerja 5 dan 11.

1) IKK1, tahun 2026 belum direncanakan penamnbahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana (masih sama dengan baseline 24,14);
2) IKK2, Pada tahun 2026 terdapat potensi penyelesaian jalur KA yang terbangun pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai. Perlu dipastikan apakah panjang jalur KA yang dievaluasi telah mempertimbangkan jalur enhancement, termasuk sekitar 6 km jalur LRT Jakarta. Perlu dijelaskan peran DJKA dalam rencana peningkatan jalur arah Cikampek–Sukabumi, apakah terbatas pada pemberian persetujuan DED atau mencakup peran lainnya;

3) IKK3, penambahan pengesahan 1 dokumen DED Jabodetabek Railway Capacity Enchacement. Selain itu, perlu dijelaskan skema pelaksanaan konstruksi oleh PT KAI, termasuk penggunaan DED enhancement atau DED tersendiri dalam rangka percepatan pekerjaan;
4) IKK4, telah dilakukan pengkuran jalur KA oleh PT KAI dan telah dilakukan evaluasi pengukuran TQI. Untuk hasil dari masinh-masing balai pada umunya menurun, yang naik hanya pada BTP Padang. Penurunan nilai TQI pada Pengukuran Periode I di wilayah Palembang disebabkan oleh kerusakan kereta ukur, sehingga pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur yang dipasang pada kereta komersial. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh lintas dapat diukur dan terdapat perbedaan metode pengukuran. Selain itu, jalur engrade Manggarai–Jakarta sepanjang ±200 meter tidak dilakukan pengukuran karena bukan merupakan jalur operasional (*existing track*). Penjelasan atas penurunan nilai TQI telah disampaikan oleh Balai dan Daop dalam forum evaluasi, dengan dasar data pengukuran yang dikeluarkan oleh PT KAI;
5) IKK5, ditargetkan pada tahun 2026 peningkatan sinyal elektrik sebanyak 2 unit (Lahat dan Marapi yang saat ini masih dilakukan proses persetujuan pengesahan dokumen kelayakan). Perlu dipastikan status penyelesaian fasilitas operasi (Fasop) Sumatera Bagian Selatan beserta tanggal pengesahannya. Apabila telah selesai dan disahkan, capaian tersebut dapat diperhitungkan sebagai realisasi kinerja, termasuk untuk dua sinyal elektrik. Mengingat indikator TQI dan Fasop menjadi acuan penilaian Balai, capaian yang masih berada di bawah 90% perlu diuraikan beserta penyebabnya dalam laporan;
6) IKK6, sampai dengan Juni 2026 rata-rata IKM ada pada nilai 3,9 dari 38 responden;
7) IKK7, target pada tahun 2026 terdapat penambahan sebanyak 268 sertifikat, realisasi sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat penambahan sebanyak 90 sertifikat (73 jalur dan bangunan KA dan 17 fasop);
8) IKK8, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terbit 2 dokumen Pedoman TQI dan SOP IMO;
9) IKK9, nilai penilaian mandiri sebesar 85,6 dan evaluasi oleh AKIP sebesar 85,6;
10) IKK10, penialian mandiri MR skor 23 dan dievaluasi oleh UMR Es I ada di skor 21;
11) IKK11, diambil dari dashboard monev kemenkeu;

12) IKK12, sampai Juni 2026 didapatkan dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi bidang Perhubungan, Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu;
13) IKK13, telah dilakukan self-assesment ASKI dengan nilai Pengawasan Kearsipan 87,4 dan Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan dan assesment oleh Biro Umum dengan nilai sementara 87,1;

c. Penyampaian Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,780	77,78	87,5	112,49
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,250	95,25	81,71	85,78
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,850	16,15	29,26	181,18
		IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,250	37,03	37,03	100
		IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	71,014	24,46	146,01	596,88
		IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,600	94,60	97,79	103,37
		IKK 7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	0	100	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,800	0	0	0
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	13,750	0	0	0
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,750	20,08	47,12	234,66
		IKK 11	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	50	56,04	112,08
		IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,000	0	0	0

1) IKK1, Capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sampai dengan Juni mencapai 112,49%, dengan realisasi 14 dokumen yang telah disahkan dari baseline 112 dokumen perencanaan teknis Tahun 2025. Meskipun capaian telah melampaui target, rencana tindak lanjut tetap perlu memuat upaya yang konkret untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta tidak hanya bersifat normatif. Perlu dijelaskan bentuk penambahan yang target yang dimaksud, termasuk substansi persetujuan yang melampaui target (target 16 dokumen). Selain itu, penyusunan rencana aksi tidak hanya memuat distribusi target, tetapi juga langkah-langkah untuk mendukung pencapaian kinerja, termasuk identifikasi kendala serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses persetujuan spesifikasi;
2) IKK2, secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98. Pada pelaksanaan survei periode Mei 2026 terdapat perubahan QR Code sehingga responden pada kuesioner SKM bulan Mei 2026 tidak terekap. Sehingga nilai IKM bulan Mei adalah 0. Diperlukan perbaikan dari substansi survey, dan juga identifikasi terhadap

pelayanan publik yang kurang;

3) IKK3, capaian hingga bulan juni sebanyak 4160 sertifikat, dengan rincian 2349 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1811 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II;
4) IKK4, pada Tahun 2026, Direktorat Sarana telah menetapkan 33 NSPK sebagai baseline perhitungan capaian IKK. Hingga saat ini, progres telah tercapai pada 17 kegiatan;
5) IKK5, Realisasi kinerja hingga Bulan Juni 2026 yaitu 50 unit pengoperasian dan baseline pengadaan 29 unit. Perlu diberikan penjelasan atas anomali capaian indikator pemenuhan sarana perkeretaapian, mengingat capaian berasal dari aspek pengoperasian tanpa adanya pengadaan. Dengan jumlah aset sebanyak 29 unit, dan target pengoperasian 20 unit hingga akhir tahun, capaian saat ini telah melampaui target tahunan sehingga perlu disertai justifikasi yang memadai. Perlu dijelaskan keselarasan target dengan Renstra, mengingat hingga saat ini telah terealisasi 29 unit, sementara target Renstra sampai dengan tahun 2029 mencakup tambahan 40 unit dan target pengoperasian sebanyak 50 unit. Selain itu, perlu diuraikan dasar penetapan target berdasarkan anggaran, mekanisme kontrak, serta perhitungan indikator yang menggabungkan kegiatan pengadaan dan pengoperasian. Capaian yang berasal dari pengoperasian sarana tanpa menggunakan anggaran, seperti lori inspeksi di Medan dan Makassar, juga perlu dijelaskan beserta jumlah unit yang berada di luar anggaran. Perlu ditegaskan ruang lingkup sarana yang diperhitungkan dalam indikator, yaitu seluruh sarana milik negara yang dikelola oleh Direktorat Sarana dan dioperasikan, termasuk RLKP dan lori. Untuk setiap aset yang diperhitungkan, perlu disertakan justifikasi bahwa aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sarana;
6) IKK6, sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%;
7) IKK7, 2 kegiatan yang telah ditindak lanjuti yakni monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan serta monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setiap capaian yang diklaim

harus didukung oleh bukti yang memadai, antara lain dokumentasi tindak lanjut hasil pengawasan depo yang menunjukkan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan.;

8) IKK8, penilaian mandiri 83, hasil evaluasi oleh evaluator SAKIP Tk Es I: 81,05 dan hasil screening Setditjen 81,50;
9) IKK9, penialian mandiri sebesar 20, penilaian mandiri UMR Es I sebesar 14;
10) IKK10, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 47,12 dengan capaian diatas 110%, sehingga diperlukan revisi PK;
11) IKK11, realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga Juni 2026 mencapai Rp840.620.000 atau 56,04% dari target sebesar Rp1.500.000.000;
12) IKK12, sudah dilakukan audit arsip internal oleh Biro pada bulan Mei 2026.

d. Penyampaian Dit. Keselamatan Perkeretaapian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. II	Realisasi Tw. II	Capaian Tw. II
1	2	3	4	5	6	6 : 5
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	**IKK.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	**96,75**	96,75	96,79	100,04
	IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti	Nilai	**40,00**	25,00	25,00	100,00
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.3** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**33,33**	22,22	22,22	100,00
	IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang ditindaklanjuti	%	**36,84**	26,31	26,31	100,00
	IKK.5 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**30,00**	10,00	20,00	200,00
	IKK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**39,16**	30,00	30,41	101,37
	IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**94,44**	92,59	90,74	98,00
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**14,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,70**	47,50	45,68	96,17
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	41,15	20,73	50,38
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**67,00**	-	-	-

1) IKK1, Sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 195 responden yang telah mengisi survey kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi SDM dengan nilai rata – rata 3,87. Perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen IKM yang memperoleh nilai terendah sebagai dasar penyusunan analisis dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya;
2) IKK2, sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 5 rekomendasi teknis keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti;
3) IKK3, realisasi sebesar 22,22 atau 4 hasil Audit SMKP yang telah ditindajlanjuti/dimanfaatkan;
4) IKK4, sampai dengan TW II 2026 terdapat 25 (dua puluh lima) rekomendasi peningkatan keselamatan yang telah ditindaklanjuti;

5) IKK5, terdapat penindakan hukum atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian sebanyak 3 penindakan. Capaian yang diatas 110% perlu di analisis;
6) IKK6, total realisasi pada triwulan II tahun 2026 adalah 30,41% atau 10.949 sertifikat;
7) IKK7, terkait usulan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik , posisi saat ini Rancangan RPM tersebut dikembalikan kepada DJKA dari Sekretaris Jenderal Kemenhub;
8) IKK8, telah dilakukan penilaian mandiri Eselon I Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Portal SILAKI DJKA ;
9) IKK9, penilaian mandiri sebesar 14 dengan nilai oleh Itjen pada awal tahun sebesar 16;
10) IKK10, terdapat deviasi halaman III DIPA lebih dari 5%, kurangnya penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan trayektori (lintasan) pola penyerapan triwulanan perjenis belaja;
11) IKK11, target BNPB tidak tercapai dikarenakan target yang ditetapkan pada DIPA 2026 sangat besar yaitu Rp. 2.400.000.000; sedangkan kemampuan unit kerja untuk mencapai PNBP tersebut Rp. 1.400.000.000 sesuai usulan sertifikat SDM perkeretaapian dari penyelenggara perkeretaapian (Operator perkeretaapian dan Dinas perhubungan). Kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan didukung informasi terkini dari tim keuangan mengenai perkembangan tindak lanjutnya. Hasil analisis serta rencana tindak lanjut agar diuraikan secara spesifik, konkret, dan terukur dalam laporan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada periode berikutnya.;
12) IKK12, Melakukan kegiatan Pengelolaan arsip inaktif 2021 dan pemberkasan arsip aktif 2025 selesai serta Self assessment menghasilkan skor 74 dengan data dukung tambahan yang sedang diproses;
13) Jumlah kecelakaan kereta api secara kumulatif hingga Triwulan II tercatat sebanyak 7 kejadian. Khusus kecelakaan di Bekasi, hasil investigasi resmi masih menunggu laporan KNKT. Berdasarkan analisis hukum sementara, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengarah pada dugaan kelalaian SDM. Namun, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil investigasi resmi;

e. Penyampaian BTP Kelas I Jakarta

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TRIWULAN II			CAPAIAN TAHUNAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	0,64	0,64	**100%**	100%
2	SK 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 2 Kondisi jalur KA Sesuai Standar TOI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,52	91,2	87,88	**96,36%**	96,02%
		IKK 3 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	99,03	99,03	99,03	**100%**	100%
3	SK 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	38,06	Pnp : 641.782.377 (14,12%) Brg : 4.457.338 (14,27%) **28,39%**	681.020.842 (14,98%) 4.692.474 (15,02%) **30,00%**	**105,69%**	78,84%
		IKK 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang Kelas I Jakarta	%	20	-	-	-	-
4	SK 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	100	99,26	**99,26%**	99,26%

*Data Sementara

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TRIWULAN II			CAPAIAN TAHUNAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
5	SK 5Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	81,30	-	-	-	-
		IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	14,20	-	-	-	-
		IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	92,35	46,18	41,24	**89,30%**	**44,66%**
		IKK 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	50,00% **4.000.000.000**	569,48% 45.558.772.804	**1138,97%**	**569,48%**
		IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	87,50	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**157,23%**	**98,93%**

1) IKK1, wilayah terhubung 9 dari 14 wilayah, rasio konektivitas juga berkaitan dengan terintegrasinya moda transportasi perkeretaapian dengan terminal Tipe A;
2) IKK2, penurunan jalur KA terukur sebesar 1,04 Km'sp karena Manggarai at grade tidak masuk dalam pengukuran TW I Tahun 2026, genangan air dan vegetasi liar pada lintas Jakarta Kampung Bandan–Jatinegara, serta kerusakan rel, genangan air, penipisan balas, dan mud pumping di beberapa titik pada lintas Tanah Abang–Rangkasbitung. Upaya kedepannya perlu dijabarkan termasuk ke IMO. Program keselamatan akan dikoordinasikan dengan subdit terkait jika memang membicarakan pelayanan dan kehandalan masuk ke IKK2 namun jika keselamatan masuk ke IKK keselamatan;

3) IKK3, tidak ada kegiatan penambahan atau peningkatan persinyalan dari mekanik menjadi elektrik. Namun BTP Jakarta telah melaksanakan Kegiatan Monev Fasilitas Operasi di wilayah kerja BTP Jakarta;
4) IKK4, pencapaian target angkutan penumpang dan barang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Iduladha dan libur sekolah, serta inovasi sarana KA *New Generation* yang meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Target angkutan bisa dijabarkan barang/penumoang yang sudah terpenuhi dan juga analiasa komoditi yang menyumbangkan banyak presentasenya;
5) IKK5, terdapat penurunan gangguan operasional pada tahun 2026 sebesar 20% (Maksimal 23 kejadian di tahun 2026), namun telah terjadi 16 kejadian sampai dengan Triwulan II 2026. Sebenarnya sampai dengan Triwulan II ada 20 kejadian setelah di excersice ada 16 kejadian yang mengganggu sehingga tidak dimasukan;
6) IKK6, telah terjadi 3 kecelakaan KA sampai dengan Triwulan II (Tabrakan dan Anjlok);
7) IKK7, penilaian evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I dengan perolehan nilai sementara sebesar 83,05;
8) IKK8, penilaian mandiri MR dengan skor 22;
9) IKK9, Realisasi NKA BTP Jakarta Triwulan II sebesar 41,24%, yang terdiri atas Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (82,48%) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (0%) akibat capaian RO yang masih belum terisi;
10) IKK10, bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Terdapat anomali capaian akibat pengembalian Belanja Barang (IMO) dan Belanja Modal tahun sebelumnya sebesar Rp42,58 miliar;
11) IKK11, sosialisasi persuratan dan kearsipan (23-27 April 2026) dan penataan arsip Inaktif (28-30 April 2026);
12) Perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap e-SAKIP Reviu dan Rencana Aksi pada SILAKI, karena masih terdapat isian yang hanya memuat indikator dan belum mencerminkan substansi rencana aksi.

f. Penyampaian BTP Kelas I Bandung

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN IKK	TARGET PK 2026	TARGET KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				CAPAIAN THP TARGET PK
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
SK 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 1**	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Rasio	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	-	-	100%	94.55%	-	-	94.55%
SK 2. Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 2**	Kondisi Jalur KA sesuai standar TQI Kategori 1 dan 2 di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88.38	86.70	87	88.38	88.38	86.51	84.95	-	-	100%	97.64%	-	-	96.12%
	IKK 3	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	-	-	100%	100%	-	-	100.00%
SK 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 4**	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	37	24.19	29.09	33.99	37	23.00	27.31	-	-	95%	93.88%	-	-	73.81%
	IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	17.86				17.86			-	-				-	
SK 4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 6**	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	100	98.64	-	-	100%	98.64%	-	-	98.64%
SK 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 7**	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81.45				80.50					-	-	-	-	
	IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81.45				80.50					-	-	-	-	
	IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	89.55	22.39	37.47			0	37.38	-	-	0	99.76%	-	-	41.74%
	IKK 10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	0	96473.73			0	96473.73%			96473.73%
	IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	76.90				76.900					-	-	-	-	

1) IKK1, sebanyak 6 lokasi sudah terhubung dari total 11 lokasi Rasio Perka s.d. Juni 2026 sebesar 0,97 dengan rincian sebanyak realisasi 73.397 dari program 75.375. Perlu ditambahkan analisis mengenai realisasi GAPEKA yang tidak sesuai dengan program, termasuk program yang tidak terealisasi beserta penyebab pembatalannya.;
2) IKK2, lintas yang mengalami penurunan yakni Lintas yang mengalami penurunan nilai TQI meliputi wilayah DAOP 1 Jakarta (TQ2), DAOP 2 Bandung (TQ1 dan TQ2), serta DAOP 3 Cirebon (TQ1), sedangkan pada DAOP 3 Cirebon tidak terdapat penurunan pada TQ2. Capaian TQI telah sesuai, namun pada lintas yang mengalami penurunan perlu diuraikan lebih lanjut upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai TQI pada periode berikutnya.;
3) IKK3, jumlah sinyal elektrik 65 dengan total persinyalan sebanyak 92;
4) IKK4, realisasi Juni 2026 mencatat angkutan penumpang sebanyak 13.777.974 penumpang (melampaui target 12.962.260 penumpang), sedangkan angkutan barang mencapai 73.147,27 ton dari target 126.279 ton, yang didominasi oleh komoditas semen, retail parcel, dan retail BHP. Angkutan barang yang tidak tercapai khususnya komoditi semen yang mengalami penurunan;
5) IKK5, keterlambatan sampai dengan Juni 2026 sebanyak 6 kejadian dari target 28 kejadian;
6) IKK6, Sampai dengan Juni 2026 terdapat 1 kecelakaan KA (Anjlokan) diakibatkan longsoran di KM 142 +8/9 petak jalan antara Maswati-Sasaksaat pada hari Rabu,

1 April 2026;

7) IKK7, nilai sementara AKIP 2026 BTP Bandung atas Penilaian Internal Mandiri sebesar 82,35;
8) IKK8, telah melakukan penialian mandiri MR;
9) IKK9, capaian masih jauh dibawah target, diusulkan untuk melakukan revisi PK 2026;
10) IKK10, realisasi PNBP berasal dari pelelangan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, meliputi kendaraan bermotor serta peralatan dan mesin;
11) IKK11, penataan arsip inaktif secara bertahap untuk arsip pekerjaan pengembangan KA wilayah Kiaracondong - Cicalengka di pusat arsip kementerian perhubungan;

g. Penyampaian BTP Kelas I Semarang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA TW II	KET
1	SKT1. Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana di wilayah BTP Semarang	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	RASIO	0,750	0,375	0,382	101,87%	>100%
2	SKT2. Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T2. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	99,00	98,995	98,673	99,67%	tidak tecapai
		IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	87,50	87,50	87,50	100%	tercapai
3	SK T3. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T4. Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja BTP Semarang	%	39,052	29,290	28,700*	97,99%*	tidak tercapai
		IKK T5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di wilayah kerja BTP Semarang	%	20,588	-	-	-	belum ada capaian
4	SK T4.Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T6. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Semarang	%	100	100	98,904	98,90%	tidak tercapai
5	SK T5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T7. Nilai AKIP BTP Semarang	NILAI	82,150	-	-	-	belum ada capaian
		IKK T8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	NILAI	15	-	-	-	belum ada capaian
		IKK T9. Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	NILAI	81	37,500	37,698	100,52%	>100%
		IKK T10. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	95	296,956	312,59%	>100%
		IKK T11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	NILAI	74,04	-	-	-	belum ada capaian
							130,22%*	

*) nilai sementara

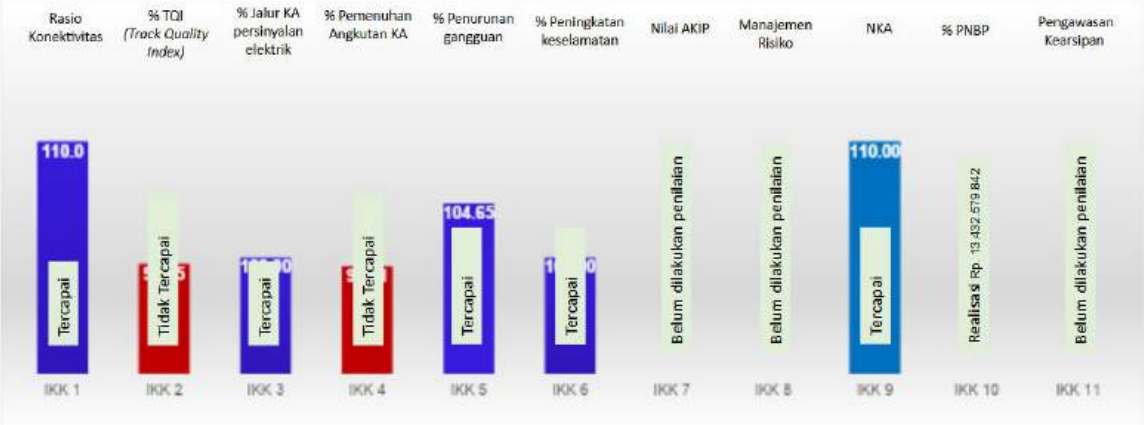
1) IKK1, jalur terhubu sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Beberapa perhitungan dalam Rencana Aksi akan disesuaikan pada revisi Perjanjian Kinerja. Secara prinsip, capaian kinerja telah memenuhi target sebesar 100%;
2) IKK2, terdapat penurunan total TQI dari Triwulan I 2026 (pengukuran Triwulan IV 2025) sekitar 0,5% (3,8km). Data telah sesuai dengan Ditpras. Penurunan capaian TQI perlu dianalisis lebih rinci beserta upaya perbaikannya berdasarkan hasil evaluasi dengan DSOP dan Divre;
3) IKK3, Pada Tahun 2026 tidak terdapat penambahan sinyal elektrik. Fasilitas operasi yang beroperasi terdiri atas 105 sinyal elektrik dan 15 sinyal mekanik, sedangkan pembangunan Gardu Traksi Delanggu masih dalam tahap pengusulan

kembali skema MYC. Keterlambatan capaian Fasop dipengaruhi proyek Gardu Traksi Delanggu yang masih menunggu proses lelang setelah usulan skema MYC belum disetujui;

4) IKK4, realisasi tidak memenuhi target antara lain pembatalan perjalanan KA akibat adanya KKA yang mengakibatkan kenaikan penumpang dan barang berkurang. Capaian IKK angkutan barang masih di bawah target bulanan dan perlu diverifikasi kembali berdasarkan target tahunan;
5) IKK5, hingga Triwulan II 2026 tercatat 20 gangguan operasional di perlintasan sebidang. Dibandingkan Triwulan I, jumlah gangguan meningkat sehingga diperlukan evaluasi untuk menekan gangguan pada periode berikutnya. 3. Gangguan operasional perlu diantisipasi melalui penguatan penjagaan perlintasan sebidang. Selain itu, untuk setiap IKK yang berada di bawah selera risiko, perlu diuraikan penanganan risiko beserta efektivitas pengendalian (existing control) yang telah diterapkan;
6) IKK6, pada 6 April 2026 terjadi anjlokan KA Bangunkarta di petak Linggapura–Bumiayu yang mengakibatkan gangguan operasional dan kerusakan prasarana. Penyebab kejadian masih menunggu hasil investigasi KNKT. Kecelakaan yang terjadi di wilayah BTP Semarang, khususnya di DAOP Purwokerto, berupa anjlokan kereta api, berdasarkan analisis Subdirektorat Pemeriksaan dan Kecelakaan, disebabkan oleh faktor prasarana.;
7) IKK7, hasil penilaian AKIP internal sebesar 83,5 dan penilaian sementara Eselon I juga sebesar 83,5 (Setditjen: 83,95). Telah dilakukan s*creening*, termasuk terhadap aspek inovasi. Mohon dukungan BTP Semarang untuk menjadi sampel dalam kegiatan bersama Inspektorat Jenderal;
8) IKK8, penialian mandiri sebesar 19, sedangkan validasi oleh UMR Es I mendapatkan nilai 16;
9) IKK9, capaian di Triwulan II telah melebihi target Triwulan II namun secara tahuna nmasih rendah dikarenakan capaian RO akan lebih banyak terealisasi di Triwulan IV. Nilai ideal diharapkan berada di atas 40, dengan asumsi IKPA telah mencapai lebih dari 90. Namun, nilai IKPA BTP Semarang masih berada pada kisaran 70 sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali;
10) IKK10, Capaian PNBP telah melampaui target Tahun 2026, sehingga diperlukan revisi Perjanjian Kinerja agar target tetap relevan;
11) IKK11, Berdasarkan penilaian LAKI 2025, perbaikan diperlukan pada aspek

penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, dan SDM di unit pengolah;

h. Penyampaian BTP Kelas I Surabaya



1) IKK1, saat ini masih terdapat 16 wilayah) dengan keseluruhan PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara (rencana keseluruhan berdasar RIPNAS adalah sebanyak 44) wilayah dengan Program Perjalanan KA berdasarkan Gapeka 2026: menggunakan realisasi sd Maret 2026:28.655 perjalanan KA (28.143 di Jatim + 512 di Sulsel). Perlu dilakukan analisis terhadap capaian konektivitas yang melebihi target, termasuk penyebab penambahan perjalanan, seperti program tambahan atau angkutan Lebaran, khususnya pada Maret dan Mei;
2) IKK2, hasil Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II sepanjang 1199.960 kmsp, dengan Jalur KA keseluruhan yang beroperasi sepanjang 1233.44 kmsp. Terkait dampak lumpur Lapindo terhadap TQI, PT KAI telah melakukan pengawasan perjalanan kereta api dan hingga saat ini jalur masih dapat dilalui secara normal;
3) IKK3, terdapat 44 unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (tidak termasuk IB) dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasilitas operasi yang beroperasi (tidak termasuk IB);
4) IKK4, saat ini masih menggunakan data sementara diakrenakan data bulan Juni masi prognosa. Realisasi angkutan penumpang dari Januari hingga saat ini:11.851.783 pnp Realisasi angkutan barang dari Januari hingga saat ini:1.268.451 ton. Capaian angkutan yang masih di bawah target bersifat sementara (prognosis). Data pada tautan *drive* agar diperbarui menggunakan data final;
5) IKK5, realisasi kecelakaan di perlintasan sebidang sampai dengan Juni 2026 sebanyak 14 keterjadian sementara target 2026 maksimal 31 kejadian;
6) IKK6, kecelakaan sampai dengan bulan Juni 2026 sebanyak 0 kejadian;

7) IKK7, sampai dengan bulan Juni telah dilakukan penilaian mandiri AKIP Tingkat eselon I dan mendapatkan nilai 82,70;
8) IKK8, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal tanggal 27 Februari 2026, BTP Kelas I Surabaya memperoleh nilai 16;
9) IKK9, realisasi NKA sebesar 70,42 (perhitungan manual), terdiri atas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 53,07 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 17,35;
10) IKK10, berasal dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada kegiatan Peningkatan Jalur KA Jember – Kalisat Rp. 618.019.747,- dan Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp. 12.814.560.09;
11) IKK11, belum dilakukan penialian;

i. Penyampaian BTP Kelas I Medan

1) IKK1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
1	Meningkatnya konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.1 Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Rasio	0,29	0,29	-	-%

Rasio konektivitas BTP Medan menunjukkan 8 dari 18 PKN/PKW/simpul transportasi telah terhubung. Jumlah tersebut berkurang satu wilayah akibat bencana pada tahun 2025 yang menyebabkan akses menuju PKW Lhokseumawe terputus;

2) IKK2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
2	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dil wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	95,95	95,95	91,35	95,20%

Capaian TQI yang masih rendah terdapat pada segmen Perlanaan–Kisaran dan Mambang Muda–Merbau akibat banyaknya sambungan rel 42 yang meningkatkan risiko rel putus. Peningkatan jalur pada segmen tersebut direncanakan diusulkan pada tahun 2027. Terdapat penambahan panjang jalur yang diperhitungkan untuk pengukuran TQI, sedangkan panjang jalur beroperasi belum mengalami perubahan;

3) IKK3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
3	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**55,35**	**55,35**	**55,35**	**100%**

Tidak terdapat penambahan Sinyal Elektrik yang direncanakan di 2026;

4) IKK4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.4 Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**40,55**	**30,25**	**-**	**-%**

Terdapat Kenaikan tonase angkutan barang pada bulan maret dan April 2026 yaitu pada komoditi peti kemas. Perlu diuraikan secara jelas apakah capaian yang telah memenuhi target berasal dari angkutan penumpang atau angkutan barang;

5) IKK5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
5	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.5 Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**-**	**-%**	**-%**

Operasional KA Perintis Cut Meutia masih terhenti akibat kerusakan prasarana pascabanjir November 2025 dan saat ini sedang dilakukan koordinasi penyusunan kajian teknis sebagai dasar rehabilitasi. Sementara itu, pemanfaatan jalur KA Perintis Rantau Prapat–Kota Pinang terus dipercepat melalui koordinasi dengan Direktorat Teknis dan Balai Uji;

6) IKK6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IIV	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
6	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.6 Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**7,5**	**-**	**-**	**-**

Pada Triwulan II 2026 jumlah kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api di perlintasan sebidang sejumlah 20 kejadian;

7) IKK7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
7	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.7 Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**100**	**100**	**100%**

Sampai TW II Tahun 2026 tidak terdapat 0 kejadian kecelakaan KA. Sehingga Capaian di TW II yaitu 100%. Uraikan penanganan risiko yang dilakukan;

8) IKK8

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	**80,9**	-	-	-

Telah ditetapkan SK Tim PM SAKIP BTP Medan dan selanjutnya akan dilakukan pengisian PM SAKIP Tahun 2026 pada Portal SILAKI;

9) IKK9

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	**15**	-	-	-

Telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026, pengisian pada aplikasi SIMARKO, serta penyampaian laporan pemantauan Triwulan II Tahun 2026;

10) IKK10

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**81**	**40,5**	**44,38**	**109,5%**

Dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran, progres kegiatan, serta penyusunan RPD/prognosa yang valid untuk mendukung percepatan pelaksanaan anggaran dan pencapaian output;

11) IKK11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**100**	**100**	**100%**

Terdapat satu aset lahan di Rantauprapat yang telah termanfaatkan untuk disewakan dan terdapat 3 aset lahan sedang menunggu proses penerbitan tarif

di KPKNL;

12) IKK12

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Level	**74**	-	-	-

Telah dilakukan koordinasi dengan Unit Kearsipan II dalam hal terkait hal penyusutan arsip inaktif serta sertifikasi teknis kearsipan.

13) Terdapat keterlambatan penginputan e-Performance pada bulan April dan Mei. Selain itu, Rencana Aksi yang diinput pada SILAKI perlu disempurnakan, khususnya terkait kegiatan pendukung. Capaian GAPEKA juga masih di bawah 80% akibat adanya perbedaan data antara PT KAI dan Direktorat Lalu Lintas, sehingga perlu ditambahkan informasi mengenai perjalanan tambahan sebagai dasar penjelasan.

j. Penyampaian BTP Kelas II Padang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN	
				TAHUN 2026	TW II		TAHUN 2026	TW II
1	Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,36	0,36	0,39	107,02	**107,02**
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87,34	87,34	89,86	102,88	**102,88**
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	37,81	28,14	27,08	71,63	**96,24**
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	22,00	-	-	-	-
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	82,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	12,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	83,52	50,00	43,62	52,23	**87,24**
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	110,51	110,51	**110,51**
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	73,00	-	-	-	-

1) IKK1, Hingga Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat penambahan wilayah terhubung, namun telah dimulai pemutakhiran Masterplan Jalur KA Pulau Sumatera sebagai tahap awal pengembangannya. Belum terdapat kegiatan yang meningkatkan rasio konektivitas. Perlu diuraikan penyebab rendahnya capaian, termasuk penurunan pada segmen tertentu;
2) IKK2, Kondisi jalan rel kategori 1 dan 2 meningkat sebesar 1,66 km'sp dibandingkan periode IV Tahun 2025. Kualitas terbaik terdapat pada lintas Duku–BIM, sedangkan terendah pada Bukit Putus–Indarung akibat ballast mati karena tumpahan semen;

3) IKK3, capaian angkutan penumpang meningkat didukung libur Iduladha dan libur sekolah, sedangkan angkutan barang belum mencapai target akibat menurunnya permintaan semen. Capaian angkutan barang masih belum mencapai target, sedangkan angkutan penumpang telah mengalami peningkatan seiring perubahan layanan dari KA Perintis menjadi KA PSO;
4) IKK4, terdapat dua kejadian temperan pada Triwulan II 2026 yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, yaitu tidak mengindahkan peringatan petugas PJL dan melintas di perlintasan sebidang liar. Ada dampak dari program penjagaan padat karya;
5) IKK5, hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak terjadi kecelakaan KA;
6) IKK6, telah meningkatkan pelaksanaan AKIP Tahun 2026 melalui penyempurnaan pelaporan kinerja dan evaluasi rutin yang melibatkan seluruh unit kerja;
7) IKK7, realisasi penanganan risiko mencapai 3 dari 7 kegiatan, dengan 1 kegiatan diselesaikan lebih cepat dari target;
8) IKK8, beberapa kegiatan belum terlaksana akibat penyesuaian anggaran yang masih dalam proses penyusunan dokumen kontrak, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. Nilai NKA masih rendah pada aspek perencanaan. Kegiatan didominasi pengawasan rutin tanpa pekerjaan fisik prasarana, dengan kegiatan strategis terbatas pada IMO. Perlu diuraikan data jalur RPJMN serta diselaraskan dengan laporan Triwulan I;
9) IKK9, capaian PNBP berasal dari penihilan RPATA 2025, penjualan tiket KA Perintis Lembah Anai, lelang BMN, dan pengembalian kelebihan belanja barang;
10) IKK10, sudah dikakukan entri data arsip;

k. Penyampaian BTP Kelas II Palembang

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target PK	Target TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	0,71	0,48	67,60%
2	SK2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK 2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	97,11	97,11	84,9	87,42%
		IKK 3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	36,14	33,73	34,94	103,59%
3	SK3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	37,66	27,87	29,32	105,20%
		IKK 5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,00	-	-	-
4	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,00	100,00	87,08	87,08%
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,00	-	37,84	100%
		IKK 8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90	-	-	-
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,00	-	-	-
		IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	73,15	-	-	-

1) IKK1, KA Fakultatif hanya dioperasikan sesuai kebutuhan dan tidak berjalan setiap hari. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya selisih antara jumlah perjalanan yang diprogramkan dengan realisasi di lapangan. Capaian GAPEKA masih rendah. Perlu dianalisis kontribusi perjalanan reguler dan fakultatif, kendala angkutan barang, serta dampak kebijakan penggunaan jalan khusus terhadap capaian;
2) IKK2, Penurunan nilai TQI disebabkan kurang optimalnya pemeriksaan dan perawatan prasarana oleh PT KAI Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang. Nilai TQI Palembang perlu dijustifikasi karena pengukuran dilakukan menggunakan kereta komersial akibat kerusakan kereta ukur. Perlu dikoordinasikan dengan Seksi Prasarana terkait metode pengukuran dan penanganannya, serta diuraikan lebih rinci dalam laporan untuk mendukung capaian RPJMN;
3) IKK3, Divre III Palembang terdapat 15 persinyalan elektrik, 7 persinyalan elektrik. Divre IV Tanjung Karang terdapat 7 persinyalan elektrik. Capaian Lahat masih perlu disinkronkan dengan Ditpras karena belum diperhitungkan. Perlu dijelaskan dasar pengakuan capaian, yang saat ini baru berupa pengusulan izin pembangunan;
4) IKK4, Peningkatan angkutan lalu lintas didukung melalui pemantauan dan monitoring berkala terhadap operasional dan perjalanan kereta api;
5) IKK5, Divre III ada 9 keterjadian, Divre IV 12 jadi total 21;
6) IKK6, terdapat 3 kecelakaan;
7) IKK7, Nilai dihitung berdasarkan bobot masing-masing 50% dari kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Dashboard Monev Kemenkeu. Perlu dipastikan percepatan kegiatan kontraktual, yang saat ini didominasi oleh IMO. Target pada revisi PK agar dibagi per triwulan serta dilakukan pengecekan kembali terhadap capaian IKPA (minimal 40);
8) IKK8, nilai sementara sebesar 82,00 dari target 81,90;
9) IKK9, telah melakssanakan penilaian mandiri MR skor 19;
10) IKK10, telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penerapan aplikasi SRIKANDI bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

l. Penyampaian Balai Pengujian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi Triwulan II	Capaian		Keterangan
			Tahun 2026	TW II		Tahun 2026	TW II	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75	96,75	96,86	100,11	100,11	Tercapai
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58	25,42	30,02	75,84	118,11	>110%
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	36,01	28,32	29,06	80,68	102.58	Tercapai
4	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07	28,54	29,52	75,55	103.42	Tercapai
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	82,15	-	-	-	-	Belum terdapat target
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	16.000	-	-	-	-	Belum terdapat target
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	94,29	50,50	53,12	56,34	105.19	Tercapai
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00	31.584	47,331	47,331	149.86	>110%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45	-	-	-	-	Belum terdapat target
TOTAL CAPAIAN KINERJA TW2							113,21	

1) IKK1, sebanyak 2.108 pengguna layanan telah mengisi surevi IKM secara elektronik sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Perlu dianalisis pelayanan yang mana yang perlu diperbaiki dari hasil survey tersebut;
2) IKK2, realisasi pengujian sarana perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah sebanyak 20.157 Unit dari target tahun 2026 sebanyak 26.579 Unit;
3) IKK3, realisasi pengujian SDM perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah sebanyak 12.600 Orang dari target tahun 2026 sebanyak 15.176 Orang;
4) IKK4, realisasi pengujian prasarana perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah 384 Unit dan 614,715 km'sp dari target tahun 2026 sebanyak 585 Unit dan 720 km'sp;
5) IKK5, telah dilakukan penialian mandiri sebesar 83,95 dan evaluasi Es I 83,05;
6) IKK6, penilaian mandiri dengan skor 18;
7) IKK7, menyusun laporan bulanan realisasi anggaran kegiatan pada bulan April – Juni tahun 2026;
8) IKK8, adanya peningkatan jumlah pengujian sarana perkeretaapian dan pembayaran tagihan pengujian prasarana perkeretaapian pada tahun 2025 oleh PT.KCIC sebesar Rp1.475.337.000;
9) IKK9, Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan arsip vital dan/atau arsip berretensi permanen berupa Berita Acara Pengujian Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025–2026, serta melaksanakan alih media arsip.
10) Secara umum, rekomendasi atau tindak lanjut yang disampaikan dalam laporan agar dibuat lebih spesifik dan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan. Sebagai contoh, pada aspek sarana terdapat rekomendasi mengenai evaluasi

target, sedangkan pada aspek sumber daya manusia (SDM) target telah terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara lebih rinci aspek atau indikator mana yang masih memerlukan evaluasi, khususnya pada bidang sarana, termasuk penyebab terjadinya kelebihan atau ketidaksesuaian yang telah disampaikan dalam pembahasan. Selain itu, pada penyusunan laporan Triwulan II juga perlu dicantumkan informasi mengenai dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Apabila pada periode tersebut terdapat kegiatan pengujian yang berkaitan dengan PSN, hal tersebut agar diuraikan dalam laporan sebagai bagian dari hasil evaluasi.

m. Penyampaian Balai Perawatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkerelaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	93,54	93,54	93,54	100
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%	100	100	73,79	73,79
	Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	%	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40	-	-	-
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83	54,11	54,62	100,94
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00	0,69	0,72	114,34
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23	-	-	-

1) IKK1, hasil agregeat April s.d. Juni 2026 terdapat 11 responden dengan hasil 93,54. Responden dari perusahaan yang menyewa/menggunakan. Untuk kedepannya responden untuk dapat di perluas selain operator juga semua yang menggunakan jasa Baperka. Perlu di analisa untuk hasil nilai survay aspek mana yang nilai masi rendah dan perlu perbaikan. IKM harusnya di hitung dari rata-rata Januari s.d. Juni;
2) IKK2, sarana siap operasi 107 unit dengan sarana tidak siap operasi 38 unit dengan data masih sementara dikarenakan TSO masih dalam perawatan. Hasil finalnya masih menunggu sampai satu minggu kedepan. Jika banyak yang TSO perlu justifikasi dan di uraikan untuk kendala dalam laporan;
3) IKK3, keberhasilan capaian dari aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin milik Baperka di Depo KRL Solo Jebres dan Depo Depok Jabar yang disewakan;
4) IKK4, progres saat ini telah menindaklanjuti hasil pemenuhan pemantauan

capaian kinerja triwulan I;

5) IKK5, progres saat ini telah mengikuti refreshment QRMO sebagai bentuk pengembangan kompetensi;
6) IKK6, realisasi NKA sebesar 54,62;
7) IKK7, realisasi pendapatan PNBP baperka s.d Juni 2026 sebesar Rp813.246.237. Perlu proyeksi untuk realisasi kedepanya di Triwulan III;
8) IKK8, telah melakukan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi Srikandi;
9) Terkait aplikasi harap di lengkapi, seperti eSR dan TL rekomendasi pada SILAKI. Target RPJM perlu diuraikan, dari Baperka dalam mensupport RPJMN perlu disampaikan.

n. Penyampaian BPKAR Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW I	% KINERJA TW I	REALISASI TW II	% KINERJA TW II
			I	II	III	IV				
Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	37,38	22,80	27,51	32,38	37,38	25,22	110,61%	28,41	103,27%
Persentase Kedatangan Dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	%	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,96	100,10%	99,88	100,02%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	95,15	106,02%	95,04	105,89%
Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	81	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	16	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	90,7	18,14	36,28	54,42	90,70	32,15	177,23%	51,05	140,71%
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	%	100	20,17	39,20	60,47	100,00	18,41	91,61%	28,84	73,60%

1) IKK1, penumpang terbanyak pada saat bulan Maret tepat pada saat Lebaran 1447H, rata-rata penumpang harian sebesar 12.332. Perlu dijelaskan apakah capaian berasal dari target baru atau perjalanan rutin, termasuk penambahan jam operasional pada kegiatan *Car Free Night* dan *Car Free Day* yang mulai berlaku pada Triwulan II. Selain itu, pelatihan di stasiun merupakan kegiatan rutin;
2) IKK2, pola operasi kereta api diatur melalui GAPEKA dengan total 8 transformasi (7 TS SO, dan 1 TS TSO) dengan hasil tercapai 17.140 perjalanan KA selama Triwulan II;
3) IKK3, hasil survey sudah menggunakan gabungan survey internal dan juga dari PPTB. Sudah di koordinasikan dengan PIC dan sudah sesuai;
4) IKK4, sampai dengan Triwulan II *zero accident.* Pelaksanaan IMO LRT masih berada pada tahap *zero progress*. Kondisi tersebut perlu dianalisis dan diuraikan dalam laporan, khususnya terkait dampaknya terhadap pemeliharaan dan aspek

keselamatan;

5) IKK5, hasil sementara penilaian mandiri sebesar 81,10;
6) IKK6, telah disusun laporan MR Triwulan II;
7) IKK7, realisasi 51,05, biasanya realisasi di Triwulan I maupun Triwulan II cendureng tinggi dan normal di Triwulan IV. Diharapkan capaian dapat mencapai di atas 40 sebagai dasar untuk melihat tren kinerja;
8) IKK8, masih belum maksimal terhadap pemanfaatan asset terutama non-core. Realisasi PNBP masih di bawah target, namun diproyeksikan tetap mencapai target BLU sebesar Rp33 miliar. Selain itu, data dukung capaian kinerja agar dilengkapi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan remunerasi;
9) IKK9, hasil penilaian evaluasi pengawasan kearsipan internal di tahun 2025 yakni 71,86;
10) Perlu menyiapkan dokumen pendukung untuk e-SAKIP Reviu setelah proses *maintenance*. Pada e-Performance, indikator yang masih berstatus ceklis kuning agar segera dilengkapi, baik data dukung maupun uraian tindak lanjut. Tindak lanjut dan rencana aksi juga perlu dipastikan telah lengkap. Capaian kinerja AKIP dan Manajemen Risiko masih berada pada jalur yang sesuai. Untuk indikator yang belum ditargetkan pada Triwulan II, agar diberi tanda strip (-) dan tidak diisi nilai 0.

o. Penyampaian BPKA Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulsel	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2025	Target					Realisasi		Capaian Kinerja TW I	Capaian kinerja Tahunan
				2026	TW I	TW II	TW III	TW IV	Triwulan I	Triwulan II		
SK 1 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK1 Kondisi Jalur KA yang Sesuai TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	101,00	101,00%
	IKK 2 Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,80	3,80	118,82	118,02%
	IKK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	12,12	37,10	22,81	28,24	33,07	37,10	23,65	29,49	103,68	63,75
	IKK5 Persentase kedutangan dan keberangkatan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%	92,88	90,45	90,45	90,45	90,45	90,45	85,23	89,18	91,95	61,35
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK6 Tingkat Keselamatan transportasi perkeretapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00%
SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK7 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	80,60	80,60	-	-	-	80,60	-	80,85	100,4	100,4
	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	10,25	12,00	-	-	-	12,00	-	16	133	133
	IKK9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	81,26	81,50	27,00	30,00	35,00	81,50	0	40,40	134,33	49,44
	IKK10 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	17,24	44,24	70,96	100,00	35,03	116,85	264,14	116,85
	IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	69,60	70,00	-	-	-	70,00	-		-	-

1) IKK1, kondisi kualitas jalur kereta api berdasarkan pengukuran Track Quality Index (TQI) periode Triwulan II Tahun 2026 dari total panjang jalur yang diukur 119km yang masuk dalam kategori I dengan spesifikasi (TQI <= 20 dengan kategori Baik Sekali) sepanjang 119km. Pedoman baru belum diterapkan sehingga hingga Triwulan II masih menggunakan pedoman lama. Sosialisasi pedoman baru direncanakan pada Triwulan III, dilanjutkan dengan

penerapannya oleh seluruh operator. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Ditpras untuk penyelarasan parameter pengukuran TQI, verifikasi data TQI Sulsel, cakupan jalur yang diukur (termasuk Palanro), serta penambahan panjang jalur beroperasi;

2) IKK2, target Fasilitas Operasi BPKA Sulsel adalah 14 Fasilitas Operasi, dimana pada Tahun 2023 Fasop di Mandai sudah terbangun , sehingga Target Fasop 14 sudah terealisasi 100%;
3) IKK3, realiasasi Triwulan II sebesar 3,86. Pada saat revisi Perjanjian Kinerja agar menggunakan skala 100, dengan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim internal Balai;
4) IKK4, realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah 29,49% atau sejumlah 491.346 penumpang;
5) IKK5, ketidakcapaian target dikarenakan adanya pembatasan kecepatan pada lintas Mandalle – Tanete dan gangguan sarana KRDE. Gangguan sinyal di Mandai masih memerlukan pengoperasian secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kendala operasional. Sebelumnya telah direncanakan kegiatan peningkatan sistem persinyalan, namun pelaksanaannya tertunda akibat pemblokiran anggaran;
6) IKK6*, zero accident*. Aspek keselamatan perlu diuraikan, termasuk dukungan yang diberikan kepada para operator dalam menjaga keselamatan operasional.;
7) IKK7, nilai sementara AKIP BPKA Sulsel sebesar 80,85. Data AKIP tidak perlu dimasukan realisasi dikarenakan data tersebut merupakan data sementara;
8) IKK8, berdasarkan penilaian Januari 2026, BPKA Sulsel memperoleh nilai 15,00 dari Inspektorat Jenderal dan 16,00 dari Unit Manajemen Risiko Eselon I, sehingga telah memenuhi target. Data MR tidak perlu dimasukan realisasi dikarenakan data tersebut merupakan data sementara;
9) IKK9, menggunakan nilai dari aplikasi sebesar 40,40. Perlu penyesuaian target di revisi PK;
10) IKK10, keberhasilan ini didukung oleh adanya PNBP dari denda penyedia, pengembalian belanja begawai (TUKIN) TAYL dan Penjualan Tiket Perintis dan penerimaan kembali belanja modal, barang dan pegawai anggaran tahun yang lalu. Perlu penyesuaian target di revisi PK;
11) IKK11, melaksanakan pemindahan dan penataan arsip aktif, serta penerapan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh dalam pengelolaan persuratan;

12) Pengisian e-performance dan monitoring renaksi harap dicek kembali. ESR ada beberapa dokumen belum terinput. Inovasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I perlu dipertimbangkan untuk tetap diuraikan pada Triwulan II sebagai bagian dari perubahan budaya kinerja. Uraian tersebut agar dikompilasi dalam Bab III sebagai salah satu upaya yang berkelanjutan.

p. Pembahasan Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

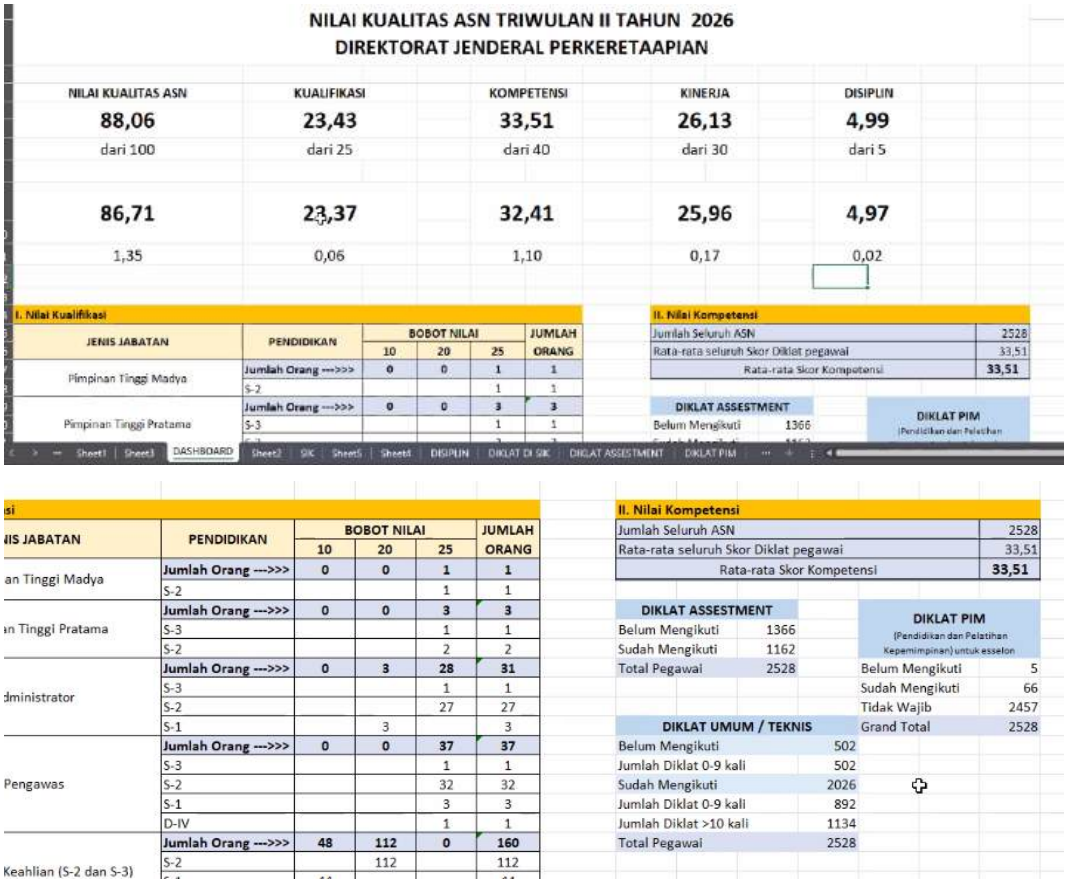
SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2026				REALISASI 2026				KETERANGAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	21,21	21,21	21,21	21,21	42,42	21,21	24,24% (8 dari 33 target regulasi)			Bagian Hukum, Humas dan Umum
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25% (1 dari 16 unit kerja)			Bagian SDMO
	c.	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Nilai	86,09	86,09	86,09	86,09	89,50	86,72	86,09 (*baseline* 2025)			Bagian SDMO
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	Nilai	1,61	-	-	-	1,70	-	-			Bagian SDMO
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	85,84	-	-	-	90,91	94,74	.....			Bagian Hukum, Humas dan Umum
	f.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	96,60	-	-	-	96,80	-	-			Bagian Hukum, Humas dan Umum

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2025				REALISASI 2025				KETERANGAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	g.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,50	-	-	-	83,65	-	-			Bagian Perencanaan & Keuangan
	h.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	23,00	-	-	-	23,00	-	-			
	i.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	91,03	91,03	91,03	91,03	95,02	.....			
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	j.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	93,43	50,00	50,00	50,00	93,43	45,41	41,82			Bagian Perencanaan & Keuangan
	k.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	22,25	1,00	2,00	5,42	90,00	1,44	9,79			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	82,60	-	-	-	81,00	-	-			Bagian SDMO
	m.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,91	3,89	3,89	3,89	3,91	3,84	Proses survei			Bagian SDMO

1) IKK1, berdasarkan pembahasan dengan Bagian Hukum, telah ditetapkan 8 regulasi kebijakan dari target Renstra sebanyak 33 regulasi (24,24%) melalui KM 148 Tahun 2026, sehingga capaian mencapai 116%. Oleh karena itu, diusulkan dilakukan revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;
2) IKK2, untuk pembangunan Zona Integritas, direncanakan BTP LRT Sumsel diusulkan sebagai WBK dan Balai Pengujian sebagai WBBM. Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal tanggal 2 Juli 2026, dari sembilan unit yang memenuhi syarat administrasi, belum terdapat unit yang memenuhi persyaratan pengusulan kepada Kementerian PANRB. Meskipun pengusulan hanya

dilakukan satu kali setiap tahun, koordinasi dan pembinaan tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan pembinaan Zona Integritas melalui sosialisasi, monitoring pengisian LKE beserta data dukung, serta koordinasi dengan Kementerian PANRB. Sebagai upaya peningkatan, rekomendasi Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti, kertas kerja dan data dukung disempurnakan, pengelolaan dokumentasi diperkuat, peran tim pembangunan Zona Integritas dioptimalkan, serta inovasi, khususnya untuk menuju WBBM, terus dikembangkan dan didokumentasikan;

3) IKK3, capaian pada Triwulan II terhitung sebagai berikut:



NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI KUALITAS ASN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
88,06	23,43	33,51	26,13	4,99
dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5
86,71	23,37	32,41	25,96	4,97
1,35	0,06	1,10	0,17	0,02

I. Nilai Kualifikasi

JENIS JABATAN	PENDIDIKAN	BOBOT NILAI 10	20	25	JUMLAH ORANG
Pimpinan Tinggi Madya	Jumlah Orang --->>>	0	0	1	1
	S-2			1	1
Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Orang --->>>	0	0	3	3
	S-3			1	1
	S-2			2	2
Administrator	Jumlah Orang --->>>	0	3	28	31
	S-3			1	1
	S-2			27	27
	S-1		3		3
Pengawas	Jumlah Orang --->>>	0	0	37	37
	S-3			1	1
	S-2			32	32
	S-1			3	3
	D-IV			1	1
Keahlian (S-2 dan S-3)	Jumlah Orang --->>>	48	112	0	160
	S-2		112		112

II. Nilai Kompetensi

Jumlah Seluruh ASN	2528
Rata-rata seluruh Skor Diklat pegawai	33,51
Rata-rata Skor Kompetensi	33,51

DIKLAT ASSESTMENT	
Belum Mengikuti	1366
Sudah Mengikuti	1162
Total Pegawai	2528

DIKLAT PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) untuk esselon	
Belum Mengikuti	5
Sudah Mengikuti	66
Tidak Wajib	2457
Grand Total	2528

DIKLAT UMUM / TEKNIS	
Belum Mengikuti	502
Jumlah Diklat 0-9 kali	502
Sudah Mengikuti	2026
Jumlah Diklat 0-9 kali	892
Jumlah Diklat >10 kali	1134
Total Pegawai	2528

Upaya kedepannya pada Triwulan III di dorong untuk peningkatan kompetensi.

4) IKK4, telah dilaksanakan *kick off* dan penyampaian laporan pendahuluan, termasuk pengembangan modul perizinan, prasarana, keselamatan, layanan BLU, *data warehouse*, dan informasi publik. Tindak lanjut meliputi pemenuhan data dukung serta kertas kerja sesuai hasil rapat awal di Kementerian Perhubungan. Selain itu, indikator dengan bobot besar (2, 8, 13, 16, 19, dan 20), khususnya pengelolaan kepuasan pengguna, memerlukan dukungan data dari Eselon I dengan target capaian kategori "cukup", dan penilaian direncanakan

pada bulan Agustus;

5) IKK5, terkait izin *crossing*, telah disampaikan surat kepada Direktorat Prasarana. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama KPBU pada Triwulan II dengan Direktorat Lalu Lintas belum terlaksana dan masih dalam proses, termasuk penyampaian usulan BUPP melalui surat kepada Menteri;
6) IKK6, ditargetkan pada Triwulan IV;
7) IKK7, pada Triwulan II sudah dilakukan penialain mandiri (nilai 83,85) serta evaluasi terhadap penilaian mandiri tingkat Es I (83,85). Selanjutnya pada bulan Juli akan dilakukan evaluasi implementasi SAKIP unit kerja sampel oleh Inspektorat Jenderal;
8) IKK8, pada Triwulan II telah dilakukan penialian mandiri penyelenggaraan manajemen risiko dengan KKE baru sesuai dengan SE ITJEN Nomor 1 Tahun 2026 (nilai 23) serta telah dilakukan validasi oleh UMR Es I dengan hasil skor 23;
9) IKK9, masih dalam konfrimasi kepada tim Verifikasi Anggaran;
10) IKK10, NKA dan PNBP masih difokuskan pada pemantauan penyerapan anggaran. Meskipun target DIPA sebesar Rp2,4 miliar, kemampuan realisasi diproyeksikan sekitar Rp1,4 miliar. Penyesuaian proyeksi bulanan dimungkinkan, namun target tahunan tetap mengacu pada DIPA. Perbedaan realisasi antara bahan paparan dan MyInterest umumnya disebabkan SP2D yang belum terbit atau adanya pengembalian anggaran, sehingga angka acuan tetap menggunakan data *MyInterest.* Selain itu, pagu efektif yang masih diblokir hanya berasal dari anggaran BLU, sedangkan pagu lainnya telah efektif. Perlu diuraikan secara lebih rinci penyebab capaian yang masih rendah, khususnya akibat deviasi pada Halaman III DIPA dan rendahnya penyerapan anggaran;
11) IKK11, potensi capaian masih mempertimbangkan optimalisasi aset serta sertifikasi SDM operator;
12) IKK12, terkait penilaian kearsipan, UK Eselon II Setditjen dan Direktorat masih dalam proses penilaian oleh Biro Umum, dengan verifikasi lapangan telah dilaksanakan pada bulan Mei. Sementara itu, penilaian UK/UP Balai sebagai UP II masih menunggu hasil audit Biro Umum yang dijadwalkan pada bulan Agustus dan mencakup seluruh unit;
13) IKK13, masih dilakukan survey terhadap kepuasan pelayanan perkantoran DJKA.

D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan upload dokumen terbaru secara berkala sesuai fitur pada aplikasi diantaranya yang masih banyak belum teruplaod yakni: RKT 2026, Pohon Kinerja dan Cascading, TL LHE, PM AKIP 2026, Monitoring Renaksi Bulanan;
   b. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian output, status pelaksanaan, progress pelaksanaan, permasalahan dan isian lainnya untuk periode Triwulan II Tahun 2026;
   c. Pengisian aplikasi e-Performance secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja;
   d. Pengisian fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya termasuk upload dokumentasi laporan kinerja triwulan/tahunan dan juga pengisian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP sesuai format terbaru dari PanRB;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala. Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan laporan triwulanan. Bagi BTP/Balai Pengelola yang belum menyampaikan atau masih terdapat kekurangan, agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan dimaksud;
3. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 sesuai outline, substansi, dan dokumen pendukung, dengan mengacu pada:
   a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   c. Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
   d. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
   e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
   f. Tindak lanjut catatan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja unit kerja

periode sebelumnya; dan

g. Tindak lanjut hasil rapat pembahasan, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pelaporan kinerja, diantaranya:
   1) Mengecek kembali penggunaan manual indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index (TQI*), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan guna rekomendasi periode berikutnya), data gangguan keamanan operasional kereta api pada perlintasan sebidang, data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya dnga mengisi link guna sinkronisasi pada tautan: https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA ;
   3) Menyusun analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi kegiatan pendukung dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain), *benchmarking,* dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;
   4) Menyusun rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya yang mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;
   5) Menyampaikan dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, progres program prioritas nasional/proyek strategis nasional, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;
   6) Melengkapi dan menyesuaikan format informasi perubahan budaya kinerja (semula-menjadi, keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja);
   7) Melengkapi uraian perhitungan matematis masing-masing indikator kinerja untuk mengukur nilai realisasi kinerja;
   8) Melengkapi dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna

menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja serta dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang; dan

9) Melengkapi data dukung capaian kinerja yang valid dengan persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab;

10) Nilai NKA cutoff pada tanggal 15 Juli 2026 dengan menggunakan nilai dari Aplikasi *MyIntress*.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta diupload pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian paling lambat tanggal 25 April 2026.

4. Melaksanakan kiat-kiat yang telah dijabarkan oleh narasumber dari Kemenkeu terhadap peningkatan NKA serta beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap evaluasi NKA Tahun 2025–2026, antara lain:
   a. Perlunya pengecekan kembali SBKK dan SBKU sebagai persiapan Tahun 2027; dan
   b. Pemantauan capaian IKPA serta keterkaitannya dengan pencapaian kinerja.
5. Memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 berupa data dukung, analisa lengkap dan rekomendasi periode berikutnya sesuai bidang tugas;
6. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta,

Pada tanggal 14 Juli 2026

Notulen



Tim Evaluasi dan Pelaporan

DOKUMENTASI








KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran
dja
NKA Perencanaan
=
Efektivitas (75%)
+
Efisiensi (25%)
K/L
Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25)
Agregasi Capaian IKP UE1 (20)
Agregasi Capaian RO satker (30)
Agregasi nilai efisiensi satker (25)
Unit Eselon I
Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) (30)
Agregasi Capaian RO satker (45)
Agregasi nilai efisiensi satker (25)
Satker
Nilai
Kategori
0 s.d 50
Sangat Kurang
> 50 s.d 60
kurang
> 60 s.d 80
Cukup
> 80 s.d 90
Baik
Capaian RO (RVRO/TVRO) (75)
Penggunaan SBK (10)
Efisiensi SBK (15)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 0264/K2/VII/2026

Yth.	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Hal	:	Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal	:	23 Juli 2026

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/5/K1/DJKA/2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan II Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dengan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Capaian rata-rata kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 97,25%.
2. Alokasi anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2026 yang dapat dikelola adalah sebesar Rp189.762.448.000 dengan realisasi keuangan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp23.905.530.492 dengan persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar 12,59%.

Atas perkenan dan arahan lanjut dari Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, diucapkan terima kasih.

Arif Anwar
NIP 197602222006041001

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).